



BUNGA RANPAI

## SEJARAH SUMATERA SELATAN

Sumatera Selatan Dalam Kajian Sosial dan Ekonomi

Zusneli Zubir

Seno

Rois Leonard Arios

BPSNT Padang  
Press



# BUNGA RAMPAI

## Sejarah Sumatera Selatan

**"SUMATERA SELATAN DALAM KAJIAN SOSIAL  
DAN EKONOMI"**

# BUNGA RAMPAI

## SEJARAH SUMATERA SELATAN

**“SUMATERA SELATAN DALAM KAJIAN SOSIAL  
DAN EKONOMI”**

ZUSNELI ZUBIR  
SENO  
ROIS LEONARD ARIOS

BPSNT PADANG PRESS

ZUSNELI ZUBIR, SENO, ROIS LEONARD ARIOS

---

**“SUMATERA SELATAN DALAM KAJIAN SOSIAL DAN  
EKONOMI”**

©2012 BPSNT PadangPress

Cetakan Pertama: Oktober 2012

---

Hak Penerbitan pada BPSNT PadangPress

*Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
Penerbit (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)*

---

**Editor**

**DR. MHD. NUR, M.S.**

**Desain cover**

**Zusneli Zubir**

**Lay-out**

**CV. FAURA ABADI**

**Percetakan**

**CV. FAURA ABADI**

**ISBN 978-602-8742-55-9**

---

**Penerbit:**

**BPSNT PadangPress**

**Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang**

**Sumatra Barat**

**Telp/faks: 0751-496181 [www.bpsnt-padang.info](http://www.bpsnt-padang.info)**



# SAMBUTAN

## SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

### KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Diiringi puji dan syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti pada Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Karya ini sebagai bentuk tanggungjawab ilmiah para peneliti Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang, yakni dapat mempublikasikan hasil kajiannya kepada masyarakat.

Karya yang berupa Bunga Rampai hasil penelitian para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang ini berupaya menjelaskan tentang berbagai hal tentang sejarah masyarakat di daerah Sumatera Selatan. Dalam perspektif sejarah daerah ini memiliki lintasan sejarah yang panjang, dan ini telah menghiasi perjalanan panjang dari kehidupan masyarakat yang hidup di bumi Sriwijaya ini. Dalam perspektif budaya, hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia, masyarakatnya juga heterogen tentu memiliki kompleksitas budaya yang unik dan menarik untuk dikaji dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam rangka itulah, para peneliti dari Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang mempublikasikan beberapa buah hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai. Bunga Rampai tersebut dalam bingkai : *Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi*. Bunga Rampai tersebut dalam bingkai : (1) Tionghoa Palembang oleh Zusneli Zubir, (2) Perkembangan Sosial-Ekonomi Transmigran Asal Jawa di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan (1970-2010) oleh Seno, dan (3) Djohan Hanafiah : Mencari Identitas Palembang oleh Rois Leonard Arios

Karya tersebut meretas kearah pengetahuan kita terhadap berbagai persoalan, mulai dari persoalan sejarah, perkembangan sosial-ekonomi transmigran asal Jawa di Ogan Komering Ilir, etnisitas khususnya orang Tiongha di Palembang, dan sampai kepada persoalan biografi Djohan Hanafiah seorang budayawan dan sejarawan dari Palembang.

Akhimya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Sumatera Selatan.

Jakarta, Juli 2012  
Setdirjen, NBSF  
Kemenbudpar



Drs. Mumus Muslim, MM.  
NIP. 19630502 198403 1 001

## PENGANTAR REDAKSI

Bunga rampai dengan tema *Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi* memuat beberapa karya yakni pertama, karya Zusneli Zubir dengan judul *Perjuangan Etnis Tionghoa di Palembang*. Zusneli Zubir menjelaskan bahwa salah satu tempat yang banyak didiami oleh orang Tionghoa di Indonesia adalah Kota Palembang. Berbeda dengan kebanyakan orang Tionghoa di daerah lain, di Palembang, pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan orang Tionghoa banyak yang ikut berjuang bersama orang Melayu sebagai pribumi Palembang. Apa, siapa, dan bagaimana kiprah orang Tionghoa di Palembang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan hal yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

Asal-usul Masyarakat Tionghoa di Palembang pada umumnya berasal dari beberapa provinsi di Cina, antara lain Provinsi Kwantung, Fukien, dan Kanton. Jalur yang dilalui oleh orang-orang Tionghoa untuk datang ke Palembang adalah melalui jalur perdagangan (transportasi laut) yang ada pada masa itu. Sebelum mencapai Palembang, mereka transit terlebih dahulu di Pulau Bangka, yang merupakan pintu gerbang menuju ke ibukota Palembang. Mereka bekerja sebagai pekerja tambang di Pulau Bangka. Sedangkan di Palembang mereka bekerja sebagai tukang di perindustrian.

Migrasi orang-orang Tionghoa ke Palembang berhubungan erat dengan jalur pelayaran tradisional yang sangat tergantung pada embusan angin muson. Pada masa kerajaan Sriwijaya, para pedagang Cina datang ke Palembang untuk membawa keramik atau kain sutra. Mereka kembali ke negaranya membawa berbagai macam produk yang dihasilkan daerah Sriwijaya seperti damar, kayu, cendana, minyak wangi, dan produk hutan lainnya.

Kedua, karya Seno dengan judul : *Perkembangan Sosial Ekonomi Transmigran asal Jawa di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (1970-2010)*. Karya tersebut menjelaskan bahwa satu daerah yang menjadi tujuan program transmigrasi di Sumatera adalah Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera sudah berlangsung sejak zaman Belanda, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda membuka beberapa jenis perkebunan di Sumatera Timur, Aceh Timur, Sumatera Selatan dan

Lampung. Kekurangan tenaga buruh perkebunan, oleh Pemerintah Belanda didatangkan dari Jawa yang terkenal sebagai pekerja kuli yang rajin dan ulet dengan upah yang murah. Program transmigrasi yang dilaksanakan pada masa Kolonial Belanda dapat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan Undang-Undang Agraria, yang kemudian melahirkan Politik Pintu Terbuka dan Politik Etis yang diprogramkan meliputi pendidikan, irigasi dan transmigrasi. Salah satu alasan yang dipakai adalah melalui pemerataan penduduk Jawa yang dinilai sangat padat untuk dipindahkan ke luar Jawa, terutama Sumatera. Pelaksanaan transmigrasi oleh Pemerintah Kolonial tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa ke Pulau Sumatera yang sangat jarang penduduknya, yang pada kenyataannya justru hanya sebagai kedok untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan yang murah di Sumatera.

*Ketiga, Rois Leonard Arios dengan judul : Djohan Hanafiah: Mencari Identitas Palembang.* Rois Leonard Arios menjelaskan bahwa semasa berumur masih balita, Djohan tumbuh dalam suasana peperangan. Pada saat itu pasukan Jepang memporak porandakan kilang minyak Belanda dan Amerika di Sungai Gerong dan Plaju, melalui serbuan udara pada tanggal 14 Februari 1942. Djohan baru berumur 3 ½ tahun pada saat itu. Suatu pertumbuhan kebatinan yang kurang menguntungkan bagi Djohan kecil. Masa pendudukan Jepang adalah masa yang paling menyedihkan bagi rakyat Indonesia. Selain kejiwaan yang terhinakan, juga yang paling parah adalah masalah makanan. Makanan rakyat yang berupa hasil perkebunan dan peternakan dijarah oleh pasukan Jepang. Untung saja pada masa itu keluarga Djohan dari pihak ibunya mempunyai lahan yang cukup untuk bercocok tanaman, seperti ubi, jagung dan sayur-sayuran. Disamping itu ada temak seperti ayam, bebek, kambing dan sapi. Lahan yang luasnya 2,5 ha, adalah hasil jerih payah R.M.Ali Hasan, yaitu Djohan yang dikumpulkannya semasa dia menjabat sebagai *ambtenaar* masa kolonial Belanda. Dia telah menduduki jabatannya mulai dari juru tulis, klerk hingga Asisten Demang yang ditempatkan hampir di semua pos di Keresidenan Palembang.

Lebih lanjut Rois Leonard Arios menjelaskan tentang persoalan aktifitas Djohan Hanafiah, baik sebagai aktifis, terutama aktifis politik, menjadi pengusaha, dan sebagai penggali sejarah Palembang, sebuah karya yang menarik untuk dibaca.

Akhimya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk bunga rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Sumatera Selatan.

*Penulis*



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM KEMENTRIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : Perjuangan Etnis Tionghoa di Palembang Oleh; Zusnelli Zubir.....	1
BAB II : Perkembangan Sosial Ekonomi Transmigran Asal Jawa di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (1970-2010) Oleh : Seno.....	102
BAB III : Djohan Hanafiah: Mencari Identitas Palembang Oleh : Rois Leonard Arios.....	193

# **BAB I**

## **PERJUANGAN ETNIS TIONGHOA DI PALEMBANG<sup>1</sup>**

Zusneli Zubir<sup>2</sup>

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Sebutan Tionghoa atau etnis Cina-Indonesia, tidaklah dianggap sebagai sebutan yang aneh di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa orang Tionghoa atau etnis Cina-Indonesia sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan merupakan sebagai salah satu etnis yang eksistensinya diakui di Indonesia. Etnis Tionghoa mempunyai daerah komunitas di beberapa daerah Indonesia. Daerah komunitas asal mereka dari daratan Cina, sudah berabad-abad ditinggalkan dan generasi mereka secara turun-temurun menetap di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak menganggap orang Tionghoa sebagai orang asing. Pertanyaan yang sering muncul ke permukaan adalah bagaimanakah orang Tionghoa sendiri memandang posisinya di Indonesia, apakah mereka merasa sebagai orang Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa atau sebagai orang Cina yang kebetulan tinggal di Indonesia.

Salah satu tempat yang banyak didiami oleh orang Tionghoa di Indonesia adalah Kota Palembang. Berbeda dengan kebanyakan orang Tionghoa di daerah lain, di Palembang, pada masa revolusi fisik orang Tionghoa banyak yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama orang Melayu sebagai pribumi Palembang. Apa, siapa, dan bagaimana kiprah orang Tionghoa di Palembang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan hal yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

Pengkajian seputar sejarah perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 – 1949 di Palembang, tidak terlepas dari dua aspek pokok bahasan. Pertama; perjuangan fisik yang identik dengan perjuangan bersenjata serta ruang gerak berada di daerah, sedangkan aspek kedua adalah perjuangan nonfisik, identik dengan perjuangan diplomasi, dengan ruang gerak berada di pusat ibukota. Kedua bentuk perjuangan ini lebih dikenal dengan periode perjuangan revolusi.

Titik fokus penelitian atau kajian yang dilakukan banyak kalangan maupun sejarawan selama ini, lebih banyak perhatiannya pada

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2007.

<sup>2</sup> Peneliti Madya pada BPSNT Padang

sejarah perjuangan revolusi dalam artian di atas. Pemilihan tema pokok ini, dengan alasan pragmatis, sekedar untuk kenangan yang dipersembahkan untuk anak cucu atau legitimasi terhadap kedudukan seseorang atau kelompok tertentu yang berkuasa. Dalam bukunya Mestika Zed mengatakan bahwa hal itu menonjol dalam penulisan biografi atau autobiografi dan karya-karya sejarah rezim Orde Baru.<sup>3</sup> Sementara itu peran maupun andil kalangan masyarakat lainnya seperti masyarakat Tionghoa jarang sekali dikaji atau diteliti secara spesifik. Hal seperti ini jelas merupakan sebuah pengingkaran terhadap sebuah realita dalam sejarah. Saat ini perkembangan historiografi Indonesia mulai membuka diri dengan kenyataan-kenyataan baru dalam penulisan sejarah, sehingga penulisan yang berhubungan dengan peran masyarakat dari kalangan tertentu terbuka untuk dikaji oleh siapapun.

Khusus mengenai golongan masyarakat minoritas Tionghoa, pada masa lalu maupun pada masa sekarang selalu menjadi sasaran rasa sentimen dari golongan masyarakat lainnya. Kondisi ini menjadikan golongan minoritas Tionghoa tidak ditampilkan secara jelas pada setiap penulisan sejarah Indonesia termasuk dalam buku babon Sejarah Nasional. Semua itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari historiografi Indonesia yang hanya memperhatikan kajian terhadap masyarakat pribumi, sementara masyarakat minoritas Tionghoa atau peran masyarakat lainnya agak terabaikan, walaupun mereka juga memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Periode perjuangan Tionghoa pada masa Perang Kemerdekaan cukup penting untuk dibicarakan. Mengingat peran penting yang dilakukan masyarakat minoritas Tionghoa Palembang pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan mempunyai andil yang cukup besar dalam sejarah sehingga perlu dikenang jasa-jasanya.

Diskusi mengenai andil etnis Tionghoa dalam perjuangan di Indonesia, sebenarnya adalah sebuah bentuk tuntutan akan "pengakuannya" sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, karena selama ini sering disangkal peranannya atau dianggap tidak berperan sama sekali atau kecil, karena tidak ada pahlawan nasional yang berasal dari golongan etnis ini. Karena itu, absennya nama Pahlawan Nasional dari etnis Tionghoa ini sering dijadikan mesiu untuk memojokkannya.

Penulisan sebuah sejarah bangsa, pada umumnya penulisan sejarah dibuat untuk kepentingan golongan penguasa yang berkuasa

---

<sup>3</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900 – 1950* (Jakarta : LP3ES), hml. 8.

pada waktu itu untuk memberikan hak legitimasinya, jadi merupakan sebuah keputusan politik tertentu. Demikian juga dengan pemilihan sebuah nama Pahlawan Nasional, adalah juga sebuah keputusan politik. Jadi tidak hanya cukup mengajukan dan mempromosikan nama-namanya berserta jasa-jasanya untuk dipilih, biarpun nama-nama yang diajukan itu sudah memenuhi kriteria sebagai pahlawan Nasional, tetapi keputusan politiklah yang menentukan.

Dalam penulisan sejarah Nasional Indonesia, terutama yang dibuat pada masa Orde Baru yang diterbitkan oleh Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro sebagai penulis dan editornya. Buku ini terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1975 yang terdiri atas enam jilid. Editornya mengaku sebagai "Buku Standar" dan menyampaikan suatu "*view from within*". Pada hakikatnya buku ini merupakan sebuah buku sejarah yang mengagungkan keberhasilan Suharto dan Orde Baru dan hampir sama sekali tidak menyebutkan peranan golongan Tionghoa dalam sejarah pergerakan Nasional.

Sayangnya masih ada beberapa penulis sejarah hingga kini yang secara sadar atau tidak sadar tetap menyangkal peranan dari golongan ini. Peranan dari kaum intelektual atau penulis sejarah dari etnis Tionghoa hanya terbatas pada pemaparan fakta sejarah peranan dari golongannya, tetapi keputusan penentuan akhir berada ditangan elit politik yang mempunyai beberapa kepentingan dan pertimbangan politik tertentu. Di bidang ekonomi, memang etnis Tionghoa relatif berperan dan berpengaruh tetapi tidak di bidang politik.

Banyak fakta-fakta sejarah yang sampai kini belum diketahui secara lengkap oleh publik dalam penulisan sejarah Indonesia sebelumnya mengenai peranan etnis Tionghoa dalam mendukung perjuangan Nasional bersenjata, seperti nama-nama yang berperan dibawah ini.

Tan Kah Kee adalah seorang jutawan dari etnis Tionghoa Malaya yang selama pendudukan Jepang lari dari Malaya lalu bersembunyi di Malang Jawa Timur), untuk menghindari dari kejaran Kempetai, karena dukungannya terhadap perjuangan melawan fasisme Jepang. Sesudah perang dunia kedua berakhir, Tan, balik ke Singapura dan bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, seperti indakannya untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang singgah di Singapura dengan menolak untuk membongkar atau memuat barang ke kapal-kapal Belanda.

Tan malah mengirim telegram ke Hongkong dan Swatow untuk ikut serta memboikot kapal Belanda. Untuk mendukung pemboikotan itu, Tan mengumpulkan sejumlah dana dari pedagang Tionghoa di



Singapura dan 30 persen sumber dana tersebut datang dan disumbangkan oleh para pedagang-pedagang Tionghoa Palembang.

Tony Wen adalah seorang etnis Tionghoa kelahiran Bangka yang sejak awal bersimpati dan mendukung perjuangan Nasional Indonesia. Tony adalah pengurus dari organisasi "Perserikatan Rakyat dan Boeruh Tionghoa" di Surakarta yang menyatakan kesetiaannya kepada kepentingan Republik pada tahun 1946. Tony dianggap juga mewakili masyarakat Tionghoa di daerah Republik. Ia pindah ke Singapura dan tinggal bersama saudaranya Boen Kin Kioen.

Tony berperan sebagai "agen utama" di Singapura dan terpenting dari pihak Republik, membantu perjuangan Indonesia dengan mengumpulkan dana melalui penjualan opium (candu) yang diselundupkan ke Singapura, dan dari hasil penjualan tersebut, dibelikan senjata yang diselundupkan ke daerah Republik di Indonesia. Selama di Singapura, Tony yang dipercayai oleh pihak Republik, tetap mengadakan kontak dengan pihak Nasionalis di Indonesia.

Pada tahun 1948, Tony ditangkap oleh otoritas Inggris atas permintaan Belanda, tetapi karena tak cukup bukti, Tony tak lama kemudian dibebaskan kembali. Karena situasi memanas, Tony melarikan diri ke Shanghai, dimana dahulu dia pernah menetap dan belajar di kota tersebut.

Adam Malik pernah memberikan penghargaan kepada Tony Wen ini, karena jasa-jasanya, dan Tony adalah satu-satunya dari lima orang yang ditunjuk oleh pihak Republik untuk menjual opium di Singapura dan menyerahkan uang hasil penjualan opium tersebut kepada pihak Republik, empat orang lainnya (dari berbagai etnis) membawa kabur uang hasil penjualan tersebut.

Pada tahun 1950-an Tony yang gemar dengan olahraga sepakbola, bergabung dengan PNI dan pernah menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia dan juga pernah menjadi anggota DPR dari fraksi PNI pada tahun 1954-1956. Meninggal pada tahun 1963.

"John Lie" ((Jahya Daniel Dharma) lahir di Manado, dan pernah berpengalaman bekerja selama 15 tahun di atas kapal Belanda melayari jalur Shanghai- Durban (Afrika Selatan). Namanya pernah menjadi sebuah legenda dalam menyelundupkan senjata ke Indonesia dari luar negeri, karena pernah dijuluki "*Gun and Bibles Smuggler*" oleh pers Barat. Jaringan John Lie ini tidak terbatas di Singapura saja, melainkan sampai ke Manila, Penang, Bangkok, Rangoon, dan New Delhi.

Dia pernah membeli lima kapal cepat dari orang Inggris untuk menyelundup senjata, tetapi hanya satu yang tertinggal dan yang satu ini

(namanya The Outlaw), tak pernah tertangkap. Empat kapal lainnya hancur dibom, ditorpedo atau tertangkap. John adalah seorang yang sangat religius, penyelundupan senjata untuk membantu perjuangan Indonesia dianggap sebagai tugas suci atau istilah sekarangnya seperti berjihad . (*"Lie's career as a smuggler was like a religious conversion. He had been praying that his country would be transformed from wild jungle into Garden of Eden. However there would be no Dutchmen there"*).

Sesudah kemerdekaan John Lie bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia dan ikut menumpas pemberontakan Permesta, John yang walaupun berasal dari Manado, ikut menumpas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara ini, dan ketika itu salah satu anak buahnya adalah Sudomo, diperingatkan untuk melarang membom sasaran-sasaran sipil dan Gereja, kecuali sasaran militer Permesta.

Tan Chi Ku adalah seorang Tionghoa yang berasal dari Selat Panjang, dia adalah orang yang menyelundupkan senjata dan perlengkapan militer untuk tentara Republik di Riau seperti Pekanbaru, Jambi, dan Bukittinggi. Seorang pengusaha Tionghoa dari Singapura, melalui Tan ini telah menyumbangkan 1000 seragam tentara Inggris ke pejuang Indonesia, di mana pada tahun 1946 sejumlah 1000 pasukan republik melakukan parade dengan dengan seragam baru ini. Tan menyelundupkan barang ini dengan sebuah kapal "Landing Craft". Selain seragam dibawa juga ban mobil, helm, topeng gas bekas tentara Jepang.

Gui Oh Nua, orang Tionghoa yang berasal dari Tanjung Balai, Karimun. Dia adalah seorang "Philanthropist" yang melengkapi kota Tanjung Balai dengan penerangan listrik. Gui berperan menyelundupkan barang-barang selundupan dari Indonesia ke Singapura. Barang-barang yang akan diselundupkan ke Singapura, seperti karet, tembakau, opium, kopi, gula, dan lain-lain dibawa dahulu ke perairan sekitar Karimun dengan kapal-kapal kecil secara tersembunyi atau dengan pesawat "Catalina", lalu dari situ dipindahkan ke tongkang-tongkang kecil dan diselundupkan ke Singapura, lalu dibarter dengan senjata.

Nama Tong Djoe tidak pernah diketahui sebagai penyelundup senjata dan namanya tidak disebutkan sama sekali dalam buku tersebut. Tong Djoe yang lahir pada tahun 1927, umurnya masih 19 tahun pada tahun 1946 itu, dan kecil kemungkinannya berperan sebagai penyelundup senjata seperti nama-nama tersebut diatas yang rata-rata berusia diatas 30 tahun dan berpengalaman. Tony Wen sendiri lahir pada tahun 1911, John Lie lahir pada tahun 1910 atau 1911.

Tong Djoe memang pernah ikut dalam perang kemerdekaan dengan Ibnu Sutowo di Sumatra Selatan dan pernah mendapatkan penghargaan oleh pemerintah serta berjasa merintis pembukaan hubungan dagang dan diplomatik dengan Tiongkok. Pada pogrom Mei 1998, rumah Tong Djoe, seperti halnya dengan rumah Lim Sioe Liong di jalan Gunung Sahari ikut dihancurkan berikut koleksi barang antiknya.

Hal ini dapat terjadi karena dalam setiap kerusuhan "anti Cina", perusuh tidak pernah bertanya dahulu, apakah anda telah berjasa kepada republik ini atau tidak, termasuk terhadap orang Tionghoa yang sering membanggakan dirinya lebih berjiwa Nasionalis atau Indonesia daripada saudara Tionghoa lainnya, juga tak luput dari sasaran pada setiap kerusuhan "anti Cina" ini.

Orde Baru sudah bubar, tetapi bayangannya masih tetap eksis. Baru-baru ini beberapa penerbit buku sekolah dipanggil kejaksaan, karena tidak mencantumkan nama PKI dibelakang huruf G30S, didalam buku pelajaran sejarahnya. Hal yang sama ketika Orba masih berkuasa. Golkar yang sekarangpun adalah sama dengan Golkar yang dahulu.

Walaupun situasi dan status golongan etnis Tionghoa jauh lebih membaik daripada waktu jaman Orba dahulu, terutama ketika zaman Gus Dur, beberapa elit politik tertentu masih tetap memandang etnis Tionghoa seperti yang Ciputra pernah mengatakan bahwa status orang Tionghoa di Indonesia masih seperti status seorang "Gundik" atau "Pacar Gelap" yaitu "dibutuhkan tetapi tidak diakui". Jadi masih membutuhkan waktu yang relatif lama, kalau ingin ada salah satu nama Pahlawan Nasional, berasal dari golongan etnis Tionghoa.

## **2. Pembatasan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka kajian ini akan melihat Bagaimana keterlibatan masyarakat minoritas Tionghoa Palembang ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia? Oleh sebab itu, kombinasi peran masyarakat minoritas dan mayoritas menjadi menarik untuk diteliti secara lebih komprehensif. Agar persolan yang hendak diungkapkan dapat diteliti secara jelimet, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya antara lain adalah Apa peran masyarakat etnis Minoritas Tionghoa pada saat mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Palembang, Bagaimana bentuk perjuangannya? Siapa saja yang ikut berjuang dan menjadi korban pada masa tersebut? Apa pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan di Palembang?

Adapun batasan spasial penelitian ini adalah etnis minoritas Tionghoa yang ikut berjuang di Kota Palembang. Sedangkan batasan temporalnya antara tahun 1945-1949 atau selama revolusi fisik Indonesia. Pada masa ini, dinamika revolusi Kemerdekaan Indonesia menunjukkan ciri khas, karena mempunyai nilai pedagogik dan patriotik, namun disisi lain terdapat pula eksese-eksese sebagai akibat suasana revolusi.

### **3. Tujuan dan Manfaat**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkapkan partisipasi etnis Tionghoa di Palembang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang perjuangan yang dilakukan etnis Tionghoa Palembang pada 1945-1949. Secara umum dilakukan pendokumentasian tentang peristiwa yang dialami oleh etnis minoritas Tionghoa Palembang ketika masa revolusi fisik terutama mempertahankan Kemerdekaan, yang selama ini tidak mendapat perhatian dari kalangan sejarawan. Melakukan rekonstruksi sebuah proses sejarah atas realitas sosial yang dialami oleh masyarakat minoritas pada masa revolusi dan membangkitkan inspirasi dan aspirasi generasi muda dalam membentuk peran model warga Negara Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah historiografi lokal, khususnya yang berkaitan dengan penulisan sejarah perjuangan sekitar zaman revolusi. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal dari studi yang mendalam untuk masa yang akan datang.

### **4. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini sudah banyak buku atau tulisan yang pernah menulis tentang etnis Cina di Indonesia. Di antaranya adalah buku yang disunting dari beberapa tulisan oleh Lily Wibisono (ed.), yang berjudul *Etnik Tionghoa di Indonesia*.<sup>4</sup> Buku ini berisi mengenai asal-usul orang Tionghoa di Indonesia, kehidupan sehari-hari mereka, ilmu pengobatan yang dikembangkan oleh orang Tionghoa, dan juga tentang *Feng Shui* yang merupakan ilmu mengenai tataletak yang berasal dari Negara Cina.

---

<sup>4</sup> Lily Wibisono (ed.). *Etnik Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: PT Intisari Mediatama, 2006).



Buku lainnya adalah buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata yang berjudul *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*.<sup>5</sup> Buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Inggris ini berisi mengenai kiprah etnis Tionghoa di empat negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Buku ini juga membahas tentang kebijakan keempat pemerintah tersebut dalam menangani etnis Tionghoa yang ada di negaranya dan pandangan penduduk pribumi setempat terhadap etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di negara mereka.

Buku lainnya yang juga tak kalah pentingnya adalah buku yang disunting oleh Mkoeh Sa'dun M. dari beberapa tulisan yang berjudul *Pri – Nonpri Mencari Format baru Pembauran*.<sup>6</sup> Buku ini memuat beberapa tulisan yang membahas mengenai peran etnis Tionghoa yang dalam buku ini disebut nonpri dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Buku mengenai sejarah kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara, termasuk yang datang ke Palembang adalah buku yang sunting oleh M. Hembing Wijayakusuma berjudul *Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*.<sup>7</sup> Buku ini mengisahkan perjalanan Cheng Ho dalam perjalanannya ke berbagai negara di Asia. Dalam perjalanan tersebut Cheng Ho juga pernah singgah di Palembang dan di kota ini dia berhasil menumpas bajak laut Chen Zhuyi yang sangat meresahkan warga Kota Palembang dan sekitarnya.

Buku yang membahas mengenai etnis Tionghoa yang ada di Palembang di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Eny Christyawaty dan Almaizon berjudul *Asimilasi Etnis Tionghoa di Kota Palembang: Studi tentang Amalgamasi Masyarakat Etnis Tionghoa dengan Golongan Pribumi*.<sup>8</sup> Buku ini membahas tentang salah satu bentuk asimilasi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi Palembang. Bentuk asimilasi yang diungkapkan dalam buku ini adalah melalui perkawinan campur, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit dilakukan oleh kedua etnis yang berbeda tersebut karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Sebagian besar perkawinan

---

<sup>5</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999).

<sup>6</sup> Moch Sa'dun M. (ed.), *Pri – Nonpri Mencari Format Baru Pembauran* ((Jakarta: PTPustaka Cidesindo, 1999).

<sup>7</sup> M. Hembing Wijayakusuma, *Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007).

<sup>8</sup> Eny Christyawaty & Almaizon, *Asimilasi Etnis Tionghoa di Kota Palembang: Studi tentang Amalgamasi Masyarakat Etnis Tionghoa dengan Golongan Pribumi* (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004).

campur yang terjadi adalah dengan mengalahnya pihak dari etnis Tionghoa, baik laki-laki maupun perempuan, masuk Islam mengikuti agama pasangan mereka. Jarang sekali ditemui pihak pribumi yang kemudian mengikuti agama yang dianut oleh pasangan mereka dari etnis Tionghoa tersebut.

Buku lainnya yang juga membahas mengenai etnis Tionghoa Palembang adalah buku karya Jumhari, Refisrul, dan Iriani yang berjudul *Jaringan Perdagangan Perantara Etnis Cina di Palembang Pada Permulaan Abad ke-20 sampai Akhir Kolonial Belanda*<sup>9</sup> Buku ini membahas mengenai kiprah etnis Tionghoa yang berperan sebagai pedagang perantara pada masa kolonial Belanda. Profesi yang dijalani oleh etnis Tionghoa ini telah menyebabkan mereka mendominasi perekonomian di Palembang pada waktu, sehingga sebagian besar di antara mereka menjadi warga masyarakat kelas menengah.

Semua buku-buku yang disebutkan di atas belum satupun yang membahas mengenai perjuangan etnis Tionghoa Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan seberapa besar sumbangsih warga keturunan Tionghoa di Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Fisik tersebut. Sumbangan dan keikutsertaan mereka sangat besar artinya bagi keutuhan negara Indonesia, meskipun peran mereka selama ini belum tercatat dalam buku-buku sejarah. Sampai saat ini belum ada warga keturunan Tionghoa yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional di Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia, khususnya dari golongan penduduk pribumi yang menganggap bahwa orang Tionghoa cenderung pro kepada golongan yang berkuasa saja supaya posisi mereka aman. Dengan hadirnya tulisan ini diharapkan agar anggapan-anggapan minor tersebut secara berangsur-angsur dapat lenyap.

## 5. Kerangka Analisis

Untuk lebih memahami kiprah etnis Tionghoa, yang merupakan salah satu etnis minoritas, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang, perlu dipahami pengertian etnis. Istilah etnis digunakan untuk suku-suku bangsa yang memiliki kekhasan kebudayaan. Mereka mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan atau karena

---

<sup>9</sup> Jumhari, et al., *Jaringan Perdagangan Perantara Etnis Cina di Palembang Pada Permulaan Abad ke-20 sampai Akhir Kolonial Belanda* (Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007).

secara kultur mereka benar-benar khas, misalnya etnis Cina, etnis Arab, dan etnis Tamil-India.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etnis juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku bangsa yang dianggap memiliki kebudayaan, misalnya suku-suku bangsa di Indonesia, terutama etnis Bugis, etnis Minangkabau, etnis Dairi-Pakpak, etnis Dani, etnis Sasak, dan ratusan etnis lainnya. Malahan akhir-akhir ini istilah suku bangsa atau etnis merujuk pada pengertian kelompok orang-orang yang hidup dalam budaya tertentu.

Pengertian Etnis dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnis memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Istilah etnis menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.

Kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Definisi etnis di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Agama kadangkala menjadi ciri identitas yang penting bagi suatu etnis, tapi kadangkala tidak berarti apa-apa, hanya sebagai kepercayaan yang dianut anggota etnis, seperti, etnis Minangkabau yang menempati wilayah geografis pulau Sumatera bagian barat yang menjadi wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini dan beberapa daerah pengaruh di provinsi sekitar.

Masyarakat Minangkabau mengukuhkan agama sebagai identitas kultur mereka sejak animisme ditinggalkan. Islam menjadi tolak ukur ke-minang-an seseorang secara legalitas adat. Orang Minangkabau yang tidak lagi beragama Islam dipandang sebagai orang yang tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap adat Minangkabau,

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), hlm. 23.

sebagaimana ditafsirkan dari “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, kendatipun secara genealogis ia tetap beretnis Minangkabau, yang tentu saja tidak bisa menjadi etnis lain.<sup>11</sup>

Hal ini berbeda dengan masyarakat Jawa. Meskipun demikian orang itu tetap tidak dianggap sebagai orang Jawa. Agama yang dianut oleh orang Jawa tidak menjadi penanda identitas etnis Jawa (kejawaan) seseorang. Selain Islam, yang merupakan agama mayoritas, orang Jawa banyak juga yang menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Kejawen. Meskipun memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mereka semua tetap diakui ke-Jawa-annya.<sup>12</sup> Demikian juga pada etnis Tionghoa. Orang Tionghoa ada yang beragama Buddha, Taoisme, Kong Hu Chu, Kristen Protestan, Katholik, dan Islam. Meskipun demikian semua orang yang memiliki darah Tionghoa tersebut tetap merasa dirinya sebagai orang Tionghoa dan masyarakat Tionghoa sendiri pun tetap mengakuinya sebagai orang Tionghoa, walaupun memiliki agama yang berbeda-beda.<sup>13</sup>

Lalu etnis Sunda menempati wilayah Pulau Jawa bagian barat, dan etnis Madura menempati Pulau Madura sebagai wilayah geografis asal. Sebuah kelompok etnis pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok etnis tertentu ataukah tidak tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnis tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnis itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut. Seorang Batak akan tetap menjadi anggota etnis Batak meskipun dalam kesehariannya sangat “Jawa”. Orang Jawa memiliki perbendaharaan kata untuk hal ini, yakni “*durung Jawa*” (belum menjadi orang Jawa yang semestinya) untuk orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Jawa dalam keseharian mereka dan menganggap orang dari etnis lain yang menerapkan nilai-nilai Jawa sebagai “*njawani*” (berlaku seperti orang Jawa).

---

<sup>11</sup> Ch. N. Latief Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 66; Umar Junus, “Kebudayaan Minangkabau” dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 261.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 310-313; Kodiran, “Kebudayaan Jawa”, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 346.

<sup>13</sup> Puspa Vasanty, “Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia” dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 367.



Pada saat anggota kelompok etnis melakukan migrasi, sering terjadi keadaan di mana mereka tercerabut dari akar budaya etnisnya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnik tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etnisnya. Akan tetapi, mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnis yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etnisnya. Jadi, keanggotaan seseorang pada suatu etnis terjadi begitu saja apa adanya, dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa seorang etnis Sunda meminta dirubah menjadi etnis Bugis, atau sebaliknya. Meskipun orang bisa saja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai, entah dari etnisnya sendiri, dari etnis lain, ataupun dari gabungan keduanya. Antara satu etnis dengan etnis lainnya kadang-kadang juga terdapat kemiripan bahasa. Kesamaan bahasa itu dimungkinkan karena etnis-etnis tersebut memiliki kesamaan sejarah tradisi kuno yang satu, yang mewariskan tradisi yang mirip dan juga bahasa yang mirip pula. Seperti misalnya bahasa Jawa memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Bali, lalu bahasa Minangkabau mirip dengan bahasa Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Banjar, dan lainnya.

Sebagai salah satu etnis minoritas, orang Tionghoa yang ada di Palembang bukan merupakan minoritas yang homogen. Dari sudut kebudayaan orang Tionghoa terbagi atas Cina Peranakan dan Cina Totok. Cina Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah “berbaur”. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Cina Totok adalah “pendatang baru”, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah Cina Totok sudah menurun dan keturunan Cina Totok pun telah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya hampir semuanya sudah menjadi peranakan.<sup>14</sup>

Sebagian besar orang Tionghoa menganut Budhisme, Tridharma, dan agama Konghucu. Namun banyak pula yang beragama Kristen Protestan, Katholik, dan Islam. Dalam hal orientasi politik, ada yang pro-Beijing atau pro-Taipei, tetapi yang terbesar adalah kelompok pro-Jakarta. Dalam hal kewarganegaraan, ada yang berwarganegara RRC atau Taiwan, tetapi yang terbanyak adalah warganegara Indonesia (WNI).

Keberhasilan dalam bidang ekonomi, banyak di antara mereka yang kaya, tetapi ada pula yang miskin. Namun sebagai minoritas di Kota Palembang, orang Tionghoa tergolong sebagai kelas menengah.

---

<sup>14</sup> Leo Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 252.

Dalam bidang usaha, yang paling sukses adalah mereka yang masih belum “berbaur”, karena mereka masih memiliki etos imigran dan wiraswasta, berbahasa Tionghoa dan mampu menggunakan jaringan perdagangan etnis yang umumnya di tangan orang Tionghoa.

Masalah Tionghoa di Indonesia masih juga tidak kunjung usai, meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad. Ada yang berpendapat bahwa ini disebabkan karena orang Tionghoa masih mempertahankan kebudayaan asing dan tidak memiliki identitas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Tionghoa hanya “setengah berbaur”, belum seratus persen, yaitu mereka masih belum “menjadi pribumi”. Dalam pandangan banyak pribumi, orang Tionghoa harus menjadi “pribumi” dengan memakai bahasa yang dipergunakan di tempat mereka tinggal, menjunjung dan melaksanakan adat dan kebudayaan daerah tempat mereka tinggal, dan kalau perlu memiliki agama yang sama dengan mayoritas masyarakat di mana mereka tinggal. Jika hal ini sudah dilakukan oleh orang Tionghoa, barulah mereka bisa diterima dan diperlakukan sama seperti pribumi di tempat mereka tinggal.

Perjuangan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ternyata belum mendapat respon yang baik dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Sampai saat ini belum satupun pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa. Pengertian dan definisi pahlawan nasional sampai kini sebenarnya masih kontroversial, karena beberapa nama pahlawan Nasional Indonesia yang melawan kolonialisme Belanda pada waktu itu, dilakukan sebelum konsep Nasionalisme atau ide negara bangsa, yaitu negara Indonesia lahir pada awal abad ke-20.

Semestinya pejuang kemerdekaan yang dikategorikan sebagai pahlawan Nasional adalah mereka yang berjuang melawan penjajahan kolonialisme Belanda untuk cita-cita dan ide sebuah negara bangsa atau nasyon Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik. Konsep atau ide negara kebangsaan Indonesia adalah sebuah konsep politik.

Beberapa nama Pahlawan Nasional memang telah melawan kolonialisme Belanda dan merupakan bagian daripada perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah, tetapi mereka yang berjuang melawan Belanda sebelum konsep negara kebangsaan Indonesia lahir, adalah lebih tepat kalau disebut sebagai pahlawan daerah atau lokal, karena mereka belum berjuang untuk sebuah ide negara kebangsaan Indonesia dan lebih bersifat kedaerahan atau masih terbatas wilayah yang diperjuangkannya.

Definisi yang lebih tepat untuk disebut sebagai pahlawan nasional adalah mereka yang berjuang melawan kolonialisme Belanda, demi terbentuknya sebuah ide negara bangsa yaitu negara Indonesia, sebagai sebuah kesatuan politik. Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia, seperti yang disebutkan dalam sumpah pemuda 1928, dan bukan berlandaskan satu suku atau satu kepercayaan.

## 6. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah deskriptif dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan. Metode sejarah menurut beberapa ahli, seperti Gilbert J. Garraghan (1984), adalah seperangkat asas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.<sup>15</sup> Louis Gottschalk, dalam bukunya *Mengerti Sejarah*, menjelaskan bahwa “metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau yang dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.”<sup>16</sup>

Sumber-sumber yang diteliti dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat dikumpulkan dari lisan dengan melakukan wawancara kepada pelaku sejarah atau saksi yang hidup pada masa itu, disamping arsip pribadi, lembaga swasta maupun pemerintah. Sedangkan sumber sekunder dikumpulkan dari buku-buku yang menjelaskan tentang topik yang dibahas.

Metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalan dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis. Melalui kerja sejarah lisan ini, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa

---

<sup>15</sup> Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press), 1984, hlm. 54-57. Lihat juga Teuku Ibrahim Alfian, “Tentang Metodologi Sejarah” dalam Teuku Ibrahim Alfian *et al.*, (eds.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 409-419..

<sup>16</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

lalu.<sup>17</sup> Hal ini jelas memberikan warna pada persepsi peneliti tentang masa lampau.

Pendekatan sejarah lisan dapat membantu dan menjelaskan kiprah etnis Tionghoa Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui empat tahap, yaitu (1) melakukan pendataan dan survai para informan (pengkisah); (2) membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); (3) menghubungi informan; dan (4) melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Data berupa tulisan dan hasil wawancara yang telah melalui proses seleksi data dan kritik dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu interpretasi.<sup>18</sup> Interpretasi merupakan analisa terhadap data sebelum dilakukan penulisan. Tahap interpretasi diakui sebagai tahapan yang tersulit selain tahapan berikutnya yakni penulisan. Dalam menginterpretasikan data penulis dipaksa bersikap kritis dan memastikan keotentikan data yang didapatkan.

Tahapan berikutnya adalah penulisan (historiografi), penulisan merupakan tahapan yang terakhir. Pada tahap ini akan dicoba menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai perjuangan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945-1949. Gambaran yang diperoleh diharapkan dapat menerangkan bagaimana perjuangan bangsa masyarakat Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Fisik yang juga disertai oleh etnis Tionghoa.

## **B. ETNIS TIONGHOA PALEMBANG PADA MASA TERAKHIR PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA**

### **1. Gambaran Umum Kota Palembang**

Kota Palembang terletak di Pulau Sumatera dan terbelah oleh Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di Sumatera. Sungai ini membentuk jantung kota itu dan karenanya banyak transportasi dilakukan di air, juga memanfaatkan anak-anak sungai yang meskipun berlebihan memasuki sungai itu terutama pada sisi Ulu, namun sama sekali tidak ada di sisi Ilir.

Sepanjang kedua tepian Musi biasa dipakai untuk menambatkan rumah tinggal yang disebut rakit, beberapa di antaranya dipakai sebagai

---

<sup>17</sup> Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris" dalam *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alifian* (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002), hlm. 152.

<sup>18</sup> *Ibid.*

ruko. Rakit ini terutama ditemukan di sisi Ulu sungai itu. Rumah-rumah sepanjang sungai itu menghadap air dan dibangun di atas pancang-pancang. Anak-anak Sungai Musi hanya bisa dilayari ketika pasang naik, karena ketika pasang turun mereka kering. Karena orientasinya ke arah sungai, kota itu punya suatu profil memanjang sepanjang kedua sisi sungai dan tidak menjangkau jauh ke daratan.

Situasi Venesia dari Timur ini yang sudah sejak zaman dulu merupakan arteri perdagangan penting antara India dan Cina, menetapkan karakter Palembang sebagai kota pelabuhan. Dalam perjalanan sejarah, fungsi komersial India dan Cina memberikan dasar untuk menetapkan kota-kota dengan karakter yang amat beragam. Palembang sudah pernah mengalami sejumlah metamorfosa dan secara bergantian pernah berkarakter sebagai ibukota, sarang bajak laut, dan pusat perindustrian.<sup>19</sup>

Berdasarkan prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit oleh Batenburg 20 November 1920 di tepi Sungai Tatang, kaki Bukit Siguntang, disepakatilah hari jadi Kota Palembang jatuh pada tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 Caka, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 683 Masehi. Kesepakatan ini diperkuat oleh Surat Keputusan Walikota Daerah Kotamadya Palembang Nomor 57/UM/WK tanggal 6 Mei 1972.<sup>20</sup>

Nama Palembang mempunyai banyak arti dan pengertian yang mendekati kenyataan adalah apa yang diterjemahkan oleh R.J. Wilkinson dalam kamusnya *A Malay English Dictionary* (Singapore, 1903), yang mengatakan bahwa Lembang adalah tanah yang berlekuk, tanah yang rendah dengan akar yang membengkok karena terendam dalam air. Menurut Kamus Dewan, Lembang adalah lembah, tanah lekuk, tanah yang rendah. Arti lain Palembang adalah tidak tersusun rapi, terserak-serak. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang berarti air yang merembes atau mbesan air. Arti awalan pe atau pa menunjukkan keadaan atau tempat. Menurut Sevenhoven, Palembang berarti tempat tanah yang dihanyutkan ke tepi, sedangkan Stuerler menerjemahkannya sebagai tanah yang terdampar. Pengertian Palembang secara umum menunjukkan tanah yang berair. Ini tidak jauh dari kenyataan yang ada, bahkan pada saat sekarang yang dibuktikan

---

<sup>19</sup> Peter J.M. Nas, *Kota-kota Indonesia Bunga Rampai* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 625-626.

<sup>20</sup> Latifah Ratnawati, "Kebudayaan Palembang" dalam Achadiati Ikram, *Jati Diri yang Terlupakan Naskah-naskah Palembang* (Jakarta: YANASSA, 2004), hlm. 1.

oleh data statistik tahun 1990 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 52,24 persen tanah yang tergenang di Kota Palembang.<sup>21</sup>

Nama Palembang pada zaman klasik selain dalam catatan kronik Cina, juga tertulis dalam Kitab Kertagama karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365. Pada zaman Islam, nama Palembang menjadi populer dengan dimuatnya nama tersebut dalam Sejarah Melayu (1612) dan Babad Tanah Jawi (1680). Sejarah Melayu aslinya ditulis sekitar tahun 1511, kemudian ditulis kembali dalam berbagai naskah hingga mencapai 29 naskah dan dibukukan dengan enam versi, satu di antaranya adalah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.<sup>22</sup>

Kata Palembang pertama kali disebut secara tertulis dalam kronik Cina pada tahun 1225. Ejaan Cina menuliskan *Po-lin-fang*. Setelah lebih satu abad kemudian, Wang Ta Yuan menyebutnya sebagai Ku-kang atau Kiu-kiang (1349-1359).<sup>23</sup> Pada abad ke-12 dan 13, Kota Palembang digambarkan dalam catatan Cina, oleh Yeng-Yai Sheng Tan-Chiao-Chu, sebagai tempat yang dikelilingi oleh air dan tanah kering hanya sedikit sekali. Para pemimpin semuanya tinggal di rumah-rumah yang dibuat di atas tanah yang kering di pinggir sungai. Rumah-rumah rakyat biasa terpisah dari rumah pemimpin, nereka semua tinggal di atas rumah rakit yang dikaitkan pada tiang yang dikaitkan dengan tali di tepian sungai. Apabila air pasang, rakit akan terangkat dan tak akan tenggelam. Seandainya penduduk akan pindah ke tempat lain, mereka memindahkan tiang dan menggerakkan rumahnya sendiri tanpa mengalami banyak kesulitan.<sup>24</sup>

Secara geografis, letak Kota Palembang sejak zaman Kesultanan Palembang hingga saat ini, tampaknya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Kota yang terbelah dua oleh Sungai Musi ini, terletak di bagian timur Pulau Sumatera pada 2°58' Lintang Selatan dan 105° Bujur Timur dari Greenwich. Jarak Kota Palembang dari muara Sungai Musi sekitar 12 mil dan 92 km dari Selat Bangka.<sup>25</sup> Iklim di Palembang panas dan lembab, suhunya beragam sepanjang tahun, mulai dari 23,4° sampai 31,7°, dengan curah hujan terbanyak di Bulan April dan paling sedikit di Bulan September.

Secara keseluruhan dataran Palembang merupakan dataran aluvial sebagai akibat pengendapan material pelapukan Bukit Barisan

---

<sup>21</sup> Djohan Hanafiah, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang* (Palembang: Pemda Tk II Palembang, 1990), hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>25</sup> Djohan Hanafiah (ed.), (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC* (Palembang: Pemerintahan Daerah Kotamadya Palembang, 1996), hlm. 1.

oleh Sungai Musi pada Kala Holosen. Kawasan di Belahan utara Musi merupakan cekungan dangkal, sedangkan di belahan selatan merupakan cekungan dalam. Perbedaan kedalaman cekungan ini, maka belahan utara Musi lebih dulu terbentuk daratan. Sementara itu belahan selatan masih berupa rawa-rawa. Karena pengaruh proses gerakan tektonik, tanah aluvial di belahan utara Musi bergelombang lemah dengan ketinggian antara 2-30 meter d.p.l.. Karena dataran sisi utara Musi keadaannya lebih tinggi dan kering, maka dengan sendirinya manusia lebih cenderung untuk bermukim di lokasi itu.

Sejarah zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa penjajahan Belanda sebenarnya cukup jelas menggambarkan, idealnya seperti apa Kota Palembang dikembangkan. Sebutan *Venice from the East* yang pernah disandang ibukota Sumatera Selatan ini semakin menguatkan kekhasan kota yang dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya.

William Marsden dalam bukunya yang berjudul *History of Sumatra* yang terbit pertama kali tahun 1881,<sup>26</sup> menulis bahwa pada abad ke-18, Palembang adalah kerajaan yang cukup penting. Sungai itu berhulu di Musi yang terletak di Pegunungan Bukit Barisan. Oleh karena itu, hulu sungai itu bernama Ayer Musi, sedangkan hilir sungai bernama Tatong.<sup>27</sup> Lebar Sungai Musi lebih dari satu mil. Sungai itu dapat dilayari dengan aman oleh kapal yang bagian di bawah permukaan airnya tidak lebih empat belas kaki. Kapal-kapal yang lebih besar dari itu datang ke sana untuk tujuan militer, seperti yang terjadi pada tahun 1680 ketika Belanda menyerang dan menghancurkan tempat itu.<sup>28</sup>

Sejak abad ke-19 sampai dasawarsa pertama abad ke-20, Palembang sebenarnya tidak begitu diminati para penguasa perkebunan swasta ketimbang Deli. Daerah di Sumatera Timur itu mampu merangsang kaum *Planters* untuk menanamkan modal di sektor perkebunan, terutama tembakau. Akan tetapi, sejak pemberian konsesi tanah dipermudah dan prospek komoditas pertanian karet dan teh serta pertambangan (batu bara dan minyak bumi) terlihat semakin menjanjikan, para penguasa Barat akhirnya berlomba-lomba mengeksploitasi daerah Palembang.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Sumatra* dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya, Bandung, tahun 1999.

<sup>27</sup> William Marsden, *Sejarah Sumatra* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 212.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 68-69.

Kemajuan ekonomi Palembang akhirnya berimbas terhadap perkembangan Kota Palembang, baik dari segi morfologi, penduduk, dan budayanya. Pada dasawarsa kedua dan ketiga abad ke-20, Palembang mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan melampaui kota-kota besar lain di Sumatera, seperti Medan dan Padang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan Palembang sebagai “kota terbesar” di Sumatera.

Kota Palembang berubah dari kota yang bercorak tradisional menjadi kolonial setelah Mayor Jendral De Kock berhasil menduduki keraton pada bulan Juni 1821.<sup>30</sup> Sejak saat itu, keraton kemudian berubah menjadi sebuah benteng kolonial. Bangunan keraton yang merupakan simbol kebesaran dan kemegahan Sultan dibongkar, hanya dinding tebal keraton yang dibiarkan menjadi benteng, lengkap dengan tangsi, gudang, rumah sakit, kantor keresidenan, dan penjara.

Pada saat yang sama rumah-rumah milik kaum ningrat, yang berdiri di dalam dan sekitar keraton, disita sebagai kediaman untuk perwira Belanda, sedangkan pasukan militer ditempatkan di dalam tembok keraton. Baru sesudah pemugaran ini selesai, kaum priyayi dapat menuntut kembali rumah mereka, lalu rumah-rumah kayu mereka dibangun kembali di kampung 27 dan 28 Ilir yang berdekatan dengan keraton.<sup>31</sup> Penyitaan rumah priyayi secara tidak langsung mengubah tata ruang kota.

Pada masa kesultanan, pemukiman penduduk dibentuk berdasarkan sistem patronase atau dikenal dengan istilah *guguk*. Penduduk kota yang terbagi dua golongan, *miji* dan *alingan*, masing-masing tinggal di sekitar pelindungnya, yaitu priyayi. Mereka memproduksi barang-barang kerajinan atas perintah pelindungnya, sehingga membentuk pola pemukiman berdasarkan ikatan pelindung dan bersifat sektoral. Hal ini nampak dari nama-nama kampung yang mencerminkan kegiatan produksi yang dilakukan. Seperti kampung “Pelampitan” (berhubungan dengan kerajinan lampit atau tikar) dan “Sayangan” (pembuat barang-barang dari tembaga dan perak).<sup>32</sup>

Namun sistem *guguk* ini kemudian dipecah menjadi beberapa kampung oleh pemerintah kolonial. Satu hal yang menarik di Palembang dan jarang ditemui di kota-kota lain ialah pemberian nama-

---

<sup>30</sup> Peter J.M. Nas, *op. cit.*, hlm. 630.

<sup>31</sup> Ida Liliana Tanjung, “Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan Abad ke-20”, *Tesis*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, 2006), hlm. 56.

<sup>32</sup> Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 42-43; *Palembang Doeloe, Sekarang dan Akan Datang* (Palembang: Humas Kota Palembang, 2000), hlm. 15; Ida Liliana Tanjung, *op. cit.*, hlm. 57.



nama kampung tersebut dengan angka dan menambahkan nama distrik seseau dengan letak kampung itu berada, seperti 1 Ilir dan 1 Ulu.<sup>33</sup>

Penduduk yang tinggal di Palembang sering disebut *matagawe*, yaitu rakyat dalam sistem kesultanan secara keseluruhan. Konsep *matagawe* mengandung arti bahwa setiap penduduk dewasa atau telah kawin dan mempunyai tempat tinggal sendiri otomatis memperoleh status sebagai rakyat kesultanan. Segala hak dan kewajiban *matagawe* dilindungi oleh pihak kesultanan. Sultan berhak meminta atau menagih *gawe* rakyat, sementara rakyat memperoleh hak, misalnya, menempati dan menggarap tanah-tanah milik sultan. Konsep kepemilikan tanah sebagaimana diatur oleh *adat* menyebutkan bahwa sultan merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah; penduduk hanya mempunyai hak “menggawekan” (mengerjakan) atau menggarap lahan di dusun mereka masing-masing. Status *matagawe* adalah *tunggu ranah Raja* yang hanya berhak menempati dan “menggawekan” tanah, bukan menguasai apalagi memiliki tanah itu. Hal serupa juga berlaku dalam status mereka sebagai *matapajeg*, “pembayar-pajak” untuk kesultanan, termasuk apa yang disebut *tiban-tukon*.<sup>34</sup>

Rakyat yang khusus tinggal di ibukota Palembang disebut *miji*, yaitu orang biasa yang kedudukannya sama dengan *matagawe* daerah pedalaman. Sebagian besar *miji* adalah orang-orang yang bekerja dan tunduk di bawah kekuasaan bangsawan dan pmbesar kesultanan. Konfigurasi kelompok tersebut terlihat agak sedikit berbeda dibanding *matagawe*. Mereka umumnya hidup dalam sebuah persekutuan di bawah penguasaan bangsawan tertentu. Hampir setiap bangsawan memiliki sejumlah *miji* yang bekerja untuknya dan sekaligus menjadi bawahannya. Namun kelompok *miji* tidak sepenuhnya berstatus bawahan. Mereka dapat menjadi “atasan” dari *alingan*, para pengikut *miji* dengan jumlah cukup besar.<sup>35</sup> Kelompok *miji* memiliki kekuatan tawar yang cukup tinggi. Mereka dapat memilih untuk menolak atau berpindah kerja pada induk semang lain. Kedudukan kelompok *miji*, baik berhadapan dengan bangsawan maupun dengan *alingan*, berkembang dalam bentuk yang mirip dengan model patron-klien

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Tiban-tukon* adalah praktik perdagangan monopoli “tradisional” yang dikendalikan penguasa (sultan dan para pembesanya). Monopoli semacam itu, menurut beberapa sumber, bukan asli tradisi dunia Melayu, melainkan berasal dari Jawa. Lihat Mestika Zed (2003), *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>35</sup> *Alingan* berasal dari kata dasar *aling* (yang “dialingi” atau dilindungi). Mereka bias jadi memiliki atau tidak memiliki pertalian keluarga dengan kelompok *miji*. Kedudukan *alingan* mirip dengan kelompok *senau* atau *sinou*, kaum budak yang khusus “dimiliki” keluarga sultan. Tidak satupun boleh mengerjakan mereka kecuali keluarga sultan. Lihat Mestika Zed (2003), *ibid.*

seperti yang lazim ditemui di sebagian besar negara prakolonial Asia Tenggara, dan Indonesia khususnya.

Sebagai bagian dari pusat kerajaan sekaligus bandar pelabuhan, Kota Palembang berperan menghubungkan berbagai kawasan dan menjadi tempat tinggal aneka macam kelompok etnis. Penguasa dari pusat seperti sultan dan para pembesar istana masuk dalam kelompok bangsawan (priyayi) yang menempati posisi puncak piramida masyarakat. Mereka pada umumnya memakai “regalia” dan gelar kebangsawanan mirip dengan tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti *tumenggung*, *pangeran*, *raden*, dan *mas-agus*.<sup>36</sup> Gelar-gelar tersebut semula diperoleh berdasarkan kelahiran. Sultan kemudian “mengambil-alih” pemberian gelar itu. Sultan sering memberikan hadiah berupa gelar dan jabatan *jenang* atau *raban* kepada *pasirah* atau orang yang dipercayainya.<sup>37</sup> Sultan juga menghadiahi dusun-dusun tertentu dan hak-hak istimewa kepada mereka. Mereka diberi hak memungut pajak dan menarik berbagai keperluan bahan pangan, kayu bakar, dan tenaga kerja. Sementara kelompok priyayi yang tidak “memiliki” dusun, berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan kerja tukang serta menjadi pengrajin emas dan perak, *lampit* (tikar), atau berdagang.

Pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan Eropa juga banyak yang memilih tinggal di Kota Palembang. Sebagian besar di antara mereka berdagang berbagai jenis komoditas sejak abad ke-17 dan ke-18. Mereka termasuk dalam stratifikasi sosial Kota Palembang dan dengan cara masing-masing berusaha menkalin kerjasama dengan pihak kesultanan. Orang Cina masuk ke Palembang pada abad ke-16 dan Palembang merupakan salah satu koloni tertua Cina di Asia Tenggara yang lebih tua dari usia Kesultanan Palembang. Mereka menjadi mitra dagang sultan dan sebagian mengambil peran sebagai “makelar” atau saudagar perantara memenuhi permintaan terhadap berbagai kebutuhan barang impor.<sup>38</sup> Jumlah mereka pada awal abad ke-19 sekitar 800 orang

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 37; Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

<sup>37</sup> *Jenang* atau *Raban* adalah orang kepercayaan sultan yang diangkat sebagai pegawai mewakili sultan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan pribadinya, seperti berdagang, memungut pajak, dan menyerahkan wajib upeti daerah pedalaman, khususnya berlaku di kawasan *kepungutan*. Mereka adakalanya diangkat dari kepala-kepala *marga* (*pasirah*), tetapi sering juga dari keluarga sultan di ibukota. Lihat Mestika Zed (2003), *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>38</sup> M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1695* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1962), hlm. 25; Wang Gungwu, *Community and Nation: Essays on Southeast Asia and The Chinese* (Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books [Asia] Ltd., 1981), hlm. 45-46, 120.

dan kebanyakan sudah terintegrasi ke dalam masyarakat setempat. Sebagian di antara mereka membaur, pindah agama (Islam), atau kawin-mawin dengan penduduk “asli” Palembang. Bahkan sebagian perempuan dalam lingkaran atas keraton adalah keturunan Cina.<sup>39</sup> Peran dagang orang-orang Cina di Palembang sekitar pergantian abad ke-17 dan abad ke-18 lebih bervariasi, mulai dari “pedagang keliling”, pedagang barang kebutuhan pokok sehari-hari, sampai pedagang perantara dalam jaringan perdagangan lada dan timah.<sup>40</sup>

Orang-orang Arab melakukan berbagai kegiatan yang hampir serupa dengan orang Cina. Jumlah mereka yang menetap di Palembang pada awal abad ke-19 sekitar 500 orang. Sejak pertengahan abad ke-18 mereka mulai mengungguli pedagang-pedagang Cina. Mereka mendominasi perdagangan kain dan tekstil serta kepemilikan kapal yang berlanjut hingga paruh pertama abad ke-19.<sup>41</sup> Orang-orang Arab hidup berkelompok secara terpisah dalam perkampungan tersendiri. Kesamaan di bidang agama di samping pengetahuan dan ketrampilan tulis-baca Al-Qur’an dan tradisi Islam membuat kedudukan mereka agak sedikit berbeda dibanding orang Cina.

Beberapa perkampungan orang Arab yang terletak di Seberang Ulu dan Seberang Ilir, yang telah dibangun rumah-rumah besar terbuat dari kayu besi dan tembesu, dilengkapi dengan atap genting yang besar. Rumah limas yang bemiilai antara Nlg. 10.000,- sampai Nlg. 30.000,- ini dulunya merupakan hak istimewa para Sultan Palembang. Orang-orang

---

<sup>39</sup> Contohnya tiga istri Sultan Mahmud Badaruddin I (1722-1757) yang berdarah Cina (dari pihak ayah) dan seorang di antaranya berasal dari komunitas Cina Semarang. Lihat Mestika Zed (2003), *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>40</sup> Pedagang keliling (*peddlers*) Cina biasanya menggunakan perahu “Wangkang Cina” yang ukurannya sedikit lebih kecil dari “Jung Cina”. Selain berfungsi sebagai toko, perahu wangkang sekaligus juga tempat tinggal. Susunan ruangan perahu biasanya terdiri dari ruangan belakang yang sempit untuk dapur, ruang tengah beratap untuk tidur, dan pelataran depan untuk berjualan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari mulai dari sayur-mayur, garam, ikan kering, beras, sampai aneka macam ramuan. Pedagang-pedagang Cina di Palembang termasuk dalam kelompok pedagang yang giat dan kompetitif. Tidak heran kemudian muncul kelakar mengapa orang Cina pada masa Kesultanan Palembang umumnya bertempat tinggal di atas perahu. Jawabannya adalah karena para pedagang bumiputera takut disaingi oleh orang Cina. Lihat Sevenhoven, “De Beschrijving van de Hoofdplaats Palembang”, dalam *VBG*, IX (1825), hlm. 16-21; Meilink-Roelofs, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>41</sup> Misalnya, dari sekitar 19 kapal yang berpangkalan di Kota Palembang dan beroperasi antara pelabuhan Palembang – Jawa dan Semenanjung Malaka, tiga di antaranya dimiliki orang Cina Palembang, dua milik bumiputera setempat, dan selebihnya milik orang Arab. Tentang nama kapal, pemilik, dan rute pelayarannya, lihat, *Regeerings Almanak Deel II*, 1840, hlm. 163.

Arab dapat dianggap cikal bakal kelompok literati – kaum terpelajar “tradisional” yang bekerja untuk kerajaan.

Rumah-rumah rakit yang berada di tepian Sungai Musi tidak lagi didominasi oleh orang-orang Cina. Kebanyakan dari mereka telah pindah ke daratan. Pemerintah kolonial tidak hanya membebaskan mereka membangun rumah dan gudang di daratan, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperluas perdagangan hingga ke pedalaman. Pemukiman Cina di daratan biasanya berdekatan dengan pasar-pasar yang mulai banyak muncul pada saat aktivitas perdagangan semakin meningkat di Palembang.

Pada tahun 1906, Kota Palembang ditetapkan sebagai *Gemeente*.<sup>42</sup> Pada tahun 1915 luas wilayah kota diperkirakan 137 km<sup>2</sup>. Oleh karena proses pemekaran kota dari tahun ke tahun sebagai akibat ledakan penduduk dan urbanisasi, pada tahun 1930, luas Kota Palembang sudah mencapai 264 Km<sup>2</sup>.<sup>43</sup> Sejak menjadi *Gemeente*, pembangunan Kota Palembang menjadi lebih terencana. Berbagai sarana dan prasarana kota mulai dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak penduduk.

Salah satu simbol modernitas kolonial yang paling mencolok dan menjadi *landmark* Kota Palembang pada masa kolonial adalah *Watertoren* atau Menara Air, yang dibangun pada tahun 1929. Bangunan itu memiliki tinggi 35 m dengan bak berisi air 1.200 m<sup>3</sup> dan berfungsi sebagai sumber air bersih Kota Palembang.<sup>44</sup> Akan tetapi, pasokan air di Menara Air ini hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa dan sebagian kecil penduduk kota saja.

Jumlah penduduk Residensi Palembang pada tahun 1915 diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang Eropa, 7.000 orang Cina, 2.200 orang Arab dan 200 orang Keling, dan sisanya pribumi.<sup>45</sup> Pada tahun 1930, ketika diadakan sensus yang pertama di Indonesia, jumlah penduduk Residensi Palembang mengalami

---

<sup>42</sup> F.W.M. Kerckman, *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1906* (Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930), hlm. 338.

<sup>43</sup> Maksum Abdullah (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* (Jakarta: Depdiknas dan Jarahnitra), hlm. 12.

<sup>44</sup> Walaupun sebagian besar Kota Palembang digenangi oleh air, tetapi selalu mengalami masalah air bersih. Di Kota Palembang tidak ada sumur air yang baik, satu-satunya sumber air berasal dari sungai, akan tetapi pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai dan rawa menjadi kering

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 90; Jumhari & Erric Syah, *Rakit Yang Berubah Haluan: Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial* (Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008), hlm. 15.

peningkatan sebesar 68,70 persen menjadi 1.096.565 yang menempati berbagai wilayah sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Penduduk Residensi Palembang Tahun 1930**

No	Wilayah	Asal Penduduk				Total
		Eropa	Pribumi	Cina	Lainnya	
1.	Benedenlanden (Ilir)	2.557	528.705	18.922	4.285	544.469
2.	Bovenlanden (Ulu)	1.117	25.773	5.523	331	332.744
3.	Ogan dan Komering	153	207.489	1.621	79	209.342
Total		3.287	1.061.967	26.066	4.695	1.096.565

Sumber: Indisch Verslag, 1931: 13, dalam Mestika Z, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historical foundation of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996, hal. 250.

Tabel 1 di atas, dapat dilihat pertumbuhan penduduk di Residensi Palembang selama 15 tahun sangat tinggi. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berkemungkinan disebabkan pada 1915 banyak penduduk yang tidak terdata, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, sehingga ketika diadakan sensus lima belas tahun kemudian, jumlah penduduk meningkat pesat.

## **2. Kedatangan Orang Tionghoa ke Palembang**

Secara garis besar dapat dikatakan, orang Cina meninggalkan tempat asalnya dalam tiga gelombang besar. Ini tidak termasuk pelarian politik dan pedagang yang sudah lama sekali singgah di kota-kota pelabuhan pelbagai penjuru dunia. Gelombang pertama terjadi sebelum tahun 1882. Mereka yang pergi merantau dalam periode ini kebanyakan buta huruf, yaitu petani miskin dan kuli-kuli yang bertudung lebar serta berkempang panjang. Lama setelah orang Cina tidak berkepeng dan bertudung lagi, mereka masih digambarkan demikian. Karena waktu itu perempuan Cina tidak boleh ikut merantau, banyak dari perantau itu menikah dengan perempuan setempat. Gelombang kedua terjadi antara tahun 1882 – 1943. Jumlah imigran tidak sebanyak gelombang pertama. Kebanyakan datang sebagai perorangan untuk berdagang atau untuk bersekolah. Banyak juga di antara mereka orang berada. Sejak 1943 banyak perempuan dan anak-anak menyusul suami atau orangtua mereka. Kemudian ketika komunis

menguasai Cina, para profesional, ilmuwan dan kaum terpelajar berbondong-bondong keluar dari tanah airnya.<sup>46</sup>

Berbeda dengan perantau gelombang ketiga, imigran gelombang pertama dan kedua tidak berniat untuk menetap di rantau orang. Mereka menganggap kepergiannya Cuma sementara. Begitu berhasil mengumpulkan harta atau menyelesaikan pendidikan, mereka akan *cabut* dan kembali ke tanah airnya, untuk hidup di masyarakat yang mereka kenal baik. Jadi ketika menyadap karet atau menggali emas di rantau, yang mereka pikirkan hanyalah kesejahteraan keluarga mereka di desa yang tertekan oleh kemiskinan. Supaya uang bisa cepat terkumpul, mereka mau membanting tulang siang-malam.

Tidak semua perantau berhasil mewujudkan cita-citanya untuk pulang kampung. Sebagian meninggal karena kecelakaan atau penyakit, sebagian tewas dibunuh dalam gerakan anti-Cina, sebagian lagi terlalu miskin untuk untuk pulang. Di Provinsi Fujian, tempat asal para perantau Hokian, sampai ada pepatah: "Dari sepuluh yang merantau ke luar negeri, tiga meninggal, enam tinggal di rantau, dan hanya seorang yang pulang."

Dalam usaha meredakan rindu di perantauan terhadap kampung halaman, mereka bahu-membahu membentuk replika mini dunia Cina, yaitu pecinan yang bisa dijumpai di mana-mana di seluruh Indonesia yang pernah ditinggali orang Cina. Ada pecinan yang *Cuma* terdiri atas sebuah jalan, ada pula yang berupa kota mini. Di tanah rantau ini, orang-orang Cina membentuk pelbagai organisasi tradisional. Ada perhimpunan orang-orang se-klan, ada *huikuan* atau organisasi perantau sedaerah asal, ada perkumpulan orang-orang sedialek. Organisasi-organisasi itu menjadi pusat aksi anti-Jepang, ketika Cina diserbu Jepang pada abad ke-20.

Sejak 1949, pengikut organisasi tradisional itu menyusut. Pemerintah Cina tampaknya tidak berminat mengendalikan lagi Cina perantauan. Bahkan Pemerintah Cina menganjurkan Cina perantauan untuk berasimilasi dengan masyarakat setempat.

Cina perantauan memiliki banyak tanah luas di Cina Selatan. Tanah itu disita oleh pemerintah komunis dan pemiliknya tidak berani pulang dari rantau, karena kalau pulang mereka akan diadili sebagai tuan tanah. Jadi mereka pun memutuskan untuk

---

<sup>46</sup> Lily Wibisono (ed.), *Etnik Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: PT Intisari Mediatama, 2006), hlm. 17-18.

menetap saja di negeri asing. Kalau di Cina mereka memiliki anak istri, maka keluarganya itu diusahakan bisa menyusul ke rantau.

Jika dibandingkan dengan orang Cina yang menetap di negara-negara Asia Tenggara lainnya, Thailand paling berhasil mengasimilasi sekitar 3,5 juta penduduk Cina di sana. Kondisi politik dan sosial memungkinkan asimilasi setelah dua atau tiga generasi. Kebudayaan Thai memang tidak terlalu berbeda dengan kebudayaan Cina. Cucu seorang imigran biasa berganti nama dengan nama Thai, menikah dengan perempuan Thai, dan menyesuaikan diri dengan norma dan kebudayaan negara tempat tinggal mereka.

Sebagaimana halnya Cina-Singapura, Cina-Malaysia, dan Cina-Indonesia, Cina-Thai umumnya berhasil dalam bidang perdagangan eceran. Kemudian banyak yang menjadi pengusaha kaya, menyaingi perusahaan-perusahaan Eropa. Mereka memiliki rumah-rumah bagus. Di masa lalu, mereka mempunyai banyak istri dan gundik. Setelah menjadi kaya mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang paling baik.

Asimilasi antara Tionghoa dan etnis lain sulit dilakukan di Malaysia karena beberapa faktor. Jumlah mereka yang mencapai 32 persen<sup>47</sup> dari jumlah penduduk menyebabkan mereka tidak menemui kesulitan mencari pasangan sesama Cina. Selain itu, pernikahan campur sulit terjadi karena masalah agama. Mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah Cina dan memiliki organisasi-organisasi tradisional sendiri.

Generasi muda Tionghoa di Malaysia sebagian besar mampu berbahasa Melayu karena sekolah-sekolah Cina diharuskan mengajarkan bahasa Melayu, selain juga lebih berorientasi lokal. Dalam perspektif keturunan, di Malaysia ada kelompok Tionghoa yang disebut Baba. Nenek moyang mereka kebanyakan datang pada masa kaum perempuan Tionghoa belum boleh merantau, sehingga mereka sebagian berdarah Melayu. Masakan mereka memakai bumbu setempat. Bahasa yang mereka gunakan adalah Melayu yang dibumbui banyak kata Hokian. Di masa lampau. Kaum perempuannya bersarung kebaya. Mereka mengambil alih sebagian kebiasaan dan tata-cara Melayu. Namun, mereka masih hidup terpisah dari masyarakat Melayu. Perantau yang datang

---

<sup>47</sup> Menurut situs *the World Factbook*, persentase orang Cina di Malaysia tahun 2006 menyusut menjadi 23,7%. Penyebab utamanya penyusutan ini adalah banyaknya pendatang, terutama dari Indonesia yang digolongkan sebagai orang Melayu yang menetap di Malaysia akhir-akhir ini. Lihat Lily Wibisono, (ed.), *Ibid.*, hlm. 23.

kemudian menghindari pernikahan dengan Cina Baba, apalagi dengan kelompok etnis lain.

Orang Cina yang tinggal di Singapura berjumlah 76,8 persen dari seluruh penduduk. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1901. Orang Cina memang sudah singgah ke sana dan Riau sejak abad ke-14. Waktu Raffles datang ke Singapura awal abad ke-19, ia mendapatkan 120 penduduk Melayu dan 30 penduduk Cina. Empat bulan kemudian penduduk pulau itu sudah 5.000 orang, sebagian besar orang Cina. Di Singapura pun ada Cina Baba.

Orang Cina kebanyakan hidup di kota-kota di Indonesia dan merupakan keturunan dari perantau yang datang pada abad ke-19. Rekan-rekannya berasal dari Nanyang. Kebanyakan dari mereka berhasil dalam bidang ekonomi. Penduduk Cina di Indonesia tidak sampai 3,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>48</sup> Mereka bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu Cina Peranakan, yang sudah lama bermukim di Indonesia dan mengambil banyak unsur kebudayaan setempat dan kebanyakan berdarah campuran Indonesia; dan Cina Totok, yang merupakan orang-orang Cina yang tetap berpegang teguh pada kebudayaan Cina dan makan makanan tradisional Cina. Mereka biasanya menghindari kawin campur dan lebih banyak bergaul dengan kalangan masyarakat mereka sendiri.

Ketika menginjakkan kaki di Bumi Nusantara, orang Cina hanya duta dagang, yang rajin berlayar dan bertukar barang dengan wiraniaga lokal. Di pelabuhan tertentu, sembari menunggu datangnya angin menuju kampung halaman, mereka mendirikan gudang, kadang juga tempat ibadah. Lama-kelamaan, justru betah dan mencari rezeki di negeri baru, yang kelak dinamai Indonesia.

Perintis komunitas Tionghoa di Indonesia sudah bolak-balik ke Nusantara sejak zaman Samudra Pasai, Sriwijaya, dan Majapahit. Tidak jarang mereka menularkan sesuatu. Majunya teknik perkapalan Majapahit, konon dirintis para mantan tentara Mongol yang mendarat di Tuban pada abad ke-12. Sisa laskar yang dihancurkan Raden Wijaya itu (sebagian besar orang Han) memilih membantu Majapahit ketimbang pulang ke kampung halaman, tetapi berstatus jajahan bangsa Mongol. Berlangsungnya proses osmosis – jauh sebelum kedatangan penjajah – pelan-pelan meleburkan berbagai unsur Cina ke dalam budaya lokal.

---

<sup>48</sup> Perkiraan kasar yang dipercaya sampai tahun 2006 adlah 4% - 5%. Namun dalam Sensus Penduduk tahun 2000, hanya 1% yang mengaku memiliki asal etnis Tionghoa. Lihat Lily Wibisono (ed.), *Ibid.*, hlm. 24.



Mereka juga menyumbangkan banyak hal yang layak dicatat, mulai teknologi sederhana penggilingan tebu, hingga bakiak. Mulai makanan eksotis, teknik dan perlengkapan masak, kepercayaan, hingga akulturasi dengan budaya lokal yang memperkaya budaya nasional.<sup>49</sup> Kontribusi Tionghoa terhadap budaya Indonesia mungkin bukan yang terbesar, jika dibandingkan dengan pengaruh Arab atau India. Tetapi harus diakui, pengaruh Cina turut memberi warna dalam perjalanan sejarah bangsa.

Orang Tionghoa yang ada di Indonesia tidak merupakan satu kelompok yang berasal dari satu daerah di Negara Cina, tetapi terdiri dari beberapa sukubangsa yang berasal dari dua provinsi, yaitu Fukien dan Kwantung, yang sangat terpecah daerah-daerahnya. Setiap imigran ke Indonesia membawa kebudayaan sukubangsanya sendiri-sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Ada empat bahasa Cina di Indonesia, yaitu bahasa Hokkian, Teo-Chiu, Hakka, dan Kanton yang demikian besar perbedaannya, sehingga pembicara dari bahasa yang satu tak dapat mengerti pembicara dari yang lain.<sup>50</sup>

Hal-hal yang mendorong terjadinya migrasi orang-orang Tionghoa ke Nusantara antara lain; *Pertama*, sebagian besar masyarakat Tionghoa bagian selatan tidak mau mengakui pemerintahan Khubilai Khan dari bangsa Mongol (Dinasti Mancu) yang berhasil menguasai Negeri Cina. *Kedua*, sering terjadinya kerusuhan, terutama selama masa perpindahan kekuasaan dari Dinasti Ming ke Dinasti Manchu. *Ketiga*, faktor kesulitan ekonomi atau kemiskinan yang diderita sebagian besar rakyat Cina sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak. *Keempat*, terjadinya Perang Candu pada tahun 1850-1860.<sup>51</sup>

Rute perjalanan yang dilalui orang Tionghoa ke Nusantara adalah sebagai berikut; berangkat dari daratan Cina, menyusuri pesisir Indo Cina, Thailand, Semenanjung Melayu, dan terus ke Tumasik (sekarang Singapura). Sampai di sini rute pelayaran terpecah menjadi dua, menuju Asia Tengah dan ke arah selatan. Rute ke Selatan akan menyusuri Pulau Sumatera (via Selat

---

<sup>49</sup> Muhammad Sulhi, "Merekonstruksi Masa lalu, Mungkinkah? dalam Lily Wibisono (ed.), *Ibid.*, hlm. 45-46.

<sup>50</sup> Puspa Vasanti, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia" dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 353.

<sup>51</sup> Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)* (Palembang: FPS2B & PSMTI, 2002),

Bangka), pesisir utara Pulau Jawa hingga ke Surabaya dan Madura. Rute perjalanan pulang bertolak dari ujung timur Pulau Jawa, menyeberangi Laut Jawa, Selat Karimata, menyusuri Kalaimantan barat, Brunei, menyeberang ke Palalawan, Luzon, dan Taiwan, kemudian kembali ke daratan Cina.<sup>52</sup>

Pada awal Dinasti Ming (1386-1644), sudah ada orang-orang Tionghoa merantau ke Palembang, antara lain Liang Daoming yang berasal dari Nan Hai (Guangzhou/Kanton), Provinsi Guangdong. Pada tahun 1377, Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit menyerang Sriwijaya. Menjelang tergulungnya Sriwijaya, Liang Daoming menguasai Palembang didukung oleh ribuan keluarga keturunan Tionghoa di tempat itu. Hal ini tidak dianggu oleh tentara Majapahit.<sup>53</sup>

Di samping Liang Daoming, masih ada seorang tokoh perantau-Tionghoa yang terkenal, yaitu Chen Zhuyi (Tan Tjo Gi). Dia orang Chazhou (Theochiu) Provinsi Guangdong. Karena melanggar hukum di Tiongkok, Chen Zhuyi melarikan diri beserta keluarganya ke Palembang. Mula-mula dia bekerja untuk Raja Sriwijaya. Kemudian dia mengerahkan bajak laut setempat dan mengangkat diri sebagai gembongnya setelah Raja Sriwijaya itu mangkat. Chen Zhuyi berbuat sewenang-wenang, antara lain merampok kapal perdagangan yang lalu-lalang di situ. Tahun 1405 Kota Palembang Kota Jambi jatuh ke tangan bajak-bajak laut Tionghoa. Kapal dagang tidak banyak lagi yang datang ke situ sehingga kedua kota itu makin mundur. Chen Zhuyi dan anak buahnya tidak hanya merampas barang dagangan tetapi banyak juga pedagang tersebut yang dibunuh di laut. Penduduk setempat dan pedagang-pedagang di luar amat benci kepada si gembong bajak laut itu.<sup>54</sup>

Bajak laut Chen Zhuyi ini baru hancur pada tahun 1407 oleh armada Cheng Ho yang merupakan utusan Kaisar ming dari Cina yang singgah di Palembang dalam perjalanan pulang ke Tiongkok setelah mengunjungi bagian timur Pulau Jawa tahun 1406. Kehancuran bajak laut Chen Zhuyi ini disambut oleh

---

<sup>52</sup> Sjam Alamsjah, *et al.*, "Keturunan Cina dari Kalimantan Barat," artikel dalam rubrik Rehat Majalah *Sinar*, 13 Desember 1993: Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 26-27; Eny Christyawaty & Almaizon, *Asimilasi Etnis Tionghoa di Kota Palembang: Studi tentang Amalgamasi Masyarakat Etnis Tionghoa dengan Golongan Pribumi* (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004), hlm. 30.

<sup>53</sup> H.M. Hembing Wijayakusuma (ed.), *Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007), hlm. 93-94.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.94

penduduk Palembang dan rakyat di sekitarnya dengan bersorak-sorai dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Chen Ho. Selanjutnya salah seorang tokoh masyarakat tionghoa yang ada di Palembang, yaitu Shi Jinqing diangkat sebagai pemimpin perantau Tionghoa setempat. Sejak itu hubungan antara Tiongkok dengan kerajaan di Palembang semakin baik.<sup>55</sup>

Imigran Tionghoa yang terbesar ke Indonesia datang mulai abad ke-16 sampai kira-kira pertengahan abad ke-19 yang berasal dari sukubangsa Hokkien. Mereka berasal dari Provinsi Fukien bagian selatan. Daerah itu merupakan daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Cina ke seberang lautan. Kepandaian berdagang ini yang ada di dalam kebudayaan sukubangsa Hokkien telah terendap berabad-abad lamanya dan masih tampak jelas pada orang Tionghoa di Indonesia. Di antara pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia merekalah yang paling berhasil. Hal ini juga disebabkan karena sebagian besar dari mereka sangat ulet, tahan uji, dan rajin. Orang Hokkien dan keturunannya yang telah berasimilasi sebagai keseluruhan paling banyak terdapat di Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pantai Barat Sumatera.

Imigran Tionghoa lain adalah orang Teo-Chiu yang berasal dari pantai Selatan Negeri Cina di daerah pedalaman Swatow di bagian timur Provinsi Kwantung. Orang Theo-Chiu dan Hakka (Khek) disukai sebagai kuli perkebunan dan pertambangan di Sumatera Timur, Bangka, dan Belitung. Walaupun orang Hakka merupakan sukubangsa Cina yang paling banyak merantau ke seberang lautan, mereka bukan sukubangsa maritim. Pusat daerah mereka adalah di pedalaman Provinsi Kwantung yang terutama terdiri dari daerah gunung-gunung kapur yang tandus. Orang Hakka merantau karena terpaksa atas kebutuhan mata pencaharian hidup. Selama berlangsungnya gelombang-gelombang imigrasi dari 1850-1930, orang hakka adalah yang paling miskin di antara para perantau Tionghoa. Mereka bersama-sama orang Theo-Chiu dipekerjakan di Indonesia untuk mengeksploitasi sumber-sumber mineral sehingga sampai sekarang orang Hakka mendominasi masyarakat Tionghoa di distrik-distrik tambang emas lama di Kalimantan Barat, Sumatera, Bangka, dan Belitung. Sejak akhir abad ke-19, orang Hakka mulai bermigrasi ke Jawa barat, karena tertarik oleh perkembangan Kota Jakarta dan karena dibukanya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 91-95.

daerah Priangan bagi pedagang Tionghoa. Kini banyak orang Hakka menetap di Jakarta dan Jawa Barat.<sup>56</sup>

Di sebelah Barat dan Selatan daerah asal orang Hakka di Provinsi Kwantung tinggallah orang Kanton (Kwong Fu). Serupa dengan orang Hakka, orang kanton terkenal di Asia Tenggara sebagai kuli pertambangan. Mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia, sebagian besar tertarik oleh tambang-tambang timah di Pulau Bangka. Walaupun mereka mulai merantau ke Indonesia dalam kelompok-kelompok pada waktu yang sama dengan orang Hakka, namun keadaan mereka berlainan. Umumnya mereka datang dengan modal yang lebih besar dan mereka datang dengan ketrampilan teknis dan pertukangan yang tinggi. Di Indonesia, mereka terkenal sebagai ahli dalam pertukangan, pemilik toko-toko besi dan industri kecil. Orang Kanton ini jauh lebih tersebar merata di seluruh Kepulauan Indonesia dibandingkan dengan orang Hokkien, Teo-Chiu, atau Hakka. Walaupun demikian tidak banyak dari mereka yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka, dan Sumatera Tengah.<sup>57</sup>

Masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang, asal-usul mereka pada umumnya sama saja dengan orang-orang Tionghoa yang ada dan tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini disebabkan telah adanya hubungan dengan Negeri Cina pada masa lampau, baik berupa hubungan dagang, politik, maupun adanya migrasi secara besar-besaran. Sama seperti orang Tionghoa lainnya yang ada di Nusantara, masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang terdiri dari beberapa provinsi di Cina, antara lain Provinsi Kwantung, Fukien, dan Kanton.

Jalur yang dilalui oleh orang-orang Tionghoa untuk datang ke Palembang adalah melalui jalur perdagangan (transformasi laut) yang ada pada masa itu. Sebelum mencapai Palembang, mereka transit terlebih dahulu di Pulau Bangka, yang merupakan pintu gerbang menuju ke ibukota Palembang. Di Pulau Bangka, orang Tionghoa bekerja sebagai pekerja tambang, sedangkan di Palembang mereka bekerja sebagai tukang di perindustrian. Bermigrasinya orang-orang Tionghoa ke Palembang berhubungan erat dengan jalur pelayaran tradisional yang sangat tergantung pada embusan angin muson.

---

<sup>56</sup> Puspa Dewi, *et al.*, *Klenteng Kuno di DKI Jakarta dan Jawa Barat* ((Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan Direktorat Purbakala, 2000), hlm.

<sup>57</sup> Tarmizi Taher, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi bangsa di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1997), hlm. 12

Pada masa kerajaan Sriwijaya, pedagang-pedagang Cina datang ke Palembang membawa keramik atau kain sutra. Mereka kembali ke negaranya membawa berbagai macam produk yang dihasilkan daerah Sriwijaya seperti damar, kayu, cendana, minyak wangi, dan produk hutan lainnya.<sup>58</sup>

Hubungan Sriwijaya dan Cina dapat dilihat dari catatan perjalanan yang ditulis oleh I-Tsing, seorang pendeta agama Buddha. Ia datang ke Palembang pada tahun 671 M dan tinggal di Sriwijaya selama enam bulan untuk mempelajari bahasa Sansekerta sebelum bertolak ke India. Di India ia tinggal selama sepuluh tahun untuk menuntut ilmu di perguruan Nalanda dan kembali lagi ke Sriwijaya untuk menetap selama empat tahun. Kali ini ia berhasil menyalin teks Buddha berbahasa Sansekerta ke dalam bahasa Cina. Menurut penuturan I-tsing, Sriwijaya saat itu merupakan pusat agama Buddha dan merupakan tempat yang ideal untuk melakukan persiapan belajar sebelum belajar di India. Oleh karena itu, ia menyarankan pelajar-pelajar Cina untuk menetap di Sriwijaya beberapa lama sebelum menempuh pelajaran agama yang lebih tinggi di India.<sup>59</sup>

Kerajaan Sriwijaya mulai paruh ke-2 abad ke-7 sangat dekat hubungannya dengan Cina. Secara teratur Sriwijaya mengirim utusan ke Negeri Cina untuk menyatakan pengakuan atas kekuasaan imperium Cina.<sup>60</sup> Hubungan ini didasari atas saling berkepentingan. Pihak Cina yang saat itu sudah memiliki armada kapal laut kuat, mereka harus melindungi Sriwijaya. Mereka sangat membutuhkan berbagai jenis barang yang dihasilkan dari Sriwijaya. Bahkan pada masa itu barang-barang yang dihasilkan dari Sriwijaya memiliki nilai yang tinggi di Negeri Cina. Di pihak lain, Sriwijaya juga sangat membutuhkan dukungan Cina dalam menghadapi ancaman penguasa lokal yang berkedudukan di Jawa seperti Wangsa Syailendra dan Sanjaya. Kedekatan hubungan dengan Cina juga turut memperbesar kesempatan orang-orang Cina untuk menetap di Sriwijaya.<sup>61</sup>

Pada masa kolonial, Belanda memperlakukan imigran Cina sebagai bangsa tersendiri, sehingga membuat mereka kian terkucil. Jumlah komunitas Tionghoa di Indonesia memang meningkat tajam di era kolonial. Menjelang tahun 1800, orang Cina di Jawa

---

<sup>58</sup> Puspa Dewi, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 7

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang* (Jakarta: Keng Po, 1961), hlm. 83.

<sup>61</sup> Puspa Dewi, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 8.

hanya 100.000 orang, tetapi pada akhir abad ke-19 membengkak menjadi 500.000 orang. Gelombang imigran tersebut datang demi mencari penghidupan yang lebih baik, menyusul mandeknya pertanian di akhir era dinasti Qing, yang membawa dampak kelaparan di banyak tempat. Karena mendadak jumlahnya membesar, para imigran itu harus rela diberi upah rendah. Di sisi lain, tanggapan positif masyarakat lokal terus merosot. Realitas inilah yang memperkuat upaya mereka mempertahankan jati diri sebagai etnik pendatang.

Pola pikir zaman kolonial itu terlanjur mendalam. Henggangnya Belanda tak memecahkan masalah. Di tengah euforia kemerdekaan, banyak orang mulai mempertanyakan, mau ke mana etnik Tionghoa? Sama seperti Belanda memperlakukan mereka, masyarakat pun ikut memandang orang Cina sebagai komunitas homogen dengan stereotip tertentu.

Padahal, kelompok etnik atau keturunan Cina, menurut garis patrilineal, sebenarnya sangat heterogen. Secara kultural, mereka memang seragam menyebut dirinya bangsa Han, kelompok etnik yang mencakup 90 persen dari total penduduk Tiongkok (sisanya etnik Manchu, Mongol, Tibet, Uygur, Chuang, Hui, dan lainnya), namun kebudayaannya beragam. Sampai menjelang abad ke-19, para pendatang itu hanya terdiri atas kaum pria. Mereka menikah dengan perempuan setempat hingga melahirkan beberapa generasi. Mereka masih disebut orang Cina, karena mempertahankan sistem patrilinealnya. Kelompok itulah yang kemudian dikenal sebagai Cina Peranakan, yang keturunannya lebih banyak menggunakan bahasa lokal ketimbang bahasa Cina. Kecuali beberapa istilah yang berhubungan dengan kekerabatan, keagamaan, dan perdagangan.<sup>62</sup>

Imigran Cina setelah abad ke-19 kondisi ekonominya lebih baik. Mereka membawa serta istri dan anak-anak, hingga terbentuklah keluarga yang ayah dan ibunya asli dari daratan Cina. Kelompok ini dikenal sebagai Cina Totok, yang kukuh mempertahankan budaya kota atau provinsi asalnya. Di sisi lain, budaya Cina Peranakan pun beragam, tergantung seberapa jauh terjadinya perkawinan campur dengan penduduk lokal.

Orang Cina Peranakan, karena penyesuaian kebudayaan mereka sudah jauh, pada permulaan sudah tentu lebih berorientasi terhadap kebudayaan dan negara Indonesia, kalau dibandingkan dengan Cina Totok. Walaupun demikian pada masa pemerintahan

---

<sup>62</sup> Muhammad Sulhi, *op. cit.*, hlm. 49.

kolonial, di mana orang Indonesia hanya menempati lapisan terbawah, Cina Peranakan tidak mau disamakan dengan orang Indonesia asli, tetapi selalu berusaha untuk memelihara identifikasi Cina mereka. Sikap ini dipupuk lagi oleh tumbuhnya nasionalisme negara Cina yang berkembang dalam abad ke-20 dan oleh propaganda kaum nasionalis dalam Revolusi Cina. Propaganda itu menyebabkan tumbuhnya suatu reorientasi terhadap keagungan kebudayaan Cina dalam masa yang lampau di antara Cina Peranakan di Indonesia. Bertambah pula dengan sekolah-sekolah Cina yang mulai saat itu banyak didirikan di Indonesia, menyebarkan bahasa nasional Cina baru, yaitu bahasa Kuo-yu, juga di antara orang Peranakan yang sudah lama lupa dengan bahasa sukubangsanya yang asli. Akhirnya suatu hal yang lebih mengisolasi anak-anak Peranakan dari anak-anak Indonesia adalah usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah Cina Belanda, atau *Hollands Chinese School*.<sup>63</sup>

Pada masa Kolonial, semua orang Tionghoa di Indonesia secara yuridis diperlakukan sebagai suatu golongan yang dikenakan sistem hukum perdata yang berbeda dengan orang Indonesia pribumi, yaitu hukum untuk orang Timur Asing.<sup>64</sup> Pada tahun 1910 pernah ada suatu perjanjian antara Negeri Belanda dan Negara Cina, yang menetapkan ke-dwiwarganegaraan bagi orang Tionghoa di Indonesia, agar mereka dapat dikenai aturan-aturan hukum Hindia-Belanda. Keadaan ini diwarisi oleh Pemerintah Indonesia, waktu Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia tahun 1949. Hal ini menyebabkan semua orang Tionghoa di Indonesia pada waktu itu mempunyai ke-dwiwarganegaraan itu, menjadi warga negara Cina merangkap warga negara Indonesia.

Pada tahun 1955, waktu Konferensi Asia Afrika di Bandung, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian dengan RRC untuk mengakhiri keadaan ini, sehingga orang Tionghoa di Indonesia dapat memilih menjadi salah satu, warga negara RRC atau warga negara Indonesia (WNI). Untuk menjadi

---

<sup>63</sup> Puspa Vasanti, *op. cit.*, hlm. 356; Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 97.

<sup>64</sup> Menurut *Regerings Reglement* 1907, penduduk Indonesia digolongkan atas orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang Pribumi, yang masing-masing dikenakan hukum perdata yang berbeda-beda walaupun dalam hukum pidana semuanya disamakan. Orang Tionghoa di Indonesia, yang dimasukkan golongan orang Timur Asing di dalam soal-soal hukum dagang malahan disamakan dengan hukum Eropa.

WNI, ia antara lain harus bisa membuktikan di muka pengadilan bahwa ia lahir di Indonesia, dan kemudian mengatakan juga di muka pengadilan, bahwa ia melepaskan kewarganegaraan RRC-nya. Ratifikasi dari perjanjian tersebut baru selesai tahun 1960, sedangkan untuk implementasinya ditentukan waktu dua tahun.

Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Palembang ada orang Cina yang sangat kaya. Namun ada juga yang hidup sangat merana, sama seperti tetangganya di perkampungan kumuh. Tahun 1967, pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum dan bahasa pengantar Cina. Beberapa tahun kemudian anak-anak Cina sudah tak bisa lagi berbicara dialek apa pun, baik Mandarin, Hokian, Hakka, Kwongfu, Tociu, dan sebagainya.

Dalam masyarakat Tionghoa Indonesia ada perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan golongan orang kaya. Akan tetapi, perbedaan ini tidaklah sangat menyolok karena golongan buruh ini tidak menyadari akan kedudukannya, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena sering masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dan si majikan. Sebuah perusahaan (*kongsi*) orang Tionghoa biasanya memang merupakan perusahaan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kekerabatan dan kadang-kadang merupakan usaha dari sekelompok orang yang berasal dari satu desa di Negara Cina dulu sebelum ke Indonesia.<sup>65</sup>

Tionghoa Peranakan yang kebanyakan terdiri dari orang Hokkien, merasa dirinya lebih tinggi dari Tionghoa Totok karena mereka menganggap Tionghoa Totok umumnya berasal dari kuli dan buruh. Sebaliknya Tionghoa Totok memandang rendah Tionghoa Peranakan karena mereka dianggap mempunyai darah campuran.<sup>66</sup>

### **3. Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa di Palembang**

Setelah menetap di Palembang orang Tionghoa membentuk perkampungan yang bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Pada masa Kesultanan Palembang, masyarakat Tionghoa diberi izin tinggal di Palembang dengan syarat mereka bersedia tinggal di atas air dengan membuat

---

<sup>65</sup> Puspa Vasanti, *op. cit.*, hlm. 365; Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 31.

<sup>66</sup> *Ibid.*



rumah-rumah rakit.<sup>67</sup> Peraturan ini dikeluarkan karena pihak penguasa pada waktu itu khawatir jika mereka diizinkan tinggal di daratan akan membahayakan penguasa. Sedangkan kalau mereka tinggal di rakit-rakit akan mudah dikuasai, cukup dengan membakar rakit-rakit tersebut. Hal ini membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat Tionghoa pada waktu itu.<sup>68</sup>

Rakit-rakit yang ditempati oleh masyarakat Tionghoa tersebut berada di sepanjang Sungai Musi yang letaknya menghadap ke arah keraton atau berseberangan. Rakit-rakit tersebut umumnya dibuat dari bahan kayu atau bambu dengan atap kajang dan sirap.<sup>69</sup> Rumah-rumah rakit kepunyaan orang-orang Tionghoa yang kaya terbuat dari kayu jati yang dicat dengan rapi, ukurannya sesuai dengan selera masing-masing. Rumah tersebut terdiri atas tiga bagian: sebuah rumah di bagian depan, dipakai sebagai toko dan gudang; bagian belakang di atas rakit terpisah yang berisi dapur dan tempat tinggal; dan di antara keduanya ada rakit yang berfungsi sebagai semacam halaman. Juga dimungkinkan menyeberang ke kamar mandi terapung. Renovasi rakit-rakit itu, kalau sudah mulai lapuk, dilakukan secara bertahap, dengan menarik keluar bambu yang lama dan penggantinya dengan yang baru. Perdagangan dilakukan dalam toko-toko Cina dan juga dalam perahu-perahu kecil. Usaha grosir didominasi orang Cina dan Arab. Ketika sampai di Palembang, orang Belanda tidak menemukan pasar.<sup>70</sup>

Pada masa Kesultanan Palembang ini, orang-orang Tionghoa tidak bisa menjadi petani karena mereka tidak diizinkan untuk tinggal di darat dan memiliki tanah oleh raja-raja Palembang pada masa itu. Adanya larangan tersebut mengakibatkan orang-orang Tionghoa tinggal di atas rumah-rumah rakit dan bekerja sebagai pedagang. Adapun jenis barang dagangannya antara lain kain linen kasar dan halus yang umumnya sangat laku, juga berbagai barang pecah belah (keramik) dari Cina, sutra kasar,

---

<sup>67</sup> Pada masa kesultanan Palembang, tanah merupakan milik raja, orang yang bukan keturunan raja hanya boleh meminjam padanya, sedangkan bagi orang asing, khususnya orang Tionghoa hanya boleh tinggal di atas rumah-rumah rakit. Lihat Jalaluddin, *Petunjuk Kota Palembang dari Wanua ke Kotamadya* (Palembang: Humas Pemda Dati II Kotamadya Palembang, 1991), hlm. 83; I.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang* (Jakarta: Bhartara, 1971), hlm. 21; Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 31

<sup>68</sup> I.L. Sevenhoven, *loc. cit.* ; Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>69</sup> Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari, Citra Palembang Tempo Dulu* (Palembang: Humas Pemda Tingkat II Palembang, 1988), hlm. 48.

<sup>70</sup> Peter, J.M. Nas. *Op. cit.*, hlm. 630.

benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan, dan lain-lain.<sup>71</sup> Selain menjadi pedagang ada juga orang Tionghoa di Palembang yang menjadi nelayan (menangkap ikan) di sepanjang perairan Sungai Musi, ada juga yang menarik becak sehingga dikenal dengan panggilan becak Cina.<sup>72</sup>

Pada masa akhir pemerintahan Kesultanan Palembang mulai terjadi perubahan-perubahan kecil, masyarakat Tionghoa sudah mulai diizinkan untuk membangun rumah di darat. Kebijakan ini diawali dengan adanya rumah pemimpin masyarakat Tionghoa yang berada di pinggir Sungai Musi di atas tanah yang kering.<sup>73</sup> Kendati telah mendapatkan izin untuk tinggal di daratan, tidak semua orang Tionghoa mampu membangun rumah di darat sehingga tidaklah mengherankan apabila masih terdapat masyarakat Tionghoa yang tinggal di rumah-rumah rakit.

Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan pada tahun 1825 dan menjadi bagian wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa ditempatkan pada suatu perkampungan tersendiri yang disebut dengan *Wijk* atau *Wijkenstelsel*.<sup>74</sup> Perkampungan Tionghoa ini dipimpin oleh seorang pimpinan yang mempunyai kepangkatan militer seperti Mayor (*Majoor*), Kapten (*Kapiten*), dan Letnan (*Luitnant*). Kehidupan mereka secara spasial terpisah dari pemukiman penduduk pribumi.<sup>75</sup> Di Palembang Kapiten Cina yang pertama adalah Tjoa Ham Him yang dilantik pada tahun 1855.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> I.L. Sevenhoven, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>72</sup> Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 88.

<sup>73</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa, Citara Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 103.

<sup>74</sup> Pada masa pemerintahan Belanda orang-orang Tionghoa diwajibkan untuk tinggal dalam pemukiman yang telah ditentukan. Untuk keluar dari pemukimannya mereka harus minta izin dari pemerintah melalui pemimpinnya. Lihat Melly G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981), hlm. 5; Yoshihara Kunio, *Konglomerat Oei Tjong Ham, Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 84.

<sup>75</sup> Djoko Surjo, "Kota dan Pembauran Sosio-Kultural dalam Sejarah Indonesia" dalam Team Peneliti IDS, *Interaksi Antarsuku-bangsa dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud, 1989), hlm. 43-44.

<sup>76</sup> Eka Asih Putriana Taim, "Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang dari Masa ke Masa, dalam Jurnal Arkeologi *Siddhayarta* Volume 7 No. 2 (Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002), hlm. 31; Jumhari, et al., *Jaringan Perdagangan Perantara Etnis Cina di Palembang Pada Permulaan Abad ke-20 sampai Akhir Kolonial Belanda* (Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007), hlm. 28.

Dasar pembentukan sistem wilayah di Palembang adalah telah adanya pola pemukiman tersendiri pada masa pemerintahan sebelumnya.<sup>77</sup> Selain itu adanya kecurigaan yang cukup besar terhadap golongan Timur Asing, sehingga dirasakan perlu untuk membatasi dengan ketat gerak masyarakat Timur Asing, khususnya orang-orang Tionghoa. Akan tetapi, pada perkembangannya justru golongan ini yang mendapatkan kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan golongan Pribumi dan Timur Asing lainnya.<sup>78</sup>

Pemimpin masyarakat Cina pada masa kolonial (*Hoofd de Chinezen*) dipilih oleh rakyat dan dari rakyatnya sendiri. Kriteria terpilihnya seorang pemimpin adalah atas dasar kepercayaan dan kekayaan yang dimilikinya. Selain itu ia harus mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakatnya serta mempunyai hubungan yang erat dengan pihak penguasa setempat.<sup>79</sup>

Pemimpin orang Tionghoa ini mempunyai tugas sebagai perantara atau penghubung masyarakat Tionghoa yang ingin mengurus sesuatu hal dengan pemerintah Belanda, dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ia mempunyai hak untuk mengadili semua perkara yang ada atau terjadi pada masyarakatnya.<sup>80</sup> Selain membela kepentingan golongannya ia juga mempunyai tugas-tugas administrasi seperti mengurus (1) Surat Kelahiran; (2) Surat Kematian; (3) Surat Nikah; (4) Surat Cerai; (5) Surat jalan; (6) Surat Wasiat/Warisan, (7) Cacah jiwa/Sensus, dan lain-lain.<sup>81</sup> Dalam struktur pemerintahan Belanda, kedudukan Pemimpin Tionghoa ini selain sebagai perantara, juga merangkap sebagai penasihat kepada pemerintah. Terutama mengenai masalah penarikan pajak, serta sebagai sarana informasi tentang ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>82</sup>

Kedudukan materi orang-orang Tionghoa pada masa kolonial ini sedikit lebih baik daripada orang asing lainnya. Mereka dijadikan perantara bagi orang-orang Barat (Belanda)

---

<sup>77</sup> Yoshihara Kunio, *loc. cit.*

<sup>78</sup> Hidayat Z.M., *op. cit.*, hlm. 129; Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>79</sup> Puspa Vasanti, *op. cit.*, hlm. 366.

<sup>80</sup> Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 35-36; Puspa Vasanti, *loc. cit.*

<sup>81</sup> T. S. Wardoyo, *Tan Jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Jogjakarta* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 152.

<sup>82</sup> Puspa Vasanti, *loc. cit.*

dengan orang-orang pribumi dalam dunia perdagangan, terutama perdagangan kopi, lada, karet, dan beras<sup>83</sup> yang dibeli dari hasil-hasil bumi penduduk daerah pedalaman melalui sungai-sungai yang ada sebagai sarana transportasinya.<sup>84</sup>

Belanda pada awalnya datang ke Indonesia tidak secara besar-besaran. Oleh karena itu, kekuatan asing itu selalu memerlukan mitra-mitra dagang. Cina menjadi mitra dagang Belanda, khususnya di bidang distribusi, tidak di bidang perdagangan perantara. Dari kegiatannya mendistribusikan barang-barang dari kota ke penduduk-penduduk pribumi di desa, orang Cina mendapatkan uang tembaga dari orang-orang di desa, yaitu uang kecil yang biasa digunakan untuk membeli barang-barang di desa. Mereka kemudian menjualnya ke VOC di kota. Inilah yang mempererat hubungan orang-orang Cina dengan orang-orang Belanda.<sup>85</sup>

Orang Cina dan orang Belanda datang ke Indonesia sebenarnya adalah sama-sama untuk berdagang. Belanda dalam bentuk VOC datang untuk melakukan perdagangan, dan orang-orang Cina datang ke Indonesia juga untuk melakukan perdagangan. Baik Belanda maupun Cina datang dari latar belakang kota yang dikelilingi “dinding”. Pernyataan ini memang aneh kedengarannya, namun itulah realitanya.<sup>86</sup> Karena berbagai hal dan insiden, sejak permulaan, orang-orang Cina ini menjadi mitra dagang Belanda.

Kebutuhan Belanda terhadap peranan orang-orang Tionghoa di bidang perdagangan tercermin dalam kedudukan administratif dan hukum istimewa yang diberikan kepada mereka. Pada setiap kota pelabuhan utama dan kota-kota perdagangan yang terletak di pinggir sungai-sungai, ditunjuklah syahbandar (mandor tol dan bea cukai) khusus untuk komunitas pedagang Tionghoa, bersama-sama dengan syahbandar harus mengurus para pedagang pribumi.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Ma'moen Abdullah, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 87; <sup>1</sup> Ong Hok Ham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina Sejarah Etnis Cina di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 20; Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 14.

<sup>84</sup> Melly G. Tan (ed.), *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>85</sup> Kedudukan orang Cina di dalam hal distribusi, di dalam perdagangan perantara ini, tetap mereka pegang dan mereka kuasai dari permulaan abad ke-17 sampai sekarang ini. Lihat *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>86</sup> Ong Hok Ham, *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>87</sup> Peter Carey, *op. cit.*, hlm. 13-14.

Selain rumah-rumah rakit yang berfungsi sebagai sarana perdagangan, orang Tionghoa juga menggunakan sarana pendukung lainnya seperti wangkang-wangkang Cina,<sup>88</sup> perahu atau sampan penduduk pribumi dari berbagai ukuran. Kapal-kapal ini menjadi toko-toko terapung yang penuh dengan berbagai macam barang dagangan mulai dari kain, barang pecah belah, hingga barang-barang makanan untuk keperluan sehari-hari.

Perkembangan orang Tionghoa Palembang pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai berangsur-angsur menghapuskan larangan-larangan terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka kemudian dijadikan mitra dalam usaha perdagangan. Orang-orang Tionghoa juga diberi hak untuk menarik pajak dari rakyat, sehingga mempunyai kesempatan untuk menjalankan pemerasan terhadap penduduk. Setelah kedudukannya makin kuat mereka diberikan kedudukan hukum yang setaraf dengan orang-orang Belanda, kecuali dalam tindakan kriminal yang hukumannya tetap disamakan dengan kedudukan hukum penduduk pribumi.<sup>89</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari, bahasa yang umum dipakai oleh orang Tionghoa Palembang adalah bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Cina, Arab, dan bahasa-bahasa daerah setempat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan orang Cina tentang bahasa Melayu terbatas, sehingga dalam penggunaannya dicampur aduk atau digabungkan dengan bahasa lain. Bahasa ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa "Melayu Rendah" atau "Melayu Pasaran".<sup>90</sup>

Penggunaan bahasa Melayu Pasaran ini pada perkembangannya terus mengalami perubahan, terutama pengaruh dari bahasa masyarakat setempat. Bahasa Cina sendiri dalam perkembangannya tidak begitu banyak berpengaruh terhadap bahasa Melayu Palembang. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tata bahasa Cina yang sangat jauh berbeda dengan bahasa Melayu ataupun bahasa daerah setempat.<sup>91</sup> Meskipun demikian banyak juga kata-kata dari bahasa Cina yang diserap oleh bahasa Melayu Palembang seperti kata-kata; *kuntao* (pencak silat), *encek* (sebutan untuk laki-laki Tionghoa yang sudah tua), *encim* (sebutan untuk

---

<sup>88</sup> Wangkang Cina adalah semacam perahu kecil yang mirip dengan kapal atau *Jung* Cina, hanya ukurannya saja yang berbeda. Lihat I.L. Sevenhoven, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>89</sup> Hidayat Z.M., *op. cit.*, hlm. 79.

<sup>90</sup> Bob Widyahartono, *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina* (Jakarta: Pustaka Azet, 1989), hlm. 56; Hidayat Z.M., *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

perempuan Tionghoa yang sudah tua), *amoy* (panggilan untuk perempuan Tionghoa yang masih muda atau gadis), *toke* (panggilan untuk orang-orang yang kaya), *loteng* (kamar atau gudang di bawah atap rumah), *bihun*, *kecap*, *toge*, dan sebagainya.<sup>92</sup>

Dalam bidang pendidikan, orang Tionghoa Palembang pada masa kolonial lebih suka menyekolahkan anaknya di Sekolah Cina Belanda atau *Hollands Chinesche School* (HCS) yang didirikan pemerintah kolonial pada tahun 1920 yang berlokasi di sekitar 7 Ulu Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang.<sup>93</sup> Lama pendidikannya adalah tujuh tahun, kurikulumnya sama seperti Sekolah Rendah Eropa atau *Europesche Lagere School* (ELS), dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.<sup>94</sup>

Pengaruh orang Tionghoa terhadap masyarakat Palembang adalah pempek yang sekarang sudah diklaim sebagai masakan khas Palembang. Pempek pada awalnya dibuat dan diperkenalkan ke khalayak masyarakat Palembang oleh etnis Tionghoa. Awal mula orang Tionghoa di Palembang menciptakan makanan pempek diawali oleh sebab peraturan yang ditetapkan oleh Sultan Palembang yang mengharuskan orang Tionghoa bertempat tinggal di rakit-rakit di sepanjang Sungai Musi. Etnis Tionghoa yang memang memiliki tingkat kreativitas tinggi melakukan inovasi ketika dihadapkan dengan situasi ini. pada saat itu, di sungai Musi masih terdapat banyak ikan belida, maka mereka membuat makanan yang merupakan campuran antara daging ikan belida, sagu, dan air. Ikan belida dipih karena memiliki tekstur yang dapat cepat bercampur dengan sagu dan air.

Makanan ini kemudian mereka jual di sepanjang Sungai Musi dengan menggunakan perahu. Etnis Tionghoa di Palembang dikenal dengan nama "Apek", jadi ketika ada konsumen yang ingin membeli dagangan tersebut mereka memanggil "Apek, Apek, Apek". Setelah itu, makanan ini pun dikenal dengan nama Pempek. Oleh karena ikan belida sudah sulit ditemukan (bahkan sungai-sungai di daerah pun ikan ini jarang ada maka sekarang pempek dibuat dengan ikan Gabus yang lebih mudah ditemukan. Saat ini pempek sudah menjadi makan nasional juga yg mudah didapat di mana saja.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Kemas Ari, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>93</sup> Wilayah ini sekarang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, tidak berapa jauh dari terminal 7 Ulu (bawah jembatan Ampera).

<sup>94</sup> Ma'moen Abdullah, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>95</sup> Erliandy, "Pempek", *Artikel*, 22 Februari 2008.

#### 4. Eksistensi Etnis Tionghoa di Mata Masyarakat Melayu Palembang.

Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa sebagaimana WNI dari etnis lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Mereka merupakan elemen penting di antara kelas menengah dan kelas atas kapitalis Indonesia, usahawan, pedagang, profesional, dan orang terlatih. Tanda keunggulan dalam ekonomi ini merupakan perkembangan dari toko-toko yang dimiliki orang Tionghoa di sepanjang jalan-jalan utama di seluruh kota-kota kecil dan besar Indonesia. Perdagangan eceran merupakan aspek penting dalam kehidupan yang diciptakan masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Meskipun etnis Tionghoa sangat dominan dalam bidang ekonomi, secara politis mereka kurang beruntung. Hal ini disebabkan karena kekuatan ekonomi yang mereka miliki telah menyebabkan kecemburuan sosial dari sebagian pribumi kepada mereka yang mana kecemburuan ini kemudian berubah menjadi sikap antipati. Etnis Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan massa setiap kali terjadi krisis ekonomi di tanah air karena mereka dianggap sebagai penyebab dari krisis tersebut. Beberapa catatan kerusuhan yang terjadi yang telah mengorbankan etnis Cina di antaranya adalah Kasus Ujungpandang, Tragedi Mei 1998, dan Kasus Bagan Siapi-api Riau.<sup>96</sup>

Meskipun golongan etnis Cina sudah berabad-abad tinggal di Indonesia, termasuk di Palembang, serta bergaul secara intens dan luas dengan orang-orang “asli” Indonesia, akan tetapi mereka sampai saat ini belum juga terintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Hal ini, antara lain, dapat dikembalikan pada politik pemerintah Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Penduduk Indonesia waktu itu dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra (Pribumi Indonesia). Dasar hukum yang mengadakan pembedaan tersebut tercantum dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Hak-hak orang Tionghoa (yang tergolong ke dalam golongan Timur Asing) lebih menguntungkan daripada golongan Bumiputra.<sup>97</sup>

Sampai kira-kira tahun 1910, setiap golongan ras ditetapkan tinggal di masing-masing kampung yang terpisah sehingga ada

---

<sup>96</sup> Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), hlm. 8-30.

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 92.

kampung Cina, Arab, Bugis, Melayu, dan lain-lain. Pembatasan terhadap mobilitas badaniah itu, bagi golongan Timur Asing seperti Cina dipertegas dengan keharusan memiliki pas jalan bagi perjalanan dari satu kampung Cina ke yang lain. Sistem pembatasan bergerak itu dikenal sebagai *passenstelsel* dan *wijkenstelsel* (sistem pas jalan dan perkampungan).<sup>98</sup>

Banyak dugaan dan mitos yang mengatakan bahwa golongan penduduk Cina selalu diprioritaskan oleh pemerintah kolonial. Namun, menurut ilmuwan seperti Victor Purcell dan Lea Williams, sebagaimana dikutip oleh Ong Hok ham, justru penguasa kolonial Belanda memiliki sentimen anti Cina yang sangat besar. Sentimen anti Cina ini memuncak pada zaman Politik Etis (1900), ketika Belanda merasa perlu melindungi penduduk pribumi terhadap “kelicinan” Cina. Karena sepanjang sejarah, orang Cina menempati kedudukan sebagai pedagang perantara Eropa dengan pribumi dan mendominasi perdagangan di jalan-jalan utama tiap kota di Jawa.<sup>99</sup>

Pada zaman pemerintahan kolonial, golongan Tionghoa mendapat fasilitas-fasilitas tertentu yang lebih memungkinkan mereka menduduki lapisan lebih tinggi di atas rakyat Indonesia. Ini dimungkinkan oleh peraturan-peraturan yang mengangkat mereka secara ekonomis lebih kuat. Selanjutnya, fakta-fakta lain kian mempertajam masalah ini. Seperti yang terjadi pada masa Perang Kemerdekaan nasional, tidak begitu banyak orang-orang Tionghoa yang memihak kepada Republik, sebagian lain memihak Belanda, sebagian yang lain lagi ada yang berpaling ke negeri leluhurnya (yaitu Tiongkok Kuo Min Tang) dan pada tahun 1950-an ada pula yang memihak Republik Rakyat Cina (RRC). Jadi beberapa faktor yang menyulitkan asimilasi antara orang-orang Tionghoa dengan kaum Pribumi Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:<sup>100</sup>

1. Perbedaan ciri-ciri badaniah, orang Tionghoa memiliki warna kulit yang relatif lebih kuning, mata yang lebih sipit, dan rambut yang lebih lurus dibanding ciri-ciri fisik badaniah yang dimiliki sebagian besar pribumi.
2. *In-group feeling* yang sangat kuat pada golongan Tionghoa, sehingga mereka lebih kuat mempertahankan identitas sosial dan kebudayaannya yang eksklusif.

---

<sup>98</sup> Ong Hok Ham, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 92-93.



3. Dominasi ekonomi yang menyebabkan timbulnya sikap tinggi hati. Dominasi ekonomi tersebut bersumber pada fasilitas yang dahulu diberikan oleh pemerintah Belanda, dan juga karena kemampuan teknis dalam perdagangan serta ketekunan dalam berusaha.

Masalah pembauran orang-orang Tionghoa, baik peranakan maupun totok, dari waktu ke waktu nampaknya tidak dengan mudah dapat diselesaikan. Di sana-sini masih timbul permasalahan. Proses pembauran keturunan Cina yang notabene merupakan pendatang terbesar di Indonesia, masih berjalan lambat dan semu. Ketenangan-ketenangan yang ada seolah-olah hanyalah ketenangan yang ada di atas permukaan saja. Sehingga masalah pembauran ini hanya selesai di kulitnya saja, sedangkan isinya tidak.

Tanpa adanya usaha-usaha khusus ke arah pembauran, golongan Tionghoa sulit sekali membaur karena memiliki banyak sekali perbedaan dengan penduduk pribumi Indonesia, yaitu faktor kepercayaan (agama), adat-istiadat/kebudayaan, status sosial, tingkat penghasilan, pada masa lalu keyakinan politiknya, perasaan superior pada sebagian orang Cina, dan lain-lain.<sup>101</sup> Kenyataan sederhana mengenai perbedaan ras dan keterpisahan sosio-budayanya merupakan titik pangkal tersebamnya rasa permusuhan, kecuali apabila perbedaan kekayaan, peranan ekonomi, tingkat pendidikan dan status sosial telah mewarnai rasa keterpisahan itu dengan kepahitan, rasa iri, atau permusuhan.

Dalam banyak hal hubungan antara masyarakat Melayu Palembang dengan etnis Tionghoa tidak selalu disebabkan oleh fakta perbedaan ras dan keterpisahan sosial budayanya yang berperan, tetapi perasaan subyektif mengenai berbagai hal yang menjadikan hal-hal ini menjadi suatu masalah yang penting. Tidak semua orang Tionghoa lebih kaya atau lebih terpelajar daripada semua orang Melayu Palembang, meskipun pada umumnya cenderung ke arah itu. Kedua golongan tersebut tidaklah homogen melainkan sangat heterogen.

Perbedaan status sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Melayu Palembang pada zaman kolonial, sangat menyakitkan hati, dengan pengisoliran fisik orang-orang Tionghoa dalam "*kamp-kamp*" khusus di kota-kota, dengan kebijaksanaan mengkategorikan mereka di bidang hukum sebagai "Orang Timur

---

<sup>101</sup> Siswono Yudohusodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1996), hlm. 42-43.

Asing” dengan status yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi. Kecenderungan orang Cina Peranakan golongan elite tidak untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat pribumi yang mereka pandang rendah tetapi untuk berasimilasi dengan masyarakat Belanda dan berusaha untuk mendapatkan persamaan hukum, politik, dan sosial dengan kasta yang sedang memerintah.<sup>102</sup>

Hal ini memperdalam adanya rasa perbedaan ras, budaya, dan sosial antara golongan Tionghoa dan pribumi Melayu. Kesadaran tentang adanya perbedaan ras lebih diperdalam lagi dengan tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme dari golongan pribumi, yang sebagaimana juga terjadi di negara-negara lain, bersifat sempit terlebih dahulu sebelum menemukan bentuknya yang lebih matang. Berkembangnya rasa nasionalisme ini telah mengembangkan pula perasaan bangga atas ras Indonesiannya.

Di lain pihak, pada masa akhir dari masa penjajahan, berkembang pula perasaan superior dari golongan Tionghoa, sebagai akibat dari sukses-sukses ekonomi yang mereka dapatkan serta kelebihan-kelebihan perlakuan yang mereka peroleh dari penjajah Belanda. Perasaan superior ini menumbuhkan perasaan kebanggaan ras untuk kemudian melihat rendah pribumi sehingga enggan membaur. Kedua perkembangan tersebut telah lebih menjauhkan jarak antara golongan Tionghoa dan pribumi.<sup>103</sup>

Sikap kebanyakan orang-orang Tionghoa di Indonesia, termasuk Palembang, terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme di Indonesia pada tahun-tahun semasa perang kemerdekaan, juga memperdalam jurang pemisah antara mereka, mempertebal rasa permusuhan dan kecurigaan terhadap orang-orang Tionghoa, yaitu tidak simpati terhadap aspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketidakpastian tentang status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa sesudah kemerdekaan dan keraguan dari orang-orang pribumi mengenai ketulusan hati bahkan terhadap mereka yang memilih kewarganegaraan Indonesia sekalipun, yang cenderung mengekalkan pendapat, bahwa rasa perbedaan ras antara golongan pribumi dengan Tionghoa makin lebih mendalam.

Perasaan dengki antara “orang-orang yang tidak berada” terhadap “yang berada”, tentu saja memainkan peranan. Dari

---

<sup>102</sup> Ong Hok Ham, *op. cit.*, hlm. 21-22.

<sup>103</sup> Siswono Yudohusodo, *op. cit.*, hlm. 44.

waktu ke waktu, setiap anggota masyarakat suatu bangsa, makin menginginkan persamaan, tidak hanya masalah materi semata, tetapi juga di bidang-bidang lain. Keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian serta keinginan untuk ikut serta menikmati hasil kemerdekaan.

Sehubungan dengan perasaan ini ada keyakinan yang umum pada orang-orang pribumi Indonesia bahwa “dominasi ekonomi” orang-orang Tionghoa terhadap negerinya melalui jaringan-jaringan ketat dan ikatan-ikatan perorangan yang tidak dapat diterobos, yang telah memberikan keuntungan yang besar kepada golongan Tionghoa. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, keyakinan semacam ini kelihatannya merupakan gejala yang paling mutakhir dalam sindrom anti orang-orang Tionghoa, makin meluasnya jaringan pedagang-pedagang Tionghoa, dianggap oleh sementara pengusaha pribumi, merupakan rintangan yang serius bagi usahawan-usahawan pribumi Indonesia untuk mengembangkan dirinya.

Aspek ke-tak-suka-an yang serba asing (*xenophobic*), sikap-sikap negatif terhadap lain bangsa yang condong memperkuat rasa pemisahan golongan antara kedua golongan tersebut, ketidakpercayaan diri, iri, ketakutan dan permusuhan di antara kedua golongan tersebut, kecongkakan budaya, penghinaan atau berpandangan rendah terhadap pribumi Indonesia di antara sebagian orang Tionghoa, terutama yang paling *chauvinist*, telah ikut mengembangkan perasaan ketidaksukaan golongan pribumi terhadap golongan Tionghoa.

Faktor lain penyebab ketidaksukaan masyarakat pribumi terhadap orang-orang Tionghoa adalah peranan Islam. Agama yang masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Arab/Persia/Gujarat ini juga telah menumbuhkan pedagang-pedagang Islam Indonesia. Perasaan nasionalisme yang tumbuh di antara mereka dan pandangan agamanya telah memperkuat pandangannya untuk melawan orang-orang yang kafir atau non-Muslim yang umumnya adalah pendatang, baik Belanda maupun Cina. Golongan Islam Nasionalis yang ekstrim akan melihat masalah ini dari pandangan tugas sucinya.<sup>104</sup>

Tempat tinggal golongan Tionghoa yang di banyak tempat selalu bergerombol di satu tempat tersendiri (Pecinan), memberikan kesan eksklusif. Lebih-lebih lagi, ada kesan golongan ini enggan menerima kehadiran golongan lain di tempat

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

tinggalnya. Pusat-pusat perdagangan pada umumnya adalah tempat-tempat tinggal golongan Tionghoa. Pada saat golongan pribumi mulai berkembang di bidang usaha, mereka mulai sadar bahwa pusat perdagangan dikuasai oleh golongan Tionghoa dan mereka enggan membaginya. Hal ini ikut menyuburkan rasa kebencian di antara mereka.<sup>105</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi etnis Tionghoa di mata masyarakat pribumi, termasuk masyarakat Melayu Palembang, yaitu faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor psikologi, faktor budaya, dan faktor keamanan.<sup>106</sup> Di antara semua faktor yang disebutkan di atas, faktor ekonomilah yang paling utama. Kondisi dalam negeri maupun kondisi internasional yang menonjolkan ekonomi dalam kehidupan manusia merupakan sebab utama mengapa faktor ekonomi amat dominan.

Berdasarkan sejarah, orang Tionghoa Palembang sudah berabad-abad tinggal di Palembang. Meskipun nenek moyang mereka dahulu adalah pendatang, orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Palembang saat ini tidak bisa dianggap sebagai pendatang lagi. Mereka sudah merasa dirinya orang Palembang karena sudah bertempat tinggal di Palembang selama berabad-abad. Oleh karena itu masalah kerusakan etnis antara Pribumi dan Tionghoa tidak bisa dianggap sebagai masalah penduduk asli versus penduduk pendatang. Ketika pemerintah Indonesia memindahkan sejumlah keturunan Cina ke RRC pada tahun 1950-an, tindakan itu tidak memecahkan masalah pri-nonpri oleh karena tidak mengenai inti permasalahannya. Sebaliknya tindakan itu justru sangat merugikan bangsa Indonesia, baik di dalam negeri sendiri maupun di dunia internasional, karena dinilai bersikap kurang manusiawi.

Dalam perspektif politik, pada masa pemerintahan Belanda, keturunan Cina digunakan untuk menindas warga Pribumi. Orang Cina dan orang Timur Asing lainnya seperti Arab dan India kemudian mendominasi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah di mana kebanyakan masyarakat Pribumi berada. Secara sistematis pemerintah kolonial Hindia Belanda menyapu bersih kemampuan usaha orang Pribumi, oleh karena kekuatan ekonomi Pribumi dapat membahayakan kekuasaan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>106</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, "Pri-Nonpri dalam Perspektif Integrasi Sosial dan Pemerataan Pembangunan", dalam Moch Sa'dun M. (ed.), *Pri-Nonpri Mencari Format Baru Pembauran* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1999), hlm. 6.

penjajah. Posisi nonpri dalam masyarakat kolonial menjadi kuat, ditambah lagi oleh semangat dan naluri bisnis etnis Tionghoa.

Jadi secara politik orang Tionghoa sengaja diuntungkan Belanda yang jumlahnya sedikit karena mereka memerlukan sekutu untuk menekan pribumi. Hal inilah yang menyebabkan etnis Tionghoa pada umumnya tidak memihak perjuangan bangsa Indonesia, kecuali beberapa kaum idealis seperti perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Palembang.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi masyarakat pribumi, termasuk Melayu Palembang, dalam memandang eksistensi etnis Tionghoa. Ada dua hal yang amat berperan dalam ekonomi itu. *Pertama*, sebagai keturunan imigran yang meninggalkan tanah asalnya karena kesengsaraan dan ancaman penderitaan, maka keturunan Cina amat diliputi *survival instinct* yang. Untuk menjamin *survival*-nya di tempat tinggal baru ia harus sanggup mengembangkan usaha. Naluri bisnis etnis Tionghoa amat kuat yang telah dipupuk berabad-abad lamanya. Persamaan nasib yang dirasakan oleh sesama keturunan Cina menyebabkan mereka kemudian membangun *network* atau jaringan bisnis yang meliputi seluruh Asia Tenggara. Sebaliknya naluri bisnis waraga Melayu Palembang telah dihancurkan oleh penjajah Belanda untuk mencegah timbulnya kekuatan ekonomi Pribumi. Di samping itu masih kuat berlakunya semangat dan sikap feodalisme dalam masyarakat Melayu Palembang menjadi rintangan berkembangnya naluri bisnis. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa perkembangan kemampuan bisnis warga Melayu Palembang relatif baru, kecuali ada satu dua keluarga bisnis yang selamat dari penghancuran oleh Belanda.

Faktor budaya, meskipun tidak sekuat faktor ekonomi, juga turut mempengaruhi pandangan orang Melayu Palembang terhadap etnis Cina. Sikap yang dibawa orang Cina pada umumnya ialah bahwa bangsa Cina adalah yang paling berbudaya dan beradab di seluruh dunia, karena memang mempunyai kebudayaan paling tua di dunia yang masih berlanjut. Ada kecenderungan orang Cina memandang bangsa lain lebih rendah. Hal ini diperkuat oleh kondisi pada masa penjajahan di mana golongan Cina cenderung berasosiasi dengan pihak penjajah dan orang kulit putih pada umumnya, bukan kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun tidak sedikit juga kaum Pribumi yang tidak memihak perjuangan kemerdekaan dan malahan memihak penjajah.

Orang Tionghoa pada masa kolonial lebih suka berasosiasi dengan orang kulit putih, maka kebanyakan orang Tionghoa menjadi penganut Kristen dan hanya sedikit yang beragama Islam. Kalau orang Tionghoa yang beragama Kristen tinggal di lingkungan Pribumi yang juga mayoritas beragama Kristen seperti di Tapanuli Utara atau Sulawesi Utara, tidak ada masalah kesenjangan budaya. Akan tetapi jika mereka tinggal di daerah yang masyarakat Pribumi-nya beragama Islam, seperti halnya masyarakat Melayu Palembang, maka akan terjadi perbedaan budaya yang dapat menimbulkan persoalan. Kelompok non-pribumi yang beragama Islam seperti orang Arab dan India paling mudah membaur dan diterima oleh mayoritas orang Indonesia. Orang Arab dan orang India di Palembang, diperlakukan oleh masyarakat seolah-olah mereka adalah orang Melayu juga karena kesamaan agama yang mereka miliki. Berbeda halnya dengan perlakuan mereka terhadap etnis Tionghoa. Kasus kerusuhan di Palembang dan juga di kota-kota lainnya di Indonesia tidak pernah terjadi kerusuhan anti Arab atau anti India, seperti halnya kerusuhan anti Cina yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena agama merupakan sesuatu yang sangat menyentuh alam perasaan.

Secara psikologi, ada kecenderungan orang Tionghoa bersikap eksklusif terhadap golongan lain, khususnya terhadap pribumi Melayu. Ini disebabkan karena kesadaran mereka tentang keunggulan budaya di satu pihak dan perasaan terancam di pihak lain. Oleh sebab itu, non-pribumi yang agamanya sama dengan mayoritas lingkungannya, soal sikap eksklusif tidak terlalu menonjol. Sikap budaya mempengaruhi sikap dalam bisnis, khususnya menyangkut hubungan antara majikan dan buruh. Dibandingkan dengan orang Jepang dan Indonesia, orang Cina lebih individualistis sifatnya. Oleh karena cenderung untuk berasosiasi dengan Barat, maka dalam bisnis orang Cina Indonesia suka mengambil sikap yang individualistis sekali. Pandangannya kemudian menjadi kapitalistis murni yang dalam urusan bisnis semata-mata mengejar laba (*profit making*) dan kurang memperhatikan bahwa dalam bisnis perlu juga memperhatikan faktor psikologis dan hubungan kemanusiaan.

Hal itu kemudian berefleksi dalam sikap orang Tionghoa sebagai majikan terhadap orang Melayu atau Pribumi lainnya di Palembang yang menjadi buruh atau karyawannya. Tidak jarang ada sikap majikan yang terlalu rasional sehingga oleh karyawan Melayu dirasakan sebagai kejam. Bahkan di kalangan orang

Melayu yang termasuk *personal staff* di satu perusahaan milik etnis Tionghoa sering ada perasaan bahwa pimpinan perusahaan membedakan antara *personal staff* Melayu dan Tionghoa. Hal ini terlihat antara lain dengan membayar *personal staff* Tionghoa lebih tinggi daripada *personal staff* Melayu atau Pribumi, sekalipun mereka menjalankan pekerjaan yang sama. Kalau ada pimpinan yang relatif terbuka, tidak jarang dikemukakan sebagai alasan bahwa orang Melayu tidak mampu bekerja sekuat dan sebaik orang Tionghoa. Terasa sekali bahwa dalam lingkungan Tionghoa yang memimpin perusahaan kurang ada kepercayaan terhadap kemampuan orang Melayu, terutama untuk pekerjaan yang bersangkutan dengan keuangan.

Sikap orang Tionghoa ini didasarkan oleh pengalaman mereka sendiri dalam menghadapi orang Melayu yang duduk dalam lembaga pemerintahan yang kemudian juga menjalar kepada orang Melayu di lingkungan swasta. Sikap orang Melayu yang dianggap tidak jujur, korup, dan ujudah sekali disuap, serta kurang serius dalam bekerja merupakan nilai negatif orang Melayu di mata orang Tionghoa. Penguasa Tionghoa tahu persis apakah seorang pekabat yang ia hadapi dapat disuap dan berapa harga suapnya. Hal ini dimanfaatkan untuk bisnisnya yang dilakukan dengan sikap kapitalistis itu. Akibatnya orang Tionghoa banyak yang menganggap orang Melayu memiliki karakter yang lemah. Orang Tionghoa tidak keberatan atau malahan berusaha menjadi cukong bagi pejabat yang besar kekuasaannya, karena sebagai cukong pejabat penting, ia dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Pengusaha Tionghoa seperti itu di kalangannya dinilai tinggi, karena berhasil menguasai seorang pejabat.

Dalam hal keamanan, berbagai hal menimbulkan kecurigaan para pengatur keamanan terhadap orang Tionghoa. Ada kecurigaan yang memang pada tempatnya, tetapi ada juga yang berlebihan dan dibuat-buat. Kecurigaan utama adalah terhadap sikap orang Tionghoa dalam hubungan antara Republik Indonesia dengan RRC atau Taiwan. Meskipun pemerintah RRC telah menegaskan bahwa keturunan Cina di Asia Tenggara adalah warga negara di mana mereka menetap dan tumbuh, namun tidak dapat dicegah bahwa meskipun berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, seorang Tionghoa dekat hatinya kepada RRC yang merupakan tanah leluhurnya. Apalagi negara RRC sedang berkembang sebagai kekuatan adikuasa, baik dalam arti politik maupun ekonomi dan bahkan mungkin juga dalam arti militer. Mau tidak mau seorang keturunan Cina yang mengadakan investasi besar di RRC,

sekalipun atas dasar perhitungan bisnis semata-mata, berkepentingan dengan kemajuan RRC dan makin luas pengaruhnya di dunia. Dengan begitu investasinya yang besar aman dan malahan menjadi makin berkembang sebagai asetnya.

Kondisi sosial yang dikhawatirkan adalah sikap dari orang Tionghoa tersebut andaikata terjadi sengketa antara Indonesia dan RRC. Apakah dia akan memihak Indonesia atau memihak RRC. Kecurigaan lain adalah dalam kriminalitas, terutama yang bersangkutan dengan bisnis. Sikap orang Tionghoa yang individualis dan kapitalis itu acapkali merangsang perorangan Tionghoa untuk berbuat pelanggaran yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Setiap kali ada bank swasta dilarikan uangnya, seringkali yang berbuat adalah seorang Tionghoa. Di pihak lain harus diakui bahwa seringkali itu terjadi karena dimungkinkan oleh sikap dan kondisi birokrasi dan aparat pemerintah Indonesia sendiri, termasuk pejabat tinggi negara. Kecurigaan yang menyangkut kriminalitas ditambah lagi oleh kenyataan bergerakinya Mafia Cina atau Triad yang mempunyai jaringan luas di Asia Timur dan Amerika Serikat. Jaringan ini khususnya menyangkut perdagangan obat terlarang, peredaran uang palsu, perjudian, dan prostitusi. Kecurigaan terhadap perorangan Tionghoa tidak jarang dimanfaatkan oleh petugas keamanan Melayu atau Pribumi untuk melakukan pemerasan terhadap Tionghoa itu, dan dengan begitu memperkuat lagi penilaian negatif orang Tionghoa terhadap orang Melayu.

Walaupun Indonesianisasi yang dilakukan orang Tionghoa di Indonesia, termasuk Palembang, cukup tinggi, namun orang Melayu Palembang dan Pribumi lainnya masih banyak yang tetap menganggap orang Tionghoa sebagai orang asing yang berbeda dengan mereka. Orang Tionghoa, terutama Tionghoa Peranakan yang mengubah nama Cina mereka menjadi nama yang terdengar seperti nama Indonesia pun tetap dianggap sebagai orang Tionghoa.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Kasus serupa juga terjadi di Malaysia, orang Cina Baba (Peranakan) yang secara budaya telah berbaur dengan Melayu tetap dianggap sebagai orang Tionghoa. Lihat Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 47.



## C. ETNIS TIONGHOA PADA MASA KEKUASAAN FASISME JEPANG

### 1. Palembang pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Palembang menempati posisi yang istimewa dalam strategi politik-militer Jepang di Sumatera. Sumatera bersama Semenanjung Malaya dimasukkan sebagai daerah inti (*nuclear zone*) kawasan selatan. Kedua daerah ini dijadikan prioritas dalam rencana invasi Jepang ke selatan. Di samping letaknya yang sangat strategis bagi kepentingan politik regional Jepang di Asia Tenggara, kedua daerah inti itu juga memiliki kekayaan sumberdaya alam yang dapat mendukung kepentingan ekonomi perang Jepang. Bukti bahwa kedua daerah inti tersebut dianggap penting dikemukakan Admiral Nakamura, salah seorang perwira Jepang yang pernah bertugas di Sumatera, yang mengatakan “mundur dari Sumatera berarti kehilangan Hindia Belanda secara keseluruhan”. Pandangan tersebut secara tidak langsung mengurangi peran Jawa sebagai jantung kolonial Hindia Belanda atau *the cradle of colonialism*.<sup>108</sup>

Jauh sebelum bangsa Jepang dan mesin perang mereka bergerak memasuki Kepulauan Nusantara, para pemimpin pergerakan pejuang kebangsaan, dan kaum priyayi, sebagian terbesar telah menyimpan keyakinan yang dalam, yaitu suatu saat kelak “sang pembebas” atau “Ratu Adil” akan tiba membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Mitos yang begitu lama mengakar secara batiniah seperti itu semata-mata bukan monopoli rakyat biasa yang tidak berpendidikan, tetapi juga kaum cerdik pandai dan kaum yang telah mengenyam sekolah modern. Kepercayaan dan kekaguman yang amat sangat terhadap sesuatu yang abstrak tidak lain karena dilatarbelakangi ketidakberdayaan dan traumatik begitu menekan, akibat masa penjajahan yang begitu lama.

Ancaman penyerbuan balatentara Jepang membuat hampir semua penduduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda, terutama orang Belanda dan kaum Indo, dihindangi perasaan ketakutan massal. Lubang-lubang perlindungan, panitia-panitia pertolongan korban perang, latihan-latihan penanggulangan bahaya udara dan lain-lain upaya penyelamatan adalah partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk rasa takut terhadap Jepang. Kegiatan seperti ini lebih ditingkatkan lagi menyusul kabar buruk keberhasilan Jepang menghancurkan Bandar Mutiara (Pearl Harbor), pangkalan laut Amerika Serikat di Pulau Oahu Selatan, Hawaii, tanggal 7 Desember 1941, penguasaan atas Guam 10

---

<sup>108</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 227-228.

Desember 1941, Wake tanggal 23 Desember 1941, dan tanggal 25 Desember 1941 menguasai sepenuhnya wilayah Hong Kong.<sup>109</sup>

Pendapat umum di Indonesia terpecah belah, satu sisi ikut tenggelam dalam keresahan Belanda dan sisi lainnya malah sebaliknya, kagum dan bangga atas kemenangan bangsa Asia itu. Kelompok yang terakhir ini terpengaruh oleh propaganda Jepang yang disampaikan melalui radio resminya NHK (*Nippon Jonso Kyokai*) seksi bahasa Indonesia, yang dalam ulasan-ulasannya memberikan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Jepang menggunakan perasaan anti-Belanda dan perasaan nasional yang terdapat pada bangsa Indonesia. Siaran-siaran radio Tokyo dalam bahasa Indonesia selalu menutup siaran mereka dengan lagu Indonesia Raya. Pembuktian-pembuktian lain tentang kejayaan Jepang selalu terdengar, yaitu munculnya peristiwa-peristiwa tragis yang menimpakekuatan bangsa Barat yang sebelumnya tidak mungkin terkalahkan, bahkan dalam mimpi sekalipun.

Satu persatu dominasi kolonialisme bangsa Barat di Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang. Dimulai dengan jatuhnya Singapura tanggal 10 Februari 1941, yang disebut sebagai benteng kejayaan Barat (Inggris) di pertahanan Asia Tenggara. Peristiwa ini sangat besar pengaruhnya terhadap tanah jajahan lainnya, terutama Hindia Belanda. Pasukan Jepang yang menyerbu ke Asia Tenggara dipimpin oleh Panglima Armada II, Lksamana Madya Nobutake Kondo. Pasukan ini dibagi dua, yaitu untuk wilayah timur dibawah pimpinan Laksamana Muda I Takahashi, Panglima Armada III, yang meliputi wilayah Filipina, Selat Makasar, Laut Jawa hingga ujung timur. Untuk wilayah barat dipimpin oleh Panglima Armada Ekspedisi Selatan, Laksamana Madya J. Ozawa, yang meliputi daerah Laut Cina Selatan, Semenanjung Melayu, dan Sumatera.<sup>110</sup>

Khusus untuk penetrasi militer Jepang ke Hindia Belanda, mereka membagi tiga kekuatan. Kekuatan Tentara ke-25 menduduki Sumatera (dan Malaya), bermarkas di Singapura (*Shonanto*) dan pusat pemerintahan untuk Sumatera di Bukittinggi. Pulau Jawa dan Madura dikuasai kekuatan Tentara ke-16 yang bermarkas di Jakarta. Untuk wilayah Indonesia yang lainnya menjadi kekuasaan Angkatan Laut Jepang, bermarkas di Makasar. Perembesan kekuatan militer mereka begitu rapi dan cepat berkat pengalaman kemenangan demi kemenangan pada perang-perang sebelumnya. Menghadapi Cina tahun 1895 dan

---

<sup>109</sup> Abi Hasan Said, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera* (Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992), hlm. 23-24,

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Rusia tahun 1905, Jepang meraih kemenangan besar. Jepang berhasil menduduki Semenanjung Korea dalam perang melawan Cina tersebut, dan kendatipun tidak sampai menguasai daratan besar untuk memaksa Cina menerima kehendak Jepang, namun Cina akhirnya harus mengakui perluasan Imperium Jepang pada tahun 1905. Kemenangan-kemenangan besar ini merupakan modal dalam memulai Perang Dunia II melawan musuh utamanya, yaitu Amerika Serikat yang mengomandani pasukan Sekutu.

Hanya beberapa hari setelah menaklukkan Singapura, rembesan pasukan Jepang pun memasuki Palembang pada tanggal 12 Februari 1942. Sebanyak 700 pasukan payung diterjunkan dari udara. Isyarat sebelumnya ditandai dengan suasana hiruk pikuk para serdadu asing yang panik dan ketakutan ketika melintasi sepanjang jalan baru di 7-Ulu Kertapati. Mereka adalah para serdadu anggota pasukan ABDA (Persekutuan Pertahanan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia) yang kalah perang dan diliputi perasaan tak menentu sebelum tiba saatnya harus menjadi tawanan atau sasaran pembantaian Jepang. Tentara Jepang menyusup bagaikan siluman, baik yang didaratkan dari Sungai Musi maupun yang diterjunkan dengan parasut dari pesawat udara. Kedatangan tentara Jepang telah membawa suasana hiruk pikuk dan keonaran. Hari-hari pertama di Palembang ditandai dengan toko-toko dan pusat perbelanjaan di Pasar 16-Iilir yang dijadikan sasaran penggerebekan dan perampokan yang rakus dan kasar.

Kota Palembang menjadi gempar. Dalam keadaan yang kosong kekuasaan, rakyat telah berbondong-bondong menyerbu toko-toko yang berada di sepanjang jalan Pasar 16-Iilir dengan teriakan-teriakan “*calooi-calooi-calooi*” dan “hidup Dai Nippon”, mengambil apa saja yang bisa mereka ambil. Polisi-polisi kolonial sudah tidak berdaya untuk mencegah “perampokan-perampokan” ini, sedangkan serdadu Jepang sibuk dengan pembersihan kekuatan militer Belanda dan Sekutu di seluruh pelosok kota. Walaupun kehadiran balatentara Jepang telah menamatkan penjajahan Belanda dari muka Bumi Pertiwi, namun eksesekses yang ditimbulkan mau tidak mau akhirnya menjadi beban masyarakat. Dengan keberhasilan menduduki Palembang ini, terbukalah jalan penyerbuan bagi Jepang ke Pulau Jawa.<sup>111</sup>

Setelah berhasil menduduki seluruh wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda, Jepang kemudian membagi Indonesia dalam tiga daerah pemerintahan yaitu;

---

<sup>111</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 1.

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 di Pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia.
3. Pemerintahan Militer Angkatan laut Armada ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, dengan pusatnya di Makasar.<sup>112</sup>

Jepang menyusun administrasi pemerintahan militer dengan bentuk permanen di Sumatera sejak bulan September 1942. Jumlah orang Jepang, baik sipil maupun militer, di Sumatera waktu itu sekitar 75.000 orang, jauh lebih banyak daripada di Jawa. Sesuai dengan sifatnya, Jepang tidak terlalu berkepentingan membangun birokrasi “rumit” seperti yang pernah dikembangkan Belanda. Untuk sementara mereka masih mengikuti “warisan” susunan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, tetapi dengan istilah-istilah bahasa Jepang.

Langkah-langkah yang diambil oleh panglima Tertinggi Angkatan Darat ke-25 yang berkedudukan di Bukittinggi adalah sebagai berikut; Panglima Tertinggi Angkatan Darat ke-25 membentuk pemerintahan sipil yang terdiri dari *syuugun* (keresidenan), *bunshyu* (sub keresidenan), *gun* (distrik), dan *son* (subdistrik). Sementara itu, oleh pemerintah militer Jepang, Sumatera dibagi dalam sepuluh *syuu*, yaitu Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Bangka/Belitung. Masing-masing *Syuu* mempunyai Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, dan Departemen Sosial. Tiap-tiap *syuu* dikepalai oleh seorang *Syuuchoo*. *Gunseikanbu* (Staf Pemerintahan Militer) dibentuk pada pertengahan tahun 1943 yang berkedudukan di Bukittinggi, dengan mempunyai sebelas departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pembukuan, Departemen Penerangan, Departemen Pemindahan dan Pengiriman, dan Departemen Meteorologi.<sup>113</sup>

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah militer yang berkedudukan di Bukittinggi dalam bidang pemerintahan, maka pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan dapat berpedoman sebagai berikut; Palembang dan Bangka-Belitung adalah sebagai *syuu*. Tiap-tiap

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 5, 151.

<sup>113</sup> Ma'moen Abdullah *et al.*, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan* (Palembang: Depdikbud Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan, 1991/1992), hlm. 155; Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 156.

*syuu* terbagi atas *bunsyuu*, *bunsyuu* terbagi atas *gun*, dan *gun* terbagi atas *son*. Tiap-tiap *syuu* dikepalai oleh *syuucookan*, *bunsyuu* dikepalai oleh *bunsyuucoo*, *gun* dikepalai oleh *guncoo*, dan *son* dikepalai oleh *soncoo*. Kedudukan *syuucookan* dapat disamakan dengan Residen; *bunsyuucoo* sama dengan Asisten residen; *guncoo* sama dengan Wedana/Demang; dan *soncoo* sama dengan asisten wedana atau camat.

Di samping kedudukan-kedudukan tersebut di atas ada juga kedudukan sebagai *syicoo* (Walikota) untuk kota seperti Palembang *Syi* (Kotapraja Palembang). *Syi* mempunyai administrasi sendiri dalam *syuu*. Kedudukan *syicoo* langsung berada di bawah *syocookan*.<sup>114</sup> Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan yang disediakan untuk orang Indonesia pada umumnya hanyalah jabatan sebagai Wedana dan Asisten Wedana. Di luar dari jabatan-jabatan itu diduduki oleh bangsa Jepang. Pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan di Palembang di antaranya ialah Letnan Jenderal Myako Tosio sebagai *Cookan/Syuucookan*, Matsubara sebagai *Soomubucoo*, R. Mutoro dan R.M. Mursodo sebagai pejabat dari Kepolisian, dan Asaari sebagai pejabat Kepala Kepolisian. Sebagai ibukota Keresidenan Palembang, di Palembang, juga terdapat kantor *Gubseibu*. Departemen-departemen yang ada di Palembang ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, dan Departemen Kesejahteraan Sosial.<sup>115</sup>

Jepang menilai Pulau Sumatera memiliki “keunikan” tertentu dibanding Jawa. Jepang juga menyadari adanya perbedaan internal di antara masing-masing daerah administratif di Sumatera. Jepang memperkenalkan administrasi pemerintahan militer pada bulan September 1942 dan segera terlihat perbedaan dengan gaya pemerintahan sebelumnya.

Pemisahan Sumatera dari Jawa dan penggabungan Sumatera dengan Semenanjung Malaya setidaknya-tidaknya mencerminkan visi Jepang mengenai peranan penting kedua daerah tersebut, khususnya dari sudut ekonomi dan militer. Sumatera merupakan “daerah inti” dan, menurut Jepang, kehilangan pulau ini berarti kehilangan Indonesia.<sup>116</sup> Dari sisi strategi militer, Jepang memperkirakan ancaman musuh (Sekutu) datang dari perairan Selat Malaka. Pertahanan utama Jepang terletak di kawasan itu, sehingga penggabungan Sumatera dengan Malaya lebih diutamakan daripada dengan Jawa. Jepang memiliki perhatian ekonomi berbeda terhadap Sumatera dan Jawa. Pulau Sumatera kaya dengan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan dalam

---

<sup>114</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 I* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 448.

<sup>115</sup> Ma'moen Abdullah *et al.*, *op. cit.*, hlm. 155-156.

<sup>116</sup> Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 233.

menunjang ekonomi perang Jepang. Karet, minyak bumi, timah, batubara, dan bauksit Sumatera mampu menjaga mesin-mesin perang Jepang tetap dapat terus berjalan. Jepang sendiri giat mengupayakan swasembada pangan di Sumatera. Sedangkan potensi ekonomi Pulau Jawa yang kaya beras dan berpenduduk padat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan dan tenaga kerja paksa untuk proyek-proyek Jepang di dalam dan di luar pulau ini.<sup>117</sup>

Visi Jepang tentang perbedaan kondisi internal daerah-daerah di Sumatera juga ikut menentukan keterlibatannya di masing-masing daerah. Penduduk Minangkabau dan Aceh dianggap memiliki kemampuan atau kecerdasan politik yang lebih tinggi, sama seperti partisipasi politik masyarakat daerah ini yang jauh lebih luas dibanding kelompok etnis mana pun di Sumatera.<sup>118</sup> Sementara itu, daerah Palembang lebih dipentingkan dari segi potensi ekonominya, terutama minyak bumi. Pandangan demikian mewamai bentuk keterlibatan Jepang di masing-masing daerah. Jepang banyak melakukan kompromi politik dengan pemimpin-pemimpin Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Barat. Sebelum melakukan invasi, Jepang sudah lebih dahulu menjalin kontak dengan kelompok PUSA (Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh) di Aceh dan kelompok Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Sejumlah pemimpin Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Barat juga aktif menjalin kontak bersifat rahasia dengan “Kolonel Kelima” (*Fujiwara Kikan*) yang berkedudukan di Penang.<sup>119</sup> Sementara gerakan-gerakan lokal, khususnya yang bergerak di Kota Padang dan Bukittinggi, sejak awal berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin pengaruh Sukamo. Mereka berhasil membentuk badan perjuangan *Pemuda Nippon Raya* yang seolah-olah pro-Jepang, tetapi sesungguhnya lebih banyak berperan mengkoordinasikan anggota-anggota pergerakan lokal yang tumbuh sebelum Perang Dunia II.<sup>120</sup>

Kondisi Palembang berbeda dengan tetangganya di bagian utara. Tujuan ekonomi perang Jepang di Palembang jauh lebih penting daripada membangun kerjasama politik. Jepang berusaha semaksimal mungkin mengamankan sumber-sumber daya yang dianggap strategis tanpa perlu melakukan kompromi politik dengan para pemimpin lokal

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 233-234.

<sup>118</sup> Lebra, Joyce C., *Tentara Gemblengan Jepang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 130-132.

<sup>119</sup> Anthony J.S. Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 84ff.

<sup>120</sup> Audrey Kahin, “Some Preliminary Observation on West Sumatra during the Revolution,” dalam *Indonesia*, No. 19 (October 1974), hlm. 77-117.

Palembang. Mereka menyita semua “warisan” milik bekas pemerintahan Hindia Belanda. Setiap orang yang dianggap menghambat atau memperlambat pengambilalihan kekuasaan dan kekayaan pemerintah Hindia Belanda dihadapi dengan tindakan keras.

Pemimpin pergerakan di Palembang diselimuti banyangan ketakutan terhadap tindak kekerasan Jepang. Rezim baru ini secara sengaja sering mempertontonkan kekerasan terhadap Sekutu di depan umum dengan menghina untuk memupuk kebencian rakyat terhadap Sekutu. Lambat laun tindak kekerasan juga menimpa penduduk Bumiputera. Beberapa minggu setelah menduduki Palembang, Sukarno yang kebetulan singgah dalam perjalanan menuju Jakarta menuturkan “... *with my own eyes I've seen them repeatedly slap Indonesians ...*” (di depan mata saya sendiri saya men yakikan mereka berulang kali menampar orang Indonesia).<sup>121</sup> Sebagian besar pemimpin Palembang akhirnya memilih untuk menghindari dari provokasi Jepang. Mereka enggan tampil terbuka di depan umum.

Pada awal kedatangan Jepang di Palembang inilah muncul Dokter Adnan Kapau Gani, tokoh pergerakan nasional dan politisi yang memimpin tugas-tugas sosial dan medik bagi para korban keganasan perang. Pekerjaan kemanusiaan ini walaupun bisa dilakukan oleh banyak orang, tetapi di dalam keadaan yang tidak menentu seperti itu tidak ada perasaan lain yang berkembang di masyarakat kecuali rasa panik dan kebencian. Inisiatif Bung Gani (panggilan akrab Dr. A.K. Gani) membentuk kelompok-kelompok kerja sosial dan pertolongan itu, membangkitkan orang-orang di sekitarnya untuk bersikap tidak masa bodoh. Kelompok kemanusiaan yang dibentuk diberi nama PKO (Penolong Keamanan Oemoem) bertugas memberikan pertolongan kepada para korban perang. Para korban perang tersebut ditempatkan di Sekolah Methodist yang terletak di Jalan Tengkurak. Di tempat ini anggota masyarakat bahu-membahu menanggung beban perang yang tidak dikehendaki. Besar sekali andil para medik dan perawat yang tergabung dalam wadah PKO ini, di antaranya suster Emma dan R.A. Eha yang membantu Bung Gani di rumah sakit darurat itu.<sup>122</sup>

Kedatangan balatentara Jepang di Palembang pada mulanya disambut dengan gembira oleh masyarakat, walaupun sebenarnya sudah merasa sakit dan benci oleh perilaku yang tidak senonoh dari tentara Jepang. Masyarakat Palembang menyambut Jepang sebagai *Liberator* (pembebas), yang akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan kolonial

---

<sup>121</sup> Cindy Adams, *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams* (New York: The Bobs Merril Company Inc., 1965), hlm. 168.

<sup>122</sup> Abi Hasan Said, *op. cit.*, hlm. 27-28.

Belanda.<sup>123</sup> Setelah Palembang jatuh ke tangan Jepang, pemuka-pemuka Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) seperti Dr. A.K. Gani, Nungcik A.R., A.S. Sumadi, dan tokoh-tokoh dari Partai Indonesia Raya (Parindra) seperti Dr. M. Isa, telah bersepakat mencari Bung Karno yang ditahan di Sumatera Barat. Bung Karno dibebaskan dari pengasingannya di Padang oleh balatentara Jepang dalam bulan Maret 1942 dan pada awal bulan Juli 1942 dibawa ke Jakarta melalui Palembang.<sup>124</sup>

Sebelum diantar ke Jakarta dengan mempergunakan perahu motor kecil oleh pemuda-pemuda Gerindo, selama Bung Karno berada di Palembang diadakan perundingan. Hasil perundingan di antaranya adalah sebagai berikut, Kesatuan dan persatuan di kalangan segenap pemimpin dalam menghadapi fasisme Jepang agar dipelihara; hubungan dengan masyarakat agar diusahakan terpelihara; dan gerak langkah baik secara legal ataupun secara illegal agar diatur.<sup>125</sup>

Setelah berada kembali di Jawa, Bung Karno segera menghubungi Bung Hatta dan Sutan Syahril, yang keduanya telah bersentuhan dengan gerakan di bawah tanah yang disusun oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Dermawan Mangunkusumo. Secara timbal balik diputuskan bahwa perjuangan nasional yang terbaik harus ditempuh dengan dua cara, yaitu bekerjasama atau mengadakan perlawanan. Bung Karno dan Bung Hatta mengambil langkah bekerjasama dengan Jepang. Sutan Syahril dengan memelihara kontak dengan mereka itu menyusun suatu perlawanan di bawah tanah.<sup>126</sup>

Pada akhir tahun 1942 di Sumatera Selatan timbul perlawanan rakyat di daerah Air Hitam Sekayu, menentang Jepang. Perlawanan yang dilakukan berupa penembakan secara tiba-tiba terhadap rombongan pemerintah militer Jepang yang sedang melakukan peninjauan menggunakan perahu. Najmuddin yang turut dalam rombongan itu kena peluru. Jepang kemudian mengambil tindakan atas peristiwa ini dengan menangkap, memenjarakan, dan menyiksa para pemimpin PSII di daerah ini, seperti A.S. Matcit dan Hamzah Kuncit beserta banyak anggotanya. Di samping itu ditangkap juga Dr. A.K. Gani dan Inspektur Polisi R. Mutoro. Mereka berdua disiksa pula, R. Mutoro bahkan dibunuh setelah disiksa.<sup>127</sup>

---

<sup>123</sup> M.A. Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia* (The Hague: M. Nihoffm 1955), hlm. 149.

<sup>124</sup> Ma'moen Abdullah *et al.*, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> George Mc. Tuman Kahin, *Nationalisme and Revolution in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1963), hlm. 10.

<sup>127</sup> Ma'moen Abdullah *et al.*, *op. cit.*, hlm. 157.



Setelah mengalami kekalahan di beberapa medan pertempuran Perang Pasifik Raya menghadapi Sekutu, Jepang mulai mengubah politiknya terhadap Indonesia. Rakyat Indonesia dijanjikan kemerdekaan dan diminta memberi bantuan semaksimal mungkin segala sesuatu untuk kepentingan perang seperti bahan makanan, tenaga Romusha, barisan-barisan perlawanan berupa Heiho dan Gyugun. Di Palembang, untuk maksud ini Cookan Letnan Jenderal Myako Tosio mengizinkan Asaari, Kepala Pengadilan Palembang, untuk mengadakan kontak dengan pemimpin-pemimpin daerah. Kesempatan yang baik ini dipergunakan sepenuhnya oleh Asaari. Orang yang pertama kali dihubungkannya ialah Kepala Resakdi Palembang Shinbun, Nungcik Ar, dengan tujuan mengusahakan pembentukan semacam Hoakaakai di Palembang. Mereka kemudian mengadakan beberapa perundingan dengan pegawai-pegawai negeri dan pamong. Nungcik Ar mengadakan perundingan dengan pemuka-pemuka daerah dan pemuda.

Setelah melalui perundingan-perundingan, termasuk dengan Jepang, terbentuklah di Palembang Badan Kebaktian Rakyat (BKR). Badan ini merupakan Front Persatuan Nasional di daerah ini dan besar peranannya dalam menyambut permulaan Revolusi Nasional tahun 1945. Para Pegawai Negeri dan pemuka-pemuka pergerakan daerah bersatu-padu dalam BKR. Fr. A.K. Gani seorang tokoh pergerakan daerah terkenal, setelah keluar dari penjara segera aktif dalam BKR.<sup>128</sup>

Keadaan sosial penduduk Palembang pada masa pendudukan Jepang pada umumnya sangat menderita. Kondisi sosial rakyat sangat buruk. Penduduk Sumatera Selatan yang sebagian besar bertani, diharuskan menanam padi di sawah, tetapi hasilnya sebagian harus disetorkan kepada Jepang, Barang-barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan pangan, termasuk rokok, oleh Jepang disimpan di gudang. Barang-barang itu dibagiakan dengan sistem distribusi melalui penyalur yang ditunjuk. Sebagian besar penduduk mengalami kekurangan sandang dan pangan. Oleh karena pakaian sukar didapat, rakyat terpaksa memakai karung goni atau kulit kayu sebagai pakaian. Para Romusha atau kuli BPP (Badan Pembantu Pemerintah), sebutan terkenal di Sumatera Selatan, sangat menyedihkan. Upah, makanan, dan kesehatan mereka kurang diperhatikan oleh Jepang. Akibatnya banyak di antara mereka yang meninggal dunia di tempat mereka bekerja. Sebagai buruh paksa mereka dipekerjakan di beberapa tempat untuk membangun bangunan yang berhubungan dengan kepentingan perang Jepang, seperti jalan-jalan, benteng-benteng, lapangan kapal terbang, dan sebagainya di

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

Sekojo, Plaju, Mariana, dan di tempat-tempat lain yang dianggap penting.

Nasib buruh, pegawai negeri yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi Jepang hampir sama dengan yang diderita kuli BPP. Mereka juga menderita kurang makanan dan kurang pakaian. Upah buruh dan pegawai negeri di instansi-instansi Jepang pada umumnya sangat rendah, sementara jam kerja diperpanjang. Buruh perkebunan diperbolehkan tetap berda di perkebunan atau tetap bekerja pada perkebunan tetapi mereka harus menyediakan waktunya untuk menanam tanaman yang menghasilkan bahan makanan di samping melakukan tugasnya.

Pemerintahan pendudukan militer Jepang juga telah mengubah kehidupan ekonomi perang. Prioritas pertama diarahkan kepada sumber-sumber bagi kepentingan usaha-usaha perang dan prioritas kedua kepada kepentingan memenuhi kepentingan kebutuhan sendiri bagi Dunia Kemakmuran Bersama Asia.

Untuk mendapat pasokan bahan bakar bagi pesawat terbang dan kapal-kapal, setelah berhasil menduduki Palembang, Jepang mengadakan perbaikan pabrik penyulingan minyak bumi yang berpusat di Plaju dan Sungai Gerong yang rusak akibat siasat bumi hangus. Sungai Gerong lebih parah rusaknya daripada Plaju. Untuk memperbaikinya, banyak tenaga romusha/BPP, baik dari dalam maupun dari luar Sumatera Selatan yang dikerahkan, di samping buruh yang dimiliki oleh perusahaan itu.

Siasat bumi hangus juga terjadi di Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Tanjung Enim). Banyak pula romusha/BPP yang dipekerjakan di perusahaan ini. Meskipun sudah dilakukan perbaikan, produksi minyak bumi dan batubara menurun pada masa pendudukan Jepang.

Perusahaan perkebunan kina dan karet di Sumatera Selatan pada umumnya masih melakukan kegiatannya meskipun tidak segiat sebelum pendudukan Jepang. Perusahaan perkebunan kina terdapat di Karinjing, perkebunan karet terdapat di Sungai Laru, Tebat Gunung, dan Malani. Perusahaan perkebunan teh dan kopi umumnya juga mundur, bahkan ada yang menghentikan kegiatannya. Perusahaan perkebunan teh terdapat di Gunung Dempo dan Tanjung Keling. Perusahaan perkebunan kopi terdapat di Padang Karet dan Kebun Pagaralam.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan makanan, pemerintah pendudukan militer Jepang meningkatkan produksi beras. Daerah-daerah penanaman padi dibuka di perusahaan perkebunan yang menghasilkan bukan hasil pokok

bagi kepentingan usaha-usaha perang Jepang. Perkebunan yang dialihfungsikan sebagai tempat penanaman padi tersebut di antaranya adalah perkebunan kopi di padang karet, Kebun Pagaralam, dan di tempat lainnya. Di samping itu juga dibuka daerah baru sebagai tempat penanaman padi di Sumatera Selatan.

## 2. Kebijakan Fasisme Jepang terhadap Etnis Tionghoa

Penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama pribumi, pada masa pendudukan Jepang, menyebabkan rasa tidak senang masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa yang dianggap oleh sebagian masyarakat dekat dengan penguasa Jepang. Terdapat persepsi dari masyarakat luas di Indonesia bahwa sewaktu zaman pendudukan Jepang dan zaman Revolusi Fisik, orang-orang Tionghoa tidak menunjukkan loyalitas terhadap perjuangan bangsa Indonesia, sehingga banyak kaum pribumi yang jengkel waktu itu disebabkan tingkah mereka. Sampai-sampai terbit dalam hati sesuatu perasaan bahwa orang-orang Tionghoa lebih berbahaya daripada Belanda.<sup>129</sup>

Persepsi masyarakat luas tersebut sebenarnya terlalu berlebihan, tanpa memahami berbagai latar belakang yang kompleks, termasuk mengabaikan heterogenitas di dalam golongan Tionghoa itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri pula sumbangan orang-orang Tionghoa terhadap berdirinya negara Indonesia. Periode Jepang cukup penting untuk dibicarakan, mengingat zaman ini banyak melatarbelakangi apa yang dilakukan golongan Tionghoa pada masa Revolusi Fisik.

Setelah berkuasa di Indonesia, Jepang memiliki berbagai rencana untuk golongan Tionghoa, mulai dari rencana untuk memusnahkan, mengusir, dan yang paling lunak adalah memaksa mereka untuk bekerjasama. Jepang menganggap kesetiaan Tionghoa perantauan ada pada pemerintah Cina di Chungking (Chiang Kai-shek). Supaya mau bekerjasama dan sekaligus menyatakan kesetiannya pada Jepang, maka didirikan sebuah negara boneka di Nanking di bawah pimpinan Wang Ching-wei (1940). Dengan adanya rezim baru ini diharap kesetiaan golongan Tionghoa perantauan berpindah dari Chiang ke Wang.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Didi Kwartanada, "Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa 1942-1945", dalam Seri Siasat Kebudayaan, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 25; Umar Hasyim, *Islam bukan Penghalang Pengasiatenggaraan Orang-orang Tionghoa* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 32.

<sup>130</sup> Sutan Sjahrir, *Renungan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1947), hlm. 163.

Untuk mempengaruhi golongan Tionghoa di Indonesia, Jepang menyebarkan agen-agen intelijennya ke dalam masyarakat Tionghoa. Selain menyebarkan propaganda, agen-agen Jepang ini bertugas untuk meredam perasaan dan suara-suara anti-Jepang dalam masyarakat Tionghoa. Aksi ini dikoordinasikan dari Konsulat Jepang di Batavia.<sup>131</sup> Aksi ini ternyata tidak banyak membawa hasil karena kuatnya perasaan anti-Jepang dalam masyarakat Tionghoa.

Untuk mengawasi orang-orang Tionghoa, Jepang mendirikan Kantor Urusan Tionghoa (*Kakyo Han*) yang merupakan *think tank* pemerintah untuk masalah Tionghoa.<sup>132</sup> Supaya tidak melakukan perlawanan, golongan Tionghoa langsung di bawah pengawasan ketat *kenpeitai* (polisi rahasia). Setelah merasa sanggup mengamankan situasi di kalangan Tionghoa, pada acara peringatan enam bulan pendudukannya, Jepang mengumumkan secara resmi bahwa golongan Tionghoa tidak dianggap sebagai musuh selama mereka mau bekerjasama.<sup>133</sup>

Pada prinsipnya kebijakan Jepang terhadap golongan Tionghoa adalah bagaimana mengeksploitasi mereka semaksimal mungkin untuk membantu jalannya pperangan. Untuk itu mereka memerlukan suatu badan yang dapat berfungsi demikian. Di berbagai tempat sesudah Juli 1942 didirikan sebuah organisasi Orang Tionghoa yang disebut *Hoa Chiao Chung Hui* (HCCH) atau dalam bahasa Jepang disebut *Kakyo Sokai*.<sup>134</sup> Organisasi ini adalah satu-satunya perkumpulan orang-orang Tionghoa yang diakui oleh pemerintah. Di dalamnya berkumpul Cina Peranakan dan Cina Totok sekaligus, karena Jepang memandang kedua golongan itu sama. Keputusan ini cukup kontroversial karena sebelum perang Cina Peranakan dan Cina Totok tidak pernah bisa berkumpul dalam satu organisasi induk.<sup>135</sup> Pengurusnya ditunjuk oleh Jepang dan bertanggungjawab kepada komandan militer setempat. Susunan pengurus mewakili berbagai latarbelakang golongan, peranakan, totok, dan berbagai macam perkumpulan. Tugas HCCH adalah mengumpulkan uang untuk kegiatan perang Jepang; mengurus Tionghoa miskin atau

---

<sup>131</sup> Pejabat Jepang di konsulat itu adalah wakil konsul Atary Toyoshima yang agaknya merupakan pemimpin dari operasi ini. Agen yang paling terkenal adalah Tomegoro Yoshigumi, yang kelak pada masa revolusi berjuang di Pihak Republik dan tewas ditembak Belanda. Lihat M.A. Azis, *op. cit.*, hlm. 105 & 139.

<sup>132</sup> Didi Kwartanada, *op. cit.*, hlm. 29.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 30; Justus M. Vander Kroef, *Indonesia in the Modern World Part I* (Bandung: Tanpa Penerbit, 1954), hlm. 238.

<sup>134</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti, 1986), hlm. 4-16.

<sup>135</sup> Mary F.A. Sommer, "Peranakan Chinese Politics in Indonesia". *Ph.D Dissertation* (Ithaca: Cornell, 1965), hlm. 106-107.

korban perang (pengungsi dari daerah lain), dan mengelola sekolah Tionghoa. Jepang sama sekali tidak mau membantu organisasi ini, seluruh biaya operasional ditanggung oleh masyarakat Tionghoa.

Sejak awal kedatangannya, Jepang menggolongkan orang Tionghoa sebagai *bangsa asing*, yaitu dengan Undang-undang nomor 7 tanggal 11 April 1942.<sup>136</sup> Seiring dengan itu mereka diharuskan membayar *pajak bangsa asing*, untuk laki-laki f.100 dan perempuan f.50. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, maka Jepang memperbolehkan pembayaran dengan cara dicicil.<sup>137</sup> Dapat dibayangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu keluarga yang memiliki banyak anak yang sudah menjelang dewasa. Sering terjadi beberapa keluarga Tionghoa terpaksa menjual harta bendanya (rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk membayar pajak ini. Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu urusan pembayarannya ditanggung bersama oleh masyarakat Tionghoa lewat HCCCH.

Orang-orang Tionghoa dewasa jika hendak bepergian, mereka diharuskan membawa kartu pengenalan bangsa asing, bila mereka tidak punya atau lupa membawa akan fatal akibatnya. Pearturan surat jalan untuk golongan Tionghoa (*passenstelsel*) yang sudah dihapus oleh Belanda pada awal abad ke-20 dihidupkan kembali. Untuk memperoleh surat jalan ini, harus membayar sejumlah uang.

Di samping berbagai kebijakan yang menyulitkan golongan Tionghoa, Jepang juga menjalankan politik budaya *resinifikasi* dengan cukup gencar, supaya dapat mengambil hati golongan Tionghoa. Hari Raya Imlek dijadikan hari libur, musik tradisional Tionghoa dimainkan di radio pemerintah, dan juga film-film mandarin diputar di gedung-gedung bioskop. Orang Tionghoa harus dapat menuliskan namanya dalam huruf Cina, sesuatu hal yang tidak mudah untuk seseorang peranakan berpendidikan Belanda. Banyak orang Tionghoa peranakan – tua dan muda – yang untuk pertama kali seumur hidupnya mempelajari bahasa Cina. Sekolah untuk anak-anak Tionghoa memberikan pelajaran dengan pengantar bahasa Cina, Dapat dibayangkan kesulitan yang

---

<sup>136</sup> Gunseikanbu, *Boekoe Pengoempeolan Oendang-oendang* (Djakarta: 2604), hlm 10-11. Golongan Arab semula juga digolongkan sebagai orang asing dan juga dikenai kewajiban pendaftaran dan membayar pajak bangsa asing. Oleh karena terdesak kepentingan politisnya yang berusaha merangkul Islam, Jepang pada bulan Juli 1944 mengeluarkan peraturan yang menganggap orang Arab sebagai orang Indonesia, yang berarti bebas dari pendaftaran dan membayar pajak bangsa asing. Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm 160 dan 283-284.

<sup>137</sup> Gunseikabu, *op. cit.*, hlm. 17-18 (Undang-undang Nomor 19 tanggal 11 Juni 1942).

dialami seorang anak peranakan berpendidikan Cina.<sup>138</sup> Kebijakan ini menyebabkan banyak anak-anak peranakan yang dengan beberapa pertimbangan memilih untuk tidak bersekolah daripada menjadi siswa di sekolah Tionghoa. Anak Tionghoa diizinkan masuk sekolah negeri (bukan Tionghoa) hanya bila tersedia bangku kosong, namun kursi-kursi itu selalu terisi penuh.<sup>139</sup> Dalam situasi seperti ini di kalangan totok timbul suatu sikap *overacting* terhadap golongan peranakan yang memang mengalami kesulitan untuk belajar sebuah bahasa yang relatif baru untuk mereka.

Dalam bidang ekonomi, Jepang giat mendorong pedagang Indonesia untuk maju. Mereka didorong untuk bergabung dalam persatuan pedagang, yang berbentuk semacam koperasi. Organisasi ini dimaksudkan sebagai badan distribusi barang-barang kebutuhan dari pemerintah Jepang kepada konsumen. Pada masa ini di seluruh Indonesia terdapat kecenderungan umum untuk memperkuat persatuan pedagang Indonesia melawan Tionghoa. Banyak pedagang Tionghoa yang terdepak dari persaingan bisnis dengan pribumi.<sup>140</sup> Bila di perkotaan ekonomi orang Tionghoa mulai terdesak, di pedesaan mereka masih menguasai perekonomian, terutama penggilingan padi.<sup>141</sup>

Berbagai macam pungutan dikenakan terhadap golongan Tionghoa. Ada pajak kekayaan, pajak bangsa asing, serta berbagai macam sumbangan lain. Bahkan sebagian biaya operasional tentara PETA (Pembela Tanah Air) – yang merupakan embrio TNI – oleh Jepang juga dibebankan pada golongan Tionghoa. Demikian juga untuk *Heiho* dan anggota keluarga mereka.<sup>142</sup> Selain itu, masyarakat Tionghoa harus menanggung biaya operasional HCCH dan aneka ragam kegiatan (seperti olahraga, hiburan, dan sosial) yang diselenggarakannya. Pajak untuk golongan Tionghoa yang tidak mampu juga ditanggung bersama seluruh masyarakat Tionghoa. Yang memberatkan adalah bila ketua HCCH adalah seorang penjiilat Jepang dan bermaksud mencari muka, misalnya menyanggupi pengumpulan sejumlah uang yang cukup besar untuk pembelian pesawat terbang.<sup>143</sup>

---

<sup>138</sup> Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 23-25.

<sup>139</sup> Willard H. Elsabee, *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements 1940-1945* (Cambridge: Harvard University Press, 1953), hlm. 131.

<sup>140</sup> Didi Kwartanada, *op. cit.* hlm. 32.

<sup>141</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: PT Grasindo, 1993), hlm. 92, 112.

<sup>142</sup> Twang Peck Yang, "Indonesian Business Communities in Transformation 1940-1950", *Disertasi Ph.D.* (Canberra, Australian National University, 1987), hlm. 50.

<sup>143</sup> Didi Kwartanada, *op. cit.* hlm. 33.

Selain eksploitasi dana, Jepang juga merekrut tenaga pemuda Tionghoa untuk dilatih menjadi *Keibotai* (Korps Pertahanan Sipil Tionghoa). Jepang menentukan kuota jumlah pemuda Tionghoa yang harus disediakan untuk dilatih.<sup>144</sup> Tujuan Jepang mengadakan korps ini adalah melibatkan pemuda Tionghoa dalam pertahanan dari kemungkinan serbuan Sekutu, walau tidak semua perwira Jepang setuju dengan usaha ini.<sup>145</sup> Yanagawa, yang sering dijuluki “Bapak Tentara PETA” termasuk yang tidak setuju dengan program ini. Akan tetapi, Jepang tetap menjalankan program tersebut dengan mendirikan Pusat latihan Pemuda Tionghoa.<sup>146</sup> Selain *Keibotai*, *Beppan* (bagian khusus dari staf umum pemerintahan militer yang bersifat rahasia/intelijen) juga melatih kesatuan rahasia pemuda Tionghoa, yaitu *Nami Kikan* yang tujuannya semula akan diselundupkan ke Australia, namun kemudian dialih tugaskan pada penjagaan pantai dari kemungkinan serbuan Sekutu.

Golongan Tionghoa terpecah pendapat dalam menanggapi adanya *Keibotai* ini. Di satu pihak, mereka melihatnya sebagai usaha Jepang untuk mengadu-domba mereka dengan golongan pribumi.<sup>147</sup> Di pihak lain, mereka melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk berlatih dasar-dasar kemiliteran, seandainya kelak mereka dalam keadaan terdesak.<sup>148</sup> Apa pun pendapat yang ada, yang jelas sistem kuota yang ditetapkan Jepang amat meresahkan para orangtua Tionghoa, yang tidak rela bila anaknya harus dilatih kemiliteran secara keras ala Nippon. Sebuah tugas berat lainnya adalah bila Jepang meminta pada ketua HCCH untuk menyediakan perempuan penghibur.<sup>149</sup> Tuntutan nafsu seksual Jepang atas perempuan setidaknya pernah mengadu domba kaum pribumi dengan orang-orang Tionghoa, ketika batalyon PETA memberontak di Blitar pada bulan Februari 1945. Pemberontakan yang bersejarah itu juga mengandung unsur anti-Cina, yang terbukti dengan terbunuhnya beberapa orang Tionghoa. Salah satu alasan pemberontakan itu adalah ketidaksenangan para tentara PETA terhadap orang Tionghoa – yang atas perintah Jepang – merekrut perempuan Indonesia untuk dijadikan “wanita penghibur” (*jugun ianfu*).

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Joyce C. Lebra, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>146</sup> Mary F.A. Sommer, *op. cit.*, hlm. 109-110.

<sup>147</sup> Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar* (Amsterdam: Teratai, 1981), hlm. 74.

<sup>148</sup> I.J. Brugmans et al., (eds.), *Nederlandsch-Indië Onder Japanese Bezetting: Gegevens en Documenten Over de Jaren 1942-1945* (Franeker: 1982), hlm. 520; George S. Kanahale, “Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence”, *Ph.D. Dissertation* (Ithaca: Cornell, 1967), hlm. 297.

<sup>149</sup> Siauw Giok Tjhan, *op. cit.*, hlm. 72.

Kebijaksanaan “meminjam tangan” yang kontroversial ini – tanpa disadari

Seiring dengan “patuhnya” golongan Tionghoa, berbagai kebijakan yang ketat mulai dikendorkan Jepang.<sup>150</sup> Bulan Desember 1943 peraturan surat jalan dihapus, bulan Mei 1944 pajak bangsa asing juga dihapuskan. Orang-orang Tionghoa diperbolehkan mempunyai “wakil” (yang tentu saja ditunjuk oleh Jepang) dalam berbagai badan bentukan Jepang (lihat Tabel 2.)

**Tabel 2. Anggota-anggota Tionghoa dan Minoritas Lain dalam Berbagai Badan Bentukan Jepang**

No.	Nama Badan	Jumlah Anggota	Nama Anggota Tionghoa	Nama Anggota Minoritas Lain
1	Chuo Sangi In	40	Liem Thwan Tik Oey Tiang Tjoey Oei Tjong Hauw Yap Tjwan Bing	A.R. Baswedan (Arab) P.F. Dahler (Indo)
2	BPUPKI	70	Liem Koen Hian Oei Tjong Hauw Tan Eng Hoa	A.R. Baswedan (Arab) P.F. Dahler (Indo)
3	PPKI	21	Yap Tjwan Bing	-

Sumber: Diolah dari Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation 1944-1945* (Ithaca: Cornell University Press, 1961), hlm. 10, 18, 63.

Kontribusi finansial dari para pengusaha Tionghoa tidak saja berpindah ke tangan Jepang, namun juga ke tangan-tangan organisasi-organisasi militer kepemudaan Indonesia, Boei Giyugun (Korps Pertahanan Sukarela), yang salah satu elemen terpentingnya adalah PETA. Sumbangan pengusaha Tionghoa juga masuk ke kantong Heiho (pasukan pertahanan), keluarga anggota organisasi militer, organisasi-organisasi Islam, dan juga untuk surat kabar berbahasa Indonesia *Asia Raya*.<sup>151</sup> Kampanye-kampanye ini yang ternyata hasil kerja militer Jepang, tidak terbatas hanya ditujukan pada kalangan Tionghoa; sumbangan untuk kemerdekaan juga diminta oleh rakyat Indonesia.

<sup>150</sup> Jepang sebenarnya paling takut menghadapi gerakan bawah tanah Tionghoa, karena orang-orang Tionghoa paling baik dalam hal organisasi, pembiayaan, dan pimpinan. Lihat George S. Kanahale, *op. cit.*, hlm. 159.

<sup>151</sup> Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terjemahan Apri Danarto, Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 94.



Namun demikian, kenyataan bahwa pengusaha Tionghoa membiayai banyak organisasi militer Indonesia telah lama diketahui dan memiliki banyak konsekuensi penting.

Memasuki masa Revolusi Fisik, golongan Tionghoa tersedot ke dalam sebuah masa yang lebih kompleks dari sebelumnya, dengan dilatarbelakangi tiga masalah pokok; (1) Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaannya; (2) Belanda yang kembali ingin menjajah Indonesia; dan (3) munculnya negara Cina sebagai salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia II. Sebagian besar orang Tionghoa tidak mau terjun secara aktif ke dalam Revolusi Indonesia disebabkan karena pengaruh pendudukan Jepang dan sebagian lagi karena pertimbangan di dalam revolusi itu sendiri, yang tidak dapat menghindari pecahnya kekerasan di berbagai tempat.<sup>152</sup>

### 3. Reaksi Etnis Tionghoa terhadap Kebijakan Jepang

Pandangan politik golongan Tionghoa Peranakan selama pendudukan Jepang dapat dilihat dari pendapat tokoh-tokoh Tionghoa di BPUPKI sewaktu mengadakan sidang mengenai masalah kewarganegaraan.<sup>153</sup> Liem Koen Hian, seorang tokoh *asimilasionis* dari Partai Tionghoa Indonesia (PTI), tanpa ragu menganjurkan agar Republik Indonesia yang akan datang menyatakan semua orang Tionghoa di Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia. Lain lagi pendapat Oey Tiang Tjoei, seorang Tionghoa pro-Jepang, pemimpin HCCH Pusat. Secara samar ia mengatakan agar kewarganegaraan orang Tionghoa sebaiknya "diberi pertimbangan yang adil", tanpa memperjelas maksudnya. Akan tetapi, Leo Suryadinata mengatakan bahwa agaknya pernyataan Oey menjurus kepada suatu kehendak agar orang Tionghoa dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Pendapat Oei Tjong Hauw lebih jelas maksudnya. Ia adalah pengusaha besar, putra konglomerat Oei Tiong Ham. Oei lebih memilih agar pemerintah Indonesia mendatang menyatukan semua orang Tionghoa sebagai warga negara Tionghoa, dengan catatan mereka tetap akan membantu perjuangan rakyat Indonesia mencapai sebuah negara merdeka. Dengan kata lain, kaum peranakan tidak bersatu kata menghadapi kemerdekaan Indonesia.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Mary Somers-Heidhues, "Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis Cina dan Revolusi Indonesia", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu (eds.), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (Jakarta: Grafiti Pers, 1991), hlm. 156-187.

<sup>153</sup> Leo Suryadinata (1986), *op. cit.*, hlm. 55-56.

<sup>154</sup> Didi Kwartanada, *op. cit.* hlm. 35-36.

Kekalahan Jepang kembali meretakkan "persatuan semu" antara totok dan peranakan. Golongan totok menuduh para pemimpin HCCH (peranakan) sebagai *hankan* (pengkhianat) karena mau bekerjasama dengan Jepang. Mereka mendaulat agar HCCH dibubarkan dan para pemimpinnya mengundurkan diri. Masalah "kolaborasi" menjadi salah satu sumber perpecahan baru antara totok-peranakan. Karena itu, HCCH dibubarkan dan diganti dengan sebuah "organisasi lama dengan nama baru", yaitu *Chung Hua Tsung Hui* (CHTH).

Kekalahan Jepang, yang diikuti dengan kemerdekaan Indonesia serta usaha Belanda untuk kembali, menimbulkan lagi kekerasan berdarah anti-Cina di berbagai tempat. Sjahrir, sebagaimana dikutip Didi Kwartanada, menyalahkan Jepang atas terjadinya insiden itu.<sup>155</sup> Menurut Sjahrir, Jepang telah memutar kebencian terhadap Jepang yang tambah lama tambah besar dengan agitasi dan propagandanya terhadap bangsa kulit putih, orang Tionghoa, dan pangreh praja. Propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh Jepang banyak hasilnya, terlihat dengan kebencian yang ditunjukkan oleh para pemuda, yang sebelumnya ditujukan kepada bangsa Jepang, kepada Sekutu, Belanda, kaum Indo, Ambon, Menado, Cina, dan Pangreh Praja. Maksudnya tak lain adalah, seluruh dunia boleh dibenci asalkan jangan membenci Jepang.

Bagi masyarakat keturunan Cina, kedatangan Jepang telah mereka antisipasi, bahkan ada beberapa pengusaha yang menawarkan tenaga mereka untuk pemerintahan baru. Tidak seperti di Malaysia yang memunculkan gerakan perlawanan bersenjata seperti *Malayan People's Anti Japanese Army* (MPAJA) serta organisasi bawah tanah anti-Jepang, seperti *Fuxing She* (*Asosiasi Resiliensi*) bentukan KMT dan *Jizhong She* (*Asosiasi Sentralisasi*) di Jawa yang beranggotakan lebih dari 100 orang secara cepat dibasmi oleh tentara pendudukan Jepang. Persatuan anti-Fasis yang dibentuk Wang Renshu secara cepat dapat dibungkam oleh Jepang. Penerimaan secara pasif keturunan Cina terhadap kedatangan Jepang berimplikasi pada kedudukan mereka kemudian. Tidak lama setelah Hindia Belanda berhasil ditaklukan oleh Jepang keluar perintah untuk mengawasi secara ketat kelompok keturunan Cina. Bahkan jauh sebelum invasi Jepang ke Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang telah mengawasi kelompok etnik Tionghoa. Organisasi politik kelompok Cina Totok maupun Cina Peranakan seperti KMT (*Kuo Min Tang*) dan CHH (*Chung Hua Hui*, *Asosiasi Orang-Orang Cina*), serta merta menjadi organisasi politik terlarang pada periode ini. Banyak

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

terjadi penangkapan terhadap orang-orang keturunan Cina yang didalamnya termasuk elite dari organisasi KMT dan CHH.<sup>156</sup>

Secara psikologis penahanan dan penangkapan yang dilakukan terhadap warga keturunan Cina menyebabkan sebagian dari mereka mengundurkan diri dari aktivitas perdagangan. Bahkan ada perlakuan diskriminatif yang membuat posisi orang Cina menjadi sulit, terutama bagi mereka yang telah menikah dengan orang Belanda, setidaknya mereka dianggap musuh oleh Jepang. Proses Eropanisasi terhadap warga keturunan Cina di Hindia Belanda pun otomatis menjadi berhenti

Didi Kwartananda, seorang sinolog, mengatakan periode pendudukan Jepang sebagai proses “pencinaaan kembali” atau dengan bahasa politis yang lebih lugas telah terjadi proses sosialisasi nilai ketionghoan mereka melalui media pendidikan merujuk pada kasus yang terjadi di kota Yogyakarta.<sup>157</sup> Berdasarkan kebijakan dasar Jepang di bidang pendidikan tercantum suatu dokumen berjudul ‘Kebijakan Fundamental mengenai Pendidikan di Wilayah Selatan’, yang dibuat oleh Markas Besar Balatentara Ekspedisi Selatan, tertanggal 12 Januari 1942. Dari dokumen diketahui bahwa pada awalnya Jepang sama sekali bemiati menghapuskan sekolah-sekolah Tionghoa, namun bahasa Tionghoa diperkenankan untuk diajarkan sebagai kurikulum ekstra. Sejauh ini belum ada penelitian dan fakta empirik terjadinya proses resinifikasi untuk kasus Palembang.

Pendudukan Jepang di Indonesia juga bisa dimaknai sebagai bangkrutnya kelompok pedagang Tionghoa yang bermitra dengan kapitalis Belanda karena pada periode ini tidak sedikit perusahaan dan firma milik warga Tionghoa yang gulung tikar akibat kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang yang menyukai mereka (pedagang Tionghoa) yang berhubungan dengan sekutu. Selama periode awal masa penjajahan, sikap Angkatan Darat Jepang terhadap warga Tionghoa tampaknya telah berpengaruh pada posisi dagang mereka. Jenderal Yamamoto yang pada awal Maret 1942 menjabat sebagai *gunseikan* (panglima militer) di Jawa, berkata pada pemuka masyarakat Tionghoa bahwa masyarakat Tionghoa tampak “hormat dan patuh dari luar, tetapi tidak dalam”. Pernyataan yang tak kalah tegasnya dinyatakan S. Nishijima “Loyalitas warga Cina diterima secara skeptis,

---

<sup>156</sup> Twan Peck Yang, *op. cit.*, hal. 90-91.

<sup>157</sup> Didi Kwartananda, *Lahirnya Satu Generasi Baru Tionghoa di Jawa: Pendidikan dan Resinifikasi di Yogyakarta 1930-an s/d 1950-an*, makalah pada Konferensi dan Workshop Internasional “ Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an “, diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah FIS UNP bekerjasama dengan NIOD, Padang tanggal 18-21 Juni 2006.

dan pihak penguasa menunjukkan sikap negatif terhadap eksistensi kalangan pengusaha Cina”.<sup>158</sup>

#### **D. PERANAN ETNIS TIONGHOA PALEMBANG DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 1945-1949**

##### **1. Bentuk-bentuk Peranan Etnis Tionghoa dalam Perjuangan Kemerdekaan**

Ketegangan yang merebak antara Tionghoa dan Melayu di masa Revolusi Kemerdekaan merupakan akibat segregasi (pemisahan) antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu di Palembang yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak lebih dari seratus tahun sebelumnya, masyarakat Tionghoa ditempatkan tersendiri dalam pelapisan sosial. Hukum yang berlaku terhadap mereka, tidak sama dengan undang-undang Bumiputera. Kaum Tionghoa digolongkan sebagai “Timur Asing” yang mempunyai beberapa keleluasaan, lebih dari sekedar bangsa jajahan.

Selain itu, pemisahan pun berlaku secara fisik. Kelompok Tionghoa ditempatkan dalam *enclave* “daerah kantong” pemukiman yang biasa disebut *pecinan*. Mereka dibiarkan mendirikan sekolah yang berbahasa pengantar Mandarin serta tetap memelihara adat-istiadat Cina. Lalu pada tiap pemukiman, pemerintah kolonial mengangkat pemuka masyarakat yang disebut “kapiten” serta walikota khusus. Bahkan dalam tiap *pecinan*, juga ada wakil atau konsul dari Cina Daratan yang ditunjuk sebagai diplomat.

Seusai Perang Dunia II, saat Belanda berusaha kembali menduduki Republik Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keterasingan masyarakat Cina dari Pribumi dimanfaatkan. Apalagi, pasukan Sekutu melihat gejala mulai banyak simpatisan kaum Tionghoa dalam “Republiken”, bahkan terasa mulai merepotkan. Seperti yang ditunjukkan Laksamana John Lie – peranakan Cina asal Manado – yang menembus blokade Belanda untuk mencari senjata dan obat-obatan bagi pejuang kemerdekaan. Atau, kegiatan para politisi Tionghoa pro-Republik, seperti Liem Koen Hian, Mr. Tan Po Gwan, atau Siauw Giok Tjhan, sejak terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sekutu dan NICA lalu

---

<sup>158</sup> Twan Peck Yang, *op.cit*, hal. 96; Jumhari & Erric Syah, *Rakit Yang Berubah Haluan: Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial* (Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008), hlm. 20.

membentuk *Poh An Tui* (ada yang menuliskannya sebagai *Pao An Tui*) yang artinya Pasukan Keamanan Lingkungan Cina. Mereka ditugaskan untuk melindungi wilayah pecinan dari “perampok”, “ekstrimis”, dan “anjing Soekarno”.<sup>159</sup>

Tindakan perampokan yang sering terjadi pada masa pendudukan Jepang terhadap warga masyarakat nonpribumi dan peranakan (Cina, India, dan Arab) di Palembang telah memunculkan suatu sikap kebersamaan sesama golongan masyarakat yang tertuju pada soal-soal keamanan. Berbagai prakarsa telah diambil oleh sekelompok masyarakat, termasuk dari etnis keturunan Arab, India, dan Cina untuk menyusun barisan dengan niat ingin turut menyumbangkan dharma bakti pada Ibu Pertiwi. Masyarakat keturunan Arab diwakili oleh SH Al Menoar dan Abdurrahman Assegaf, keturunan India diwakili Sakither Maricar dan Lilarm, dan keturunan Cina diwakili oleh Lauw Gwan, Tjoe An Hoo, Tan, Ban, Sya, Tong Djoe, Theng A Suy (Paman Tong Djoe), dan lain-lain.<sup>160</sup>

Sikap masyarakat ini timbul sebagai perilaku spontanitas sekaligus semangat perjuangan yang menyala-nyala mempertahankan Proklamasi. Berangkat dari hal ini kemudian lahirlah gagasan untuk membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat, yang tugasnya membantu polisi. Badan ini dipimpin oleh seorang bekas perwira *Gyu Gun* Hasan Kasim dibantu beberapa perwira lainnya seperti Dani Effendy, M. Arief, Abdullah Tjek Seh, dan lain-lain. Daerah operasionalnya baru disetujui untuk Kota Palembang saja, demikian pula pembiayaannya masih dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Pada gilirannya BPKR berubah menjadi BKR (Badan Keamanan Rakyat), sedang markasnya yang semula berada di *Mijuhao Gakkoo En* dipindahkan ke gedung Sekolah Methodist di Jalan Sungai Tengkuruk (kini Jalan Jenderal Sudirman).<sup>161</sup>

Pembentukan BPKR diawali oleh suatu pertemuan yang diprakarsai oleh Dr. A.K. Gani sebagai Pimpinan Pemerintah Bangsa Indonesia di mana sengaja diundang wakil-wakil golongan penduduk Kota Palembang. Golongan Tionghoa diwakili oleh Lauw Gwan Tong dan Tan Ban San, Golongan India diwakili oleh S.A. Kither Maricar dan

---

<sup>159</sup> Abdul Baqir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), hlm. 9-10.

<sup>160</sup> Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan, *Sejarah dan Peranan Subkoss dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950)*, (Palembang: DHD – 45 Provinsi Sumatera Selatan, 2003), hlm. 631

<sup>161</sup> Abi Hasan Said, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera* (Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992), hlm. 92-93.

Lilaram, sedangkan golongan Arab diwakili oleh S.A. Almenoar dan S. Abdoerrachman Assegaf. BPKR diresmikan berdirinya pada bulan September 1945, kemudian berproses dan berkembang menjadi BKR (Badan Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia), dan akhirnya TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Setelah TNI terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, seluruh lapisan masyarakat terpanggil untuk bahu-membahu menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai prakarsa telah diambil, masing-masing menyusun barisan dengan niat ingin turut menyumbangkan darma bakti pada Ibu Pertiwi. Sekelompok pemuda-pemuda Tapanuli bekas *Heiho* yang baru datang dari Burma segera setelah mendarat di Pelabuhan Palembang bersama-sama dengan pemuda-pemuda Tapanuli lainnya yang memang sudah bertempat tinggal di Palembang membangun Barisan Perjuangan yang diberi nama Angkatan Pemuda Batak Indonesia, di bawah pimpinan C. Siagian, Chandra Nainggolan, Daulat Tobing, M. Hutabarat, Motung Tobing, dan lain-lain. Pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Sulawesi juga telah menyusun barisan dengan nama barisan KRIS di bawah pimpinan Rudy Ratulangi dan Sondakh.

Dari kalangan Tionghoa tampil seorang pemuda keturunan Tionghoa yang berasal dari lingkungan petani kebun sayur di sekitar Kota Palembang, memprakarsai sebuah organisasi di kalangan mereka dengan nama Persatuan Kaum Tani Tionghoa (PKTT) yang menyatakan jati-dirinya sebagai partisan yang sepenuhnya berpihak pada Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Dwitunggal Soekamo dan Muhammad Hatta. Pemuda ini bernama Theng A Suy. Organisasi yang diketuainya itu merupakan gerakan yang memberikan bantuan penuh pada Pemerintah Republik Indonesia dengan saluran bantuan lewat pimpinan pemerintahan, A.K. Gani, Abdulrozak, dan jawatan perlengkapan TKR/TNI serta dinas rahasia Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda maupun Inggris. Jaringan organisasi ini pun telah digunakan pula oleh Bung Gani, sehingga terkenal dengan julukan "*The Great Smugler*". Keberadaan Theng A Soey sangat merisaukan Belanda. Akhirnya Theng A Soey dijemak dan ditangkap Belanda sehingga hilang dari peredaran secara misterius. Hilangnya Theng A Soey menyebabkan memudatnya peranan PKTT yang disusul dengan perpecahan di kalangan anggotanya berkat tangan NICA dan dinas rahasia Belanda.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98; Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan, *op. cit.*, hlm. 631-632.

Meskipun Theng A Soey telah hilang tanpa kabar berita, tetapi Theng A Soey dan PKTT-nya telah banyak berjasa pada Republik Indonesia, baik sebagai pemasok sayur-mayur, beras, daging, dan lain sebagainya bagi keperluan Sekutu dalam hubungan dengan politik diplomasi Dr. A.K. Gani, maupun sebagai pemasok perlengkapan perang, pemancar radio, kendaraan dan peralatannya, obat-obatan termasuk penicillin, dan perlengkapan untuk pemerintahan sipil. Di antaranya juga disuplai ke Jawa lewat jembatan udara Karang Endah – Maguwo. Salah seorang penghubung mereka adalah pemuda Abubakar Komek yang menjadi saksi hidup peristiwa ini. Saksi lainnya adalah Theng Lian Joo, masih kerabat Theng A Soey, adalah salah seorang operator pelaksana penyelundupan dengan kapal laut antara Singapura – Palembang. Theng Lian Joo ini sekarang dikenal sebagai pengusaha yang berhasil dengan nama Tong Djoe.<sup>163</sup>

Pada tahun 1945, Tong Djoe diajak A.K. Gani untuk berpartisipasi dalam perjuangan menghadapi Belanda. A.K. Gani mengajak Tong Djoe untuk berjuang bersama didasarkan pada pengalaman Tong Djoe di bidang perdagangan. Ajakan A.K. Gani tersebut disambut baik oleh Tong Djoe. Hal ini disebabkan ia menyadari bahwa perjuangan membela Indonesia bukan hanya tugas orang Melayu atau pribumi saja, tetapi kewajiban seluruh warga yang tinggal di Indonesia, termasuk etnis Tionghoa. Oleh karena itu, ia merasa terpanggil dengan ajakan A.K. Gani untuk berjuang bersama rakyat Indonesia. Tong Djoe merasa sepaham dan sehati dengan tokoh-tokoh perjuangan saat itu seperti Dr. M. Isa, Abdul Rozak, Bambang Utoyo, dan A.K. Gani yang memang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih.

Bentuk perjuangan yang dilakukan Tong Djoe adalah dengan melakukan barter barang antara pihak Indonesia dengan pasukan Inggris di Singapura. Dari Palembang Tong Djoe mengirimkan hasil panen dari Sumatera Selatan seperti kopi yang ditukar dengan pakaian, obat-

---

<sup>163</sup> Tong Djoe adalah seorang pengusaha terkenal di Palembang pada tahun 1945, yang berusaha di bidang perkapalan. Setelah tahun 1950-an Tong Djoe pindah ke Singapura dan ketika Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo, perusahaannya yang bernama TUNAS menjadi rekanan Pertamina dalam pengadaan kapal Tangker untuk mengangkut minyak dari Indonesia ke luar negeri. Tong Djoe juga aktif dalam usaha menormalisasi hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat Cina dan membantu pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Singapura, dan berusaha menarik investor Cina ke Indonesia. Tong Djoe mendapat banyak penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, antara lain dari A.K. Gani, Menlu Ali Alatas, Bambang Kesowo, Akbar Tanjung, dan lain-lain. Lihat Abi Hasan Said, *op. cit.*, hlm. 98.

obatan, senjata, dan lain-lain. Bantuan ini diberikan melalui A.K. Gani sebagai tokoh "penyelundup" (*The Great Smuggler*).

Selain itu Tong Djoe juga membantu perjuangan di bidang logistik dan informasi melalui saluran pimpinan pemerintahan A.K. Gani, Abdul Rozak, dan jawatan Intendans (perlengkapan) TNI serta dinas rahasia Republik dalam menghadapi Belanda maupun Inggris.<sup>164</sup> Bantuan tersebut sangat besar manfaatnya bagi perjuangan pasukan TNI dan pemerintah Republik Indonesia di masa itu.

Pejuang yang sering berhubungan dengan Tong Djoe di antaranya adalah Nurdin Panji (orangtua Bupati Musi Banyuasin) dan Harun Sohar (Komandan Panglima Devisi Dempo). Tong Djoe banyak membantu dalam penyediaan senjata dan ekonomi kepada pejuang-pejuang pribumi tersebut.<sup>165</sup>

## 2. Keterlibatan Kelompok Bisnis Tionghoa pada Masa Revolusi

Pada masa Revolusi, kegiatan perdagangan di Palembang banyak merambah dimensi politik. Pada masa ini wewenang menyalurkan atau mengoordinasikan pertukaran barang-barang ikut melibatkan banyak pihak, terutama yang paling menonjol adalah pedagang/pengusaha Tionghoa. Para pedagang tersebut terikat dengan saluran politik tertentu berdasarkan legitimasi resmi pemegang kekuasaan, yakni pemerintah Republik Indonesia. Kasus pedagang Cina-Palembang khususnya memperlihatkan dengan jelas bahwa keterlibatan mereka sebagai "mitra-dagang" Republik berjalan sejajar dengan berbagai kepentingan ekonomi. Mereka menggunakan saluran-saluran politik yang penuh diwarnai sentimen anti-kolonial.

Sikap politik masyarakat Tionghoa di Palembang selama masa Revolusi cenderung ambivalen. Mereka mendukung Republik dengan orientasi lebih "ke dalam", yakni untuk menjaga kepentingan masyarakat Tionghoa itu sendiri. Ketidakjelasan sikap yang diperlihatkan sebagian besar komunitas Cina-Palembang membuat kelompok-kelompok radikal-revolusioner dalam tubuh Republik seringkali menuduh mereka "kaki tangan" NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang dibentuk di Australia untuk persiapan pendudukan kembali Indonesia setelah Perang Dunia II). Mereka memang dihadapkan pada pilihan yang teramat sulit: mendukung sepenuhnya Republik atau menerima kembali

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 95; Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan, *op. cit.*, hlm. -632.

<sup>165</sup> Wawancara dengan A. Zamawi Tjik Molek, Mantan Sekretaris Pribadi harun Sohar, tanggal 17 April 2008 di Palembang.



Belanda. Kelompok masyarakat Cina-Palembang yang tergabung dalam beberapa organisasi mencoba bersikap “netral” terhadap konflik Indonesia-Belanda, namun usaha reorganisasi ini agaknya tidak mampu mengurangi pandangan sinis kaum radikal. Selain kerap diancam akan dibunuh, mereka juga menderita kerugian nyawa serta harta relatif besar dibanding kelompok mana pun dalam masyarakat Palembang. Mereka selalu menjadi korban terbesar dalam setiap konflik bersenjata antara pasukan Republik dengan tentara Belanda.

Sebagian besar masyarakat Cina-Palembang masuk ke dalam *Chung Hua Tsung Hui* (Federasi Cina Perantauan atau *Overseas Chinese Federation* – OCF) sejak Januari 1946. Organisasi ini dikoordinir oleh *Chinese Consul General* yang berpusat di Singapura. Hampir semua organisasi Cina-Palembang dilebur ke dalam *Min She* atau *Ming Cha* (*Association of Peoples Livelihood* – APL) pada bulan Desember 1946. Organisasi ini tidak mempunyai warna politik dan menghilangkan perbedaan antara Cina Totok dengan Cina Peranakan.<sup>166</sup>

Pertempuran Tahun Baru 1947 di Palembang tampaknya mampu “mengubah” sikap kelompok-kelompok Cina-Palembang. Sebagian tokoh masyarakat Cina-Palembang yang berhasil lolos dari pertempuran dan menyelematkan diri ke Singapura segera membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan *Himpunan Persahabatan Cina Palembang* (HPCP). Mayoritas orang Tionghoa di Palembang tetap bersikap “netral” di tengah ketidakpastian. Namun ada di antara mereka yang mulai berani terang-terangan mendukung Republik dengan cara sendiri. *Chinese Labour Union* (CLU) Palembang,<sup>167</sup> misalnya menunjukkan dukungan kepada Republik dengan melakukan aksi protes dan menuntut Belanda supaya “membayar” ganti rugi atas nyawa dan harta yang hilang dalam pertempuran Tahun Baru 1947, walaupun korban tewas dalam pertempuran ini juga akibat tindakan unsur anti-Cina dari pihak Republik. Liem Djie Lan, pimpinan CLU yang bertindak atas nama masyarakat Cina-Palembang, menggelar berbagai

---

<sup>166</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 497.

<sup>167</sup> Cikal bakal organisasi ini adalah *Democratic League*, gerakan anti-Jepang yang dibentuk di Nanking tahun 1942. Cabang di Singapura digunakan sebagai pusat gerakan anti-Jepang di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh organisasi itu melarikan diri ke Indonesia, termasuk ke Palembang, ketika Jepang menyerbu Singapura. Setelah Perang Pasifik berakhir mereka kembali ke Singapura dan mendirikan CLU. Di antara mereka yang pernah mengungsi ke Palembang dan dianggap paling berpengaruh di Asia Tenggara adalah “raja karet” Tan Kah Kee. Lihat Leo Suryadinata, *Political Thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1977* (Singapore: Singapore University Press, 1979); Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 498.

pertemuan pada awal Februari 1947 dan tetap menuntut Belanda supaya membayar ganti rugi.<sup>168</sup>

Ganti rugi yang diminta Konsul Cina adalah sebesar f.100.000,- untuk setiap korban yang meninggal dan f. 20.000 untuk yang terluka, belum termasuk kerugian material (toko dan tempat tinggal orang Tionghoa yang musnah terbakar). Jumlah total ganti rugi yang dituntut mencapai f. 8.664.195,81. Belanda tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, kecuali dana untuk membangun kembali gedung Konsulat Cina yang hancur.

Penolakan tersebut mendorong Liem Djie Lan untuk melangkah ke persoalan yang lebih luas. Dia menyusun beberapa agenda yang kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan besar yang dihadiri kelompok-kelompok masyarakat Cina-Palembang pada tanggal 13 April 1947. Pertemuan tersebut menelurkan beberapa mosi yang ditujukan kepada "pemerintah Belanda" di Palembang. Salah satu yang terpenting adalah penghapusan jabatan "kapten Cina". Bila ditinjau lebih seksama, mosi tersebut mengandung dua hal pokok. *Pertama*, sebagai wujud ketidakpuasan mereka atas "kapten Cina" Lie Sioe Sing yang dianggap tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib anggota. *Kedua*, membangkitkan citra bahwa masyarakat Cina-Palembang seolah-olah pro-Republik. Mosi tersebut terasa agak sedikit janggal mengingat "kapten Cina" Lie Sioe Sing pernah menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 1946 di Palembang. Meskipun demikian, mosi ini jelas semakin mempertegas posisi organisasi masyarakat Cina-Palembang dan mendorong kerjasama lebih konkrit dengan pihak Republik.

Semenjak pertemuan tanggal 13 April 1947 tersebut, masyarakat Cina-Palembang yang berjumlah sekitar 40.000 orang (25.000 "totok"

---

<sup>168</sup> Liem Djie Lan adalah seorang Cina Peranakan yang dilahirkan di Palembang pada tahun 1910. Mengambil pendidikan formal di Singapura sebelum Perang Dunia II. Pernah bekerja di NKPM Sungai Gerong. Pemilik *Hotel Centraal* dan Bioskop *Capitol* ini pernah menjadi agen *Kenpeitai* dan pengawas perekrutan buruh BPP (*romusha*) dari komunitas Tionghoa. Awal Revolusi ia menjalin hubungan dengan laskar *Boeroeng Hantoe*. Tokoh yang berpengaruh di dalam organisasi PKTT (Perkumpulan Kaum Tani Tionghoa) dan CHPK (Chung Hui Penjaga Keamanan), dua organisasi berhaluan komunis, ini adalah seorang intelektual. Banyak menulis soal perburuan dalam *Sin Po* (surat kabar berbahasa Cina di Batavia) dan *Soeara Rakjat* (surat kabar sosialis yang terbit di Palembang). Pada tahun 1946 Liem Djie Tan mewakili delegasi *Sin Min Lap Chung Hui*, organisasi buruh Cina-Batavia, menghadiri konferensi ILO (Persatuan Buruh Sedunia), di San Fransisco. Dia termasuk pendiri *Chinese Nacht Wacht*, petugas jaga malam Cina di Palembang. Anggota jaga malam ini banyak yang bergabung dengan laskar-laskar "liar di Palembang. Lihat Mestika Zed, *ibid*.

dan 15.000 “peranakan”) terombang-ambing antara tunduk kepada “kapten Cina” atau “konsul Cina” yang berpusat di Singapura. Di sisi lain, banyak orang Cina-Palembang yang mulai mengubah nama dan kegiatan organisasi mereka menjadi organisasi yang bersifat nonpolitik, seperti *Sin Sin Music Club*, *Alumni Association H.C. School*, *Study Association*, *Chinese Sport Association* (Plaju), dan lain-lain. Beberapa pedagang besar Tionghoa juga masuk ke dalam organisasi-organisasi semacam itu.<sup>169</sup>

Liem Djie Lan muncul kembali sebagai wakil CLU Palembang dalam sebuah kongres serikat buruh di Tanjung Enim pada tanggal 26-28 April 1947. Kongres bertujuan merumuskan kembali program organisasi BBI (*Barisan Boeroeh Indonesia*) yang berdiri satu tahun sebelumnya.<sup>170</sup> Keputusan terpenting kongres adalah melebur semua organisasi-organisasi semua organisasi buruh di Sumatera Selatan yang bernaung di bawah BBI ke dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Meski CLU tidak ikut bergabung, karena terikat dengan pusat organisasinya di Nanking, Liem mengaskan bahwa sekitar 17 anak-cabang CLU Palembang dengan anggota sekitar 3.000 orang bersedia menjalin kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia. Bukan hanya itu saja, Liem Djie Lan juga mengirim beberapa anggota CLU Palembang untuk menemui *Chinese Consul-General* di Singapura. Ong Gwan Seng, salah seorang tokoh OCF, ikut mendampingi mereka. Maksud kedatangan mereka adalah untuk membahas hubungan kerjasama dagang Singapura-Palembang.

Selain bertemu dengan *Chinese Consul-General*, Ong Gwan Seng juga berjumpa dengan Ki Agus Abdulrahman, salah seorang pedagang Palembang yang berada di Singapura sebagai wakil NAMSOCO (kemudian SBTC). Kedatangan Ong Gwan Seng bertepatan dengan aksi protes anti-Belanda yang dilancarkan 80 orang pengusaha Tionghoa. Ong ikut bergabung dengan aksi-aksi yang dikoordinir oleh *Relief Committee on Palembang Chinese Refugees*.<sup>171</sup> Sebagian besar dari 15 orang pengurus komite itu adalah pedagang Cina asal Palembang, sebagian lagi pengusaha Cina-Singapura dari kelompok

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm. 499.

<sup>170</sup> Kongres ini diprakarsai oleh *Barisan Boeroeh Indonesia Soematera Selatan* dengan presidium K. Hoetabarat. Peserta kongres sekitar 1.000 orang mewakili 25 organisasi serikat sekerja.

<sup>171</sup> Sikap penguasa Inggris di Singapura terhadap aksi-aksi anti-Belanda kelompok Cina dan Republik di Singapura kelihatannya pragmatis. Inggris cenderung bertindak sebagai “penengah” sambil mempertahankan kepentingan ekonomi (perdagangan) Singapura ketimbang terlibat langsung perkara politik Belanda-Republik. Dalam hal ini Inggris condong pro-Republik, Lihat Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 500.

*Hock Ho*, organisasi yang menghimpun 60 pengusaha hotel di Singapura. Ketua komite adalah Wang Yuanxing, seorang Cina-Palembang.<sup>172</sup> Anggota-anggota komite seperti Koh Teck Kin, Tan Ban San, Chan Kay Cheong, dan Chen Bai Chuan juga tergolong pedagang besar yang memiliki basis di Palembang, namun kemudian menetap di Singapura. Wang Yuanxing pernah tampil sebagai juru bicara masyarakat Cina-Palembang dalam sebuah pertemuan di Singapura pada tanggal 26 Januari 1947. Pertemuan dihadiri sekitar 50 organisasi Cina-Singapura dan berhasil mendirikan *Pao Chiao Hui* (PCH) atau *Overseas Chinese Protection Association*. Tujuan asosiasi ini adalah membantu masyarakat Cina-Palembang khususnya dan masyarakat Cina di Asia Tenggara pada umumnya. Kata *protection* yang disandang tidak menjelaskan perlindungan terhadap apa dan atau untuk apa. Namun jelas tujuan PCH adalah melindungi *interests* ekonomi kelompok Tionghoa dalam berhadapan dengan Belanda dan Republik.

Sebagian besar pendukung *Overseas Chinese Protection Association* adalah kelompok pengusaha besar Tionghoa yang *vested interests* terhadap hubungan dagang (ekspor-impor) Sumatera-Singapura. Pertempuran Tahun Baru 1947 mengakibatkan jatuhnya banyak korban di pihak orang Cina-Palembang. Sebagian besar korban tewas karena diserang oleh unsur-unsur anti-Cina dari pihak Republik, namun PCH tidak “mengangkat” masalah ini. Mereka justru menganggap Belanda sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap jatuhnya korban di kalangan orang Cina-Palembang. Belanda juga didesak supaya melepas kapal-kapal dagang mereka yang ditangkap sejak akhir 1946.<sup>173</sup> Dengan memakai sentimen anti-Belanda, kelompok sayap kiri Cina-Singapura di dalam *Democratic League* dan berbasis di CLU berusaha keras melindungi kepentingan mereka lewat berbagai cara. Terlebih lagi sebagian besar sumber-sumber daya ekonomi Sumatera, khususnya Palembang, masih berada di tangan

---

<sup>172</sup> Wang Yuanxing termasuk salah seorang Cina-Palembang yang menyeberang ke Singapura setelah pertempuran tahun Baru 1947. Cina “Peranakan” ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam dunia politik dan bisnis yang sebagian besar didominasi Cina Totok.

<sup>173</sup> Antara Juli-September 1946, sekitar 40 buah kapal dagang orang Cina-Palembang ditangkap Belanda. Tempat kejadian terutama di muara Sungai Musi, dekat perairan Muntok, Selat Bangka. Di antara tangkapan Belanda terdapat kapal-kapal yang biasa menempuh rute Jakarta-Singapura. Jumlah keseluruhan awak kapal yang ditangkap cukup banyak, kurang lebih 400 orang. Rata-rata di antara mereka harus mendekam dalam penjara selama tiga bulan. Lihat Lihat Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 501.

Republik. Mereka menganut garis politik pro-Republik dan secara terbuka anti-Belanda.<sup>174</sup>

Sesuai dengan misi melindungi kepentingan masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara, aksi protes dan pertemuan PCH selanjutnya lebih ditujukan pada dua sasaran utama: menarik perhatian publik Cina-Singapura terhadap warga Cina-Palembang yang menjadi korban pertempuran Tahun Baru 1947 dan penangkapan kapal-kapal Cina yang terjebak di lintasan perdagangan Jawa-Sumatera-Singapura. Dalam pertemuan berikut yang berlangsung tanggal 15 Februari 1947, PCH mengeluarkan sebuah resolusi yang intinya menuntut Belanda supaya membenahi semua kebijakannya terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Bila tuntutan ini tidak dipenuhi, PCH atas nama masyarakat Cina Asia Tenggara akan memboikot semua bentuk hubungan ekonomi dengan Belanda.<sup>175</sup> Resolusi ini dikirim ke seluruh cabang Kamar Dagang (*Chambers of Commerce*) Cina di Jakarta, Penang, Hong Kong, Shanghai, Amoy, India, Swatow, dan Australia.<sup>176</sup> Gelombang baru perdagangan gelap mulai dijalankan kelompok-kelompok pengusaha Cina lewat rute Palembang-Singapura bulan-bulan berikutnya, dan ini merupakan bagian dari jawaban mereka atas blokade ekonomi Belanda. Perkembangan demikian disambut oleh CLU Palembang dan Republik dengan mengirim seorang utusan dengan tugas utama menjalin hubungan kerjasama dagang dengan “*the Fighting Comrades*” Indonesia di Singapura.<sup>177</sup>

Kegiatan penyelundupan kelompok bisnis Cina di Indonesia periode 1947-1949 dapat dibedakan atas dua kategori. *Pertama, dangbangke*, yaitu sekelompok pedagang kecil yang telah ada sebelumnya tumbuh berkembang sangat pesat pada masa pendudukan Jepang. Kebanyakan dari mereka bergiat secara perorangan, bukan dalam bentuk usaha besar. Tipe semacam ini biasa memperdagangkan barang-barang dalam skala kecil, tetapi berharga tinggi seperti emas, permata, dan “emas hitam” (opium). Usaha ini biasanya hanya dilakukan di daerah tertentu atau antarsaerah. Mereka melintasi jalan darat daerah perbatasan (*cross-border*) untuk menukar barang yang dimiliki dengan para pelanggan di seberang. *Kedua, lianhao* yang secara harfiah berarti perusahaan gabungan atau “kongsi” (*associated firms*). Perusahaan kongsi yang beroperasi di Indonesia sejak sebelum Perang

---

<sup>174</sup> “The Political Lines of the Friends of Indonesia Society”, NEFIS Publicatie, No. 23, CAD, MvD, Den Haag.

<sup>175</sup> “Chineesche Zaken, April 1947”, Bijlage A. *Rap. Ind.*, No. 516-519, ARA, Den Haag; Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 502.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> “The Political Lines of the Friends of Indonesia Society ...,” *loc. cit.*

Dunia II termasuk dalam tipe itu. Mereka tukar-menukar komoditas dalam skala besar. Sesuai dengan sifatnya, kegiatan dagang semacam itu menjangkau tempat yang relatif jauh. Peran angkutan kapal di sini menjadi sangat penting.<sup>178</sup> Pada masa Revolusi, peran perantara ini dikerjakan oleh beberapa pedagang besar yang bekerjasama dengan penguasa Republik. Merekalah yang sesungguhnya menjalankan usaha-usaha dagang Republik.

Tipe *dangbangke* merupakan ciri utama perdagangan yang beroperasi di Jawa. Gejala serupa pada tingkat tertentu juga berkembang di Sumatera pada umumnya dan Palembang khususnya. Palembang mungkin tidak pernah terlibat langsung dalam produksi candu, salah satu komoditas terpenting pedagang *dangbangke* di Jawa, tetapi sejumlah pedagang kecil Cina-Palembang sebenarnya terlibat langsung dalam mata rantai perdagangan candu dari Jawa yang berlangsung sejak tahun 1946.<sup>179</sup> Awal April 1946, Ang Tjiang Sam, kemenakan pedagang besar Ang Tiau Sie, ditangkap Sekutu karena dianggap terlibat penyelundupan candu.<sup>180</sup> Adnan Kapau Gani sendiri pernah menyelundupkan emas Palembang ke Singapura lewat orang-orang NAMSOCO (*Nusantara-Malaya-Singapore & Co*). Emas permata senilai f. 600 juta yang disita dari keluarga kerajaan di Sumatera Timur saat revolusi sosial juga dijadikan komoditas *dangbangke* ke Singapura.<sup>181</sup> Sukarno bahkan secara eksplisit mengakui bahwa Gani dan beberapa pejabat tinggi Republik pernah menyelundupkan 9 kg emas dan 300 kg perak dari Sumatera yang “dipertukarkan” dengan, antara lain, 20.000 seragam tentara.<sup>182</sup>

Kegiatan perdagangan *dangbangken* di Palembang berkaitan dengan perdagangan *ngulo* khas Palembang, khususnya di daerah Pasemah. Sejak Lahat dikuasai RECOMBA setelah Agresi Militer 1947, lintas penyeberangan garis demarkasi Lahat-Pagaralam ramai dilewati para pedagang *ngulo*. Dengan memikul barang dagangan, mereka berjalan kaki puluhan bahkan ratusan kilometer karena jembatan-jembatan yang menghubungkan pasar di kedua kota telah dihancurkan Tentara Republik Indonesia (TRI).<sup>183</sup> Mereka membawa kopi, beras, bawang merah, temak, dan hasil ternak, serta hasil pertanian rakyat dari

---

<sup>178</sup> Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 502-503.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 503.

<sup>180</sup> “Centrale Militaire Inlichtingdienst” (CMI), No. 511, 5 Juli 1946. *Proc. Gen.*, No. 21, ARA, Den Haag.

<sup>181</sup> “Onderwerp: A.K. Gani,” *Proc. Gen.*, No. 284, ARA, Den Haag.

<sup>182</sup> Cindy Adams, *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams* (New York: The Bobs Merril Company Inc., 1965), hlm. 236.

<sup>183</sup> “Handelsverkeer Pagar Alam-Lahat,” *HKGS-NOI*, GG. 31.475/1948. CAD, MvD. Den Haag.

daerah-daerah pedalaman. Barang dagangan tersebut mereka barter di pasar. "*Uang mandat*",<sup>184</sup> mata uang sementara yang dikeluarkan oleh TRI setempat dengan dibubuhi tinta cap stempel mudah luntur, kurang diminati karena tidak mempunyai nilai di daerah pendudukan RECOMBA (*Regeeringscommissaris voor Bestuurs-aangelegenheden*). Para pedagang *ngulo* pulang ke daerah asal tidak membawa uang, tetapi barang dagangan berupa minyak, rokok, sabun, garam, kain, perkakas pertanian, dan lain-lain. Barang tersebut kemudian dibarter lagi dengan barang-barang yang dihasilkan daerah pedalaman.

Pedagang *ngulo* bahkan ada yang merambah sampai daerah Bengkulu dan Lampung. Mereka harus menerobos hutan rimba, semak belukar, dan berjalan kaki sepanjang ratusan kilometer. Pekerjaan semacam itu tentu penuh dengan resiko. Binatang buas yang masih banyak berkeliaran di hutan Sumatera siap menerkam mereka. Selain itu, orang yang keluar masuk daerah demarkasi dapat dengan mudah dituduh sebagai mata-mata. Para pedagang *ngulo* harus membayar "pajak tol" sebanyak dua kali di setiap daerah perbatasan; satu kali ketika keluar dari daerah penguasaan Republik dan satu kali ketika hendak masuk daerah pendudukan RECOMBA. Di setiap daerah yang dikuasai Republik terdapat beberapa pos jaga yang menghubungkan daerah-daerah perbatasan Onder Distrik Militer (ODM). Setiap orang yang melewati ODM wajib memiliki surat "pas jalan".<sup>185</sup>

Pedagang *ngulo* yang memiliki modal besar umumnya orang Cina-Palembang. Mereka menyewa beberapa "kuli bujang" untuk memanggul barang-barang dagangan. Mereka biasanya memborong barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah sangat besar. Pedagang Cina di pasar Pagaralam, misalnya, pada September 1947 memborong ratusan kilogram beras ketika sebagian besar rakyat Palembang tengah dilanda kesulitan bahan pangan pokok ini. Beras tersebut kemudian dibawa ke Kota Palembang dan selanjutnya dimuat ke beberapa kapal yang bersandar di Pelabuhan Boom Baru.<sup>186</sup> Sebagian pedagang Tionghoa yang bertindak sebagai penyalur barang dagangan pedagang lebih besar (*lian hao*) bukan semata-mata pedagang mandiri.

---

<sup>184</sup> *Ibid.*; "Verslag Toestanden Pagar Alam, 16-1'48," *Rap. Ind.*, No. 5'9, ARA, Den Haag.

<sup>185</sup> Pemeriksaan biasanya berlangsung informal dan sering terjadi hal tidak terduga. Para petugas jaga yang "tidak kenal tulis baca" bagaikan seorang raja. Mereka menegur setiap orang yang tidak dikenal untuk berhenti dan menanyakan "mana surat atau siapa nama?" Jika orang yang ditanya memiliki "surat pas" dan hendak diperlihatkan, sang petugas yang buta huruf dengan setengah membentak memerintahkan "baca sendiri!", lihat Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 504.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 505.

Mereka juga menyalurkan komoditas yang dikumpulkan *Verkoopcentrale* Republik dari para pedagang *lianhao*.

Jumlah kelompok-kelompok pedagang kecil dan pedagang menengah Tionghoa, seperti juga jaringan *ngulo* Palembang, jauh lebih banyak daripada kelompok *lianhao*. Kelompok terakhir itu umumnya menggunakan Singapura sebagai pangkalan usaha. Kelompok bisnis *lianho* Singapura bernaung di bawah PCH, khususnya di dalam organisasi SOCIEA (*Overseas Chinese Importers and Exporters Association*).<sup>187</sup> Pedagang/pengusaha Tionghoa asal Palembang atau pedagang Tionghoa yang menggunakan Kota Palembang sebagai tempat basis usaha, jumlahnya paling besar dibanding daerah lain di Indonesia.

Beberapa pengusaha *lianhao* Palembang yang turut serta dalam kegiatan perdagangan di daerah ini lebih merupakan mitra-dagang biasa. Mereka bukan aktivis politik atau pemah terjuan dalam pergerakan politik. Akan tetapi, mereka mampu menyesuaikan diri di dalam konflik Indonesia-Belanda. Bahkan sebagian besar di antara mereka cenderung mendukung perjuangan Republik; seperti Ho Chiang, Tan Ban San, Ang Tiuw Bie, Yap Jam Kie, dan Check Goan. Yang paling terkemuka di antara mereka hanya Check Goan, karena perusahaan perkapalan raksasa yang dimilikinya.<sup>188</sup> Perusahaan yang dibangunnya pada Januari 1946 ini berkembang pesat menjadi sebuah perusahaan *lianhao* di Palembang setahun kemudian, khususnya ketika perusahaan ini menjadi “pemasok” SVPM (*Standard Vacuum Petroleum Maatschappij*).

Pedagang *lianho* memiliki armada kapal yang terkait dengan kegiatan perdagangan Singapura-Palembang. Perubahan penting dalam sarana transportasi kapal Cina-Palembang baru dimulai sejak periode Revolusi. Sebelum Perang Dunia II, kapal yang mereka punyai hanya kapal jenis tongkang (berbobot 10-15 ton) dan kapal roda lambung (20-30 ton). Kapal-kapal ini merupakan milik pribadi dan bukan milik

---

<sup>187</sup> Organisasi ini didirikan setelah Perang Dunia II usai. Asosiasi ini tampil ke permukaan sejak awal 1946. Direktur SOCIEA adalah Guo Shang Hu, pemilik kapal *Senang* yang beroperasi ke Palembang sejak 1945. Bendahara organisasi dipegang Tay Hok Goan, seorang Cina-Palembang. Sebagian besar anggota asosiasi penguasa Cina Totok (asal Hokkien) yang mempunyai ikatan keluarga dan bisnis dengan kelompok pengusaha Cina-Palembang yang pindah ke Singapura sejak pertempuran Tahun Baru 1947. Pada awal berdiri hanya beranggotakan sekitar 100 orang, tetapi kemudian meningkat menjadi 239 orang. Asosiasi ini memperoleh pijakan kuat karena dapat bekerjasama dengan pihak Republik di Pulau Sumatera.

<sup>188</sup> Check Goan alias Tan Ben Goan adalah Cina Totok yang bermukim di Palembang; pemilik *Check Goan & Co.* Dan *Lian Tai & Co.* Dua kapal kayu (masing-masing berbobot sekitar 200 ton) milik perusahaannya yang dipakai untuk mengimpor pakaian dan garam dari Singapura dan mengangkut karet Palembang. Lihat “Lee Rubber Coy.,” *Proc. Gen.*, No. 436, ARA, Den Haag.



perkongsian. Hanya segelintir kapal milik perusahaan. Setelah Jepang kalah dari Sekutu, armada kapal Jepang diambil oleh Republik yang kemudian dijual kepada Cina Palembang. Selain itu, mereka merupakan juga membeli kapal dari otoritas Inggris di Singapura. Dari 20 pemilik kapal Cina yang beroperasi di Indonesia atau menggunakan Palembang sebagai pangkalan operasi 7 di antaranya dimiliki oleh Cina-Palembang seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3.**  
**Perusahaan Kapal Cina-Palembang**

No.	Nama Pemilik	Perusahaan Kapal	Perusahaan Lain
1	Ang Tiuw Bie	Kapal “Teluk 1-7”	Handel Mij Swan Liong
2	Chek Goan	Chek Goan & Co. Ltd	Lian Tai & Co
3	Chuan Ann (Tung Djoe)	Chuan Ann Shipping Co.	-
4	Koh Teck Kin	Chiang Shipping Co. Ltd	Firma Koh Teck Kin
5	Soe Hai Goan	- The China Navigation Co. Ltd - The Hong Hong Steamship, Co. Ltd - The Straits Steamship Co. Ltd	Soe Hai Goan & Co
6	Tan Ban San	Tong Seng Shipping Co.	Firman San Ho
7	Tay Hock Goan	Kie Hock Shipping Co.	Firma Tay Hock Goan

Sumber: Mestika Zed, Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 508.

Sejak pertempuran Tahun Baru 1947 dan blokade ekonomi yang diberlakukan Belanda, lalu lintas perdagangan melalui pelabuhan Palembang melemah. Pelabuhan Palembang praktis dipegang otoritas duane Belanda sejak Agresi Militer ke-1. Hal ini merupakan faktor penting yang mendorong pesatnya perdagangan gelap, dan membuat data tentang volume ekspor-impor dan lalu-lintas kapal yang bekerjasama dengan pihak Republik tidak tersedia. Blokade ekonomi Belanda mendorong sebagian para pengusaha di Jawa, baik Bumiputera

maupun Tionghoa, memindahkan usaha dagang ke Sumatera. Jaringan kegiatan “perdagangan gelap” turut pindah ke Sumatera.

Menjelang berakhirnya Revolusi, peran pedagang-pedagang Tionghoa dalam jaringan kepiialangan Republik di Palembang tetap terjaga, meski mengalami sedikit pergeseran. Keikutsertaan mereka dalam jaringan kepiialangan Republik periode 1947-1948 melibatkan unsur (sentimen) politik dan ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun ikatan tersebut tampak semakin longgar pada periode berikutnya. Di sini terbuka kesempatan untuk mengambil garis “Co” dalam kegiatan perdagangan. Hubungan kerjasama yang berlandaskan sentimen politik mulai berkurang. Alasannya lebih dari sekedar soal pragmatis. Kebanyakan pedagang besar Tionghoa yang bergerak dalam usaha dagang adalah mereka yang telah banyak membantu Jepang, kalau bukannya “kolaborator”, sama seperti sebagian pemimpin dan kelompok bisnis Republik. Kelompok-kelompok bisnis Tionghoa yang dituduh Belanda sebagai kolaborator Jepang berada dalam posisi yang sulit dibanding kelompok-kelompok bisnis Republik saat Indonesia memasuki tahap Revolusi. Mereka gelisah dengan “hukuman” yang akan ditimpakan Belanda karena telah mengambil pilihan yang “salah”. Mendukung Republik adalah jalan satu-satunya yang dianggap “aman” dan menguntungkan daripada menerima rekolonisasi Belanda. Di samping itu, persaingan di antara pedagang Tionghoa yang bergerak dalam ekspor-impor berbagai komoditas dengan pengusaha Bumiputera tidak terlalu tajam. Daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi masih di tangan Republik. Dengan demikian dalam kegiatan ekspor-impor tidak bisa lain kecuali lewat kerjasama dengan pihak Republik.

Pada tahun-tahun terakhir Revolusi, garis “Co” dan “Non-Co” tampak mulai tidak relevan lagi. Begitu pula dengan garis pro-Republik atau anti-kolonial. Hubungan bisnis tidak lagi dibatasi garis pemisah setajam itu. Kelompok-kelompok bisnis Tionghoa sejak saat itu dapat secara terbuka menjalin kerjasama dagang dengan Belanda sambil melanjutkan kerjasama serupa dengan pihak Republik. Situasi yang sebelumnya penuh dengan ketegangan berangsur-angsur kembali normal. Kekuatan politik dan ekonomi Belanda tidak lagi menjadi ancaman serius. Tahap akhir perjuangan mempertahankan kemerdekaan tinggal menunggu waktu, saat digelar kompromi melalui perundingan sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Diaspora perdagangan orang Tionghoa pasca-Revolusi di Indonesia mencapai tingkatan sempurna pada saat setiap orang bersiap menyambut zaman baru. Kerjasama dengan pemegang kekuasaan, buah pergaulan selama masa Revolusi, tetap terpelihara dengan baik. Namun kerjasama ini

tidak lagi didasarkan komitmen “perjuangan”. Keuntungan ekonomi yang diterima masing-masing pihak jauh lebih diutamakan.

### 3. Respon Etnis Melayu terhadap Perjuangan Etnis Tionghoa

Warga Negara Indonesia keturunan Cina banyak ekali yang telah memberikan jasanya yang besar kepada negara Indonesia. Beberapa di antaranya di bidang politik, baik pada masa awal-awal kemerdekaan maupun pada masa reformasi ini. Banyak Warga Negara Indonesia keturunan Cina yang mencapai prestasi intemasional di bidang olahraga. Tidak kurang pula di bidang kemasyarakatan sebagai pendidik, dokter, ahli-ahli hukum, dan lain-lain yang mempunyai reputasi internasional. Salah seorang keturunan Cina, Oei Yong Tjio, merupakan seorang nasionalis yang di tahun awal-awal kemerdekaan telah berjuang bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan kaum Republikan yang lain dengan penuh kecintaan pada bangsanya, Indonesia. Oei Yong Tjioe berjuang tanpa pamrih untuk bangsanya, tanah airnya, dan tanah tumpah darahnya, Indonesia.<sup>189</sup>

Nasionalisme, rasa kebangsaan, seperti yang dirumuskan oleh Ernest Renan (1880), sebagaimana dikutip oleh Yudohusudo (1996), adalah suatu solidaritas yang sangat besar yang terbentuk karena adanya pengorbanan-pengorbanan yang besar yang telah diberikan di masa yang lalu, dan kesediaan bersama untuk tetap memberikan pengorbanan-pengorbanan baru di waktu yang akan datang. Untuk orang-orang seperti Oei Yong Tjioe dan juga nonpribumi-nonpribumi lainnya seperti Dr. E.F.E. Douwes Dekker yang kemudian berganti nama menjadi Setia Budi, atau juga Dahler yang kemudian menjadi Dahlan, perbedaan asal-usul pri dan non pri menjadi tidak mempunyai arti apa-apa, atas sikap batinnya yang telah dibuktikannya yaitu pengorbanan pada mas lalu dan kesediaan berkorban di masa yang akan datang. Bagi setiap bangsa yang baru merdeka, lebih-lebih setelah ratusan tahun terjajah, wajar kalau di awal-awal kemerdekaannya dan mungkin puluhan tahun sesudah itu, kadar emosional perasaan masih mewarnai tingkah laku bangsa Indonesia.<sup>190</sup>

Masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Palembang, pada masa revolusi juga turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan caranya masing-masing. Sebagian besar di antara mereka berjuang dalam bentuk bantuan logistik kepada pejuang yang turun ke medan juang, hanya sedikit sekali yang terjun langsung ke

---

<sup>189</sup> Siswono Yudohusodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1996), hlm. 108-109.

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm. 109.

tengah medan pertempuran. Beberapa veteran perang kemerdekaan di Palembang memberikan pandangan yang berbeda mengenai keterlibatan etnis Tionghoa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang.

Mukhtar Effendi, salah seorang pejuang veteran di Palembang, mengatakan bahwa pada masa perjuangan kemerdekaan, dari semua *front* yang ada di Sumatera Selatan tidak terdapat orang Tionghoa atau pejuang Tionghoa yang terlibat aktif. Mereka lebih banyak bersifat netral. Artinya tidak memihak kepada perjuangan kaum Republik dalam mempertahankan kemerdekaan juga tidak memihak kepada Belanda yang kembali ingin menjajah Indonesia. Sebagian besar dari mereka berpandangan siapapun yang berkuasa tidaklah penting bagi mereka, yang penting usaha perdagangan mereka lancar dan hidup mereka aman.<sup>191</sup>

Jiwa patriotisme orang Tionghoa menurut Mukhtar Effendi hampir tidak ada, biasanya orang Tionghoa membantu hanya dalam bentuk makanan, dan itupun bila diminta. Hal ini berbeda dengan orang Arab yang ikut berjuang bahu-membahu bersama kaum pribumi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang pejuang keturunan Arab di Palembang adalah Mahdar Sahab yang berjuang di bawah *front* Fisabilillah.<sup>192</sup>

Orang Tionghoa memang ada yang ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia, tetapi secara khusus di Provinsi Sumatera Selatan tidak ditemukan orang Tionghoa yang ikut terjun langsung ke medan pertempuran bergabung dengan pejuang-pejuang lainnya. Namun, meskipun demikian orang Tionghoa juga tidak diidentifikasi berpihak pada penjajah Belanda, tidak pula sebagai mata-mata penjajah. Mereka benar-benar bersifat netral yang semata-mata lebih memikirkan untuk mencari selamat saja. Orang Tionghoa tetap tidak mau ikut terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan meskipun mereka dalam posisi terjepit pada waktu itu.<sup>193</sup>

Baru setelah tahun 1950-an ada intelektual Tionghoa yang ikut berperan dalam pendirian Universitas Sriwijaya di Palembang, yaitu Liem Chou Kyan yang ikut menghadap Menteri Pendidikan dalam memperjuangkan berdirinya Universitas Sriwijaya. Pada waktu peristiwa G 30 S / PKI Liem Chou Kyan melarikan diri ke Belanda. Tokoh intelektual lainnya dari golongan Tionghoa ialah Mr. Hun Fuji,

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Mukhtar Effendi di Palembang pada hari Senin 14 April 2008 pukul 16.05 WIB.

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

seorang dosen Universitas Sriwijaya yang kemudian juga melarikan diri ke Amerika Serikat sewaktu terjadi peristiwa G 30 S / PKI. Sebelum tahun 1950-an peran orang Tionghoa dalam Perang Kemerdekaan, menurut Mukhtar Effendi, memang hampir tidak ada.

Keterangan Mukhtar Yahya berbeda dengan keterangan H. Badri. Menurut Badri, sewaktu perang kemerdekaan, semua pejuang membuat palang merah dan dapur umum. Di dalam palang merah dan dapur umum ini orang Tionghoa dan pribumi membaur. Orang Tionghoa yang ikut berjuang di Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan jumlahnya cukup banyak, walaupun hampir tidak ada yang terjun langsung ke medan pertempuran. Orang Tionghoa pada umumnya mendukung perjuangan rakyat Indonesia dengan aktif di palang merah dan dapur umum.<sup>194</sup>

Orang-orang Tionghoa yang ikut berjuang bersama pribumi di antaranya ialah seorang Tionghoa yang tinggal di jalan Rajawali dan seorang Tionghoa yang tinggal di Bukit Besar. Perkampungan Tionghoa yang ada di Palembang adalah di Kecamatan Ilir Barat dan Kampung Kapitan di Kecamatan Seberang Ulu I.

Masyarakat pribumi menanggapi secara positif dan merasa sangat berterimakasih dengan keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, walaupun orang Tionghoa lebih banyak terlibat di palang merah dan dapur umum. Orang Tionghoa yang ikut berjuang ada yang dari golongan Cina Peranakan dan ada pula yang dari Cina Totok.

Menurut Badri, motivasi orang Tionghoa berjuang sama halnya dengan motivasi kaum pribumi yang ingin mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah dari kaum penjajah, dan juga karena adanya himbauan-himbauan dari tokoh pemimpin masyarakat Sumatera Selatan. Yang ikut berjuang sebagian besar adalah orang Tionghoa yang menganut agama Konghucu.<sup>195</sup>

Zarkawi T, seorang pejuang yang pernah menjadi sekretaris pribadi Arun Sohar (Komandan Panglima Divisi Dempo di Sumatera Selatan), mengatakan bahwa pada masa perjuangan kemerdekaan ada seorang tokoh Tionghoa yang cukup berjasa bernama Tong Djoe. Dia adalah seorang Cina Palembang yang merantau dan menetap di Singapura. Tong Djoe banyak membantu dalam hal persenjataan dan keuangan kepada para pejuang. Pada masa perjuangan kemerdekaan ada Persatuan Kaum Tani Tionghoa (PKTT) pada tahun 1945-1946.

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan H. Badri di Palembang pada hari Rabu 16 April 2008 pukul 10.20 WIB.

<sup>195</sup> *Ibid.*

Kelompok ini ikut berjuang bersama pribumi, terutama dalam hal penyediaan pangan kepada pejuang. Ketua PKTT adalah Teng A Sui yang merupakan adik dari Tong Djoe. Anggota PKTT adalah orang-orang Tionghoa Palembang yang memberikan bantuan kepada pejuang dalam bentuk ekonomi atas kesadaran mereka sendiri.<sup>196</sup>

Di samping ikut membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, ada juga orang Tionghoa yang berkhianat kepada perjuangan tersebut. Mereka adalah orang-orang Cina yang pernah menjadi kaki tangan Belanda yang ditunjuk sebagai pedagang perantara pada masa pemerintahan kolonial. Kesejahteraan hidup yang mereka alami pada masa penjajahan Belanda menyebabkan mereka ingin kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.<sup>197</sup>

Seorang tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang juga dikenal sebagai penulis beberapa buah buku tentang Palembang, Djohan Hanafiah, mengatakan bahwa pada waktu Perang Kemerdekaan tidak ada pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang Tionghoa di Palembang. Orang-orang Tionghoa lebih banyak membantu dalam hal penyediaan bahan makanan kepada para pejuang. Pada waktu itu banyak orang Tionghoa yang berprofesi sebagai petani sayur yang berkebun di daerah pinggiran Kota Palembang.<sup>198</sup>

Pos orang-orang Tionghoa pada waktu Perang Kemerdekaan terletak di daerah Konten, daerah Seberang Ulu (daerah Kapiten). Jika di Medan ada kelompok pejuang Tionghoa, tetapi di Palembang tidak ada. Menurut Djohan Hanafiah, orang Tionghoa yang terlibat langsung ikut berjuang, dalam arti ikut memanggul bambu runcing hanya satu atau dua orang saja. Orang Tionghoa waktu itu lebih banyak yang menjadi korban, sehingga salah seorang pejuang dari etnis Tionghoa, Ceng Cu, memprotesnya. Sebagian besar orang Tionghoa memiliki loyalitas yang kuat terhadap Republik Indonesia.

Nasionalis orang Cina Peranakan terutama terdapat pada mereka yang beragama Islam. Pada waktu itu belum banyak orang Tionghoa yang masuk Islam. Orang Tionghoa Islam yang banyak ditemui di Palembang saat ini (2008) rata-rata adalah para muallaf, bukan Islam keturunan yang beragama Islam karena orangtuanya Islam. Di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti di Palembang, Islam membawa etnis Tionghoa melebur dan menjadi

---

<sup>196</sup> Wawancara dengan Zarkawi T di Legiun Veteran Palembang pada hari Kamis 17 April 2008 pukul 11.06 WIB.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Wawancara dengan Djohan Hanafiah di Palembang pada hari Kamis 17 April 2008 pukul 19.35 WIB.

bagian pribumi. Hal ini berbeda dengan etnis Tionghoa non-Muslim yang kian terpisah dengan pribumi, seperti air dan minyak.

Di awal kemerdekaan, terdapat kebijakan pemerintah berupa Dwi Kewarganegaraan yang berlaku untuk orang-orang Tionghoa. Hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa orang-orang Tionghoa sangat sedikit perannya dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan mereka merasa tidak punya akar di Indonesia,<sup>199</sup> berbeda dengan etnis lainnya seperti Jawa, Sunda, Melayu, Minangkabau, Madura, Bugis, Batak, dan lain-lain yang memiliki wilayah komunitas asal di Indonesia sehingga mereka merasa akarnya memang di Indonesia. Orang Tionghoa yang memberikan bantuan dalam perjuangan pada umumnya berasal dari kesadaran mereka sendiri yang merasa bahwa Indonesia adalah tanah air mereka juga karena mereka sudah berabad-abad tinggal di Indonesia.

Orang Melayu Palembang memandang Cina Peranakan dengan penuh kepercayaan, tetapi terhadap Cina Totok agak kurang. Hal ini bisa dilihat pada waktu kerusuhan-kerusuhan yang melanda beberapa kota besar di Indonesia, yang menjadi sasaran kemarahan warga adalah rumah-rumah dan toko-toko orang Cina Totok yang dijajah dan dibakar.

Yahya Bahar, seorang pejuang pada masa Perang Kemerdekaan di Palembang mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui orang Cina di Palembang ikut berjuang atau tidak. Setahu beliau ada satu orang Tionghoa yang bernama Tong Djou yang berjasa dalam memasukkan persenjataan di Sumatera Selatan yang dibawa dari Singapura. Sistem yang dipakai adalah perdagangan cara barter, yaitu senjata ditukar dengan hasil pertanian, terutama karet.<sup>200</sup>

Ketika memimpin pasukan selama lima tahun dari tahun 1945 – 1950, menurut Yahya Bahar tidak ada satupun orang Tionghoa yang ikut berjuang bersama dengannya. Orang-orang Tionghoa sebagian besar hanya terlibat dalam perdagangan. Dalam masalah perjuangan sebagian besar di antara mereka bersikap pasif, bahkan banyak yang ketakutan pada waktu Revolusi Fisik tersebut. Orang-orang Tionghoa yang melakukan kegiatan perdagangan dengan pejuang pada waktu itu tujuannya hanyalah demi keuntungan semata.

Yahya Bahar pernah menjadi komandan Paukan Harimau Selatan di Pagaralam dan Beruang Hitam di Lahat. Selama berjuang,

---

<sup>199</sup> Sebagian besar orang Cina di Palembang pada waktu Revolusi Fisik cenderung pro Taiwan, yang diorganisir oleh Mr. Chen. Wawancara dengan Djohan Hanafiah di Palembang tanggal 17 April 2008.

<sup>200</sup> Wawancara dengan Yahya Bahar di Palembang pada hari Jum'at tanggal 18 April 2008 pukul 17.15 WIB.

Yahya Bahar tidak pernah sama sekali mendapat bantuan berupa logistik dari orang Tionghoa. Di Sumatera Selatan, menurut Yahya Bahar, tidak ada orang Tionghoa yang ikut berjuang memegang senjata. Di tengah hiruk pikuk perjuangan, yang mereka lakukan hanyalah berdagang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya.

## E. PENUTUP

Asal-usul Masyarakat Tionghoa yang ada di Palembang pada umumnya berasal dari beberapa provinsi di Cina, antara lain Provinsi Kwantung, Fukien, dan Kanton. Jalur yang dilalui oleh orang-orang Tionghoa untuk datang ke Palembang adalah melalui jalur perdagangan (transformasi laut) yang ada pada masa itu. Sebelum mencapai Palembang, mereka transit terlebih dahulu di Pulau Bangka, yang merupakan pintu gerbang menuju ke ibukota Palembang. Orang Tionghoa di Pulau Bangka, bekerja sebagai pekerja tambang, sedangkan di Palembang mereka bekerja sebagai tukang di perindustrian. Migrasi orang-orang Tionghoa ke Palembang berhubungan erat dengan jalur pelayaran tradisional yang sangat tergantung pada embusan angin muson. Pada masa kerajaan Sriwijaya, pedagang-pedagang Cina datang ke Palembang membawa keramik atau kain sutra. Mereka kembali ke negaranya membawa berbagai macam produk yang dihasilkan daerah Sriwijaya seperti damar, kayu, cendana, minyak wangi, dan produk hutan lainnya.

Ketegangan yang merebak antara etnis Tionghoa dan Melayu di masa Revolusi Kemerdekaan merupakan akibat segregasi (pemisahan) antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu di Palembang yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak lebih dari seratus tahun sebelumnya, masyarakat Tionghoa ditempatkan tersendiri dalam pelapisan sosial. Hukum yang berlaku terhadap mereka, tidak sama dengan undang-undang Bumiputera. Kaum Tionghoa digolongkan sebagai “Timur Asing” yang mempunyai beberapa keleluasaan, lebih dari sekedar bangsa jajahan.

Pada saat mempertahankan kemerdekaan di Palembang peran masyarakat etnis Tionghoa terutama adalah sebagai pemasok bahan makanan, senjata, dan pakaian seragam untuk para pejuang Republik yang diselundupkan dari Singapura. Salah seorang pemuda keturunan Tionghoa yang bernama Theng A Suy, memprakarsai sebuah organisasi di kalangan mereka dengan nama Persatuan Kaum Tani Tionghoa (PKTT) yang menyatakan jati-dirinya sebagai partisan yang sepenuhnya berpihak pada Kemerdekaan Republik. Organisasi yang diketuainya itu



merupakan gerakan yang memberikan bantuan penuh pada Pemerintah Republik Indonesia dengan saluran bantuan lewat pimpinan pemerintahan, A.K. Gani, Abdulrozak, dan jawatan perlengkapan TKR/TNI serta dinas rahasia Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda maupun Inggris. Jaringan organisasi ini pun telah digunakan pula oleh Bung Gani, sehingga terkenal dengan julukan "*The Great Smugler*"

Theng A Soey dan PKTT-nya telah banyak berjasa pada Republik Indonesia, baik sebagai pemasok sayur-mayur, beras, daging, dan lain sebagainya bagi keperluan Sekutu dalam hubungan dengan politik diplomasi Dr. A.K. Gani, maupun sebagai pemasok perlengkapan perang, pemancar radio, kendaraan dan peralatannya, obat-obatan termasuk penicillin, dan perlengkapan untuk pemerintahan sipil. Di antaranya juga disuplai ke Jawa lewat jembatan udara Karang Endah – Maguwo.

Salah seorang kerabat Theng A Soey yang juga banyak berhasa pada Republik pada masa Revolusi adalah Theng Lian Joo yang lebih dikenal dengan nama Tong Djoe. Bentuk perjuangan yang dilakukan Tong Djoe adalah dengan melakukan barter barang antara pihak Indonesia dengan pasukan Inggris di Singapura. Dari Palembang Tong Djoe mengirimkan hasil panen dari Sumatera Selatan seperti kopi yang dirukar dengan pakaian, obat-obatan, senjata, dan lain-lain. Bantuan ini diberikan melalui A.K. Gani sebagai tokoh "penyelundup" (*The Great Smugler*).

Sikap politik sebagian besar masyarakat Tionghoa di Palembang selama masa Revolusi cenderung ambivalen. Mereka mendukung Republik dengan orientasi lebih "ke dalam", yakni untuk menjaga kepentingan masyarakat Tionghoa itu sendiri. Ketidakjelasan sikap yang diperlihatkan sebagian besar komunitas Cina-Palembang membuat kelompok-kelompok radikal-revolusioner dalam tubuh Republik seringkali menuduh mereka "kaki tangan" NICA. Selain kerap diancam akan dibunuh, pada masa Revolusi, orang Tionghoa juga menderita kerugian nyawa serta harta relatif besar dibanding kelompok mana pun dalam masyarakat Palembang. Mereka selalu menjadi korban terbesar dalam setiap konflik bersenjata antara pasukan Republik dengan tentara Belanda.

Menjelang berakhirnya Revolusi, peran pedagang-pedagang Tionghoa dalam kegiatan ekspor impor di Palembang tetap terjaga, meski mengalami sedikit pergeseran. Keikutsertaan mereka melibatkan unsur (sentimen) politik dan ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Kebanyakan pedagang besar Tionghoa yang bergerak dalam usaha dagang adalah mereka yang telah banyak membantu

Jepang, kalau bukannya "kolaborator", sama seperti sebagian pemimpin dan kelompok bisnis Republik. Kelompok-kelompok bisnis Tionghoa yang dituduh Belanda sebagai kolaborator Jepang berada dalam posisi yang sulit dibanding kelompok-kelompok bisnis Republik saat Indonesia memasuki tahap Revolusi.

Sewaktu perang kemerdekaan, semua pejuang membuat palang merah dan dapur umum. Di dalam palang merah dan dapur umum ini orang Tionghoa dan pribumi membaur. Orang Tionghoa yang ikut berjuang di Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan jumlahnya cukup banyak, walaupun hampir tidak ada yang terjun langsung ke medan pertempuran. Orang Tionghoa pada umumnya mendukung perjuangan rakyat Indonesia dengan aktif di palang merah dan dapur umum. Motivasi orang Tionghoa berjuang sama halnya dengan motivasi kaum pribumi yang ingin mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payah dari kaum penjajah, dan juga karena adanya himbauan-himbauan dari tokoh pemimpin masyarakat Sumatera Selatan. Yang ikut berjuang sebagian besar adalah orang Tionghoa yang menganut agama Konghucu

Masyarakat pribumi menanggapi secara positif dan merasa sangat berterimakasih dengan keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, walaupun orang Tionghoa lebih banyak terlibat di palang merah dan dapur umum. Orang Tionghoa yang ikut berjuang ada yang dari golongan Cina Peranakan dan ada pula yang dari Cina Totok.

Di samping ikut membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, ada juga orang Tionghoa yang berkhianat kepada perjuangan tersebut. Mereka adalah orang-orang Cina yang pernah menjadi kaki tangan Belanda yang ditunjuk sebagai pedagang perantara pada masa pemerintahan kolonial. Kesejahteraan hidup yang mereka alami pada masa penjajahan Belanda menyebabkan mereka ingin kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Arsip

- "Centrale Militaire Inlichtingndienst" (CMI), No. 511, 5 Juli 1946.  
*Proc. Gen.*, No. 21, ARA, Den Haag.
- "Chineesche Zaken, April 1947", Bijlage A. *Rap. Ind.*, No. 516-519,  
ARA, Den Haag.
- "Handelsverkeer Pagar Alam-Lahat," *HKGS-NOI*, GG. 31.475/1948.  
CAD, MvD.Den Haag.
- Lee Rubber Coy., " *Proc. Gen.*, No. 436, ARA, Den Haag.
- "Onderwerp: A.K. Gani, " *Proc. Gen.*, No. 284, ARA, Den Haag.
- Regeerings Almanak Deel II*, 1840.
- Regerings Reglement* 1907
- "The Political Lines of the Friends of Indonesia Society", NEFIS  
Publicatie, No. 23, CAD, MvD, Den Haag.
- "Verslag Toestanden Pagar Alam, 16-1'48," *Rap. Ind.*, No. 5'9, ARA,  
Den Haag.

### 2. Koran/Majalah

- Sinar*, 13 Desember 1993.

### 3. Buku

- Abdullah, Maknum (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdiknas dan Jarahnitra.
- \_\_\_\_\_ et al., *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*,  
Palembang: Depdikbud Bagian Proyek Inventarisasi dan  
Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan,  
1991/1992.
- Adams, Cindy, *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams*,  
New York: The Bobs\_Merril Company Inc., 1965.
- Al-Rasjid, Achmad Haroen, et., al. *Peristiwa Pengibaran Merah Putih  
Tanggal 6 September 1945 di Gedung Menara Air Palembang*.  
Palembang : DHC Angkatan 45. 1982
- Alamsjah, Sjam, et al., "Keturunan Cina dari Kalimantan Barat," artikel  
dalam rubrik Rehat Majalah *Sinar*, 13 Desember 1993.
- Alfian, Teuku Ibrahim, "Tentang Metodologi Sejarah" dalam Teuku  
Ibrahim Alfian et al., (eds.), *Dari Babad dan Hikayat sampai  
Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada*

Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Anderson, Benedict, *Some Aspects of Indonesian Politics Under the Japanese Occupation*, Ithaca: Cornell University Press, 1961.

Ari, Kemas. *Masyarakat Tionghoa Palembang ; Tinjauan Sejarah Sosial (1823 – 1945)*. Palembang : Forum Pengkajian Sejarah Sosial Budaya dan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia. 2002.

Azis, M.A., *Japan's Colonialism and Indonesia*, The Hague: M. Nihoffm 1955.

Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Brugmans, I.J. et al., (eds.), *Nederlandsch-Indië Onder Japanese Bezetting: Gegevens en Documenten Over de Jaren 1942-1945*, Franeker: 1982.

Carey, Peter, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi tentang Cina*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Chambert, Henri et al., (eds.), *Panggung Sejarah: Persembahkan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.

Christyawaty, Eny & Almaizon, *Asimilasi Etnis Tionghoa di Kota Palembang: Studi tentang Amalgamasi Masyarakat Etnis Tionghoa dengan Golongan Pribumi*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004.

Dewi, Puspa, et al., *Klenteng Kuno di DKI Jakarta dan Jawa Barat*, Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan Direktorat Purbakala, 2000.

Elsbree, Willard H., *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movemnts 1940-1945*, Cambridge: Harvard University Press, 1953.

Erliandy, "Pempek", *Artikel*, 22 Februari 2008.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

Graghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press), 1984

Gunseikanbu, *Boekoe Pengoempeolan Oendang-oendang*, Djakarta: 1944.

- Hanafiah, Djohan, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Palembang Zaman Bari, Citra Palembang Tempo Dulu*, Palembang: Humas Pemda Tingkat II Palembang, 1988.
- \_\_\_\_\_, (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. Palembang: Pemerintahan Daerah Kotamadya Palembang. 1996
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Palembang Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang : Pemerintahan Kotamadya Palembang. 1998.
- Hasyim, Umar, *Islam bukan Penghalang Pengasiatenggaraan Orang-orang Tionghoa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Jalaluddin, *Petunjuk Kota Palembang dari Wamua ke Kotamadya*, Palembang: Humas Pemda Dati II Kotamadya Palembang, 1991.
- Jeroen Peeters. *Kaum Tuo – Kaum Mudo ; Perubahan Religius di Palembang 1821 – 1942*. Jakarta : INIS. 1997.
- Jumhari, et al., *Jaringan Perdagangan Perantara Etnis Cina di Palembang Pada Permulaan Abad ke-20 sampai Akhir Kolonial Belanda*, Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007.
- Jumhari & Erric Syah, *Rakit Yang Berubah Haluan: Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: Depbudpar Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008.
- Junus, Umar, “Kebudayaan Minangkabau” dalam Koentjaraningrat, *Mamusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Kahin, Audrey, “Some Preliminary Observation on West Sumatra during the Revolution,” dalam *Indonesia*, No. 19 (October 1974), hlm. 77-117.
- Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalisme and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1963.
- Kanahele, George S., “Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence”, *Ph.D. Dissertation*, Ithaca: Cornell, 1967.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

- Kerchman, F.W.M., *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1906*, Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930.
- Kodiran, "Kebudayaan Jawa", dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Kroef, Justus M. Vander, *Indonesia in the Modern World Part I*, Bandung: Tanpa Penerbit, 1954.
- Kunio, Yoshihara, *Konglomerat Oei Tiong Ham, Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Kurasawa, Aiko *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT Grasindo, 1993.
- Kwartananda, Didi, *Lahirnya Satu Generasi Baru Tionghoa di Jawa: Pendidikan dan Resinifikasi di Yogyakarta 1930-an s/d 1950-an*, makalah pada Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an", diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah FIS UNP bekerjasama dengan NIOD, Padang tanggal 18-21 Juni 2006.
- \_\_\_\_\_, "Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945" dalam Seri Siasat Kebudayaan, *Penguasaan Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Latief Dt. Bandaro, Ch. N., *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 2002.
- La Ode, M.D. *Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat (Perspektif Ketahanan Nasional)*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1997.
- Lebra, Joyce C., *Tentara Gemblengan Jepang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Lembaga Studi Realino: *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.
- Marsden, William, *Sejarah Sumatra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

- Meilink-Roelofsz, M.A.P., *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1695*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1962.
- Nas, Peter J.M. *Kota-kota Indonesia Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, Jakarta: Keng Po, 1961.
- Ong Hok Ham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok: Komunitas Bambu, 2005.
- G. Pakpahan, *1261 Hari di Bawah Sinar Matahari Terbit*, Jakarta: Marintan Jaya, 1979.
- Purwanto, Bambang, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris" dalam *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta Persembahkan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002.
- Ratnawati, Latifah, "Kebudayaan Palembang" dalam Achadiati Ikram, *Jati Diri yang Terlupakan Naskah-naskah Palembang*, Jakarta: YANASSA, 2004.
- Reid, Anthony J.S., *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Reeve, David *et al.*, (eds.), *Onze Ong Onghokham dalam Kenangan*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2007.
- Said, Abi Hasan, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera*, Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992.
- Sa'dun M., Moch (ed.), *Pri-Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 19996.
- Sevenhoven, I.L., *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971.
- \_\_\_\_\_, "De Beschrijving van de Hoofdplaats Palembang", dalam *VBG*, IX (1825),
- Siauw Giok Tjhan, *Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar*, Amsterdam: Teratai, 1981.
- Sjahrir, Sutan, *Renungan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1947.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

- Sommer, Mary F.A., "Peranakan Chinese Politics in Indonesia". *Ph.D Dissertation*, Ithaca: Cornell, 1965.
- Somers-Heidhues, Mary, "Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis Cina dan Revolusi Indonesia", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu (eds.), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Grafiti Pers, 1991.
- Sulhi, Muhammad, "Merekonstruksi Masa lalu, Mungkinkah? dalam Lily Wibisono (ed.), *Etnik Tionghoa di Indonesia*, PT Intisari Mediatama, 2006.
- Surjo, Djoko, "Kota dan Pembauran Sosio-Kultural dalam Sejarah Indonesia" dalam Team Peneliti IDSNI, *Interaksi Antarsukubangsa dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud, 1989.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, "Pri-Nonpri dalam Perspektif Integrasi Sosial dan Pemerataan Pembangunan", dalam
- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Syafidin, Nurhayati, et al., *Perkawinan Wong Palembang Menurut Tatanan Adat*. Palembang : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. 206.
- Taher, Tarmizi, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi bangsa di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1997.
- Taim, Eka Asih Putriana, "Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang dari Masa ke Masa, dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayarta* Volume 7 No. 2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002.
- Tanjung, Ida Liana, "Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatra Selatan Abad ke 20", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta : UGM. 2006.
- Tan, Melly G. (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981.
- Tim Penulis Sejarah Kota Palembang, *Palembang Doeloe, Sekarang dan Akan Datang*, Palembang: Humas Kota Palembang, 2000.
- Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan, *Sejarah dan Peranan Subkoss dalam Perjuangan Rakyat*



*Sumbagsel (1945-1950)*, Palembang: DHD – 45 Provinsi Sumatera Selatan, 2003.

Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2005.

---

\_\_\_\_\_, “Indonesian Bussiness Communities in Transformation 1940-1950”, *Disertasi Ph.D.*, Canberra, Australian National University, 1987.

Utomo, Bambang Budi, *et al.*, *Kota Palembang: Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, Palembang : Pemerintahan Daerah Kota Palembang dan Paguyuban Masyarakat Peduli Musi, 2005.

Vasanti, Puspa, “Kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Wang Gungwu, *Community and Nation: Essays on Southeast Asia and The Chinese*, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books [Asia] Ltd., 1981.

Wardoyo, T. S., *Tan Jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Jogjakarta*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Wibisono, Lily, *Etnik Tionghoa di Indonesia*, PT Intisari Mediatama, 2006.

Widyardono, Bob, *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*, Jakarta: Pustaka Azet, 1989.

Wijayakusuma, H.M. Hembing (ed.), *Muslim Tionghoa Cheng Ho Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2007.

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 I*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Yudohusodo, Siswono, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1996.

Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.

---

\_\_\_\_\_, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historica Foundation of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996.

Zein, Abdul Baqir, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*,  
Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000.

## BAB II

### PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN ASAL JAWA DI DESA TUGUMULYO, KECAMATAN LEMPUNG, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (1970-2010) <sup>1</sup>

Seno<sup>2</sup>

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil. Berkenaan dengan situasi kependudukan dalam hal perpindahan yang cukup berarti, empat pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mempunyai peranan yang sangat penting. Sensus penduduk Indonesia pada tahun 1980-an, didapatkan keadaan sebagai berikut. Seluruh penduduk Pulau Sumatera yang berjumlah lebih dari 28 juta orang, lebih dari 2,9 juta lahir di pulau Jawa dan penduduk Jawa yang 91, 3 juta, hanya 718.500 orang lahir di Sumatera.<sup>3</sup> Kondisi ini merupakan perpindahan penduduk paling besar yang pernah terjadi di Indonesia.

Kenyataannya, migrasi yang dilakukan orang-orang Jawa di Sumatera lebih banyak dilakukan melalui program transmigrasi yang diprakarsai oleh Pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai Departemen Transmigrasi, suatu badan tingkat tinggi yang mendorong redistribusi penduduk di dalam negeri. Departemen ini merupakan kebutuhan bagi negara Republik Indonesia yang berpenduduk tidak merata. Wilayah negara yang berpenduduk sangat padat adalah Jawa, Madura dan Bali. Daerah yang sangat jarang penduduknya seperti Sumatera menjadi tujuan pemerintah untuk melaksanakan program transmigrasi.<sup>4</sup>

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan yang bertujuan untuk meratakan penyebaran penduduk ke seluruh wilayah dengan sasaran utama ke daerah di luar Jawa yaitu kepulauan Sumatera. Transmigrasi sebagai pemindahan

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2011.

<sup>2</sup> Peneliti Madya Pada BPSNT Madang

<sup>3</sup> R.H. Pardoko, *Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi*, (Bandung : Angkasa, 1987), hal. 7.

<sup>4</sup> R.H. Pardoko, *Ibid.*, hal. 10.

penduduk maka dalam pemindahan tersebut masyarakat yang pindah dalam hal ini masyarakat Jawa secara otomatis juga membawa budaya dan adat istiadat dari daerah asalnya. Ketimpangan yang terjadi di bidang ekonomi adalah faktor utama terjadinya transmigrasi untuk memperbaiki nasib yang menghimpit sebagai akibat adanya tekanan ekonomi<sup>5</sup>.

Berhasilnya transmigrasi membuka peluang yang lebih pasti untuk memecahkan masalah pangan dan lapangan kerja yang makin lama makin menyita perhatian Pemerintah. Selain itu, mutlak perlu pemecahan masalah kependudukan dan mendukung pemerataan penduduk Indonesia dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengembangkan kebudayaan nasional yang beragam.<sup>6</sup>

Dalam menyediakan lahan pemukiman bagi para migran dibutuhkan kerja sama yang baik antar Departemen terkait, diantaranya yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertanian.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi landasan kerja sama berbagai departemen dalam kegiatan transmigrasi ini adalah Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1978 mengenai Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (BAKORTTRANS) dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1976 yaitu tentang sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.<sup>8</sup>

Tujuan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah bertitik tolak pada pembangunan sektor ekonomi dengan penekanan pembangunan bidang pertanian guna meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya. Perhatian Pemerintah ditujukan pada tiga masalah pokok, yaitu kependudukan, pangan dan lapangan pekerjaan. Melalui program transmigrasi, ketiga masalah pokok di atas dapat diatasi dengan mencetak sawah-sawah baru di daerah permukiman transmigrasi.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> R.H. Pardoko, *Ibid.*, hal. 15.

<sup>6</sup> Mursito Ndaru Sunarto, "Prospek Transmigrasi Melancarkan Pembangunan Pedesaan", *Analisa*, Nopember No. 11 Tahun XI, 1982), hal. 60. Lihat juga Ismah Afwan, Sri Sumarni, Kustadi, *Kerja Sama Antar Departemen/Lembaga Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hal. 175.

<sup>7</sup> Kustadi, *Masalah Pertanahan di Daerah Permukiman Transmigrasi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hal. 55.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>9</sup> Indriati Eko Purwaningsih, *Masalah Produksi dan Pemasaran Hasil Komoditi Pertanian di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 89-90.

Satu daerah yang menjadi tujuan program transmigrasi di Sumatera adalah Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera sudah berlangsung sejak zaman Belanda, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda membuka beberapa jenis perkebunan di Sumatera Timur, Aceh Timur, Sumatera Selatan dan Lampung. Kekurangan tenaga buruh perkebunan, oleh Pemerintah Belanda didatangkan dari Jawa yang terkenal sebagai pekerja kuli yang rajin dan ulet dengan upah yang murah. Program transmigrasi yang dilaksanakan pada masa Kolonial Belanda dapat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan Undang-Undang Agraria, yang kemudian melahirkan Politik Pintu Terbuka dan Politik Etis yang diprogramkan meliputi pendidikan, irigasi dan transmigrasi. Salah satu alasan yang dipakai adalah melalui pemerataan penduduk Jawa yang dinilai sangat padat untuk dipindahkan ke luar Jawa, terutama Sumatera. Pelaksanaan transmigrasi oleh Pemerintah Kolonial tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa ke Pulau Sumatera yang sangat jarang penduduknya, yang pada kenyataannya justru hanya sebagai kedok untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan yang murah di Sumatera.<sup>10</sup>

Pada zaman kemerdekaan, Pemerintah Indonesia juga melakukan program transmigrasi dari daerah yang padat ke daerah yang kosong untuk membuka lahan pertanian baru. Penduduk yang besar jumlahnya tinggal di wilayah yang luasnya hanya 7 persen dari seluruh kepulauan Indonesia. Akibatnya, Jawa berpenduduk sangat padat, rata-rata seorang petani menggarap tanah seluas 0, 2 hektar. Jumlah ini kurang dari luas minimum yang dibutuhkan untuk hidup seorang petani beserta keluarganya.<sup>11</sup>

Perlu dicarikan jalan keluar untuk mengatasi kondisi kepadatan penduduk Jawa. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu melaksanakan program transmigrasi. Jika di sebuah pulau penduduknya sangat padat, dan di pulau lainnya sangat jarang penduduknya atau malah banyak yang kosong, maka jalan keluarnya adalah melaksanakan program transmigrasi. Bagi mereka yang tidak mempunyai tanah pertanian atau lahannya terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dapat ikut program transmigrasi yang dibiayai oleh Pemerintah. Mereka dapat membuka lahan pertanian baru dengan menerima sekitar 2 hektar tanah pertanian untuk ditanami tanaman

---

<sup>10</sup> Mestika Zed, "Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial akhir", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM-Pustaka Pelajar, 2002), hal. 298.

<sup>11</sup> Indriati Eko Purwaningsih, *Op.cit.*, hal. 90.

pangan atau perkebunan. Program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan sangat menarik untuk diteliti karena sampai saat ini masih banyak persoalan, hambatan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya kegagalan transmigrasi di beberapa daerah, khususnya di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing. Kenyataannya, di beberapa daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), hambatan dan masalah tersebut sering terjadi.

Kayu Agung merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang meliputi 12 kecamatan antara lain Kecamatan Kayu Agung, Kecamatan Padamaran, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kecamatan SP Padang, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Pampangan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Lempuing. Kecamatan Lempuing pada awalnya masuk dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Setelah dilihat kembali letak wilayahnya, Kecamatan Lempuing lebih dekat letaknya dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), maka pada tanggal 20 Oktober 1980 Kecamatan Lempuing ini beralih kekuasaan dari Kabupaten OKU ke Kabupaten OKI. Jarak antara Kecamatan Lempuing dengan Kabupaten OKI (Kayu Agung) sekitar 69 km. Lempuing ini terdiri dari 23 desa, antara lain Desa Lubuk Seberuk, Desa Muara Bernai, Desa Jae, Desa Tugu Jaya, Desa Tugu Agung, Desa Kepayan, Desa Bumi Agung, Desa Sidang Sari, Desa Tulung Harapan, Desa Tugumulyo dan desa-desa lainnya.<sup>12</sup>

Desa Tugumulyo merupakan salah satu daerah transmigrasi yang berhasil dalam bidang pertanian dibandingkan dengan desa transmigrasi lainnya yang ada di Kecamatan Lempuing. Sebelum dibuka menjadi daerah transmigrasi, Tugumulyo merupakan daerah kawasan hutan yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Setelah daerah ini dibuka sebagai daerah transmigrasi lokal, lambat laun menjadi suatu tempat pemukiman yang sangat ramai.<sup>13</sup>

Tugumulyo baru dibuka pada tahun 1970 dan mempunyai luas wilayah 12.500 hektar. Transmigrasi yang ada di Desa Tugumulyo ini termasuk dalam jenis transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu daerah tertentu dari suatu daerah setempat lainnya. Jumlah penduduk yang ada di Tugumulyo adalah 9.971 jiwa yang terdiri dari 4.051 jiwa laki-laki, 5.920 jiwa perempuan dan 3.285 kepala keluarga yang mempunyai

---

<sup>12</sup> Monografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

<sup>13</sup> Wawancara dengan H. Supamo, Kepala Desa Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 13 September 2011.

kepadatan penduduk 80 orang perkm. Desa Tugumulyo ini dikepalai oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh staf desa lainnya. Pusat Pemerintahan Kecamatan Lempuing berada di kota Kayu Agung yang merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).<sup>14</sup>

Para transmigran yang datang ke daerah Tugumulyo adalah dari Jawa Barat (Sunda), Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, penduduk asli Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Desa Tugumulyo ini tidak hanya dihuni oleh para transmigran, tetapi juga dihuni oleh orang-orang dari suku lain seperti Batak, Mandailing, Minangkabau dan Bugis.<sup>15</sup> Mereka hidup membaur satu sama lainnya karena mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain yang ada di sekitarnya.

Hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat di Tugumulyo tidak terlepas pada hubungan mereka sesama orang Jawa saja, tetapi juga hubungan mereka dengan para transmigran lainnya yaitu Bali, Sunda, dan penduduk asli (Ogan Ilir dan Ogan Ulu) sehingga terjadi hubungan timbal balik di antara mereka. Hubungan antara individu dan kelompok pada masyarakat di Tugumulyo dipengaruhi oleh faktor bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi sehari-hari, karena dalam berkomunikasi sering terjadi kesalah-pahaman antara orang Jawa, Bali dan penduduk asli. Selain itu, tata cara dan adat pergaulan antar masyarakat di Tugumulyo juga berbeda satu dengan yang lainnya<sup>16</sup>.

Bentuk interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat di Tugumulyo terlihat dalam proses asosiatifnya. Asosiatif merupakan proses yang terjadi di antara orang-orang yang terlibat dan memiliki kesamaan dan keserasian pandangan sehingga mereka mengarah pada satu kesatuan. Selain itu bentuk interaksi lainnya adalah dalam proses kerja sama yaitu proses sosial yang terjadi di mana orang-orang yang terlibat aktivitas selalu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama untuk pemecahan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sifat kegotong royongan pada masyarakat di Tugumulyo masih sangat kental. Hal ini terlihat dari program desa mereka yang selalu mengadakan pembersihan yang disebut Jum'at bersih lingkungan pada setiap hari Jum'atnya yang dikerjakan secara bergotong royong dengan tujuan untuk kebersihan lingkungan desa mereka. Sistem jaga malam atau

---

<sup>14</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2010.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Marjowinangun di Tugumulyo 3 pada tanggal 10 September 2011.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pronowiyoto di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.

siskamling masih berlaku di Tugumulyo dan setiap kepala keluarga mendapat giliran untuk menjaga keamanan desa pada malam hari.<sup>17</sup>

Perekonomian di Tugumulyo ini tergolong sudah berhasil dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Lempuing. Membaiknya tingkat perekonomian penduduk Tugumulyo ini disebabkan di desa tugumulyo terdapat pasar desa tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar Tugumulyo ini terletak tidak jauh dari tempat pemukiman penduduk dan pasar ini dibuka setiap hari, tetapi hari yang paling ramai adalah hari Senin dan Kamis karena hari itu adalah hari kalangan dan harga barangnya lebih murah dibandingkan pada hari lainnya. Di sekitar pasar Tugumulyo juga terdapat beberapa hotel dan penginapan bagi para pelancong dan wisatawan yang ingin bermalam. Di samping itu juga terdapat beberapa mesjid sebagai tempat beribadah, bahkan ada satu mesjid Taqwa yang sangat besar dan megah yang terletak di seberang pasar sebagai tempat beribadah masyarakat.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Tugumulyo sebagai petani. Tugumulyo mempunyai potensi yang baik di bidang pertanian, hal ini terbukti bahwa Tugumulyo merupakan penghasil beras yang cukup besar di Kecamatan Lempuing dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya. Tugumulyo juga menghasilkan tanaman palawija dan buah-buahan, tetapi ada juga sebagian kecil dari masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengrajin.<sup>18</sup>

Pemerintah pada dasarnya telah mencanangkan bahwa setiap pemukiman transmigrasi sebelum dibangun maka akan dilihat terlebih dahulu alternatif bisnisnya dan peluang pasar daerah itu. Peluang itu pada komoditi hutan, komoditi perkebunan, komoditi perikanan, komoditi peternakan dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Budaya yang ada di Tugumulyo sangat beragam yang terdiri atas budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, budaya Palembang, dan beberapa budaya etnis lain seperti Minang, Mandailing dan Bugis, tetapi budaya yang paling dominan adalah budaya Jawa karena penduduk Jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dari etnis lainnya. Budaya Jawa yang berkembang di Tugumulyo adalah wayang kulit, ketoprak, kudalumping, tayuub dan sebagainya.<sup>20</sup> Pada upacara

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Wongsorejo, seorang tokoh pemuda di Tugumulyo 4 pada tanggal 13 September 2011.

<sup>18</sup> Profil Desa Tugumulyo Tahun 2010.

<sup>19</sup> Rukmadi, *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Daerah Pemukiman*, (Jakarta : Rajawali, 1984, hal. 13

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ki Mangun Sarkoro, Tokoh Budaya Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.



perkawinan, baik itu antara orang Jawa dengan orang Bali maupun dengan penduduk asli, maka adat perkawinan yang dipakai adalah adat perkawinan Jawa karena budaya Jawa lebih dominan di Tugumulyo dalam arti budaya Jawa lebih menonjol dari pada budaya lainnya.

Masyarakat tidak mungkin hidup terpisah satu sama lainnya karena setiap masyarakat, akan terdapat suatu kebudayaan dan menurut pendapat orang Jawa pada umumnya kebudayaan adalah suatu kesatuan yang homogen karena mereka sadar bahwa keanekaragaman sifatnya regional<sup>21</sup>, begitu juga dengan kebudayaan Jawa yang ada di Tugumulyo yang tercermin dari unsur-unsur budaya yang ada.

Keberadaan daerah Tugumulyo membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan hal ini terlihat dalam bidang ekonomi, yaitu dari taraf hidup yang lebih baik dari daerah asal transmigran Jawa sebelumnya, karena mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak dan lebih baik. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan program transmigrasi adalah sejauh mana program tersebut mendorong terjadinya transformasi sosial ekonomi dan budaya di kalangan transmigran, begitu juga dengan transmigrasi yang ada di Tugumulyo, yaitu adanya suatu interaksi dan transformasi sosial ekonomi dan budaya antar masyarakat.

Penulis menganggap tema ini penting karena penulis ingin melihat dan mengetahui lebih jauh bagaimana kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa Tugumulyo sehari-hari. Penulis ingin mengenal lebih dekat daerah Tugumulyo dalam bidang sosial ekonomi dan budaya masyarakat Jawa di daerah transmigrasi Tugumulyo tersebut.

## **2. Pembatasan Masalah/Ruang Lingkup**

Permasalahan yang hendak dilihat mengenai transmigran asal Jawa ke Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) ini adalah sebagai berikut :

- a. Siapakah yang menjadi transmigran?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong mereka bertransmigrasi?
- c. Bagaimanakah perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat transmigran dan masyarakat setempat?

---

<sup>21</sup> *Interaksi antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk*, (Yakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjarahnitra, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989), hal. 46.

- d. Bagaimanakah hubungan antara para transmigran dengan penduduk setempat?

Penelitian ini dibatasi dalam lingkup spasial dan temporal. Batasan spasial penelitian ini hanya dilakukan di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan temporalnya dibatasi mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 2010. Adapun alasan dipilihnya kurun waktu tersebut, karena pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya di Desa Tugumulyo dilaksanakan pada tahun 1970 dan berproses terus hingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigran mengalami kemajuan hingga kini.

### **3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat transmigran di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selanjutnya juga dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya. Penelitian ini dapat memberi gambaran dan informasi tentang keadaan daerah yang menjadi lokasi transmigrasi, sehingga dapat memperkaya penulisan sejarah lokal di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan tepat sehingga pembangunan di daerah pedesaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak menimbulkan benturan budaya dan konflik antar etnik.

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar ada dua manfaat. Pertama adalah manfaat secara akademis, yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah, khususnya yang berkaitan dengan transmigrasi orang-orang Jawa di Sumatera Selatan, khususnya di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI. Dengan diangkatnya masalah transmigran dari Jawa ke Tugumulyo Kecamatan Lempuing ini, maka kita akan dapat mengetahui permasalahan dan konflik yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya atau mengeliminir permasalahan menjadi kekuatan yang mendorong bangsa ini menjadi kokoh, bersatu membangun ekonomi yang lebih makmur.

Manfaat kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah manfaat secara praktis, yaitu akan dapat dipergunakan sebagai pengalaman masa lalu untuk menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik di masa mendatang dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

#### 4. Kerangka Pemikiran

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah di bidang kependudukan yang bertujuan untuk meratakan penyebaran penduduk ke seluruh wilayah dengan sasaran utama ke daerah luar Jawa yaitu ke Pulau Sumatera. Transmigrasi sebagai pemindahan penduduk, maka dalam pemindahan tersebut masyarakat yang pindah dalam hal ini masyarakat Jawa secara otomatis juga membawa budaya dan adat-istiadat dari daerah asalnya. Ketimpangan yang terjadi di bidang ekonomi merupakan faktor utama terjadinya transmigrasi untuk memperbaiki nasib yang menghimpit kehidupan sosial ekonominya.<sup>22</sup>

Sebelum membahas masalah program transmigrasi, terlebih dahulu kita ungkap mengenai makna transmigrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah atau pulau yang padat ke daerah atau pulau lain yang berpenduduk jarang.<sup>23</sup> Makna tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Muhajir, yang mengatakan bahwa transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang sedikit penduduknya dalam suatu negara.<sup>24</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rukmadi dalam Khodijah, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu propinsi ke propinsi lain dalam suatu wilayah.<sup>25</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah/propinsi yang padat penduduknya ke daerah/propinsi yang jarang penduduknya dalam suatu wilayah untuk pemerataan penduduk. Transmigrasi ini merupakan program pemerintah sehingga pelaksanaannya juga dibiayai oleh Pemerintah. Orang yang ikut program transmigrasi disebut transmigran.

Agar pelaksanaan program transmigrasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah berusaha untuk mensukseskan program transmigrasi ini melalui Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972.<sup>26</sup> Dalam pasal 4 PP No. 42

---

<sup>22</sup> Chadidah, *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 47.

<sup>23</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hal. 654.

<sup>24</sup> Utomo Muhajir, *90 Tahun Kolonisasi – 45 Tahun Transmigrasi*, (Jakarta : Pulsa Swara, 1997), hal. 6.

<sup>25</sup> Chadidah, *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 1.

<sup>26</sup> Rozi Munir, "Transmigrasi, Apa dan Masalahnya" dalam Sri Edi (ed.), *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia, 1905-1985*, (Yakarta : Universitas Indonesia, 1985), hal. 276.

Tahun 1972 dinyatakan bahwa transmigrasi ada dua bentuk, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa/spontan.<sup>27</sup> Transmigrasi umum ialah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah, sedangkan transmigrasi swakarsa ialah transmigrasi yang pelaksanaannya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang bersedia membiayainya.<sup>28</sup> Di samping itu juga ada transmigrasi dengan nama lain, seperti transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu daerah tertentu dari suatu daerah ke tempat lainnya.<sup>29</sup> Transmigrasi *bedol deso* adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang dilakukan secara menyeluruh dalam suatu desa mulai dari perangkat desa sampai warga desa tersebut.<sup>30</sup> Maksudnya, seluruh warga desa, termasuk Kepala Kampung dan Ketua RT/Rwnya ikut transmigrasi.

Biasanya transmigrasi *bedol deso* ini terjadi jika ada bencana alam, seperti gunung meletus atau bencana lainnya yang menyebabkan seluruh warga desa harus berpindah ke daerah yang baru untuk membuka lahan pertanian yang baru. Untuk itu mereka harus ditransmigrasikan. Contohnya, ketika Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus dan menghancurkan daerah di sekitarnya, maka ada beberapa desa yang terpaksa harus dikosongkan dan seluruh penduduknya harus ditransmigrasikan ke Sumatera dan Kalimantan<sup>31</sup>. Transmigrasi semacam ini disebut transmigrasi *bedol deso*.

Mereka yang ditransmigrasikan ke pulau Sumatera harus beradaptasi dengan penduduk setempat. Hal ini perlu karena mereka akan berinteraksi dan bergaul dengan penduduk setempat yang nota bene berbeda adat-istiadat, budaya, bahasa dan falsafah hidupnya.<sup>32</sup> Transmigrasi sebagai kelanjutan dari proyek kolonisasi pada masa Pemerintahan Belanda, kini telah berubah tujuan. Jika pada masa Belanda berorientasi pada pemenuhan tenaga kerja di perkebunan-

---

<sup>27</sup> Sujarwadi, "Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan dan Transmigrasi Perkebunan" dalam Rukmadi Warsito dkk., *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Chodidah, B. Raharjo, *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta : Raja wali, 1984), hal. 26.

<sup>31</sup> "Bencana Merapi, Ada Beberapa Desa yang Hancur, Mereka harus Dittransmigrasikan", Dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, tanggal 8 November 2010, hal. 4.

<sup>32</sup> Presiden Indonesia, *Pidato Pertanggung Jawaban Presiden Mandataris MPR RI pada tanggal 1 Maret 1983*, (Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1983), hal. 830.

perkebunan swasta Belanda, tetapi setelah Indonesia merdeka transmigrasi bertujuan untuk pemerataan dan penyebaran penduduk. Tujuan ini dipertegas dengan adanya UU No. 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi dan PP No. 42 Tahun 1972 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Berdasarkan UU dan PP tersebut, tujuan transmigrasi yaitu : (1) Peningkatan taraf hidup; (2) Pembangunan daerah; (3) Keseimbangan penyebaran penduduk; (4) Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia; (5) Pemanfaatan sumber alam dan tenaga manusia; (6) Persatuan dan kesatuan bangsa; (7) Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.<sup>33</sup>

Pembangunan dalam bidang transmigrasi erat kaitannya dengan pembangunan daerah penerima. Bagi daerah asal dapat mengurangi beban penduduk yang sangat padat, sedangkan daerah penerima dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sangat kurang dalam mengerjakan tanah yang masih kosong atau belum tergarap. Ada beberapa desa/daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masih kosong, masih berupa lahan tidur yang tidak tergarap karena tidak ada tenaga kerja. Untuk itu, perlu didatangkan orang-orang dari Jawa yang nota bene kelebihan penduduk, sehingga kehadiran para transmigran dapat saling menguntungkan.<sup>34</sup>

Keuntungan bagi masyarakat setempat, di samping daerahnya menjadi produktif juga dapat membuka daerah tersebut dari keterasingan dunia usaha, khususnya dalam bidang pertanian tanaman pangan. Kekurangan tenaga kerja dapat dipenuhi dengan hadirnya para transmigran asal Jawa yang nota bene sangat padat penduduknya. Di samping itu, masyarakat setempat juga dapat meniru sistem pertanian baru yang dibawa oleh para transmigran. Tentunya yang dapat ditiru adalah cara-cara bercocok tanam yang lebih baik dari yang mereka kerjakan semula, sehingga mereka yang tadinya hanya asal-asalan dalam mengerjakan tanah pertanian, sekarang mereka dapat lebih produktif dengan sistem pertanian yang diperlihatkan oleh para transmigran yang telah mengenal sistem panca usaha tani atau pertanian terpadu.<sup>35</sup>

Penduduk desa di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi serta memperkaya budaya, sehingga menjadi lebih terbuka terhadap kaum pendatang yang membawa beragam kebiasaan dan tradisi dari daerah asalnya. Akibatnya terjadi saling mengenal dan saling menghargai serta

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Wawancara dengan Wongso dan Sarijo di Tugumulyo 2 pada tanggal 12 September 2011.

mempererat tali persaudaraan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat lebih diperkokoh.<sup>36</sup>

Keuntungan bagi para transmigran, sudah jelas mereka mendapatkan lahan pertanian yang cukup untuk dikelola sebagai tempat bercocok tanam. Jika di daerah asalnya mereka tidak memiliki tanah pertanian, maka di daerah yang baru tersebut, mereka dapat memiliki lahan pertanian sekurangnya 2 hektare sawah yang dapat ditanami tanaman pangan. Kehadiran para transmigran asal Jawa di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyebabkan kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas menjadi penting untuk ditingkatkan, sehingga dapat membuka keterasingan daerah tersebut. Adanya prasarana dan sarana jalan yang baik, maka hasil pertanian yang melimpah di daerah tersebut dapat di jual ke kota atau daerah lain yang membutuhkan<sup>37</sup>. Sebaliknya, daerah tersebut juga dapat dengan mudah mendatangkan segala kebutuhan dari daerah lain. Dampaknya menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi transmigran, maupun penduduk setempat, sehingga perekonomian rakyat menjadi lebih baik.

Agar tidak menimbulkan benturan budaya, maka dalam penempatan para transmigran dari Jawa, diusahakan sedapat mungkin dimukimkan di daerah yang masih kosong. Jika ada tanah yang masih dikuasai oleh masyarakat adat, harus dibebaskan terlebih dahulu dengan cara memberi ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan. Para transmigran yang didatangkan diusahakan mereka yang bisa berinteraksi dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sehingga mereka dapat cepat beradaptasi dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Mengingat masyarakat setempat merupakan masyarakat yang beragama Islam, maka penempatan para transmigran juga diperuntukkan bagi mereka yang juga beragama Islam, sehingga lebih mudah berbaur dan berinteraksi serta tidak menimbulkan ekses negatif, baik bagi masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat<sup>38</sup>.

Menurut keterangan salah seorang transmigran asal Jawa, masyarakat Jawa yang ada di Tugumulyo adalah masyarakat pendatang. Pada awalnya mereka merupakan para transmigran dari daerah Kecamatan Belitang, Kecamatan Muay Madang, Kabupaten Ogan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Dalimin di Tugumulyo 1 pada tanggal 14 September 2011.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Parmanto, pedagang Pasar Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 14 September 2010.

<sup>38</sup> Wawancara dengan H. Nanang Abdullah, Imam Mesjid Pasar Tugumulyo pada tanggal 13 September 2010.

Komerling Ulu (OKU). Mengingat lahan di daerah tersebut sudah terlalu sempit dan tidak memadai sebagai tempat tinggal, maka sebagian kecil dari mereka pindah ke daerah Tugumulyo sebagai transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal merupakan pemindahan penduduk yang terjadi dalam suatu daerah tertentu dari satu daerah ke tempat lainnya. Kehidupan masyarakat Jawadi Tugumulyo tidak hanya tergantung pada sektor pertanian saja, tetapi juga dari sektor-sektor jasa, dagang dan industri kecil.<sup>39</sup>

Transmigrasi sebagai pemindahan penduduk, maka dalam pemindahannya masyarakat yang pindah itu secara otomatis juga membawa budaya dan adat-istiadat dari daerah asalnya. Demikian juga transmigrasi dari Jawa yang ada di Tugumulyo juga membawa adat dan budaya mereka masing-masing. Para transmigran sudah terbiasa hidup dengan pola-pola budaya di daerah asalnya, tiba-tiba harus merubah cara hidupnya dengan menyesuaikan diri dengan kondisi yang serba baru.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan program transmigrasi adalah sejauh mana program itu mendorong terjadinya transformasi budaya di kalangan transmigran. Di samping itu, program transmigrasi diharapkan dan diupayakan dapat memberi keuntungan sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi. Artinya, kehadiran para transmigran dapat memberikan berbagai pengetahuan (teknologi baru) dalam bidang pengembangan usaha tani atau usaha lain, dan berbagai keterampilan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat meningkatkan standar hidup mereka.

Sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program transmigrasi ini agar terlaksananya transmigrasi yang teratur dalam jumlah yang besar-besaran untuk mencapai peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga manusia, serta kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Para transmigran umumnya dapat meningkatkan taraf hidupnya dari pengembangan usaha tani, industri kecil dan berbagai kegiatan non pertanian yang mereka tekuni. Sedangkan masyarakat lokal hampir tidak dapat memanfaatkan kehadiran atau pengembangan ketransmigrasian di sekitarnya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Paijo, seorang transmigran asal Jawa bertempat di Tugumulyo 5 pada tanggal 12 September 2010.

## 5. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa buku yang menyinggung masalah transmigrasi, di antaranya yaitu : (1) Ruknadi Warsito, dkk., *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Cetakan Kedua Juni 1995, Terbitan Raja Grafindo Persada. Buku ini merupakan kumpulan tulisan hasil penelitian beberapa orang dosen atau peneliti. Ada enam tulisan, di antaranya yaitu (a) Tulisan Sujarwadi dengan judul : *"Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan, Transmigrasi Perkebunan dan Transmigrasi Industri"* yang berisi tentang jenis-jenis transmigrasi yang dijalankan oleh Pemerintah. Di samping itu juga mengungkap masalah transmigrasi yang dilakukan oleh para nelayan, transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga perkebunan di daerah atau pulau lain, transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh pada industri; (b) Kustadi yang menulis tentang : *"Masalah Pertanahan di Daerah Pemukiman Transmigrasi"*; Tulisan ini membahas masalah sengketa tanah yang diambil untuk para transmigran. Tanah tersebut diaku oleh penduduk setempat sebagai tanah miliknya, dan belum ada kesepakatan ganti rugi. (c) Indriati Eko Purwaningsih berjudul : *"Masalah Produksi dan Pemasaran Hasil Komoditi Pertanian di Daerah Transmigrasi"*. Tulisan ini membahas masalah hasil pertanian di daerah transmigrasi yang diperdagangkan ke daerah lain. (d) Tulisan Chodiyah Budi Raharjo yang berjudul *"Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Pemukiman Transmigrasi"*, yang menguraikan masalah benturan sosial dan budaya di daerah transmigrasi antara penduduk setempat dengan para transmigran. Konflik sosial dan budaya ini muncul karena antara transmigran asal Jawa dengan penduduk setempat berbeda jauh adat budaya dan tradisinya sehingga berpotensi menimbulkan konflik. (e) S. Ismah Afwan, Sri Sumami, Kustadi, berjudul *"Kerja Sama antar Departemen/Lembaga Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi"* berisi kerja sama antar departemen dalam menangani program transmigrasi. Hal ini dilakukan agar program transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berhasil dengan baik. (f) Arief Budiman berjudul *"Menuju Pola Transmigrasi Tri-Partial Sebuah Agenda Penelitian"*;

Buku lain yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini adalah karangan R.H Pardoko yang berjudul *"Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi"* Penerbit Angkasa Bandung tahun 1987, yang menguraikan masalah Arus migasi di Indonesia. Di samping itu juga membahas masalah Urbanisasi dilihat dari segi ekonomi dan pembangunan.



## 6. Metode

Berdasarkan judul dan batasan masalah serta didukung oleh klasifikasi yang dikemukakan, penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif, yang akan mendiskripsikan perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat transmigran asal Jawa di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat tentang fenomena sosial tertentu yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara hidup kaidah antara berbagai gejala sosial, dan satu hal yang tidak dapat dicapai oleh penelitian yang bersifat menerangkan.<sup>140</sup>

Sampel penelitian adalah individu yang tinggal dalam masyarakat yang diambil berdasarkan sampel wilayah dan sampel responden. Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah suatu kecamatan yang sangat luas dan merupakan kecamatan hasil pemekaran yang terdiri dari banyak desa. Desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Lempuing merupakan desa-desa transmigrasi lokal yang mayoritas berasal dari etnis Jawa. Mengingat luasnya wilayah Kecamatan Lempuing, maka yang menjadi sampel wilayah kecamatan adalah Desa Tugumulyo, dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Desa Tugumulyo merupakan desa transmigrasi pertama tahun 1970; (2) desa Tugumulyo mempunyai wilayah yang cukup luas dibanding dengan desa-desa lain yang terdapat di Kecamatan Lempuing. Luas desa ini adalah 12.500 hektar; (3) Populasi masyarakat Jawa lebih dominan dengan jumlah penduduk 5.470 orang yang terdiri dari 2.347 laki-laki dan 3.123 perempuan; (4) Desa Tugumulyo merupakan desa transmigrasi yang sudah maju dalam bidang pertanian dan perekonomian di Kecamatan Lempuing; (5) Letak desa ini dilalui jalan raya Sumatera lintas timur sehingga arus informasi dan transportasi sangat lancar.

Sampel responden dalam penelitian ini diambil dari individu yang tinggal dalam masyarakat Jawa di desa Tugumulyo dengan populasi dari individu yang tinggal dalam masyarakat Jawa di Desa Tugumulyo dengan populasi 5.470 jiwa (1.925 KK). Sampel diambil dari usia 25 tahun ke atas yang berjumlah 1.156 jiwa. Arikunto mengatakan untuk menemukan sampel dilihat apabila subyek kurang dari 100 maka dapat diambil semuanya, sehingga penelitian dapat merupakan penelitian populasi.<sup>141</sup> Jika jumlah subyek lebih besar dapat

---

<sup>140</sup> Singarimbun dan effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1999), hal. 4.

<sup>141</sup> Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka cipta, 1999), hal. 31.

diambil 10 – 15 % atau 20 – 25 %. Berdasarkan pendapat Arikunto, mengingat sampel berjumlah 1.156 maka dalam penelitian ini diambil 10 % yaitu 100 orang untuk dijadikan sampel responden<sup>42</sup>.

Usia sampel dibagi dua yaitu usia muda dimulai dari umur 24 – 44 tahun dan usia tua mulai tahun 45 – 65 tahun ke atas, untuk membedakan antara pendapat golongan tua dan golongan muda. Populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen, maka pengambilan sampel responden dengan menggunakan teknik *starified random sampling*, yaitu responden disrata agar sampel dapat mewakili populasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel responden diklasifikasikan (sistrata) berdasarkan tingkat usia, jenis kelamin, untuk memudahkan persentase guna membuat kesimpulan. Setelah populasi dibagi dalam strata-strata lalu sampel diambil secara acak, dengan metode ini diharapkan sub populasi dapat terwakili.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu heuristik/pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan historiografi/penulisan<sup>43</sup>.

Pertama, heuristik/pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, baik data lisan maupun data tertulis. Data lisan dilakukan melalui serangkaian wawancara kepada sejumlah responden yang ada di Tugumulyo. Para narasumber/responden dipilih atau diseleksi berdasarkan kemampuan dan keahlian dalam berbagai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan, yaitu tentang kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat transmigran asal Jawa di Tugumulyo. Mereka di antaranya yaitu tokoh-tokoh masyarakat, pihak pemerintah setempat dan wawancara dengan masyarakat setempat; Kemudian juga dilakukan angket kepada 100 orang responden yang dipilih dari berbagai kalangan dan profesi. Angket adalah cara memperoleh data primer dengan membuat beberapa pertanyaan tertulis yang relevan dengan obyek yang diteliti. Pada responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui.<sup>44</sup>

Data tertulis dicari di perpustakaan yang ada di Desa Tugumulyo, perpustakaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perpustakaan yang ada di kota Palembang. Di Desa Tugumulyo dan Kecamatan Lempuing diperoleh data tertulis berupa monografi, arsip desa dan kecamatan, dokumen desa dan buku penunjang lainnya.

---

<sup>42</sup> Arikunto, *Ibid*.

<sup>43</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press, 1975), hal. 34.

<sup>44</sup> Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hal. 124.

Kedua, kritik sumber. Sumber-sumber tertulis maupun lisan yang telah dikumpulkan kemudian dikritisi atau diseleksi berdasarkan tingkat kefaliditasan/keotentisitasan data. Data yang lebih otentik/lebih falid adalah data yang lebih diperlukan, sementara data yang kurang falid dapat dijadikan sebagai data penunjang/data pendukung.

Ketiga, melakukan interpretasi atau menafsirkan. Interpretasi adalah menafsirkan atau membuat tafsiran yang tidak bersifat subyektif, melainkan harus seobyektif mungkin untuk mendapatkan kebenaran yang otentik. Menurut Kuntowijoyo interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut analisis sejarah.<sup>45</sup> Setelah kritik sumber dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi untuk selanjutnya dilakukan penulisan.

Keempat, Historiografi. Historiografi adalah tahap akhir dalam penulisan sejarah. Setelah diinterpretasikan kemudian dituliskan dalam suatu penulisan yang sistematis dan kronologis sesuai dengan tema dan judul penelitian. Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan menggunakan ilmu bantu lainnya, seperti antropologi budaya, sosiologi dan ilmu ekonomi.

Teknik analisa data merupakan teknik yang dipergunakan untuk mengubah data yang dikumpulkan dan telah diklasifikasikan menurut fungsi dan jenisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dianalisis tersebut merupakan data hasil angket yang nantinya akan dihubungkan dengan data wawancara dan observasi untuk membuat kesimpulan. Sedangkan data angket, dilakukan analisa data dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melalui persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F$$

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

$$N$$

Keterangan :

P = Jumlah persentase yang dicapai

F = Frekuensi jumlah jawaban yang diperoleh

N = Jumlah sampel dalam penelitian.

---

<sup>45</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hal. 100.

## 7. Gambaran Umum Desa Tugumulyo

### a. Letak Geografis

Kecamatan Lempuing merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Jarak tempuh dari Kecamatan Lempuing ke Kayuagung, yang merupakan kota Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sekitar 69 km. Sedangkan jarak Kecamatan Lempuing dengan kota Palembang, yang merupakan ibukota propinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 135 km<sup>46</sup>. Kecamatan Lempuing ini terdiri dari 23 desa, antara lain yaitu Desa Tulung Harapan, Desa Muara Bema, Desa Sindang Sari, Desa Lubuk Seberuk, Desa Tugu Mulyo, Desa Jae, Desa Tugu Jaya, Desa Kepayang, Desa Tugu Agung, Desa Sindang Sari, Desa Tulung Harapan dan desa-desa lainnya<sup>47</sup>.

Desa Tugu Mulyo terletak di sebelah selatan kota Kayu Agung yang merupakan ibu kota Kabupaten OKI yang berjarak sekitar 73 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Desa Tugu Mulyo secara astronomis terletak antara 2, 72<sup>0</sup> Lintang Selatan sampai dengan 2, 72<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 3, 07<sup>0</sup> Bujur Timur sampai 3, 07<sup>0</sup> Bujur Timur dengan batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Anyar, yang termasuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sindang Sari; Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulung Harapan.<sup>48</sup>

Secara topografis, Tugumulyo merupakan daratan yang terdiri dari dataran rendah yang sebagian berupa rawa-rawa yang telah dikeringkan. Ketinggian rata-rata sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Daerah yang paling rendah dengan ketinggian sekitar 6 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah pada umumnya merupakan jenis aluvial (tanah lebak) dan potsolik (tanah talang). Jenis aluvial terdapat di daerah aliran sungai, dengan warna tanah kelabu ataupun coklat, keadaan liat berpasir dan menjadi lembab apabila kering. Tanah ini disebut juga sebagai tanah lebak dengan susunan humus yang kaya untuk pertanian, persawahan, perkebunan kelapa, palawija dan perikanan air tawar. Jika tergenang air warna tanahnya menjadi kuning kehitaman<sup>49</sup>.

Sementara itu, jenis potsolik terdapat di dataran yang tidak tergenang air dengan tingkat kesuburan yang lebih rendah dari tanah lebak. Selain untuk perkebunan, daerah dengan jenis tanah ini sering

---

<sup>46</sup> Minografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

<sup>47</sup> Minografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

<sup>48</sup> Minografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

<sup>49</sup> Minografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

dipergunakan untuk menjadi tempat pemukiman penduduk. Secara umum, Desa Tugumulyo merupakan daerah beriklim tropis, dengan perkisaran musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Musim penghujan terjadi pada masa di antara bulan November sampai dengan bulan April. Penyimpangan musim terjadi berselang setahun sekali berupa musim kemarau lebih panjang dari musim hujan. Menurut catatan, pada tahun 2010 terjadi 891 kali hujan di daerah ini, dengan rata-rata curah hujan berjumlah 6.966 mm<sup>50</sup>.

Topografi seperti di atas, sejak masa lampau di tempat ini telah bersemi aneka tumbuh-tumbuhan, terutama yang biasa terdapat pada iklim tropis baik yang tumbuh secara alami maupun yang diusahakan termasuk tanaman obat. Sedangkan tumbuhan perkebunan adalah karet, kelapa, kopi, jambu mete, selain tanaman buah seperti duku, durian, nangka, jeruk, nanas, pisang, pepaya, beberapa jenis mangga dan sebagainya. Masyarakat juga membudidayakan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi seperti kelapa sawit, coklat, cengkih, lada, kelapa hibrida, selain tanaman pangan seperti ubi-ubian, sayur-mayur, kacang-kacangan dan lain-lain<sup>51</sup>.

Binatang liar yang hidup di daerah ini pada awal dilaksanakan transmigrasi tahun 1970-an adalah gajah, ular, kera, babi hutan, harimau dan sebagainya. Namun sekarang binatang seperti gajah dan harimau sudah tidak ada lagi. Yang banyak ditemak oleh masyarakat adalah binatang temak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, angsa, serta berbagai jenis ikan air tawar. Bentangan alamnya relatif datar, yaitu dengan interval rata-rata hanya empat meter. Tempat rata-rata tertinggi adalah 10 meter dari permukaan laut, sedangkan tempat yang paling rendah adalah 6 meter. Interval yang pendek antara tempat tertinggi dengan tempat paling rendah seperti itu memungkinkan mobilitas penduduk lebih dinamis. Tidak ada pegunungan sebagai faktor alam yang menghambat maupun mengisolir penduduk untuk bergerak dalam kegiatan sosialnya.<sup>52</sup>

Letak Desa Tugumulyo sangat strategis karena berada di jalan Lintas Timur dan dekat dengan jalan raya. Luas Desa Tugu Mulyo 12.500 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 ada sekitar 9.971 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.051 jiwa dan perempuan sebanyak 5.920 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 3.285 jiwa dan kepadatan

---

<sup>50</sup> Minografi Kecamatan Lempuing Tahun 2010.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 17 September 2011.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 17 September 2011.

penduduk 80 orang per/km.<sup>53</sup> Tujuh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 12.897 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 6.569 orang dan jumlah perempuan ada 6.328 orang.<sup>54</sup> Kepadatan penduduk 999 per kilometer.<sup>55</sup>

Keadaan tanah Tugumulyo termasuk relatif subur dan sangat cocok sebagai lahan pertanian. Luas tanah pertanian yang diusahakan sekitar 3.460 ha dan termasuk dalam jenis sawah tadah hujan. Lahan pertanian Desa Tugumulyo ditanami berbagai jenis tanaman perkebunan, seperti karet, kelapa, sawit, cengkih, kapuk, coklat dan sebagainya. Tanaman buah-buahan yang dibudidayakan yaitu berbagai jenis mangga, rambutan, jambu air, jambu biji, sirsak, srikaya, pepaya, semangka, melon, blewah/waloh, sukun, kluwih dan sebagainya. Selanjutnya tanaman palawija yang dibudidayakan yaitu ketela pohon, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, uwi, gembili, ganyong dan lain-lain. Sedangkan tanaman sayur-sayuran yang dibudidayakan yaitu tomat, kacang panjang, lombok, terong, labu siam, bayam, kangkung, bawang merah dan lain-lain. Tanaman utama bagi masyarakat Tugumulyo adalah padi. Oleh karena itulah maka di desa ini dikenal sebagai penghasil beras terbesar bagi Kecamatan Lempuing.<sup>56</sup>

Keadaan tanah Desa Tugumulyo sebagian berbentuk dataran tinggi dan sebagian lagi terdiri dari dataran rendah, ditambah adanya lembah dan rawa-rawa. Seperti halnya di daerah-daerah lain, Desa Tugumulyo juga merupakan daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 27<sup>0</sup> C – 34<sup>0</sup> C, kecepatan angin 7, 55 km/jam dengan curah hujan 2, 650<sup>3</sup>/tahun. Desa Tugu Mulyo terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Tugumulyo berada pada ketinggian 89 meter di atas permukaan laut. Daerah ini merupakan daerah dataran tinggi. Adapun tanah yang menjadi rawa dimusim hujan mencakup wilayah seluas 12 %. Berdasarkan karakteristik tanahnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanah desa Tugumulyo adalah dataran tinggi dan rawa-rawa yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang relatif baik untuk lahan pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil panen padi sebanyak dua kali setahun dan sering dirayakan secara besar-besaran yang disebut panen raya dan sering kali juga dihadiri oleh Bupati OKI (Ogan Komering Ilir).<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Monografi Desa Tugu Mulyo Tahun 2010.

<sup>54</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2010, hal. 14.

<sup>55</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2010.

<sup>56</sup> Monografi Desa Tugu Mulyo Tahun 2010.

<sup>57</sup> Laporan Tahunan Desa Tugu Mulyo Tahun 2003.

## b. Demografi

Jumlah penduduk Desa Tugumulyo berdasarkan registrasi akhir tahun 2000 adalah sebesar 9.971 jiwa yang terdiri dari 4.051 jiwa laki-laki dan 5.920 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 3.285 orang dan jumlah penduduk yang bersuku Jawa adalah sebanyak 5.470 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 2.347 jiwa dan perempuan sebanyak 3.123 jiwa. Jumlah kepala keluarga Jawa ada sekitar 1.925 orang. Penduduk Tugu Mulyo sebagian besar berasal dari suku Jawa, Bali, dan penduduk asli (penduduk OKI dan penduduk OKU), dan semuanya berkewarga negaraan Indonesia.<sup>58</sup>

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Tugumulyo sebagian besar merupakan kelompok tenaga kerja usia antara 16 sampai dengan usia 40 tahun. Dari kelompok kedua ini dapat diurutkan yang terbesar yaitu usia antara 26 tahun sampai 40 tahun ranking tertinggi, yang jumlahnya mencapai 1.865 orang. Kemudian disusul dari usia antara 20 sampai 25 tahun, dengan jumlah 1.615 orang dan terakhir usia 16-19 tahun berjumlah 1.298 orang.

Urutan berikutnya adalah kelompok usia antara 41 sampai 45 tahun berjumlah 1.724 orang. Disusul kemudian kelompok usia 46 sampai 55 tahun berjumlah 862 orang. Sedangkan kelompok terendah adalah usia antara 0 sampai dengan 5 tahun, berjumlah hanya 443 orang.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia<sup>59</sup>**

No.	Usia Kelompok	Jumlah
1.	Kelompok Pendidikan a. 0 – 5 tahun b. 6 – 12 tahun c. 13 – 15 tahun	443 orang 680 orang 996 orang
2.	Kelompok Tenaga Kerja a. 16 – 19 tahun b. 20 – 25 tahun c. 26 – 40 tahun	1.298 orang 1.615 orang 1.865 orang
3.	Kelompok Usia Lanjut a. 41 – 45 tahun b. 46 – 55 tahun c. 56 tahun ke atas	1.724 orang 862 orang 483 orang

---

<sup>58</sup> Laporan Tahunan Desa Tugu Mulyo Tahun 2003.

<sup>59</sup> Laporan Tahunan Desa Tugu Mulyo Tahun 2003.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian<sup>60</sup>**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Karyawan	360 orang
2.	Wiraswasta	150 orang
3.	Tani	3.197 orang
4.	Pertukangan	95 orang
5.	Buruh Tani	223 orang
6.	Pensiunan	50 orang
7.	Nelayan	-
8.	Pemulung	-
9.	Jasa	280 orang

Berdasarkan mata pencahariaannya, penduduk di Desa Tugu Mulyo sebagian besar berprofesi sebagai Petani. Bahkan petani ini menduduki urutan pertama dengan jumlah 3.197 orang. Urutan kedua profesi yang digeluti adalah sebagai karyawan, baik karyawan swasta maupun pegawai negeri dengan jumlah 360 orang. Profesi di bidang jasa menduduki urutan ketiga dengan jumlah 280 orang. Urutan keempat adalah yang berprofesi sebagai buruh tani dengan jumlah 223 orang. Sedangkan yang terendah adalah para pensiunan dengan jumlah 50 orang. Mengingat desa Tugu Mulyo ini berada di kawasan pedalaman yang jauh dari pantai, maka penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tidak ada atau nihil. Demikian juga pemulung juga tidak ada karena berada di desa pedalaman. Sedangkan pemulung biasanya berada di kota-kota besar.

Penduduk di Desa Tugumulyo sebagian besar beragama Islam, ad juga yang beragama Kristen, Khatolik dan Hindu. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Tugumulyo. Sedangkan agama lainnya merupakan agama minoritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

---

<sup>60</sup> Laporan Tahunan Desa Tugu Mulyo Tahun 2003.



**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>61</sup>**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	9.572 orang
2.	Kristen	1.107 orang
3.	Khatolik	123 orang
4.	Hindu	169 orang
5.	Budha	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Tugu Mulyo beragama Islam. Jumlah mereka yang beragama Islam sekitar 9.572 orang. Kemudian urutan kedua disusul mereka yang beragama Kristen Protistan dengan jumlah 1.107 orang. Berikutnya urutan ketiga adalah mereka yang beragama Hindu berjumlah 169 orang. Dan terakhir beragama Khatolik berjumlah 123 orang. Agama Budha tidak berkembang di Desa Tugu Mulyo, sehingga di desa ini yang beragama Budha dapat dikatakan nihil atau tidak ada.

Secara garis besar penduduk di desa Tugumulyo dapat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pendatang dan penduduk asli. Penduduk pendatang adalah berasal dari suku Jawa dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan penduduk asliteratediri dari dua suku yaitu suku Komering Ilir dan Komering Ulu. Mereka hidup menetap di Tugumulyo dengan membawa budaya mereka masing-masing, tetapi secara umum penduduk Tugumulyo didominasi oleh orang-orang dari Suku Jawa.

Jumlah keseluruhan penduduk Tugumulyo adalah sebanyak 9.971 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, karena daerah ini sebagai penghasil pangan terbesar di Kecamatan Lempuing. Tetapi ada juga penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pengrajin dan yang bergerak di bidang jasa. Penduduk Desa Tugu Mulyo ini merupakan sosok pekerja keras yang gigih dalam bekerja demi kelangsungan hidup mereka.<sup>62</sup>

### **c. Struktur Masyarakat Tugu Mulyo**

Setiap suku bangsa terdapat pelapisan sosial (stratifikasi sosial) dalam kehidupan masyarakat. Pelapisan sosial itu sangat beraneka ragam sesuai dengan sub kebudayaan yang ada, yaitu sistem pelapisan

<sup>61</sup> Monografi desa Tugu Mulyo Tahun 2011.

<sup>62</sup> Kantor Kepala Desa Tugu Mulyo Tahun 2003.

sosial tradisional, sistem pelapisan sosial berdasarkan ketaatan pada agama, dan sistem pelapisan sosial Indonesia. Kedudukan-kedudukan yang ada pada sistem pelapisan tradisional di Indonesia ini pada umumnya merupakan kedudukan-kedudukan yang diskriptif, yaitu kedudukan yang terutama berdasarkan pada kualitas pribadi seseorang. Kualitas pribadi seseorang dinilai untuk menentukan kedudukan tradisional adalah berdasarkan pada : (1) Jenis kelamin, karena dalam masyarakat Indonesia, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada kedudukan seorang perempuan. (2) Senioritas, yaitu berdasarkan pada usia dan generasi, maksudnya kedudukan yang lebih tua dianggap lebih tinggi dari pada yang lebih muda. (3) Keturunan yang berdasarkan pada kedudukan sistem pelapisan sosial agama yang ditentukan oleh pedoman penilaian antara lain ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran agama dan tingkat pengetahuan mengenai ajaran agama. Sedangkan pada kedudukan sistem pelapisan sosial Indonesia ditentukan oleh pedoman penilaian berdasarkan pendidikan.<sup>63</sup>

Masyarakat yang ada di Desa Tugumulyo berasal dari dua suku daerah, yaitu suku pendatang dan suku asli. Suku pendatang berasal dari beberapa daerah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat/Sunda dan Bali. Penduduk asli ada dua yaitu dari Komering Ilir dan Komering Ulu, tetapi secara umum yang mendominasi penduduk di Tugu Mulyo adalah suku dari Jawa, karena jumlahnya yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan adanya program transmigrasi dari Pemerintah. Masyarakat Jawa yang ada di desa Mulyo hidup membaaur satu sama lainnya dengan penduduk asli. Kehidupan mereka pada umumnya sama dengan kehidupan mereka di daerah asalnya, yaitu Jawa sebelum bertransmigrasi. Hal ini dapat dilihat mulai dari cara hidup mereka sehari-hari dan bahasa Jawa yang merupakan bahasa keseharian yang sering digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi.<sup>64</sup>

Penduduk desa Mulyo mempunyai beraneka ragam pekerjaan, antara lain sebagai pedagang, membuka bengkel, industri kerajinan, jasa, buruh tani, buruh bangunan dan petani. Petani ini merupakan jenis mata pencaharian utama masyarakat Desa Tugu Mulyo. Mengingat penduduk yang ada di Desa Tugu Mulyo kebanyakan berasal dari Jawa, maka struktur masyarakat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sistem pelapisan sosial tradisional Jawa. Pada pelapisan sosial tradisional ini masyarakat Desa Tugu Mulyo berdasarkan kualitas

---

<sup>63</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1980), hal. 233. Lihat juga Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Jembatan UGM, 1976, hal. 123. Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta : Gramedia, 1982, hal. 36.

<sup>64</sup> Profil Desa Tahun 2002.

pribadi, yaitu : Ditinjau dari senioritas, dalam kehidupan masyarakat orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua dan saling menghargai satu sama lainnya. Ditinjau dari jenis kelamin, dalam kehidupan bermasyarakat kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari pada perempuan.

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi adat kesopanan yang berkaitan erat dengan tata pergaulan dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari serta saling menghormati dan saling menghargai antar sesama.<sup>65</sup>

Masyarakat yang menganut sistem pelapisan tradisional tersebut di atas biasanya dapat digolongkan sebagai masyarakat tradisional yang masyarakatnya relatif kecil dan mempunyai kebudayaan yang masih sederhana dan berpegang teguh pada adat dan tradisi serta tata hidupnya yang cenderung bersifat kolektif. Dengan demikian di dalam masyarakat tradisional mempunyai kebiasaan hidup dengan sistem sosial yang masih sederhana dan penuh dengan rasa kekeluargaan dan keakraban.<sup>66</sup>

Masyarakat pada dasarnya terbentuk dari sejumlah aktor (*acting subjects*) yang saling berinteraksi dan terikat satu sama lainnya pada relasi sosial. Masyarakat merupakan sistem interaksi sosial, yang terdiri dari orang-orang yang saling mempengaruhi, baik secara individu maupun secara kelompok.<sup>67</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, ada banyak sisi kehidupan yang tidak bisa dilukiskan atau dilihat bentuknya. Hidup bermasyarakat meliputi banyak bidang kehidupan antara lain kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya maupun kehidupan politik.

Masyarakat yang berada di daerah transmigrasi Desa Tugumulyo berasal dari daerah yang berbeda. Mereka hidup bersama dan setiap anggotanya akan memainkan peran sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lainnya. Peran-peran yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat bisa terwujud dalam suatu bentuk pola-pola tindakan yang dapat mewakili eksistensinya, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat tertentu sebagai suatu sistem sosial. Kehidupan sosial ini terdiri dari pola interaksi atau

---

<sup>65</sup> Subangun, E., "Nilai Social Budaza yang Mendukung Program Kependudukan" dalam *Ilmu Kependudukan*, (Jakarta : Erlangga), 1981, hal. 182. Lihat juga Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta : Gramedia, 1982, hal. 233.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 183.

<sup>67</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 87

hubungan antar masyarakat, sistem pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, kerja sama antar masyarakat maupun konflik yang terjadi dalam masyarakat Jawa yang ada di Desa Tugumulyo.<sup>68</sup>

#### **d. Kelembagaan**

Lembaga di desa ini terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan dan lembaga keamanan. Lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan dibantu oleh aparat-aparat desa lainnya serta Badan Perwakilan Desa (BPD). Jumlah aparat di desa ini adalah 31 orang dengan rata-rata pendidikan SLTA. Desa Tugumulyo terdiri dari lima dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun dan langsung bertanggung jawab dengan kepala desa. Badan Perwakilan Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertugas memantau perkembangan masyarakat di desa ini. Badan ini mempunyai jumlah anggota sebanyak 11 orang dengan pendidikan rata-rata SMA atau sederajat.<sup>69</sup>

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Tugumulyo yaitu organisasi perempuan atau PKK dan kelompok gotong royong. Untuk organisasi perempuan jumlah anggotanya adalah 325 orang, sedangkan untuk kelompok gotong royong jumlah anggotanya ada 240 orang. Partai politik yang merupakan bagian dari kelembagaan di desa ini terdapat 4 partai politik, yaitu Partai Politik Nahdatul Umat (NU), partai politik PPP, partai politik Demokrat, partai politik Golkar dan partai politik PDI Perjuangan. Jumlah koperasi di desa ini ada 12 unit dengan jumlah anggota 176 orang<sup>70</sup>. Selain itu di desa ini juga terdapat warung kelontong sebanyak 16 unit dengan jumlah tenaga kerja 46 orang. Pasar yang ada di desa ini adalah Pasar Tugumulyo yang ramai tiap hari. Meski berujung pasar tradisional, namun tergolong cukup besar menurut ukuran orang desa. Sarana pendidikan yang ada terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Jumlah TK yang ada sebanyak 3 buah, dengan jumlah guru 6 orang. Dan jumlah murid 300 orang. Sedangkan untuk SD terdapat 3 buah dengan jumlah murid 500 orang dan jumlah guru 31 orang. Taman pendidikan Al Qur'an (TPA) ada 1 buah dengan jumlah murid 100 orang dan jumlah pengajar atau guru ada 12 orang<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Gusmara, Sekretaris Desa Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 13 September 2011.

<sup>69</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2011.

<sup>70</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2011.

<sup>71</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2011.

Keamanan Desa Tugumulyo menerapkan sistem keamanan lingkungan. Masyarakat desa ini sangat kompak dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.<sup>72</sup> Hal ini terbukti dengan adanya pos-pos siskamling yang hampir ada di setiap dusun.

## **B. SEJARAH TRANSMIGRASI TUGUMULYO**

### **1. Masuk dan Berkembangnya Transmigrasi**

Desa Tugumulyo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya masuk dalam wilayah Kecamatan Lempuing. Nama Tugumulyo terdiri dari dua suku kata, yaitu “Tugu dan Mulyo” yang berarti “batas kemuliaan” atau diartikan sebagai batas keberhasilan. Sebelum dibuka sebagai tempat pemukiman penduduk yang layak huni, desa Tugumulyo merupakan suatu kawasan hutan lebat yang banyak dihuni oleh binatang-binatang buas dan liar, seperti harimau, ular, gajah, monyet, buaya, babi hutan dan sebagainya<sup>73</sup>.

Desa Tugumulyo dibuka pada tahun 1970 dengan usaha membuka kawasan hutan yang berada di bawah naungan marga Semendawai suku III Betung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Para pembuka hutan terdiri dari orang-orang yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sunda, Bali, Madura dan penduduk setempat<sup>74</sup>.

Mereka berhasil membuka daerah Tugumulyo menjadi suatu daerah transmigrasi yang baru bagi penduduk transmigran. Desa Tugumulyo terdiri dari dataran tinggi dan sebagian kecil dataran rendah yang berbentuk rawa-rawa dan lebih dikenal dengan istilah “*Lebak Kaunyin*” yang berarti sawah semua.<sup>75</sup>

Jauh sebelum ada transmigrasi lokal di Desa Tugumulyo, di Sumatera Selatan ada program transmigrasi yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Tuguharjo. Asal mulanya tempat ini bernama kolonisasi Belitang, meskipun tidak terlalu tepat nama tersebut diberikan karena Belitang adalah nama dari sebuah Marga. Sebagian dari tanah kolonisasi itu adalah tanah Marga Belitang dan untuk bagian lain-lainnya adalah tanah dari Marga-marga Muncak Kabau dan Marga Rasuan. Sedangkan Marga Kotanegara juga

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Suparno, Kepala Desa Tugumulyo pada tanggal 16 September 2011 di rumahnya.

<sup>73</sup> Marto Wiharjo, transmigran asal Jawa, tinggal di Tugumulyo 3, wawancara pada tanggal 11 September 2011.

<sup>74</sup> Martowiharjo, *Ibid*.

<sup>75</sup> Arsip desa Tugumulyo Tahun 2002.

mempunyai tanah disitu. Pada masa penjajahan Belanda, didatangkan orang-orang Jawa dari Pulau Jawa, tepatnya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan program transmigrasi. Para transmigran asal Jawa tersebut ditempatkan di Tuguharjo sebagai kelanjutan dari kolonisasi Belitang.<sup>76</sup>

Luas wilayah daerah ini sekitar 20.000 hektar atau 30.000 bauw tanah. Pada zaman Belanda dahulu, kepala daerahnya adalah Asisten Wedana dan dalam pembagian administrasinya, ia terbagi dalam desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang dikepalai masing-masing oleh seorang lurah, lengkap dengan stafnya, yaitu Carik (Sekretaris Desa), Pengawas Keamanan (Polisi), Penjaga Keamanan, Pengawas Pengairan dan sebagainya.<sup>77</sup>

Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan masih tetap berlaku seperti sedia kala, hanya berbeda dalam soal kepala pemerintahan, ada dua orang Camat yaitu Camat Transmigrasi yang juga disebut Camat Teknis dan Camat Pamongpraja yang merupakan Camat Muncak Kabau, yang juga berkedudukan di Muncak Kabau. Adanya dua kekuasaan Camat tersebut, menimbulkan berbagai masalah, bahkan juga kebingungan dan kegelisahan di kalangan para transmigran yang nota bene tidak faham seluk beluk pemerintahan. Mengikuti alur sejarah di masa lampau, maka mereka hanya mengetahui bahwa Pak sistenlah pembesarnya. Status ini berlangsung hingga tahun 1951 dan pada pertengahan tahun 1952 baru ada ketegasan mengenai hak dan kewajiban para Camat tersebut. Akhirnya yang dianggap resmi adalah Camat Pamongpraja (Camat Muncakkabau) yang menjadi kepala daerah di situ. Pemerintah Desa dari lurah sampai pembantu-pembantunya digaji oleh rakyat yang tiap tahunnya diwajibkan menyerahkan sejumlah padi hasil panennya untuk membiayai alat-alat pemerintahan. Kewajiban membayar padi tersebut dinamakan janggolan.<sup>78</sup>

Transmigrasi Tuguharjo terdiri atas 17 kelurahan dengan jumlah penduduk transmigran pada tahun 1951 adalah 11.701 jiwa dengan perincian 6.682 orang dewasa dan 5.019 orang anak-anak.<sup>79</sup> Jumlah bangsa asing yang tinggal di Kecamatan ini ada 119 orang, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 11820 orang.

---

<sup>76</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Kementerian Penerangan, 1953), hal., 354.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 354.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 355.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Marsono di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk dan Kelurahan di Tuguharjo Tahun 1951<sup>80</sup>**

No	Kelurahan	Laki dewasa	Peremp .dewasa	Jumlah	Anak laki	Anak Peremp	Jumlah	Jumlah semua
1.	Sidomulyo	345	330	675	189	184	373	1048
2.	Trukorejo	506	407	913	335	387	722	1635
3.	Sumbersoko	224	196	420	171	187	358	778
4.	Sidorahayu	264	244	508	214	212	426	934
5.	Karangtengah	114	115	229	97	86	183	412
6.	Pujorahayu	172	153	325	108	111	219	544
7.	Mojosari	237	211	448	159	152	311	759
8.	Harjowinangun	255	256	511	182	176	358	869
9.	Sidogede	102	120	222	92	91	183	405
10.	Tegalrejo	153	158	311	182	154	336	647
11.	Gumawang	91	87	187	99	73	172	354
12.	Bedilan	121	138	259	171	115	286	345
13.	Yosowinangun	110	78	188	43	27	70	285
14.	Yulusayu	56	46	102	44	36	80	182
15.	Srikaton	398	241	639	131	224	355	994
16.	Talangsari	221	134	355	105	171	276	631
17.	Tanjung	205	194	399	172	139	311	710
	Jumlah	-	-	6682	-	-	5019	11701

Sumber : Sensus penduduk/cacah jiwa Kecamatan Belitang bulan Nopember 1951.

Pada tahun 1952 didatangkan lagi transmigrasi umum untuk jangka waktu lima tahun berjumlah 982 jiwa. Sehingga jumlah penduduk seluruhnya menjadi 11.683 jiwa dan jika dibulatkan menjadi 12.000 jiwa. Para transmigran yang berjumlah 12.000 jiwa tersebut tinggal di Kecamatan Belitang untuk mengolah tanah pemberian pemerintah seluas dua hektar tanah sawah/ladang ditambah  $\frac{1}{2}$  hektar tanah pekarangan. Mereka sebagian besar berasal dari Jawa timur dan Jawa Tengah. Para transmigran membuka lahan baru dengan penuh semangat, rajin bekerja dan jujur.<sup>81</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari dengan penduduk asli, mereka bagaikan ikan dalam lubuknya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan dan pergaulan antara warga transmigran asal Jawa dengan penduduk asli cukup baik, meskipun kadang kala juga diwamai perselisihan mengenai hewan temak sapi dan kerbau yang

<sup>80</sup> Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Kementerian Penerangan, 1953, hal. 355.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 355.

dipeliharanya. Menurut penduduk asli, ternak sapi dan kerbau dilepas tanpa ada yang menggembalakan sehingga berkeliaran merusak tanaman budidaya milik transmigran. Sedangkan menurut para transmigran, kerbau dan sapi jika dilepas harus dijaga sehingga tidak merugikan para petani. Menurut penduduk asli, seharusnya para transmigran memagari tanamannya agar tidak diganggu binatang ternak, sedangkan menurut kebiasaan di Jawa sawah-sawah tidak pernah dipagari. Demikianlah lantas terjadi pertikaian secara insidental, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.<sup>82</sup>

Sebelum status pemerintahan mendapat ketegasan, kini para lurah langsung berada di bawah urusan Pasirahnya Marga masing-masing, maka juga sering terjadi keributan mengenai pengolahan tanah. Pihak penduduk asli mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya, sedangkan menurut transmigran tanah itu adalah tanah transmigrasi dan telah mendapat izin dari Pak Lurah. Di samping itu juga telah menjadi perasaan Pak Tani transmigran bahwa tanah kosong adalah mubazir dan berdosa jika ditinggalkan begitu saja.<sup>83</sup>

Petani transmigran menganggap bahwa tanah yang telah dicetak dengan jerih payahnya, menjadi tanah usahanya. Lain sekali dari anggapan menurut adat penduduk asli, di mana tanah usaha itu sah jika ada pohon tahunannya seperti pohon buah-buahan alias tanah itu merupakan tanah kebun : dalam hal begini, maka tidak ada seorang penduduk asli-pun yang berani mengusik tanah itu. Jika ada perselisihan antara penduduk asli dengan para transmigran asal Jawa, maka persoalan ini sebagian besar berkisar sekitar tanah.<sup>84</sup> Sesuai dengan adat suku Jawa, mereka di daerah transmigran hidup serba sederhana. Meskipun demikian, keadaan mereka di daerah transmigrasi jauh lebih baik daripada di daerah asalnya di Jawa dahulu.

Transmigrasi asal Jawa yang telah lama atau para kolonis yang berada di Belitang sejak zaman Belanda dahulu, keadaan sosial ekonominya lebih baik daripada para transmigran yang baru didatangkan pada tahun 1951/1952. Rata-rata para kolonis zaman Belanda telah mempunyai rumah beratap genteng dan rumah bilik yang dahulunya terbuat dari bambu telah diganti dengan papan. Kehidupan para transmigran ini seratus persen tergantung pada tanah pertanian, yaitu dari hasil sawah atau ladang, beras dan juga hasil-hasil palawija. Polowijo yang banyak ditanam di antaranya yaitu kacang tanah yang akhirnya menjadi produk ekspor ke luar daerah transmigrasi. Di

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 356.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Margono, petani Tugumulyo 2 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>84</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Ibid.*, hal. 356.



samping itu para transmigran juga mengeksport beras dalam jumlah besar.<sup>85</sup>

Pada waktu itu, tanaman perdagangan seperti kopi dan lada belum banyak diusahakan. Yang nampak hasilnya adalah banyaknya pohon-pohon kelapa yang subur yang ditanam di halaman pekarangan rumah dan juga banyak ditanam di ladang, di mana banyak ditanami ubi kayu dan ketela rambat sebagai persediaan di musim paceklik. Tanah yang telah dibuka ada 10.000 bauw atau 7.000 hektar. Pada tahun 1951, sawah dan ladang para transmigran hanya meliputi areal seluas 4.684 bauw dan sisanya hanya berupa tegalan dan pekarangan.

Persawahan-persawahan belum dapat dikatakan memuaskan, usaha pengairan masih terlantar dan perlu menjadi perhatian, agar produksi sawah dapat memberi hasil lebih banyak lagi. Di samping pertanian, ada juga yang mengusahakan kerajinan tangan seperti pembuatan genteng, batu bata, penggesekan papan sebagai usaha sampingan. Perdagangan kian hari kian meningkat, di mana tentunya orang Tionghoa-lah yang memegang peranan, meskipun keadaan lalu-lintas masih sangat buruk dan terbatas, rupanya tidak menjadi rintangan bagi pedagang-pedagang Tionghoa, tengkulak-tengkulak dan tauke-tauke dari produksi transmigrasi. Di samping itu juga ada pengijon yang memberikan pinjaman kepada para petani transmigran, setelah panen nanti baru dibayar utangnya beserta bunganya.<sup>86</sup>

Meskipun hasrat untuk berkoperasi cukup besar di daerah transmigrasi Belitang ini, tetapi ini tidak atau belum cukup kuat untuk menyaingi pedagang-pedagang Tionghoa. Mereka masih kekurangan tenaga pimpinan yang trampil/ahli dalam organisasi koperasi sehingga menjadi hambatan untuk berkembangnya perdagangan petani dan pemberantasan sistem ijon. Di Belitang ada 5 buah badan koperasi yang masih dapat mempertahankan hidupnya. Keadaan perekonomian para transmigran inipun dilemahkan oleh penyakit "*ijon sistem*" yang dilakukan secara diam-diam antara petani dan tauke-tauke, baik pengijon bangsa Tionghoa maupun pedagang-pedagang Indonesia sendiri<sup>87</sup>. Penyakit ini adalah penyakit yang kronis dan sulit diberantas<sup>88</sup>.

Cara pengijon ini dilakukan dalam keadaan "perlu uang", sedangkan rumah gadai tidak ada. Kredit tani belum kedengaran. Keperluan uang mendesak, maka tidak ada cara lain yang terpaksa

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 357.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Sulistio, petani Tugumulyo 2 pada tanggal 17 September 2011.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kardiyo, seorang pedagang di Pasar Tugumulyo pada tanggal 18 September 2011.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Kardiyo, *Ibid.*

dilakukan hanyalah memborgkan tanamannya yang masih berada di sawah, ladang atau kebun, yang masih dinantikan panennya. Hutang akan dilunasi nanti pada waktu panen<sup>89</sup>.

Para rentenir/lintah darat itu tentu mencari untung yang setinggi-tingginya. Dengan hutang-piutang tersebut, maka terjadilah perjanjian bahwa sipenghutang membayar kembali uang pinjamannya dengan uang “sekian jumlah” kaleng padi, yang telah ditetapkan bersama atau dengan sekian kaleng padi menurut harga pada musim panen, di mana belum ditetapkan jumlah harganya padi. Dalam surat perjanjian tidak pula disebut jumlah pinjaman, selain jumlah kaleng padi.<sup>90</sup>

Ada yang meminjam untuk ongkos menanam padi, ada yang untuk membeli bibit, tetapi ada juga yang memerlukan uang untuk hajatan perkawinan, sunatan dan sebagainya. Tradisi pesta dengan iringan wayang, ketoprak dan sebagainya akan memakan ongkos atau biaya yang tidak kecil. Meskipun ongkos pesta itu cukup besar, dengan penuh oportunisme dihadapi segala sesuatu ini dengan keyakinan bahwa uang ini akan diperolehnya kembali dari “sumbangan” uang dari para tamu undangan. Keyakinan semakin tebal pada mereka yang telah banyak menyimpan sumbangan pada hajatan lain-lain tetangga. Sumbangan menjadi tradisi kebesaran pula, di samping dana simpanan budi, yang kelak kemudian hari pasti akan dimintanya kembali, secara halus, tetapi ..... juga hajatan. Amat kecewalah mereka yang tidak ada suatu bahan alasan untuk hajatan, sangka kita, sebab tentu jasa tertanam itu tidak akan pulih. Tetapi tidak begitu sulit bagi mereka yang bisa mengusahakan hajatan, sunatan, atau perkawinan, meskipun dengan meminjam anak orang lain dengan istilah “mengangkat pekerjaan” itu dan dengan begitu kembalilah kiranya uang simpanan itu. Perongkosannya .... ijon yang menjawab, sebab pinjaman kredit Bank belum ada.<sup>91</sup>

Kesehatan masyarakat transmigran yang berjumlah sekitar 12.000 jiwa itu dijaga, diawasi dan dijamin oleh sebuah poliklinik dan seorang perawat, dengan obat-obatan yang terbatas, sehingga sering kehabisan sebelum semua yang membutuhkan pertolongan terlayani. Penyakit yang sering berjangkit di masyarakat adalah penyakit malaria, meskipun tidak tergolong epidemis.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Wagiman, seorang petani di Tugumulyo 2 pada tanggal 18 September 2011.

<sup>90</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, Kementerian Penerangan, 1953, hal. 357.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 358.

<sup>92</sup> Wawancara dengan pensiunan petugas kesehatan di Puskesmas Tugumulyo bemama Bambang Mardowo pada tanggal 11 September 2011.

Pendidikan anak-anak berjalan baik, meskipun masih banyak kekurangan sekolah. Penduduk dalam hal ini tidak tinggal diam dan dengan bergotong-royong telah dapat mendirikan dua buah sekolah. Oleh pihak swasta/partikelir telah ada usaha pendidikan berupa sekolah rakyat dari Islamiyah dan dari pihak Katholik dan Protestan ada toleransi dengan baik. Pendidikan untuk orang dewasa belum dapat berjalan lancar sebab masih sangat kekurangan tenaga pimpinan dan pemeliharaan, sehingga usaha selalu tidak memuaskan.<sup>93</sup>

Semangat gotong royong belum berubah dari aslinya, yang selalu menjadi jiwa usaha untuk keperluan umum atau perseorangan. Di samping semangat gotong royong, jiwa “iseng”, main kartu kecil masih hidup subur pada waktu-waktu hajatan, apalagi bahwa ini juga berarti suatu sumbangan pada tuan rumah, berupa uang “pot”. Demikianlah yang berkembang di kalangan masyarakat transmigran di Tuguharjo/Belitang.

Mengingat wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat luas dan masih sangat jarang penduduknya, maka perlu didatangkan lagi transmigrasi ke daerah-daerah yang masih kosong atau masih berhutan lebat dan belum ada penghuninya. Usaha penampungan tenaga-tenaga bekas eks pejuang sebagai memenuhi pengumuman Pemerintah tanggal 14 November 1950, dilaksanakan transmigrasi eks pejuang asal Jawa di Bukit Timur. Rombongan pertama adalah anggota-anggota dari Barisan Berani Mati.<sup>94</sup>

Sebelum diberangkatkan ke tempat kediamannya yang tetap, maka oleh Jawatan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Asrama Rehabilitasi Tenaga Pejuang di Sungai Buah, dekat Pelabuhan Palembang.<sup>95</sup> Dari Asrama Sungai Buah baru mereka dikirim ke tempat yang sudah ditentukan. Ada yang ditempatkan di Palembang sendiri dan sebagian terbesar dikirim ke daerah Bukit Timur, dekat Pagar alam, Kabupaten Lahat. Pagar alam adalah daerah terkenal dengan sayur-mayumnya, seperti kool/kobis, bawang, sawi, buncis, labu siam dan sebagainya.<sup>96</sup>

Dengan obyek pertanian inilah rombongan pertama terdiri dari 180 jiwa memasuki Asrama di Bukit Timur. Sejumlah 180 jiwa tersebut terdiri dari 88 orang laki-laki anggota BBM, 42 orang perempuan dan 50 anak-anak di bawah 12 tahun. Sebelum mereka dapat berdiri sendiri, maka segala kebutuhan mereka, perumahan (asrama), ransum bahan

---

<sup>93</sup> *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Op. Cit.*, hal. 358.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Wawancara dengan Slamet Widodo di Tugumulyo 2 pada tanggal 10 September 2011.

makanan, pakaian dan sebagainya dicukupi oleh Pemerintah, yang diatur oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) cabang Lahat dan Jawatan Sosial setempat, yang bekerja sama dengan Pamong Praja di tempat itu dalam menempuh hidup baru di daerah yang baru. Juga partai dan organisasi di sana memberikan kerja sama yang baik guna menguatkan rasa persaudaraan.<sup>97</sup>

Sebagaimana diketahui tamu baru itu adalah eks pejuang bersenjata, yang baru turun dari gunung-gunung pulau Jawa, daerah gerilya, sehingga jiwa revolusi dan jiwa ketentaraan dalam banyak hal masih melekat. Guna menyelaraskan keadaan psikologis inilah, maka kerja sama dari Pemerintah setempat dengan partai/organisasi beserta rakyatnya, menjadi jaminan untuk kedua belah pihak dalam pergaulan yang rapat, yang selama ini menimbulkan kesan yang baik sekali, walaupun ketika baru-baru datang karena dorongan semangat gerilya yang masih melekat, banyak buah-buahan penduduk sekitar asrama menjadi sasaran dan agak mendongkolkan hati penduduk asli. Kejadian semacam ini adalah insidental saja dan selalu dapat diatasi secara baik-baik.<sup>98</sup>

Sejenak setelah mereka melepaskan lelah dan segala sesuatu telah diatur oleh Jawatan-jawatan yang bersangkutan, maka mulailah mereka memasuki perjuangan baru. Senjata-senjata seperti bedil, bambu runcing, granat, mortir, pistol dan senjata api lainnya telah digantikan/ditukar dengan sabit, cangkul, garu, luku, dan alat-alat pertanian lainnya. Memang tidak semua mencemplungkan diri di gelanggang pertanian, ini hanya meliputi sejumlah 60 % saja yang secara aktif menanam sayur-mayur dan palawija. Ada juga yang bekerja di DPU (Dinas Pekerjaan Umum), dan ada pula yang bekerja sebagai tenaga administratif di kantor wedana. Namun demikian ada pula yang enggan bekerja atau bahkan menyesal di tempatkan di Bukit Timur karena ingin kembali ke lapangan ketentaraan seperti zaman perjuangan ketika perang kemerdekaan.<sup>99</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari antara mereka, dalam disiplin ketentaraan agaknya masih juga berlaku dan dalam waktu istirahat banyak melakukan perkunjungan pengenalan dengan penduduk asli yang sama-sama berhasrat mempelajari adat-istiadat masing-masing dengan toleransi yang baik. Anggota BBM bujangan yang datang

---

<sup>97</sup> Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, *Op. Cit.*, hal. 359.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 359.

setalah rombongan pertama, cepat dapat memelopori asimilasi dengan mengawini gadis-gadis penduduk asli.<sup>100</sup>

Rasa curiga dan cemas terhadap para eks pejuang ini, lambat laun semakin terkikis. Dengan demikian semakin lama semakin bertambah leluasa mencari usaha dan pekerjaan guna menambah kesejahteraan hidup mereka yang belum pernah menemui kesulitan. Karena sebelum mereka dapat hidup sendiri dengan hasil usahanya, nafkah mereka berada di bawah tanggungan Pemerintah. Dalam bidang politik mereka tetap netral alias tidak ikut campur. Tetapi semangat berkoperasi kian nampak, demikian juga perdagangan hasil usahanya mulai berkembang. Demikianlah keadaan mereka yang membuat lembaran baru dalam sejarah hidupnya dari pemuda anggota barisan bersenjata menjadi perintis pembangunan di lapangan ekonomi.<sup>101</sup>

Kemudian Pemerintah juga membuka daerah transmigrasi di daerah Musi Ulu/Musi Rawas yang jaraknya sekitar 6 kilometer dari Lubuk Linggau. Luas tanah yang dijadikan sebagai daerah transmigrasi ada 6.000 hektar, yang terdiri dari 4.000 hektar untuk sawah dan 2.000 hektar untuk ladang/tegalan<sup>102</sup>.

Sebagaimana halnya dengan Tuguharjo, maka hidup organik wilayah pemerintahan yang berupa kampung diatur menurut perkembangan yang diberi nama dengan huruf-huruf alphabet dengan Lurah sebagai Kepala Kampungnya. Lurah-lurah yang ada pada waktu itu adalah aparat-aparat yang ditetapkan sejak zaman Belanda dahulu, sampai tahun 1952 mereka belum ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam banyak hal membawa masalah-masalah yang kurang menyenangkan. Di samping penghasilan sawah mereka, maka sebagai gaji dalam kedudukan sebagai Lurah juga berlaku peraturan *janggolan*, yaitu sebesar 62 ½ kg padi gabah untuk setiap bauw. Pada umumnya *janggolan* itu dirasakan amat berat oleh petani dan masalah inilah yang hampir tiap tahun menjadi pembicaraan yang ramai antara pak Lurah dan rakyat/petani. Hal ini menyebabkan pak Lurah sering mengabaikan tugasnya dengan alasan bahwa mereka belum lah Lurah resmi<sup>103</sup>.

Kepala daerahnya, Pak Camat tidak bertempat tinggal di situ dan terpaksa laporan Lurah dilakukan 3 hari sekali baru dapat disampaikan pada Camat dan terasa kesulitan jika ada laporan-laporan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 360.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito, mantan Kades Tugumulyo yang menjabat sebagai Kades dua periode mulai tahun 1981-1993 dan 1993-2003. Wawancara dilakukan di rumahnya pada tanggal 11 September 2011.

yang memerlukan penyelesaian segera yang tidak dapat ditangguhkan. Banyak juga laporan-laporan itu langsung disampaikan kepada Kepala Jawatan Transmigrasi di daerah itu dari pada ke Pak Camat.<sup>104</sup>

Penduduk yang bermukim di daerah transmigrasi Musi Rawas/Musi Ulu ini hidup dari hasil pertanian, seperti padi, jagung dan palawija yang ditanam seluas 4.000 dari 6.000 hektar adalah areal sawah ladang. Tetapi sayang, hanya 60 % saja yang mendapatkan pengairan irigasi. Hal ini terjadi karena pembangunan saluran *Klingi Kunstwerken* (irigasi Klimngi) yang telah lama direncanakan sejak zaman Belanda belum juga siap digunakan.<sup>105</sup> Keberadaan sawah-sawah yang belum mendapat pengairan, menyebabkan terjadinya perbedaan penghasilan petani yang mengolah sawah tidak berpengairan ini dengan mereka yang mempunyai sawah dengan irigasi yang teratur<sup>106</sup>.

Pada umumnya panen di daerah ini dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu panen padi dan setelah itu penanaman dan panen palawija. Hasil palawija yang berarti adalah kacang kuning (kedele). Di samping pertanian, maka juga keaktifan terdapat dalam peternakan hewan besar dan ternak unggas. Hewan besar yang dipelihara adalah kerbau, sapi, kuda yang dianggap sebagai kawan sejati para petani. Peternakan hewan di daerah ini sangat baik perkembangannya. Kerajinan mereka dalam memelihara ternak selama ini telah memberi angka-angka statistik yang selalu meningkat sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.**  
**Jumlah Ternak Petani dan Tahun Pemeliharaan<sup>107</sup>**

Tahun	Ayam	Itik	Kambing	Kerbau	Sapi	Kuda
1941	8939	396	393	5	49	1
1946	11160	455	831	69	140	22
1949	11783	488	1160	105	259	12
1952	11802	546	1211	106	420	6

Sumber : Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Kementerian Penerangan, 1953, hal. 361.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito, *Ibid*.

<sup>105</sup> Republik Indonesia Sumatera Selatan, *Op. Cit.*, hal. 360.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pronowiyoto, petani desa Tugumulyo 3 pada tanggal 17 September 2011.

<sup>107</sup> Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Kementerian Penerangan, 1953, hal. 361.

Dari data tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa stimulasi dalam usaha peternakan sangat diperlukan. Untuk usaha stimulasi ini maka sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus 1952 oleh Jawatan Kehewan telah dilakukan pameran ternak dengan hasil yang memuaskan. Pada pameran itu pun untuk ternak yang baik telah disediakan berbagai macam hadiah berupa alat-alat pertanian seperti weluku, gergaji besar, gergaji tangan dan sebagainya. Hadiah penghargaan atas pemeliharaan yang baik buat peternakan. Sungguh suatu contoh yang baik dalam bidang peternakan untuk daerah transmigrasi Sumatera Selatan<sup>108</sup>.

Setelah pekerjaan di sawah dan ladang selesai, maka banyak petani mengerjakan dagang kecil-kecilan dan ada pula yang berburuh sebagai tukang sadap di perkebunan karet rakyat yang ada di sekitar daerah transmigrasi. Berkat keuletan dan kerajinan bekerja para transmigran ini maka para transmigran ini pada umumnya sedikit lebih sejahtera kehidupan sosial ekonominya dibandingkan dengan penduduk asli, meski ada juga sistem ijon yang dilakukan secara gelap<sup>109</sup>.

Dalam pergaulan sehari-hari antar mereka masing-masing dengan penduduk asli tidak terdapat jurang perpisahan yang besar. Jika terjadi perselisihan atau konflik antar penduduk asli dengan para transmigran, dapat diselesaikan dengan musyawarah. Silang sengketa masyarakat pada umumnya terlihat pada masalah tanah atau ternak,<sup>110</sup> seperti yang terjadi di daerah transmigrasi Tuguharjo/Belitang<sup>111</sup>.

Tradisi hajatan secara besar-besaran dan sumbang menyumbang sistem tampaknya masih dilaksanakan dan sukar dikikis dari jiwa para transmigran pada umumnya. Keamanan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terjadi berkat besarnya jiwa gotong royong dalam segala hal, sehingga kriminalitas hanya terbatas pada kejadian pencurian kecil-kecilan yang jarang terjadi dalam setahun. Untuk menambah jumlah penduduk yang masih sangat sedikit di daerah Musi Rawas/Musi Ulu ini, maka pada tanggal 5 Januari sampai dengan 20 November 1952, telah didatangkan transmigran famili sebanyak 157 keluarga dengan jumlah 799 orang. Sebagaimana diketahui, transmigrasi famili ini didatangkan atas permintaan transmigran yang sudah menetap di sini dengan ketentuan bahwa selain ongkos-ongkos angkutan, jaminan tempat dan perumahan di daerah transmigrasi menjadi tanggungan dari para pemanggil. Di sinilah letaknya kesulitan yang kerap kali timbul akibat kurang persediaan dari yang memanggil dan dengan demikian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 360.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 361.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

menjadi kesulitan dalam melaksanakan cita-cita transmigrasi dari pemerintah<sup>112</sup>.

Setelah Pemerintah sukses melaksanakan beberapa kali transmigrasi di berbagai daerah di Sumatera Selatan, seperti di Tuguharjo/Belintang, transmigrasi eks pejuang Bukit Timur dan transmigrasi Musi Rawas/Musi Ulu, maka dari tahun ke tahun daerah transmigrasi tersebut semakin lama semakin berkembang dan tumbuh menjadi daerah yang makmur. Kemakmuran tersebut, menyebabkan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk menjadi semakin besar. Lama-kelamaan kepadatan penduduk di daerah transmigrasi tersebut menjadi masalah baru, karena banyak anak-anak transmigran yang setelah dewasa dan menikah tidak dapat pembagian tanah sawah untuk usaha sebagai petani. Kesulitan untuk mendapatkan tanah pertanian yang baru tersebut, mengakibatkan mereka banyak yang bekerja hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang kurang memadai. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya usaha untuk melakukan transmigrasi lokal di daerah sekitar transmigrasi yang masih kosong. Salah satu daerah/hutan yang masih liar yang dibuka untuk transmigrasi lokal adalah daerah yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi Besitang/Tuguharjo, yang nantinya setelah dibuka muncullah desa-desa baru, seperti Tugu Mulyo, Tuguharjo, Tugu Jaya, Tugu Agung, tugu Raya dan sebagainya.<sup>113</sup>

Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno, transmigrasi umum pernah dilakukan di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1950-an. Pada masa itu wilayah yang dijadikan daerah transmigrasi umum adalah di Kecamatan Belintang dan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Para transmigran tersebut berasal dari Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Sunda. Mengingat penduduk yang berada di Kecamatan Belintang dan Kecamatan Buay Madang semakin bertambah banyak, maka sebagian kecil dari mereka mencari tempat pemukiman baru dengan berusaha membuka hutan bersama untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian yang baru. Hutan yang dibuka oleh penduduk itu masih dihuni oleh binatang buas yang berada dalam wilayah Semendawai Suku III, dan daerah yang baru dibuka itu diberi nama desa Tugumulyo.<sup>114</sup>

Transmigrasi yang ada di Desa Tugumulyo merupakan salah satu jenis transmigrasi lokal, yaitu suatu perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu daerah tertentu dari satu daerah ke tempat lainnya.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 362.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 363.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.



Para transmigran yang datang ke Tugumulyo adalah para transmigran yang berasal dari Kecamatan Belitang, Kecamatan Buay Madang dan Marga Semendawai Suku III Betung Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Oleh karena itu transmigrasi yang ada di Desa Tugumulyo termasuk dalam jenis transmigrasi lokal.<sup>115</sup>

Desa Tugumulyo dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1970. sebelum tahun ini, Tugumulyo masih merupakan kawasan hutan lebat yang belum dijamah manusia. Pada tahun 1970-an, para transmigran yang datang dari daerah sekitarnya hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena hutan di Tugumulyo masih sangat lebat dan sulit dijamah manusia, sehingga pembukaan hutan mengalami kesulitan. Hanya bagi mereka yang berani kerja keras dan ulet dalam menghadapi segala kesukaran akhirnya usahanya membuahkan hasil. Keberhasilan ini menjadikan orang-orang dari beberapa kecamatan di sekitarnya memberanikan diri untuk membuka hutan di Tugumulyo. Akibatnya, secara perlahan-lahan, dari tahun ke tahun kawasan hutan Tugumulyo semakin banyak yang memberanikan diri untuk membuka hutan dan menjadikannya sebagai lahan pertanian baru, sekaligus juga tempat bermukim<sup>116</sup>.

Masuknya para transmigran ke daerah Tugumulyo melalui usaha sendiri dengan cara membuka hutan dan mereka pindah dari tempat pertama dipindahkan oleh Pemerintah ke daerah Tugumulyo secara lokal dalam batas wilayah yang sama. Para transmigran yang datang ke Tugumulyo untuk membuka hutan adalah orang-orang Jawa, Sunda dan Bali. Tetapi yang lebih dominan dalam pembukaan hutan Tugumulyo adalah orang-orang Jawa<sup>117</sup>.

Mereka ini dikenal sebagai pekerja-pekerja tangguh, ulet dan tak mengenal lelah. Maka dalam rentang waktu sekitar sepuluh tahun, sudah nampak hasilnya. Tugumulyo yang pada tahun 1970-an masih merupakan kawasan hutan lebat yang banyak dihuni binatang buas dan liar, secara bertahap, pelan-pelan tetapi pasti, telah menjadi kawasan pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung, singkong, ubi jalar, pepaya dan tanaman keras lainnya seperti mangga, jambu, sirsak, sawo, kedondong, manggis, duku, kelapa dan bermacam-macam buah lainnya. Di samping itu, mereka juga menanam karet, coklat dan kemiri<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito, *Ibid*.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Atmo di Tugumulyo 4 pada tanggal 10 September 2011.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Wagiman di Tugumulyo 4 pada tanggal 10 September 2011.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Dalimin di Tugumulyo 4 pada tanggal 10 September 2011.

Pada tahun 1980 hingga tahun 1990-an, Tugumulyo mulai nampak sebagai daerah pertanian yang banyak menghasilkan padi, jagung, singkong, dan pepaya. Tanaman keras yang melimpah yaitu karet, coklat dan kelapa. Kemakmuran yang semakin meningkat ini menggairahkan para pendatang lain ikut mencari kehidupan di Tugumulyo. Para pendatang dari Kecamatan di sekitarnya yang juga suku asli adalah dari Komerling Ulu dan Komerling Ilir.<sup>119</sup>

Motivasi utama para transmigran yang datang ke Tugumulyo adalah faktor ekonomi. Perkembangan penduduk di Tugumulyo semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan jenis dan karakter mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagian besar daerah Tugumulyo ini oleh para transmigran dari beberapa daerah yang berbeda, tetapi Desa Tugumulyo sebagian besar banyak dihuni oleh para transmigran dari daerah Jawa. Mengingat orang Jawa lebih dominan di Tugumulyo, maka budaya yang dominan di Tugumulyo adalah budaya dari orang Jawa. Bahkan nama-nama tempatpun hampir semua juga memakai nama Jawa, termasuk juga nama pasar dan pusat perbelanjaan yang tergolong besar dan modern, seperti *Tugumulyo Mas Centre*, Pasar Sapi dan sebagainya. Desa Tugumulyo merupakan desa khas Jawa yang ada di Sumatera Selatan karena keadaan desa dan suasana desa sama halnya dengan desda-desa yang ada di Jawa.<sup>120</sup>

Jumlah penduduk Tugumulyo pada tahun 1970, yaitu tahun dibukanya daerah tersebut sebagai daerah transmigrasi lokal ada sekitar 124 orang dengan 60 kepala keluarga. Jumlah itu sama dengan jumlah penduduk yang ikut transmigrasi lokal. Dengan kata lain, mereka semua, seratus persen adalah yang ikut transmigrasi lokal. Pada saat ikut transmigrasi lokal, mereka tiap kepala keluarga mendapat 2 hektar tanah untuk pertanian, setengah hektar pekarangan dan dibuatkan rumah kecil dari papan ditambah jatah hidup selama 1 tahun, berupa beras, lauk pauk dan minyak tanah<sup>121</sup>.

### 3. Penduduk dan Ekonomi

Jumlah penduduk Tugumulyo dari tahun ke tahun terus bertambah. Jumlah keseluruhan sampai akhir tahun 2004 adalah sebanyak 9.971 jiwa yang terdiri dari 4.051 jiwa laki-laki, 5.920 jiwa perempuan dengan 3.285 orang kepala keluarga yang memiliki kepadatan penduduk 80 orang/km. Desa Tugumulyo mempunyai luas

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Dalimin di Tugumulyo 4 pada tanggal 10 September 2011.

<sup>120</sup> Arsip Desa Tugumulyo Tahun 2007.

<sup>121</sup> *Ibid.*

wilayah sekitar 12.500 hektar dan dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh staf desa lainnya dengan pusat pemerintahan kecamatan Lempuing ada di Kayu Agung yang merupakan Ibukota Kabupaten OKI.<sup>122</sup>

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Desa Tugumulyo meningkat drastis menjadi 12.897 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 6.569 orang dan perempuan berjumlah 6.328 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Tugumulyo ada 3.116 kepala keluarga yang terdiri atas 3.054 kepala keluarga laki-laki dan 62 kepala keluarga perempuan.<sup>123</sup> Persentase perkembangan pertumbuhan penduduk yaitu 11 % laki-laki dan 6 % perempuan.

Jumlah pengangguran angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) tidak ada alias hampir semua telah mempunyai pekerjaan dengan berbagai profesi. Dari usia tersebut, yang cacat dan tidak bekerja ada 19 orang. Sedangkan yang cacat dan bekerja ada 9 orang. Meski mempunyai pekerjaan, di antara warga masyarakat ada juga yang sejahtera dan kurang atau tidak sejahtera. Jumlah keluarga prasejahtera ada 487 keluarga. Adapun jumlah keluarga sejahtera 1 ada 1.347 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 ada 864 keluarga, sejahtera 3 ada 399 keluarga, keluarga sejahtera 3 plus ada 19 keluarga. Total jumlah kepala keluarga di Desa Tugumulyo ada 3.116 keluarga.<sup>124</sup>

Pembangunan Desa Tugumulyo secara berangsur-angsur telah menunjukkan peningkatan, terutama dalam sektor pertanian. Tugumulyo merupakan desa yang relatif subur dan cocok untuk ditanami padi. Dari sektor pertanian Tugumulyo banyak menghasilkan panen yang selalu bermutu sehingga menjadikan desa ini sebagai desa penghasil beras di samping penghasil palawija lainnya. Setiap tahun biasanya panen selalu dirayakan oleh penduduk setempat yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai simbol dimulainya panen raya di Tugumulyo.

Luas tanaman padi tahun 2010 ada 890 hektar dengan nilai produksi ditaksir sekitar Rp. 9.932.000.000,-<sup>125</sup> Adapun biaya pemupukan ada Rp.4.003.000.000,- biaya bibit Rp.499.000.000,- biaya obat Rp.463.000.000,- dan biaya lain-lain ada Rp.290.000.000,-.

Tanah yang ditanami tanaman sayur-sayuran<sup>126</sup> pada tahun 2010 ada 9 hektar, dengan nilai produksi ada Rp.12.000.000,-. Biaya

---

<sup>122</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2009.

<sup>123</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2010, hal. 34.

<sup>125</sup> Monografi Desa Tugumulyo Tahun 2009, *Op.cit.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 35.

pemupukan Rp.1.800.000,- biaya bibit ada Rp. 300.000,- biaya obat ada Rp. 600.000,- dan biaya lain-lain ada Rp. 150.000,-

Tanaman karet yang diusahakan oleh rakyat/petani di Desa Tugumulyo ada seluas 21 hektar<sup>127</sup> dengan nilai produksi tahun 2010 ditaksir ada sekitar Rp. 670.000.000,-. Biaya pupuk yang dikeluarkan ada Rp. 30.000.000,- biaya bibit ada 7.000.000,- biaya obat ada Rp. 19.000.000,- dan biaya lain-lain berjumlah Rp.9.000.000,-.

Subsektor peternakan yang diusahakan oleh para petani ternak ada 5.533 ekor ternak yang menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 4.121.000.000,- dengan bahan baku yang digunakan ada Rp. 2.010.000.000,- dan bahan penolong yang digunakan ada Rp. 1.119.000.000,-<sup>128</sup>

Sektor perdagangan besar dengan nilai transaksi sebesar Rp. 188.000.000.000,-. Nilai aset perdagangan yang ada sebesar Rp. 792.900.000.000,-. Adapun jumlah jenis perdagangan besar ada 3 jenis. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha perdagangan ini ada Rp. 113.000.000.000,- dan biaya lain-lain ada Rp. 19.000.000.000,-.

Sektor perdagangan eceran ada 9 jenis usaha dengan total transaksi senilai Rp. 1.360.000.000,- biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.790.000.000,-. Total nilai aset perdagangan eceran sebesar Rp. 2.010.000.000,-.

Pada subsektor hotel dapat dilihat pada jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada sekitar 81 unit, dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.045.000.000,- biaya pemeliharaan sebesar Rp.461.950.000,- biaya antara yang dikeluarkan ada Rp. 281.000.000,- jumlah pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp. 302.050.000,-.

Usaha subsektor restoran dengan jumlah tempat penyediaan konsumsi ada 35 unit. Biaya konsumsi yang dikeluarkan sebesar Rp. 725.000.000,- biaya antara lainnya sebesar Rp. 576.000.000,- jumlah total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 149.000.000,-.

Sektor bangunan/konstruksi di Tugumulyo tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut : jumlah bangunan yang ada 36 unit, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sebesar Rp. 990.000.000,- nilai total bangunan yang ada Rp. 16.900.000.000,- biaya antara lainnya sebesar Rp. 120.000.000,-

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meliputi sub sektor bank dengan nilai transaksi perbankan mencapai Rp. 666.000.000.000,-. Selanjutnya subsektor lembaga keuangan bukan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal.37.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 38.

bank ada 8 unit dan jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank ada 2 jenis. jumlah transaksi keseluruhan mencapai Rp. 3.492.000.000,-.

Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah ada 166 unit dengan total nilai persewaan yang dicapai ada Rp. 830.000.000,-. Selanjutnya jumlah perusahaan jasa ada 8 jenis dengan nilai transaksi perusahaan jasa ada 112.000.000,-<sup>129</sup>

Selanjutnya mengenai pendapatan domestik Desa Tugumulyo dari sektor listrik, gas dan air minum pada tahun 2010 mencapai Rp. 628.925.500.000,- dengan perincian jumlah produksi untuk subsektor listrik mencapai Rp. 2.311.600.000,-; Nilai aset produksi gas Rp. 510.000.000,- dan subsektor air minum, jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum ada 2 jenis dengan nilai aset penyediaan air minum sebesar Rp. 340.000.000,-

Jumlah rumah tangga petani ada 1.491 keluarga dengan pendapatan per kapita sekitar Rp. 1.005.000,-. Jumlah rumah tangga bidang perkebunan ada 19 keluarga dengan pendapatan perkapita sekitar Rp. 5.420.000,-. Selanjutnya jumlah rumah tangga bidang peternakan ada 91 keluarga dengan pendapatan perkapita sekitar Rp. 3.212.000,-.<sup>130</sup>

Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan di Desa Tugumulyo ada 981 keluarga dengan pendapatan perkapita rata-rata sekitar Rp. 1.210.000,-. Jumlah kepala keluarga di Tugumulyo ada 3.116 kepala keluarga dengan pendapatan sekitar Rp. 16.249.000.000,-. Pendapatan rata-rata perangkat keluarga sekitar Rp. 1.259.900,-.<sup>131</sup>

#### 4. Sistem Pemerintahan

Pemerintahan desa dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk menjalankan pemerintahan desa dengan melihat sistem, struktur dalam pemerintahan tersebut. Desa Tugumulyo dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh aparat pemerintah desa, antara lain oleh Sekretaris Desa (Sekdes), Kebayan bertugas sebagai pesuruh serta Kaur (Kepala Urusan) dan Kadus (Kepala Dusun)<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup> *Buku Profil Desa Tingkat Desa dan Kelurahan Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Tahun 2010*, (Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2010), hal. 40.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Gusmara, Sekretaris Desa (Sekdes) Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.

Sebagai perbandingan struktur pemerintahan desa masyarakat Jawa sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut :

Kewedanan dipimpin oleh seorang Wedana. Di bawah kewedanan adalah pemerintaqhan Desa yang dipimpin oleh Lurah. Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Carik, Kebayan, Jagatirta, Jagagaya dan Modin/Kaum. Di bawah Desa ada Duku yang dipimpin oleh Kamituwo atau Kadus.<sup>133</sup> Kamituwo atau Kadus (Kepala Dusun) inilah yang bersentuhan/berhubungan langsung dengan rakyat/masyarakat di dusun tersebut. Darti kumpulan dusun-dusun dipimpin oleh Pemerintahan Desa.<sup>134</sup>

Sedangkan sistem pemerintahan yang ada di Desa tugumulyo sekarang tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan desa yang ada di Jawa sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Struktur Jabatan di kantor Desa Tugumulyo saat ini adalah sebagai berikut : Kepala Desa Tugumulyo dipegang oleh H. Suparno, Sekretaris Desa dijabat oleh Gusmara dan dibantu oleh staf lainnya yaitu Kaur Pemerintahan oleh Yusman Widodo, Kaur Pembangunan oleh Jumarsah dan Kaur Kemas/Umum oleh Katiman.

**Tabel 6**  
**Pemegang Jabatan Kades di Desa Tugumulyo<sup>135</sup>**

No.	Kades	Tahun	Suku
1.	Dona Husen	1973-1976	Jawa
2.	Prabo Muhyin	1976-1977	Jawa
3.	Isnaini	1977-1981	Sumatera
4.	Gogok sugito	1981-1993	Bali
5.	Gogok sugito	1993-2002	Bali
6.	M. Rifai	2002-2009	Sumatera
7.	Suparno	2009-sekarang	Jawa

Dari uraian di atas terlihat bahwa telah terjadi kerja sama antar penduduk di Desa Tugumulyo, meskipun mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda, tetapi mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Bentuk kerjasama desa seperti LMD, LMD sebagai wadah

<sup>133</sup> Yetti, 1996), hal. 46

<sup>134</sup> Wawancara dengan H. Suparno, Kepala Desa Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>135</sup> Arsip Desa Tugumulyo Tahun 2010.

permusyawaratan para pemuka masyarakat yang ada di desa. LMD mempunyai tugas menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kades, sebelum rencana tersebut ditetapkan menjadi keputusan desa. Adapun yang menjadi Ketua LMD di Desa Tugumulyo adalah berasal dari suku Jawa. Demikian juga dengan jenis organisasi formal lainnya seperti kaur desa, KUD, PKK, posyandu, jabatannya selalu dipegang secara bersama-sama oleh penduduk desa tanpa membedakan status dan suku mereka berasal<sup>136</sup>.

Perangkat desa Tugumulyo antara lain terdiri atas Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang didampingi oleh seorang sekretaris desa, kepala urusan (kaur) yang berjumlah tiga orang. Kepala dusun ada lima orang, ketua RT ada 20 orang, Kauh/Modin ada 5 orang, hansip sebanyak 10 orang, pengurus LPM-LKMD ada 14 orang dan jumlah badan perwakilan desa ada 13 orang.<sup>137</sup>

Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2006. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berupa Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006. Jumlah perangkat desa ada 9 orang dan jumlah aparat pemerintahan desa ada 20 orang. Selanjutnya aparatur pemerintahan yang masih aktif bekerja adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan. Sedangkan kepala urusan yang tidak aktif adalah kepala urusan umum. Selanjutnya urusan pemerintahan yang belum atau tidak ada yaitu kepala urusan pemberdayaan masyarakat, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, kepala urusan keuangan.<sup>138</sup>

Jumlah dusun/lingkungan yang masih ada kepala dusunnya dan masih aktif bekerja Desa Tugumulyo ada lima, yaitu kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, kepala dusun 4 dan kepala dusun 5. Ditinjau dari sumber daya manusianya, tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan di Tugumulyo sebagai berikut : Kepala desa berpendidikan SLTA; Sekretaris desa berpendidikan Diploma-3; Kepala urusan pemerintahan berpendidikan SLTA; Kepala urusan pembangunan berpendidikan SLTP; dan Kepala urusan umum berpendidikan SLTA.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan H. Suparno, Kepala Desa Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>137</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 17.

<sup>138</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 18.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 18.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ada 11 orang dengan tingkat pendidikan hampir semuanya berijazah SLTA. Sedangkan yang berijazah sarjana dan SLTP masing-masing hanya satu orang. Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu : Ketua dijabat oleh Sugeng Habib dengan pendidikan setingkat SLTA. Wakil Ketua dijabat oleh Sumardi, lulusan SLTA. Sekretarisnya dipercayakan kepada Supriono berijazah SLTA. Adapun anggota-anggotanya yang berpendidikan SLTA yaitu Purwoko, Samadu, sidik, Dede Maisaroh, Hani Widodo dan Wawan. Anggota yang berpendidikan sarjana S-1 bernama Ernawati, SP. Sedangkan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berpendidikan SMP bernama Nur Sutomo.<sup>140</sup> Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) yang ada di Tugumulyo berdiri sejak tahun 2006. Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukannya adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2006. Adapun organisasi yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Kepala Desa adalah sebagai berikut : LPM/LKMD (Lembaga Pimpinan Masyarakat/Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) dengan jumlah pengurus LPM/LKMD ada 32 orang dan beralamat kantor di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing. Ruang lingkup kegiatan ada 4 jenis. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dengan jumlah pengurus ada 26 orang. Alamat kantornya di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing, dengan ruang lingkup kegiatan ada 4 jenis<sup>141</sup>.

Selanjutnya juga ada satu unit organisasi Rukun Warga, dengan jumlah pengurus ada 4 orang dan ruang lingkup kegiatan ada 2 jenis. Rukun tangga ada satu unit organisasi dengan jumlah pengurus ada 21 orang, ruang lingkup kegiatan ada 3 jenis, bertempat di Desa Tugumulyo. Pembentukan Karang Taruna juga berdasarkan keputusan Kepala Desa Tugumulyo, dengan jumlah pengurus ada 20 orang, dan ruang lingkup kegiatannya ada 3 jenis. Kelompok Tani/Nelayan ada 20 unit organisasi, dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Tugumulyo. Ruang lingkup kegiatan ada 2 jenis<sup>142</sup>.

Lembaga adat ada dua jenis organisasi, dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Jumlah pengurus ada 15 orang dengan jumlah kegiatan ada 3 jenis, bertempat di Desa Tugumulyo. Kegiatan keagamaan ada 3 unit organisasi dengan jumlah pengurus 60 orang.<sup>143</sup> Yayasan pendidikan ada 9 unit organisasi dengan dasar hukum pembentukan berdasarkan Akte Notaris. Pemilik yayasan ini ada tiga

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>141</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 18.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 19.



orang dengan jumlah pengurus sebanyak 36 orang. Ruang lingkup kegiatan ada 2 jenis.

## 5. Sarana dan Prasarana Umum

Pada awal transmigrasi tahun 1973 hingga tahun 1975, sarana dan prasarana umum seperti gedung kantor, sekolah, pasar, jalan, puskesmas dan sebagainya belum ada. Untuk tempat belajar anak-anak sekolah dasar, yang lulusan SPG diminta untuk mengajar, kemudian dari Departemen Transmigrasi membuat sekolah yang atapnya terbuat dari seng, dinding bambu, lantai tanah<sup>144</sup>.

Setelah satu tahun penempatan transmigrasi, belum ada perawat. Jika ada pengiriman obat-obatan datang satu atau dua bulan sekali, diserahkan kepada Dona Husen selaku Kepala Desa. Rumah Dona Husen waktu itu dijadikan sebagai pos pelayanan kesehatan yang perawatnya datang sekali sebulan. Jika ada anggota keluarga transmigran yang sakit, mereka berobat ke rumah Dona Husen, baru diberi obat sesuai dengan penyakitnya<sup>145</sup>. Mengingat mereka kekurangan tenaga perawat, maka dalam pemberian obat pun kadang-kadang juga tidak pas dengan penyakitnya, sehingga proses penyembuhannya menjadi sangat lambat. Setelah satu tahun baru didatangkan perawat dari Kayu Agung, dan setelah memberikan pengobatan kemudian kembali lagi ke Kayu Agung. Setiap 15 hari perawat datang. Setelah di lokasi transmigran Tugumulyo ini ditempati 400 kepala keluarga, petugas kesehatan datang. Sebelum perawat datang, masih menggunakan jampi-jampi dan obat-obat tradisional dengan memanfaatkan dukun kampung.

Pembangunan sarana dan prasarana mulai lancar pada tahun 1980-an. Jalan satu-satunya yang ada adalah jalan lintas timur yang menghubungkan Bandar Lampung dengan kota Palembang yang kebetulan melewati Desa Tugumulyo. Di kanan – kiri jalan Desa Tugumulyo masih banyak berupa lahan tidur yang belum dimanfaatkan<sup>146</sup>.

Seiring dengan perjalanan waktu dari tahun ke tahun, dari dasa warsa ke dasa warsa, secara bertahap, pelan tapi pasti, pembangunan di segala bidang mulai dilakukan. Sampai akhir tahun 2010, berdasarkan

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.

<sup>145</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.

<sup>146</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 11 September 2011.

data yang kami peroleh dari Buku Profil Desa/Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Tugumulyo dapat diuraikan sebagai berikut :

Prasarana dan sarana pemerintahan desa/kelurahan telah dibangun dengan jumlah ruang kerja ada 5 ruang. Gedung perkantoran di Desa/Kelurahan Tugumulyo telah dilengkapi dengan listrik, air bersih dan telepon dengan kondisi gedung yang cukup baik dengan halaman dan taman yang cukup luas. Adapun inventaris dan alat tulis kantor Desa Tugumulyo terdiri atas : jumlah mesin tik ada 2 buah, jumlah meja ada 8 buah, kursi 36 buah, almari arsip ada 3 buah, komputer ada 1 buah dan kendaraan dinas berupa sepeda motor 1 unit.

Untuk kegiatan ibadah shalat bagi umat Islam di Desa Tugumulyo, sampai tahun 2010 telah dibangun sarana ibadah sebanyak 6 buah Mesjid, 21 Langgar/Surau/Mushola, dan sarana ibadah untuk umat yang beragama Katholik hanya ada satu buah. Sedangkan tempat ibadah umat yang beragama Kristen Protestan, Hindu dan Budha tidak ada di Tugumulyo. Dengan data sarana ibadah tersebut, maka dapat diketahui bahwa hampir seluruh warga di Desa Tugumulyo beragama Islam.<sup>147</sup> Dan hanya sedikit sekali yang beragama Katholik. Demikian juga yang beragama Hindu juga sangat sedikit, dan mereka biasanya membangun pura di depan rumahnya untuk sarana ibadah keluarga<sup>148</sup>.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kegiatan olah raga bagi para pemuda, maka di Desa Tugumulyo juga dibangun sarana olah raga. Adapun sarana olah raga yang ada yaitu lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis dan meja pingpong masing-masing satu buah. Selanjutnya lapangan bola volly ada 6 buah<sup>149</sup>.

Prasarana kesehatan yang telah ada yaitu Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) ada satu unit yang terletak di dekat kantor Kelurahan/kantor desa. Rumah Sakit Umum belum ada di Desa Tugumulyo. Bagi masyarakat Desa Tugumulyo yang ingin berobat, cukup di Puskesmas. Namun jika sakitnya sudah parah, oleh Puskesmas Tugumulyo akan dirujuk ke Rumah Sakit Daerah di kota Kayu Agung yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah Posyandu ada lima unit dan balai pengobatan masyarakat yayasas/swasta ada 3 unit. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat desa Tugumulyo, telah ada toko obat sebanyak 3 unit yang terletak di dekat Pasar Tugumulyo.<sup>150</sup> Apotik ada

---

<sup>147</sup> Buku Profil Desa Tugumulyo Tahun 2010, hal. 31.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Nanang Abdullah, Imam Mesjid Pasar Tugumulyo pada tanggal 11 September 2011.

<sup>149</sup> Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 32.

<sup>150</sup> Buku Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 32.

1 unit yang juga berada di dekat Pasar Tugumulyo. Jumlah Rumah/kantor praktek dokter ada 2 unit dan rumah bersali juga 2 unit yang letaknya juga tidak jauh dari Pasar Tugumulyo.

Untuk melengkapi prasarana kesehatan, maka di Tugumulyo juga ada tenaga kesehatan yang cukup banyak. Jumlah dokter umum ada 3 orang, dokter gigi ada 1 orang, dokter spesialis lainnya 3 orang, dokter praktek ada 4 orang dan jumlah para medis ada 19 orang. Untuk memperlancar persalinan atau menangani kelahiran bayi di desa Tugumulyo sudah ada 11 orang bidan dan 12 orang perawat. Di samping itu juga ada dukun pengobatan alternatif ada 4 orang<sup>151</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak-anak di Desa tugumulyo, maka perlu dibangun sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat yang tertinggi yaitu perguruan tinggi, baik milik pemerintah maupun swasta. Anak-anak sekolah taman kanak-kanak yang ingin belajar telah dibuatkan gedung TK milik sendiri dua buah dan sewa 1 buah. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan kekurangan fasilitas sekolah, juga telah memanfaatkan sebagian ruang kantor kelurahan/desa Tugumulyo untuk belajar anak-anak TK yang berasal dari desa di sekitarnya. Gedung SD Negeri ada 6 buah milik pemerintah, SMP Negeri 6 buah, SMA Negeri 2 buah. Di samping itu ada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang gedungnya 1 buah milik sendiri dan satu buah sewa.<sup>152</sup>

Prasarana energi dan penerangan di Tugumulyo telah dilengkapi listrik PLN ada satu unit dan genset pribadi ada 921 unit. Selanjutnya pengguna lampu minyak tanah ada 60 keluarga dan kayu bakar ada 89 keluarga. Mengingat di Desa Tugumulyo telah berkembang menjadi sebuah kota kecil dan dilewati jalan lintas timur, maka posisinya sangat strategis sehingga berkembang pula prasarana hiburan dan wisata, meski sangat terbatas. Hotel berbintang memang belum ada, tetapi hotel melati telah ada beberapa buah, di antaranya yaitu Hotel Bima milik Suparno yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Tugumulyo. Kemudian Hotel Roming dan hotel Musi serta beberapa hotel melati lainnya. Sarana bilyar ada satu buah, restoran satu buah dan water boom/kolam renang juga ada satu buah. Hal ini dimungkinkan karena di sepanjang kiri kanan jalan di dekat Pasar Tugumulyo telah dibangun banyak toko dan ruko. Bahkan telah menjadi kota kecil yang menyediakan hampir semua kebutuhan hidup manusia<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 32.

<sup>152</sup> Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 33.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Parmanto, pedagang di Pasar Tugumulyo di Tugumulyo 1 pada tanggal 18 September 2011.

Keberadaan pasar yang sangat ramai sepanjang hari, dan ruko/toko bertingkat yang berjajar sepanjang jalan, ditambah pedagang asongan dan pedagang buah yang menempati pinggir-pinggir jalan, maka sampah kota yang dihasilkan juga sangat banyak. Untuk mengatasi masalah sampah pasar ini juga diperlukan sarana dan prasarana kebersihan. Adapun sarana dan prasarana kebersihan yang ada di antaranya yaitu tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ada satu lokasi, tempat pembuangan akhir (TPA) ada 1 lokasi, gerobak sampah ada 3 unit, tong sampah ada 10 unit. Untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan terakhir maka pemerintah Desa Tugumulyo telah menyediakan truk sampah sebanyak satu unit dan jumlah satgas kebersihan satu kelompok. Jumlah anggota satgas kebersihan ada 3 orang dan jumlah pemulung ada 12 orang.<sup>154</sup>

### C. KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

Masyarakat pada dasarnya terbentuk dari sejumlah aktor (*acting subject*) yang saling berinteraksi dan terikat satu sama lainnya pada relasi sosial. Masyarakat merupakan sistem interaksi sosial yang terdiri dari orang-orang yang saling mempengaruhi baik secara individu maupun secara kelompok.<sup>155</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, ada banyak sisi kehidupan yang tidak dapat dilukiskan atau dilihat bentuknya. Hidup bermasyarakat meliputi banyak bidang kehidupan antara lain kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya maupun kehidupan politik.

#### 1. Kehidupan Sosial

Masyarakat yang berada di daerah transmigrasi merupakan masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda. Mereka hidup bersama dan setiap anggotanya akan memainkan peran sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lainnya. Peran-peran yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dapat terwujud dalam suatu bentuk pola-pola tindakan yang dapat mewakili eksistensinya baik itu yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat tertentu sebagai suatu sistem sosial.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Profil Desa/Kelurahan Tugumulyo Tahun 2010, hal. 34.

<sup>155</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hal. 87.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 13 September 2011.

Kehidupan sosial ini terdiri dari pola interaksi atau hubungan antar masyarakat, sistem pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, kerjasama antar masyarakat maupun konflik yang terjadi dalam masyarakat Jawa yang ada di Tugumulyo.

#### a. Hubungan Antar Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat interaksi sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam proses sosial. Harsojo mengatakan bahwa dalam bentuk kontek kehidupan sosial manusia memerlukan proses adaptasi. Dasar adaptasi ini adalah interaksi sosial dan komunikasi. Dari interaksi sosial akan tercipta suatu proses sosial, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kehidupan bersama.<sup>157</sup> Dengan kata lain bahwa interaksi adalah suatu aksi dan reaksi individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu yang saling merespon.<sup>158</sup>

Untuk mengetahui pola interaksi antar sesama orang Jawa maupun dengan penduduk lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7**  
**Pola Interaksi Antar Penduduk Jawa<sup>159</sup>**

No.	Sikap Masyarakat	F	%
1.	Baik	60	60 %
2.	Biasa saja	40	40 %
3.	Tidak baik	-	0 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 7. dari 100 responden (100 %), sikap masyarakat Jawa dalam berinteraksi sebanyak 60 responden (60 %), penduduk yang menjawab “baik”, penduduk yang menjawab “biasa saja” sebanyak 40 responden (40 %) dan penduduk yang menjawab “tidak baik” sebanyak 0 %.

---

<sup>157</sup> Haryono, Joan, *Transmigrasi : Dari Kolonisasi Sampai Transmigrasi Swakarsa*, (Jakarta : Gramedia, 1982), hal. 187.

<sup>158</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Tugumulyo 1 pada tanggal 13 September 2011.

<sup>159</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2011 di Desa Tugumulyo 1.

Dari tabel 7. di atas terlihat jelas bahwa sikap masyarakat dalam berhubungan dengan sesama orang Jawa adalah baik sebanyak 60 orang responden. Kita tahu bahwa dalam hidup bermasyarakat memang sangat diperlukan cara bergaul dan berhubungan dan berinteraksi dengan lainnya karena hubungan yang baik akan membuat hidup lebih menguntungkan dan menyenangkan. Sebaliknya jika hubungan tidak baik tentu dalam hidup bermasyarakat akan mengalami ketidak harmonisan. Orang-orang yang hidup bermasyarakat membutuhkan saling menghormati, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya, dan hubungan yang terjadi dalam masyarakat di Desa Tugumulyo adalah terjalinnya hubungan yang harmonis, saling pengertian dan saling menghormati, sehingga hubungan tersebut dapat dikatakan sangat harmonis. Hubungan yang harmonis tersebut dapat terjalin karena masyarakat mempunyai kebiasaan hidup dengan sistem sosial yang masih sederhana dan penuh rasa kekeluargaan serta keakraban.<sup>160</sup>

Dari tabel 7. sebanyak 40 orang responden (40 %) mengatakan bahwa hubungan antar penduduk Jawa yang ada di Tugumulyo adalah biasa saja. Dari tabel 7. juga tidak terdapat satu orang pun responden yang mengatakan bahwa hubungan mereka sesama orang Jawa tidak baik, karena pada dasarnya mereka menyadari bahwa mereka berasal dari satu daerah dan suku yang sama atas dasar kekeluargaan. Selanjutnya sikap penduduk dalam bergaul dan berhubungan antar penduduk di Tugumulyo dengan suku lainnya (orang Bali dan penduduk asli) dapat dilihat pada tabel 8. di bawah ini.<sup>161</sup>

**Tabel 8**

**Pola Interaksi Antar Penduduk Jawa dengan Suku Lainnya**

No.	Sikap Masyarakat	F	Persentase
1.	Baik	45	45 %
2.	Biasa saja	55	55 %
3.	Tidak baik	-	0 %
	Jumlah	100	100 %

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Marwan di Tugumulyo 4 pada tanggal 14 September 2011.

<sup>161</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Berdasarkan tabel 8. di atas dari 100 responden (100 %) sikap masyarakat transmigran Jawa dalam berinteraksi dengan suku lainnya (orang Bali dan penduduk asli) sebanyak 45 responden (45 %) yang menjawab bahwa hubungan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan penduduk dari suku lainnya adalah “baik” dan saling membaaur satu sama lainnya sesuai dengan dasar dari kehidupan bermasyarakat bahwa mereka saling membutuhkan karena kodrat mereka sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.<sup>162</sup>

Dari tabel 8. sebanyak 55 responden (55 %) sikap masyarakat transmigran Jawa dalam berinteraksi dengan penduduk dari suku lain, menjawab bahwa hubungan antar mereka adalah “biasa saja”. Mereka merasa bahwa hubungan mereka sesama orang Jawa dan tidak ada yang istimewa atau khusus dari cara hidup dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama mereka orang Jawa maupun hubungan mereka dengan para transmigran dari suku lainnya.

Data pada tabel 8. menunjukkan bahwa, sebanyak 0 responden (0 %) sikap masyarakat Jawa dalam berhubungan dengan para transmigran lainnya tidak ada yang menjawab “tidak baik”, dari 100 orang responden. Selanjutnya di bawah ini tabel 9. faktor yang membuat hubungan antar penduduk di Tugumulyo tidak lancar.

**Tabel 9.**

**Faktor Penyebab Hubungan Transmigran Jawa Tidak Lancar<sup>163</sup>**

No.	Faktor Penyebab	F	Persentase
1.	Bahasa	28	28 %
2.	Kesalahpahaman	72	72 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 9. dari 100 responden (100 %) faktor penyebab hubungan antara para transmigran Jawa tidak lancar, sebanyak 28 responden (28 %) yang menjawab “karena faktor bahasa” maksudnya bahasa merupakan penyebab hubungan di antara mereka tidak lancar di antaranya adalah faktor kesalahan pahaman di antara mereka.

---

<sup>162</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>163</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Data tabel 9. di atas menunjukkan bahwa, sebanyak 72 responden (72 %) bahwa penyebab hubungan antar para transmigran Jawa tidak lancar mereka menjawab “karena terjadinya kesalahpahaman”. Mereka menganggap bahwa dalam hidup bermasyarakat pasti ada suatu perbedaan yang membuat hubungan mereka terganggu, tetapi sebagian besar dari penduduk Tugumulyo mengatakan bahwa perbedaan yang ada di antara mereka bukanlah salah satu faktor yang akan membuat hubungan mereka tidak lancar karena perbedaan itu sifatnya lumrah dalam kehidupan dan mereka tidak memandang hal tersebut sebagai kendala di antara mereka.

Berikut ini tabel 10. faktor penyebab tidak lancarnya hubungan transmigran Jawa dengan penduduk dari suku lainnya.

**Tabel 10.**

**Faktor Penyebab Tidak Lancarnya Interaksi**

**Antar Transmigran dengan Penduduk dari Suku lainnya<sup>164</sup>.**

No.	Faktor Penyebab	F	Persentase
1.	Bahasa	65	65 %
2.	Budaya saja	35	35 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 10. di atas dari 100 responden (100 %), faktor penyebab tidak lancarnya interaksi antar penduduk Jawa dengan penduduk dari suku lainnya adalah sebanyak 65 responden (65 %) yang menjawab “Bahasa”. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat hubungan mereka tidak lancar dengan penduduk dari suku lainnya di antaranya adalah faktor bahasa. Bahasa keseharian yang mereka gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi adalah bahasa Jawa, tetapi pada saat mereka berkomunikasi dengan penduduk lain misalnya penduduk asli akan mengalami suatu komunikasi yang tidak lancar karena bahasa yang mereka gunakan berbeda satu dengan lainnya. Selain faktor bahasa, faktor yang berpengaruh lainnya adalah faktor budaya yang ada di Tugumulyo karena mereka berasal dari daerah yang berbeda dengan budaya yang berbeda, sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Pada tabel 10. Dapat dilihat

---

<sup>164</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.



bahwa, sebanyak 35 responden (35 %) penduduk yang menjawab “budaya” adalah faktor penyebab tidak lancarnya hubungan mereka.

#### **b. Konflik Dalam Masyarakat Jawa**

Untuk mengetahui adaakah konflik yang terjadi dalam masyarakat Jawa di Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 11. di bawah ini<sup>165</sup>.

**Tabel 11**  
**Konflik Dalam Masyarakat Jawa**

No.	Indikator Masyarakat	F	Persentase
1.	Pernah	15	15 %
2.	Kadang-kadang	52	52 %
3.	Tidak Pernah	60	60 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 11 di atas dari 100 responden (100 %) penduduk Jawa di Tugumulyo sebanyak 15 orang responden (15 %) menjawab pernah terlibat konflik antar mereka, dan sebanyak 25 responden (25 %) warga menjawab kadang-kadang terjadi konflik di antara mereka, sedangkan 60 responden (60 %) menjawab tidak pernah terjadi konflik.

Berikut masalah yang terjadi di antara masyarakat Jawa dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>166</sup>.

**Tabel 12**  
**Masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Jawa**

No.	Indikator	F	Persentase
1.	Masalah Hutang	35	35 %
2.	Masalah Tanah	40	40 %
3.	Lain-lain	25	25 %
	Jumlah	100	100 %

---

<sup>165</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>166</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Di lihat dari tabel 12 dari 100 responden (100 %) sebanyak 35 responden (35 %) penduduk menjawab karena masalah hutang dan sebanyak 40 responden (40 %) penduduk menjawab bahwa masalah yang sering terjadi di antara mereka adalah masalah tanah, sedangkan 25 responden (25 %) di antara mereka menjawab bahwa masalah yang mereka hadapi bukan masalah tanah dan hutang, tetapi ada juga masalah lainnya yaitu masalah perbedaan di antara mereka. Masalah-masalah yang timbul dan menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka antara lain :

### **1. Hutang.**

Hutang merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang dan harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hutang tersebut dapat berupa uang atau barang.

### **2. Soal Tanah**

Tanah merupakan lahan untuk tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di daerah Tugumulyo. Koentjaraningrat mengatakan bahwa, salah satu sumber konflik antara golongan etnis di negara berkembang seperti Indonesia yaitu adanya warga yang masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan atau mata pencaharian dari sumber yang sama. Kebenaran pandangan ini ternyata terjadi juga di daerah transmigrasi Tugumulyo.

Adapun faktor penyebab timbulnya masalah tanah dan penduduk saling mengklaim tanah jatah warga lainnya sesama transmigran. Tetapi masalah tanah ini dapat diatasi secara damai dengan duduk bersama bermusyawarah dan bermufakat.

### **3. Kesalahpahaman**

Kesalahpahaman yang terjadi antara warga adalah salah satu bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat di Tugumulyo. Setiap orang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Perbedaan itu antara lain mengenai keinginan dan tujuan hidup mereka yang tidak sama.<sup>167</sup>

Untuk mengetahui bentuk kesalahpahaman yang terjadi berkaitan dengan tanah antar warga di Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 13. di bawah ini.

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan H. Supamo, Kepala Desa Tugumulyo di rumahnya pada tanggal 12 September 2012.

**Tabel 13**  
**Kesalahpahaman di Tugumulyo<sup>168</sup>**

No	Jenis Konflik	F	Persentase
1.	Pertengkaran biasa/pertengkaran mulut	95	95 %
2.	Pertengkaran fisik	5	5 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan data pada tabel 13 dari 100 responden (100 %) penduduk yang terlibat konflik 95 responden (95 %) terlibat pertengkaran biasa dan 5 responden (5 %) terlibat pertengkaran fisik karena mereka tidak bisa menahan emosi masing-masing.

### c. Pendidikan di Tugumulyo

Untuk mengetahui bagaimana jenjang pendidikan yang ada di Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini.

**Tabel 14**  
**Tingkat Pendidikan di Tugumulyo<sup>169</sup>**

No.	Tingkat Pendidikan	F	Persentase
1.	SD	50	50 %
2.	SMP	30	30 %
3.	SMA	15	15 %
4.	Universitas	5	5 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 14 di atas dari 100 responden (100 %), tingkat pendidikan penduduk di Tugumulyo adalah sampai jenjang Sekolah Dasar sebanyak 50 % responden (50 %), penduduk yang berada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 30 responden (30 %), penduduk yang berada pada jenjang SMA sebanyak 15 responden (15 %), dan penduduk yang sampai pada tingkat universitas sebanyak 5 responden (5 %).

---

<sup>168</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>169</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan, di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang canggih haruslah diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik juga. Tingkat atau jenjang pendidikan yang ada di Tugumulyo termasuk dalam kategori baik karena daerah tersebut sarana dan prasarana pendidikannya cukup memadai untuk menunjang kelancaran dari proses pendidikan<sup>170</sup>.

Pendidikan yang ada di Desa Tugumulyo terdiri atas 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum terdiri atas taman kanak-kanak sebanyak 2 gedung sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 5 gedung sekolah, SMP sebanyak 2 gedung sekolah, dan SMA sebanyak 1 gedung sekolah. Pendidikan khusus terdiri atas pondok pesantren 1 gedung sekolah, madrasah 1 gedung sekolah dan sarana pendidikan non formal yang berjumlah 3 buah gedung sekolah dan hal itu merupakan bagian dari seluruh pendidikan yang ada di Tugumulyo. Secara umum sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Tugumulyo sudah cukup baik dan memadai, mulai dari tingkat TK sampai SMA.

#### d. Kesehatan Masyarakat

Berikut ini adalah keadaan kesehatan masyarakat yang ada di Desa Tugumulyo dan sarana prasarana kesehatan yang ada di Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini<sup>171</sup>.

**Tabel 15**  
**Kesehatan Masyarakat**

No	Tingkat Kesehatan	f	Persentase	Sarana Kesehatan	f	Persentase
1.	Baik	55	55 %	Baik	30	30 %
2.	Sedang	35	35 %	Cukup Baik	65	65 %
3.	Baik Sekali	10	10 %	Baik Sekali	5	5 %
	Jumlah	100			100	100 %

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat kita lihat bahwa dari 100 responden (100 %) penduduk Tugumulyo mengatakan bahwa, tingkat kesehatan yang ada di desa mereka adalah “baik” sebanyak 55

---

<sup>170</sup> Wawancara dengan Gusmara, Sekretaris Desa (Sekdes) Tugumulyo di rumahnya pada tanggal 13 September 2011.

<sup>171</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

responden (55 %), penduduk yang menjawab tingkat kesehatan yang ada di Tugumulyo “sedang” sebanyak 35 responden (35 %) dan penduduk yang mengatakan bahwa tingkat kesehatan di Tugumulyo “baik sekali” berjumlah 10 responden (10 %).

Pada tabel 15 menunjukkan bahwa sarana kesehatan yang ada di Tugumulyo dari 100 responden (100 %) penduduk tugumulyo sebanyak 30 responden (30 %) mengatakan bahwa cukup baik sarana dan kesehatan di Tugumulyo “baik” dan memadai. Sedangkan 5 responden (5 %) menyatakan sarana kesehatan yang ada di Tugumulyo “baik sekali”.

Berdasarkan jawaban pada tabel 15 di atas, terlihat bahwa tingkat kesehatan masyarakat di desa Tugumulyo adalah baik, hal ini dapat disimpulkan dari jawaban yang 55 % menyatakan kesehatan warga desa Tugumulyo baik. Sebagian kecil dari mereka menyatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat sedang karena umum mereka melihat kesehatan warga berada pada kategori sedang yang berarti tidak seluruh warga desa dalam keadaan 100 % baik kesehatannya, demikian juga dengan 10 responden lainnya yang menyatakan kesehatan mereka baik sekali karena mereka belum paham arti kesehatan itu sendiri sehingga menganggap bahwa jika fisik mereka tidak sakit, maka mereka merasa kesehatannya baik sekali.

Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap sarana prasarana kesehatan yang ada di tugumulyo berdasarkan pada tabel 15 di atas secara umum dari sebagian besar dari 100 responden (100 %) menyatakan bahwa sarana prasarana kesehatan di Desa Tugumulyo adalah cukup baik hampir 65 % responden.

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di desa Tugumulyo antara lain terdiri dari Rumah Sakit Umum Swasta satu buah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah satu sarana. Sedangkan 6 buah sarana bagi kesehatan bayi dan balita yaitu Posyandu. Sedangkan program keluarga berencana juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang menyangkut kesehatan ibu-ibu rumah tangga terdiri dari KB Aktif berjumlah 817 orang dan KB non aktif berjumlah 1.112 orang.<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Gusmara, Sekretaris Desa (Sekdes) pada tanggal 13 September 2011.

#### e. Kerjasama Antar Masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat sangat diperlukan sifat kerjasama untuk kepentingan bersama. Berikut bagaimana sifat kerjasama yang berlaku di Desa Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.<sup>173</sup>

**Tabel 16**  
**Bentuk Kerjasama Antar Masyarakat**

No.	Bentuk Kerjasama	F	Persentase
1.	Gotongroyong	40	40 %
2.	Siskamling	30	30 %
3.	Musyawarah mufakat	30	30 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 16 di atas dari 100 responden (100 %) penduduk Tugumulyo menyatakan bahwa bentuk kerjasama yaitu gotongroyong masih berlaku dan sangat kental dengan masyarakat setempat, bentuk kerjasama dengan siskamling sebanyak 30 responden (30 %) dan musyawarah mufakat sebanyak 30 responden (30 %).

Kerjasama merupakan suatu proses sosial yang terjadi di mana orang-orang yang terlibat aktivitas selalu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama untuk memecahkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun bentuk dari kerjasama yang masih berlaku dalam masyarakat Tugumulyo antara lain gotongroyong, siskamling dan musyawarah mufakat.

Gotongroyong merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan dan tujuan bersama. Selain itu kegiatan gotongroyong merupakan salah satu bentuk partisipasi dan peranan aktif masyarakat dalam pembangunan desa mereka. Contoh dari hasil kegiatan gotongroyong itu adalah dalam pembangunan jalan desa sebagai sarana transportasi yang vital di Dusun I dengan cara gotongroyong yang telah menghasilkan jalan tembus. Jika alternatif lain bagi warga Rt 01 Dusun I menuju lokasi persawahan dan pemakaman umum Dusun I, demikian juga perbaikan-perbaikan jalan-jalan desa di setiap dusun. Transportasi yang ada di Desa Tugumulyo sangat lancar dan baik, transportasi dalam desa maupun transportasi keluar desa misalnya ke Ibukota Kabupaten OKI

---

<sup>173</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo I.

di kota Kayu Agung dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Contoh lain gotongroyong dalam pembuatan rumah tinggal yang dikerjakan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama lainnya adalah siskamling. Siskamling ini dibentuk untuk mengantisipasi keamanan lingkungan desa dan sarana dalam membangun pos siskamling berasal swadaya masyarakat di lingkungan masing-masing. Pos siskamling yang dibentuk antara lain : (1) Dusun I ada tujuh buah pos siskamling, (2) Dusun II ada tiga buah pos siskamling, (3) Dusun III ada satu buah pos siskamling, (4) dusun IV ada empat buah pos siskamling dan (5) Dusun V ada dua buah pos siskamling. Pos siskamling yang terbentuk atas swadaya dari masyarakat secara mumi berjumlah 17 pos siskamling dan mereka secara bergantian melakukan tugas jaga malam di setiap dusun untuk menjaga keamanan desa mereka.<sup>174</sup>

Bentuk kerjasama lainnya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah biasanya dilakukan oleh warga desa untuk membicarakan dan mencari suatu penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Contohnya : dalam pembentukan perangkat desa seperti sekretaris desa, kaur desa, kepala dusun dari Dusun I sampai Dusun V dari setiap dusun yang mereka pilih dan lakukan secara musyawarah mufakat dengan anggota masyarakat lainnya.<sup>175</sup>

## 2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk menjalankan pemerintahan desa dengan melihat sistem, struktur dalam pemerintahan tersebut. Desa Tugumulyo dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dan dibantu oleh aparat pemerintah desa, antara lain oleh Sekdes (Sekretaris Desa), Kabayan sebagai pesuruh serta Kaur dan Kadus. Sebagai perbandingan di bawah ini dapat dilihat struktur pemerintahan desa masyarakat Jawa sebelum keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut : Kekuasaan tertinggi berada di Kewedanan dipimpin oleh seorang Wedana. Di bawah Kewedanan ada Desa yang dipimpin oleh Lurah. Lurah ini dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Perangkat Desa terdiri atas : Carik, Kebayan, Jagatirta, Jaga baya, Modin/Kaum. Kemudian di bawah Desa ada Dukuh yang

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan H. Suparno, Kepala Desa Tugumulyo pada tanggal 12 September 2011.

<sup>175</sup> Wawancara dengan H. Suparno, Kepala Desa Tugumulyo pada tanggal 12 September 2011.

dipimpin oleh Kamituwo atau Kadus. Selanjutnya, di bawah Dukuh ini adalah kumpulan dari seluruh rakyat yang tinggal di Dukuh tersebut.<sup>176</sup>

Sedangkan sistem pemerintahan yang ada di desa Tugumulyo sekarang tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan desa yang ada di Jawa sebelum keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Berikut ini anggapan masyarakat Jawa tentang aparat pemerintahan desa yang memegang jabatan sebagai aparat pemerintah di Desa Tugumulyo pada tabel 17 seperti berikut.<sup>177</sup>

**Tabel 17**  
**Tanggapan Masyarakat Tentang**  
**Aparat Pemerintahan Desa Berdasarkan Suku**

No	Jenis Jabatan	f	Persentase	Asal Suku	f	Persentase
1.	Kades	40	40 %	Jawa	30	30 %
2.	Carik/Sekdes	35	35 %	Sumatera	15	15 %
3.	Kadus	25	25 %	Campuran	65	65 %
	Jumlah	100	100 %		100	100 %

Berdasarkan tabel 17 di atas dari 100 responden (100 %) penduduk yang menjawab bahwa aparat pemerintahan dipegang oleh suku Jawa sebanyak 40 responden (40 %) sebagai Kepala Desa (Kades), jabatan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) sebanyak 35 responden (35 %) dan penduduk yang menjawab sebagai Kepala Dusun (Kadus) 25 responden (25 %).<sup>178</sup>

Dari tabel 17 di atas dilihat bahwa jabatan yang dijabat oleh aparat pemerintahan berdasarkan asal suku daerah dari 100 responden (100 %), suku Jawa menjabat aparat pemerintah sebanyak 30 % dari Bali sebanyak 10 %, dari Sumatera sebanyak 15 % dan campuran sebanyak 65 %.<sup>179</sup>

Yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Supamo, Sekretaris Desa adalah Gusmara, dan dibantu oleh staf lainnya yaitu Kaur Pemerintahan oleh Yusman Widodo, Kaur Pembangunan oleh Jumarsah dan Kaur Kemas/Umum oleh Katiman.

---

<sup>176</sup> Junghas, K.H., *Transmigrasi dan Produksi Pertanian di Sumatera Selatan*, (Jakarta : Gramedia, 1982), hal. 46.

<sup>177</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo I.

<sup>178</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo I.

<sup>179</sup> *Ibid.*



**Tabel 18**  
**Pemegang Jabatan Kades Desa Tugumulyo**

No.	Kades	Tahun	Suku
1.	Dona Husen	1973-1976	Jawa
2.	Prabo Muhyin	1976-1977	Jawa
3.	Isnaini	1977-1981	Sumatera
4.	Gogok Sugito	1981-1993	Bali
5.	Gogok Sugito	1993-2003	Bali
6.	M. Rifai, SE	2003-2009	Sumatera
7.	Suparno	2009-Sekarang	Jawa

Sumber : Arsip Desa Tugumulyo Tahun 2011

Dari uraian di atas terlihat bahwa telah terjadi kerjasama antar penduduk di Desa Tugumulyo, meskipun mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda, tetapi mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Bentuk kerjasama desa seperti LMD, LMD sebagai wadah permusyawaratan para pemuka masyarakat yang ada di desa. LMD mempunyai tugas menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kades, sebelum rencana tersebut ditetapkan menjadi keputusan desa. Adapun yang menjadi ketua LMD di Desa Tugumulyo adalah suku Jawa. Demikian juga dengan jenis organisasi formal lainnya seperti Kaur Desa, KUD, PKK, Posyandu, jabatan selalu dipegang secara bersama-sama oleh penduduk desa tanpa membedakan status dan suku mereka berasal.<sup>180</sup>

Perangkat desa Tugumulyo antara lain terdiri dari Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, yang didampingi oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) yang berjumlah 3 orang, Kepala Dusun ada 5 orang, Ketua RT ada 20 orang, Kaum/Mudin ada 5 orang, Hansip sebanyak 10 orang, Pengurus LPM-LKMD adalah 14 orang dan jumlah badan perwakilan desa ada 13 orang.<sup>181</sup>

### **3. Kehidupan Ekonomi**

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Tugumulyo ini secara umum berkaitan dengan sistem mata pencaharian masyarakat yang ada di Tugumulyo. Indikator untuk mengetahui jenis mata pencaharian di Desa Tugumulyo yaitu sektor mata pencaharian dan hal-hal yang berkaitan dengan segi kehidupan ekonomi penduduk di Desa

<sup>180</sup> Wawancara dengan Gusmara Sekretaris Desa (Sekdes) Tugumulyo di rumahnya Tugumulyo 3 pada tanggal 17 September 2011.

<sup>181</sup> Monografi Desa Tugumulyo pada tahun 2011.

Tugumulyo. Mata pencaharian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan/aktivitas penduduk dalam bidang ekonomi sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup sebelum dan sesudah kedatangan mereka ke daerah transmigrasi. Untuk mengetahui perubahan mata pencaharian penduduk Jawa sebelum dan sesudah mereka datang ke Desa Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini.

**Tabel 19**  
**Mata Pencaharian Transmigran Sebelum dan**  
**Sesudah Melakukan Transmigrasi<sup>182</sup>**

Jenis Mata Pencaharian	Sebelum		Sesudah	
	F	Persentase	F	Persentase
Bertani Menetap	31	62 %	36	72 %
Buruh Tani	10	20 %	-	-
Tukang	2	4 %	4	8 %
Pedagang	2	4 %	3	6 %
Membuat Genteng/Batubata	5	10 %	7	14 %
Jumlah	50	100 %	50	100 %

Melihat tabel 19, dari 50 responden (100 %) menyatakan perubahan mata pencaharian warga pendatang sebelum bertransmigrasi yang bertani menetap sebanyak 31 responden (62 %) menjadi 36 responden (72 %) setelah bertransmigrasi, buruh tani dari 10 responden (20 %) menjadi tidak ada, tukang 2 responden (4 %) menjadi 4 responden (8 %), pedagang dari 2 responden (4 %) menjadi 3 responden (6 %) dan yang membuat genteng dari 5 responden (10 %) menjadi 7 responden (14 %).

Masyarakat transmigran yang hidup bertani menetap rata-rata petani miskin yang hanya memiliki lahan yang sempit, sehingga dengan lahan yang mereka miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga. Selanjutnya masyarakat transmigran dari hidup bertani adalah petani yang tidak mempunyai lahan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka biasanya menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil (maruh) sesuai dengan aturan tertentu atau menyewa tanah petani lain dan menjadi buruh pada saat panen atau pada saat mengerjakan sawah pekerjaan tukang yang dilakukan warga transmigran di daerah asal sebanyak dua orang (4 %), mereka adalah tukang

---

<sup>182</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

bangunan yang mengerjakan dan membuat rumah penduduk. Profesi pedagang sebanyak 2 responden (4 %), mereka hanya pedagang kecil yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan membuat genteng/batubata dilakukan oleh 5 responden (10 %) warga transmigran, selain sebagai mata pencaharian utama juga banyak warga di daerah asal yang membuat genteng/batubata sebagai pekerjaan sampingan. Dari tabel 4.14 di atas terlihat hanya 10 responden (20 %) yang mengalami perubahan mata pencaharian dan 40 responden (80 %) tidak mengalami perubahan dalam jenis mata pencaharian. Berikut ini tabel 20, faktor penyebab yang membuat mata pencaharian mereka tidak begitu banyak mengalami perubahan.

**Tabel 20**  
**Faktor Penyebab Warga Transmigran Tidak Mengalami**  
**Banyak Perubahan dalam Mata Pencaharian.<sup>183</sup>**

No	Faktor Penyebab	F	Persentase
1.	Sudah terbiasa dengan pola dan sistem di daerah asal	100	100 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 20, dari 100 responden (100 %), masyarakat transmigran di daerah transmigrasi yang tidak mengalami perubahan mata pencaharian sebanyak 100 responden (100 %) menyatakan mereka sudah terbiasa dengan pola dan sistem di daerah asal.

Dari tabel 420, sebanyak 100 responden (100 %) mengatakan masyarakat Jawa tidak mengalami perubahan mata pencaharian karena terbiasa dengan pola di daerah asal dan hal ini tetap dipertahankan di daerah transmigrasi di Desa Tugumulyo. Hal ini sesuai dengan pendapat Amral Syamsul yang mengatakan bahwa, petani-petani Jawa tidak suka dan berat meninggalkan desanya.<sup>184</sup> Mereka mau pindah jika di daerah baru tetap dalam alam hidupnya dan bekerja dengan cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah asalnya. Pendeknya cara-cara hidup di daerah baru tidak banyak berbeda dengan cara-cara hidup di daerah asal.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>184</sup> Afwan, S. Imam, (ed.), *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 10.

<sup>185</sup> Wawancara dengan Marsis di Tugumulyo 2 pada tanggal 11 September 2011.

Di sini terjadi suatu perubahan mentalitas pada transmigran Jawa. Berger dalam Rukmadi menilai petani Jawa mempunyai sifat-sifat statis, kurang berjiwa pioneer dan terlalu pasrah pada nasib serta memandang kerja sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>186</sup> Justru di daerah baru ini mereka berubah, mereka berpacu untuk merubah keadaan hidupnya ke arah yang lebih baik, sehingga anggapan yang berbunyi *mangan ora mangan asal kumpul* tidak berlaku lagi dan bergeser menjadi *kumpul ora kumpul asal mangan*. Mereka yang rata-rata petani miskin dan petani penggarap serta buruh tani bekerja keras untuk merubah nasib mereka. Hal ini terlihat dari keterangan responden yang menyatakan tingkat kehidupan mereka lebih baik di daerah yang baru dari pada di daerah asal. Bahkan juga banyak warga yang tingkat kehidupannya lebih baik dari pada penduduk asli. Masyarakat transmigran sudah terbiasa dengan pola bercocok tanam, dengan kemampuan yang dimilikinya tidak mengalami kesulitan ketika di daerah baru yang meneruskan pola-pola di daerah asalnya.<sup>187</sup>

Perubahan yang terjadi yaitu urutan yang sebelumnya mencapai 10 responden (20 %) tetapi setelah bertransmigrasi ke Desa Tugumulyo menjadi 8 %. Di daerah asal mereka tidak mempunyai tanah/sawah, tetapi setelah bertransmigrasi mereka mempunyai sawah atau tanah sendiri, meskipun tidak terlalu luas, tetapi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari hasil sawah tersebut, walaupun mereka masih menekuni sebagai buruh tani hanya sebagai kerja sampingan saja.<sup>188</sup>

Sedangkan untuk pekerjaan tukang, dagang dan membuat genteng/batubata hampir tidak mengalami perubahan. Pekerjaan ini banyak dilakukan warga hanya sebagai pekerjaan sampingan pada saat menunggu hasil panen sawah mereka. Kegiatan ini sudah lama dilakukan warga di daerah asal, untuk pekerjaan membuat genteng/batubata banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di Desa Yogya dan Solo. Warga yang benar-benar menekuni pekerjaan membuat genteng/batubata yaitu 7 responden (14 %), meski hanya sebagai pekerjaan sampingan, tetapi sudah cukup untuk menambah perekonomian. Warga para transmigran sendiri tidak banyak mengalami perubahan dalam mata pencaharian, karena mereka tetap menjalankan

---

<sup>186</sup> Berger dalam Rukmadi, *Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Daerah Pemukiman*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 10.

<sup>187</sup> Wawancara dengan Wijiyo di Tugumulyo 5 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>188</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

pola-pola kerja di daerah asalnya. Berikut ini pola petani di Desa Tugumulyo, dapat dilihat pada tabel 21 seperti di bawah ini<sup>189</sup>.

**Tabel 21**  
**Pola Pertanian Masyarakat**

No.	Pola Pertanian	F	Persentase
1.	Terasering	-	-
2.	Rawa-rawa	5	5 %
3.	Tadah Hujan	95	95 %
	Jumlah	100	100 %

Melihat tabel 21, di atas dari 100 responden mengatakan pola pertanian penduduk Jawa di Desa Tugumulyo adalah rawa-rawa sebanyak 5 responden (5 %), sedangkan 95 responden (95 %) menyatakan bahwa pola pertanian penduduk Jawa di Tugumulyo adalah jenis sawah tadah hujan. Berdasarkan tabel 21, di atas dapat disimpulkan bahwa 95 % pola pertanian di Desa Tugumulyo adalah jenis sawah tadah hujan dan 5 % jenis rawa-rawa. Keadaan Tugumulyo daerah memang subur dibandingkan dengan desa transmigran lainnya, tetapi sebagian besar lahan persawahan di Tugumulyo termasuk dalam sawah tadah hujan dan menggunakan pola bertani menetap seperti pola mereka sebelumnya. Dengan dua musim yang ada di Tugumulyo, yaitu musim hujan (Oktober – April) dan musim kemarau (April – Oktober) dengan iklim tropis yang bersuhu rata-rata 27<sup>0</sup> C – 34<sup>0</sup> C dan curah hujan 2, 630 mm<sup>3</sup>/tahun membuat daerah ini menghasilkan produksi/panen yang cukup baik dan memuaskan.

Selanjutnya alat yang digunakan penduduk dalam mengolah lahan pertanian sebelum ditanam dapat dilihat pada tabel 22 di bawah ini<sup>190</sup>.

---

<sup>189</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>190</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

**Tabel 22**  
**Alat yang Digunakan Dalam Mengolah Pertanian**

No.	Alat Pertanian	F	Persentase
1.	Traktor	-	-
2.	Bajak	98	98 %
3.	Cangkul	2	2 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas dari 100 responden menyatakan bahwa alat yang digunakan dalam pengolahan tanah dengan bajak sebanyak 98 responden (98 %), penduduk yang menggunakan cangkul sebanyak 2 responden (2 %) dan menggunakan traktor (0 %).

Dilihat dari tabel 22, masyarakat Jawa yang menggunakan bajak sebagai alat untuk pengolahan dengan bantuan kerbau mencapai 98 %. Hal itu disebabkan kebiasaan mereka di daerah sebelum datang ke daerah transmigrasi, dalam pengolahan sawah masih menggunakan bajak sebelum lahan siap untuk ditanami pengolahan lahan menggunakan alat cangkul hanya 2 %. Di Desa Tugumulyo dilihat hasil di lapangan bahwa sebagian besar penduduk dalam mengolah lahan pertanian masih menggunakan alat tradisional, yaitu bajak dengan bantuan kerbau dan cangkul hanya sebagai alat bantu dalam pengolahan lahan.

Berikut ini jenis tanaman yang ditanam di daerah persawahan dan perkebunan dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini<sup>191</sup>.

**Tabel 23**  
**Tanaman yang di Tanam oleh Penduduk**

No	Tanaman Sawah	f	%	Tanaman Kebun	f	%
1.	Karet	-		Karet	32	64 %
2.	Padi	50	100 %	Padi	-	-
3.	Kelapa Sawit	-	-	Kelapa Sawit	10	20 %
4.	-			Palawija	8	16 %
	Jumlah	100	100 %	Jumlah	100	100 %

---

<sup>191</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 50 responden (100 %) menyatakan bahwa jenis tanaman sawah yang ditanami oleh penduduk adalah padi sebanyak 50 responden (100 %). Jenis tanaman yang dipergunakan untuk perkebunan yang ditanami oleh penduduk dari 50 responden (100 %) yang menjawab menanam karet sebanyak 42 responden (64 %), padi 0 %, kelapa sawit sebanyak 20 % dan tanaman palawija sebanyak 16 %.

Jenis tanaman utama yang ditanam oleh penduduk Jawa di Tugumulyo adalah padi. Oleh karena itu desa ini merupakan daerah penghasil padi/beras yang cukup besar di Kecamatan Lempuing. Sedangkan tanaman untuk jenis perkebunan beraneka ragam antara lain karet, kelapa sawit, sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai petani masyarakat Jawa juga ada yang memelihara ternak, seperti terlihat pada tabel 24 di bawah ini.

**Tabel 24**  
**Ternak yang Dipelihara<sup>192</sup>**

No.	Jenis Ternak	F	Persentase
1.	Sapi	3	3 %
2.	Kerbau	10	10 %
3.	Kambing	17	17 %
4.	Ayam/Itik	20	20 %
5.	Ikan	50	50 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 24, dari 100 responden (100 %) maka jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat Jawa di Tugumulyo yang memelihara sapi sebanyak 3 responden (3 %), yang memelihara kerbau 10 responden (10 %), yang memelihara kambing 17 responden (17 %), yang memelihara ayam/itik 20 responden (20 %) dan yang memelihara ikan sebanyak 50 responden (50 %).

Hasil produksi penduduk dijual ke pasar-pasar dan ada juga yang ke KUD sebagai koperasi yang cukup berperan dalam kehidupan masyarakatnya. Koperasi ini bergerak dalam bidang sarana produksi pertanian. Misalnya tanaman pangan (padi), perikanan, cengkih, peternakan, dan lain-lain. Anggotanya adalah warga desa yang kehidupannya dari lapangan pertanian tersebut. Koperasi Unit desa

---

<sup>192</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

(KUD) maju pesat dan pemerintahan memberikan bimbingan bahkan kemudahan, agar KUD (Koperasi Unit Desa) berjalan lancar. Kehidupan petani telah dibantu oleh KUD (Koperasi Unit Desa). Dilihat dari macam barang (hasil) yang diusahakan kita mengenal koperasi karet, koperasi kerajinan, dan jenis koperasi lainnya. Koperasi Unit Desa yang ada di Desa Tugumulyo sangat membantu penduduk, berikut peranan KUD (Koperasi Unit Desa) dalam kehidupan penduduk desa dapat dilihat pada tabel 25 di bawah ini.

**Tabel 25**  
**Peran KUD Desa Tugumulyo<sup>193</sup>**

No.	Pengetahuan	F	Persentase
1.	Cara membuka lahan	31	31 %
2.	Cara memelihara tanaman keras	15	15 %
3.	Cara berdagang	54	54 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 100 responden (100 %), KUD (Koperasi unit Desa) sebagai tempat menjual hasil panen sebanyak 10 responden (10 %), KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai tempat meningkatkan modal usaha sebanyak 54 responden (54 %), dan KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai tempat pembelian kebutuhan sehari-hari sebanyak 6 responden (6 %). Dari tabel 4.19 di atas KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan suatu tempat transaksi kedua bagi penduduk setelah pasar.

Desa Tugumulyo merupakan tempat bertemunya para penduduk dari berbagai suku dan budaya yang berbeda.<sup>194</sup> Secara tidak langsung masyarakat yang ada di Tugumulyo yaitu antara penduduk asli dan masyarakat transmigran Jawa terjadi suatu transformasi di bidang budaya berupa pengetahuan. Berikut pengetahuan yang didapat oleh penduduk Jawa dari penduduk asli pada tabel 26 di bawah ini :

---

<sup>193</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>194</sup> Wawancara dengan Sumardi, seorang petani yang tinggal di Tugumulyo I pada tanggal 16 September 2011.



**Tabel 26**  
**Pengetahuan Cara Membuka Hutan<sup>195</sup>**

No.	Pengetahuan	F	Persentase
1.	Cara membuka hutan	31	31 %
2.	Cara memelihara tanaman keras	15	15 %
3.	Cara berdagang	54	54 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 26, di atas dari 100 responden (100 %) masyarakat transmigran mendapat pengetahuan di bidang budaya mengenai cara membuka hutan sebanyak 31 responden (31 %), sedangkan 15 responden (15 %) mendapat pengetahuan tentang cara berdagang.<sup>196</sup> Berdasarkan tabel di atas pengetahuan yang didapat oleh masyarakat Jawa di bidang budaya tentang cara membuka hutan sebanyak 31 responden (31 %). Ketika transmigrasi datang ke Tugumulyo, daerah ini masih berupa hutan lebat sehingga mereka harus membukanya lebih dahulu sebelum dijadikan areal pertanian.<sup>197</sup>

Ketika membuka hutan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, menebang pohon-pohon besar dan menjadi tumpukan batang dan daun-daunnya, lalu batang tersebut dibersihkan dengan memotong dahan-dahan dan rantingnya. Potongan dahan, ranting dan daun ditumpuk lalu dibiarkan dulu hingga kering dan kemudian dibakar. Batang pohon yang besar dan bagus dapat dipakai untuk membuat rumah dan keperluan lainnya. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, transmigrasi telah meniru penduduk asli tentang cara membuka hutan yang benar.<sup>198</sup>

Dalam membuka hutan tersebut diperlukan alat-alat seperti beliung (kapak besar) yang terdiri dari kapak besi yang dijepit kayu atau rotan. Beliung ini berfungsi untuk menebang dan memotong kayu-kayu besar. Kapak patil (sejenis beliung, tetapi bentuknya lebih kecil), fungsinya untuk membelah atau memotong pohon-pohon kecil. Alat lainnya adalah parang atau gobek berfungsi untuk menebas semak belukar, cadung berfungsi untuk memotong dan membelah kayu yang

---

<sup>195</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

<sup>196</sup> Wawancara dengan Sanjo di Tugumulyo 4 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>197</sup> Wawancara dengan Dalimin di Tugumulyo 5 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Wagiman di Tugumulyo 4 pada tanggal 16 September 2011.

kecil. Para transmigran secara langsung telah mengadopsi tenaga/peralatan-peralatan yang dipakai oleh penduduk asli dalam membuka hutan. Peralatan-peralatan itu tidak dikenal di daerah asal mereka sebelumnya.

Pengetahuan di bidang ekonomi didapat warga pendatang dari penduduk asli tentang cara-cara memelihara tanaman keras seperti kopi, cengkih, karet, kakau yang di daerah asal mereka tidak diketahui karena mereka ini kebanyakan adalah petani padi. Dari penduduk asli, mereka mendapat pengetahuan cara-cara pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga memanen tanaman tersebut.<sup>199</sup>

Kehidupan ekonomi masyarakat di Desa Tugumulyo berpusat pada pasar, karena pasar mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan perekonomian mereka. Selain sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, pasar merupakan suatu sarana untuk berinteraksi antar penduduk di Desa Tugumulyo yang berasal dari suku yang berbeda. Hasil produksi penduduk dipasarkan di daerah Tugumulyo yaitu ke pasar. Selain itu juga dipasarkan ke luar daerah, misalnya ke pasar-pasar desa tetangga, bahkan ada juga yang dijual ke Kayu Agung dan Palembang.<sup>200</sup>

Kegiatan ekonomi penduduk terjalin cukup baik antar orang Jawa dan penduduk asli karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terjadi suatu kerja sama yang baik. Orang Jawa berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang-barang melalui hasil panen mereka di sawah/ladang. Sedangkan penduduk asli berperan sebagai konsumen dan distributor untuk barang-barang yang telah dihasilkan. Berdasarkan hasil di lapangan, dapat dilihat bahwa keadaan ekonomi penduduk di Desa Tugumulyo adalah cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sehari-hari dan saling bekerja sama dengan bantuan pasar sebagai tempat yang mempertemukan mereka dalam suatu wadah perekonomian, walaupun sifatnya masih tradisional. Pola kehidupan ekonomi penduduknya sudah lebih baik dan layak dari keadaan ekonomi mereka sebelumnya.<sup>201</sup>

Warga transmigran Jawa mendapat pengetahuan di bidang ekonomi tentang cara berdagang, karena penduduk asli mempunyai jiwa dagang yang tinggi dan cara berdagang tersebut ditiru oleh masyarakat Jawa. Sebagian besar penduduk asli berada di Tugumulyo bermata

---

<sup>199</sup> Wawancara dengan Paijo di Tugumulyo 3 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>200</sup> Wawancara dengan Wongso di Tugumulyo 3 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>201</sup> Wawancara dengan Arif Akhadi, S.Sos.MM di Tugumulyo 2 pada tanggal 16 September 2011.

pencaharian sebagai pedagang dan kebanyakan dari mereka berhasil sebagai pedagang dan hal ini merupakan suatu pengetahuan baru bagi masyarakat Jawa.<sup>202</sup>

#### 4. Kehidupan Budaya

Kehidupan masyarakat di daerah transmigrasi merupakan tempat bertemunya golongan etnik yang berbeda dengan budaya yang berbeda antara satu dan lainnya. Kebudayaan merupakan jawaban manusia atas tantangan yang dihadapi dalam hidupnya, karena tantangan yang dihadapi oleh manusia itu berbeda-beda, maka budaya yang ada dalam masyarakat dengan masyarakat lainnya pasti berbeda pula. Setiap kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, misalnya dalam wujud komunitas desa, kelompok kekerabatan atau kelompok tradisi bisa menampilkan sosok yang bercorak khas. Kekhususan corak ini dikarenakan budaya tersebut menghasilkan suatu unsur-unsur tertentu dengan bentuk dan pola yang khas corak ini membedakan suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Persatuan budaya ditentukan oleh warga pendukung kebudayaan itu sendiri, warga masing-masing sadar dengan sendirinya akan identitas dan keseragaman budaya yang berbeda dengan budaya lainnya. Masing-masing kebudayaan mempunyai suatu kepribadian yang khusus.<sup>203</sup>

Berikut ini definisi kebudayaan menurut beberapa ahli sosiologi dan antropologi, di antaranya Rafinton menyatakan, bahwa “kebudayaan adalah suatu konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil dari tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan ditentukan oleh anggota masyarakat tertentu”.<sup>204</sup> Pendapat yang sama yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen yang dikutip oleh Djojodigono dan kepercayaan yang dipelajari dan merupakan ciri anggota masyarakat tertentu.

Kebudayaan adalah segala yang terdapat dalam masyarakat mendapat dukungan dari Koentjaraningrat. Definisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat<sup>205</sup> :

---

<sup>202</sup> Wawancara dengan M. Rifai, SE di Tugumulyo 3 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>203</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1984), hal. 278.

<sup>204</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka 1984), hal. 85.

<sup>205</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1984), hal. 97.

“Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lainnya serta kebiasaan yang dapat manusia kerjakan sebagai anggota masyarakat.

Dari beberapa definisi kebudayaan, menurut beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan adalah hasil dari karsa, rasa dan cipta manusia dalam menjawab tantangan hidupnya sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang dipelajari dan diteruskan oleh generasi selanjutnya dalam kelompok masyarakat tertentu. Demikian halnya dengan kehidupan budaya masyarakat Jawa yang berada di Desa Tugumulyo yang berkaitan dengan masalah pengetahuan, adat-istiadat, bahasa, kesenian, agama, pakaian dan rumah tinggal.

#### a. Adat Istiadat

Berikut ini dapat dilihat anggapan masyarakat Jawa terhadap budaya mereka setelah pindah ke daerah transmigrasi pada tabel di bawah ini.

**Tabel 27**  
**Tanggapan Masyarakat Jawa Terhadap Budaya Mereka**  
**Setelah Pindah ke Daerah Transmigrasi<sup>206</sup>**

No.	Perbedaan Budaya	F	Persentase
1.	Ada	-	-
2.	Berubah	5	5 %
3.	Tidak Sama	95	95 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas dari 100 responden (100 %) orang Jawa di Desa Tugumulyo menyatakan bahwa adat kebiasaan dan budaya mereka tidak berubah sebanyak 95 responden (95 %) dan yang menyatakan berubah sebanyak 5 responden atau (5 %).

Sebagian besar suku Jawa berdiam di daerah pedesaan ini sesuai dengan pulau Jawa yang dikenal dengan daerah agraris. Desa dalam khasanah kebudayaan Jawa terbagi menjadi beberapa dukuh atau

---

<sup>206</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

semacam kampung. Tiap kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung atau dusun (*kadus/kamituwo*). Para kamituwo inilah yang secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat yang tinggal di daerah kekuasaannya. Sebagai halnya kepala desa, kepala dusun (*kamituwo*) juga mendapat gaji berupa *tanah bengkok* milik desa. *Tanah bengkok* adalah tanah milik desa yang diberikan kepada kepala desa untuk digarap dan dianggap sebagai gaji untuk kepala desa atas pengabdianya. Jika masa jabatannya habis, maka tanah tersebut diserahkan kembali kepada desa. Pemimpin desa tertinggi adalah kepala desa atau lurah yang dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas *carik* sebagai sekretaris desa, *jagabaya*, *kebayan* sebagai pesuruh, *ulu-ulu* yang bertugas dalam pembagian air, penghulu modin/kaum yang bertugas dalam bidang keagamaan.<sup>207</sup>

Sistem gotongroyong apa dalam masyarakat desa sangat akrab hal ini terlihat dalam rangka memelihara dan membangun desanya. Para pamong desa sering mengerahkan penduduk desa dengan cara *gugur gunung* atau *bersih desa* (kerja bakti), misalnya untuk memperbaiki atau membuat jalan, jembatan, menggali saluran air dan membuat mesjid.<sup>208</sup>

Dukuh yang terdiri dari penduduk yang jumlahnya tergantung pada besar kecilnya dukuh atau kampung dari desa tersebut. Biasanya rumah orang Jawa memiliki pekarangan yang luas yang dipagari bambu, kayu atau sejenis pagar hidup. Para petani mempunyai lumbung padi sebagai persiapan masa paceklik, seiring dengan semakin banyaknya lembaga penyimpanan uang seperti Bank yang membuat masyarakat menyimpan uangnya di Bank.<sup>209</sup>

Hampir setiap rumah orang Jawa mempunyai hewan peliharaan terutama sapi dan kerbau, yang sangat berguna dalam menggarap sawah, yaitu untuk membajak. Sekarang ini meskipun sudah ada alat yang lebih canggih seperti traktor, tetapi sapi dan kerbau masih dipelihara karena hewan tersebut dapat berfungsi sebagai tabungan,

---

<sup>207</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1984), hal. 303.

<sup>208</sup> Wawancara dengan Suyanto di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>209</sup> Wawancara dengan Parmanto di Tugumulyo 1 pada tanggal 12 September 2011.

misalnya jika mereka membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak atau untuk keperluan lainnya.<sup>210</sup>

Antara satu dukuh dengan dukuh lainnya dihubungkan dengan jalan-jalan desa. Untuk dukuh yang sudah maju jalan-jalan diperkeras dengan batu atau aspal, tetapi desa yang masih terbelakang jalannya masih berupa jalan tanah merah, sehingga jika datang musim hujan jalan menjadi becek dan berlumpur. Sawah dan ladang biasanya mengelilingi desa dan tanah pertanian mereka dapat berupa tegalan atau kebun kering dan sawah berair.

Sistem kekerabatan masyarakat Jawa berdasarkan prinsip *bilateral* atau *parental*. Sistem kekerabatan ini menunjukkan sistem klasifikasi menurut angkatan, dalam hal ini kakak laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu beserta istri dan suaminya diklasifikasikan menjadi satu dengan istilah *siwo* atau *uwo* = *tua*. Sebutan lain *siwo* atau *uwo* yaitu *Bu dhe Pak Dhe* atau *Bu lek Pak lek*.<sup>211</sup>

Dalam adat istiadat perkawinan yang berlaku masyarakat Jawa menentang perkawinan dua orang yang masih bersaudara sekandung (*pancer lanang*) atau anak dari dua saudara sekandung laki-laki (sepupu atau misan) dan jika pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya dari pihak wanita. Masyarakat Jawa memperbolehkan perkawinan *ngarang Wulu* atau *wayoh*. Perkawinan *ngarang wulu* adalah perkawinan seorang duda dengan seorang wanita salah satu adik atau kakak dari almarhum istrinya. Perkawinan *wayoh* adalah perkawinan lebih dari seorang istri (poligami). Kebudayaan Jawa mempunyai tata cara perkawinan yang rumit dimulai dengan *nakokake* (menanyakan apakah si gadis sudah mempunyai calon atau belum) sampai ijab dan upacara perkawinan di samping juga diatur cara perceraian.<sup>212</sup>

Adapun aturan tata cara perkawinan masyarakat Jawa mulai dari pinangan/melamar atau *nakokake* pertunangan disertai *sasrahan* atau *peningset*, selamat, pertemuan (*temon*), *pingitan* pertama, perhelatan di tempat mempelai perempuan, *pingitan* kedua, *ngundhuh manten*, dan perhelatan di tempat mempelai laki-laki. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah membentuk keluarga atau *somah* atau *keluarga batih*. Dalam hidup bermasyarakat *somah* mempunyai peranan yang penting, suami atau istri dapat bertindak sebagai wakil *somah*. Suami mewakili hal-hal yang ritual sedangkan istri untuk urusan sosial tertentu, secara umum yang menjadi kepala *somah* biasanya adalah

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Atmo dan Kisot di Tugumulyo 4 pada tanggal 12 September 2011.

<sup>211</sup> Koentjaraningrat, *Ibid.*, hal. 330.

<sup>212</sup> Koentjaraningrat, *Ibid.*, hal. 331.

suami. Jika suami meninggal dunia, istri bertindak sebagai kepala *somah*. Jika suami dan istri meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai kepala *somah* adalah anak tertua menggantikan posisi orang tuanya.<sup>213</sup>

Di samping keluarga *batih* atau inti (*nucleus family*), masyarakat Jawa di Tugumulyo juga mengenal keluarga luas (*expended family*) yaitu dua atau tiga keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Mereka merupakan kelompok sosial yang mempunyai anggaran belanja rumah tangga sendiri-sendiri. Kelompok kekerabatan yang lain adalah *sanak sedulur* yang terdiri atas kerabat keturunan dari seorang nenek moyang sampai derajat ketiga. Sedangkan untuk lingkungan keraton keturunan tidak sampai pada derajat ketiga, tetapi sampai sejauh mana ia memiliki dokumen bahwa ia memang benar-benar keturunan keraton. Mereka ini mendapat status istimewa dalam kehidupan bermasyarakat. Di Tugumulyo memang tidak terdapat kerabat keturunan keraton, tetapi gaya hidup keraton ditiru oleh para transmigran elit yang memegang teguh tradisi dan adat-istiadat Jawa.<sup>214</sup>

Di samping masih terdapat kelompok kekerabatan yang disebut *alur waris*, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua kerabat sampai tujuh turunan/generasi faktor peningkat kelompok kekerabatan ini adalah makam nenek moyang yang sama tugas ahli waris yaitu menjaga makam leluhur.<sup>215</sup> Adapun urutan waris tujuh turunan adalah pertama *yoga*, kemudian *putu*, *buyut*, *canggah*, *wareng*, *udeg-udeg* dan *gantung siwur*. Dalam hal pembagian warisan dari orang tua kepada anaknya, masyarakat Jawa di Tugumulyo mempunyai kebiasaan memakai dua cara, yaitu cara perdamaian dan cara *sepikul segendhongan*. Cara perdamaian yaitu dengan cara musyawarah antar ahli waris biasanya menyangkut harta, seperti rumah, tanah dan harta pusaka lainnya. Cara *sepikul segendhongan* digunakan untuk pembagian harta warisan yang berupa tanah sawah dan pekarangan. Aturan pembagian waris untuk anak laki-laki sebanyak 2/3 bagiandan anak perempuan 1/3 bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan masyarakat Jawa yang Islam yang santri pembagian warisnya berdasarkan aturan hukum Islam.<sup>216</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Jawa dibedakan dengan status *priyayi* yang terdiri dari pegawai negeri, kaum terpelajar dan *wong cilik*

---

<sup>213</sup> Geertz, Hildrid, *Keluarga Jawa*, (Terj. Hensri), (Jakarta : Grafiti Press, 1985), hal. 145.

<sup>214</sup> Wawancara dengan Handoyo di Desa Tugumulyo 5 pada tanggal 16 September 2011.

<sup>215</sup> Geertz, Hildrid, *Ibid.*, hal. 195.

<sup>216</sup> Geertz, *Ibid.*, hal. 201.

yang terdiri atas para petani, tukang, pekerja kasar, dan sebagainya. Sementara ditinjau dari intensitas dan kualitas dalam menjalankan agama masyarakat terbagi menjadi kelompok *santri dan abangan*. Kelompok *santri* berpusat pada pesantren, sedangkan kelompok *abangan* ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan Pra Hindu yang disebut *kejawen*. *Kejawen* adalah ajaran atau aliran kepercayaan masyarakat Jawa (aliran kebatinan) yang mengacu pada kepercayaan Pra Hindu yang penuh ajaran mistik/mejic.<sup>217</sup>

Pada umumnya di lingkungan masyarakat *abangan* ada kepercayaan pada kekuatan supra natural yang disebut *kasekten*, juga percaya kepada hal-hal yang gaib seperti *memedi*, *lelembut*, adalah makhluk halus seperti jin, setan, dan iblis. Makhluk-makhluk ini mendatangkan keuntungan, tetapi juga mendatangkan kesengsaraan. Untuk itu, mereka melakukan sesaji/selamatan agar makhluk-makhluk tadi tidak mengganggu, tetapi membantunya. Pada orang yang sudah meninggal dunia diadakan selamatan (*geblak*) yaitu selamatan tiga hari (*sedhekah nelung dino*), selamatan tujuh hari (*sedhekah pitung dino*), selamatan 40 hari (*sedhekah matangpuluh dino*), sedekah 100 hari (*nyatus dino*), sampai seribu hari disebut *nyewu dino*.<sup>218</sup>

Bagi masyarakat Jawa selamatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan relegi. Selamatan tidak hanya dilakukan dalam hubungan kematian, tetapi juga hampir seluruh daur hidup (*Life Cycle*) manusia sejak lahir hingga meninggal.<sup>219</sup> Berikut tanggapan masyarakat Jawa Tugumulyo tentang upacara selamatan.

**Tabel 28**  
**Tanggapan Masyarakat Tugumulyo**  
**Tentang Upacara Selamatan<sup>220</sup>**

No.	Tanggapan Masyarakat	f	Persentase
1.	Masih	98	98 %
2.	Jarang	2	2 %
3.	Tidak lagi	-	-
	Jumlah	100	100 %

<sup>217</sup> Geertz, *Ibid.*, hal. 251.

<sup>218</sup> Koentjaraningrat, (1980), *Op.cit.*, hal. 341.

<sup>219</sup> Geertz, *Op.cit.*, hal. 161.

<sup>220</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.



Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 100 responden (100 %) penduduk Jawa di Tugumulyo menyatakan bahwa adat atau upacara adat/selamatan masih dilakukan sampai sekarang sebanyak 98 responden (98 %) dan penduduk yang mengatakan jarang hanya 2 responden (2 %). Salah satu karakteristik mentalitas masyarakat Jawa, terutama pada masyarakat pedesaan adalah sikap yang pasif terhadap hidup. Berkembangnya aliran kebatinan, penilaian tinggi yang dinyatakan dalam konsep menerima seperti ungkapan tradisional Jawa "*narimo ing pandum*" (menerima apa adanya), yang dapat diimplementasikan sebagai ketabahan yang ulet dalam hal menderita. Semua ini akibat pandangan *kosmonitis*.<sup>221</sup>

Adat istiadat Jawa yang ada di Tugumulyo cukup dominan dibandingkan dengan suku lainnya, terutama dalam adat upacara perkawinan. Sebagai contoh, apabila orang Jawa menikah dengan orang penduduk asli (Ogan Komering Ilir) atau sebaliknya, maka adat upacara perkawinan yang dipakai adalah adat Jawa. Hal itu bukan berarti adat Jawa mutlak harus dipakai, tetapi hal itu menunjukkan bahwa penduduk Jawa lebih dominan di Desa Tugumulyo.

## **b. Kesenian**

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perubahan ini didasari oleh pandangan manusia yang dinamis dalam konsep, proses, dan hasil karya kesenian. Pertumbuhan seni sebagai bentuk aktivitas manusia dalam berolah rasa telah mengikuti kurun waktu yang sangat panjang dimulai dari bentuk yang sederhana pada awal lahirnya kebudayaan di masa lalu sampai pada zaman yang paling modern. Akibatnya pengertian tentang kesenian cenderung mengalami perbedaan sesuai dengan perubahan zaman.

Dengan kata lain seni merupakan alat komunikasi perasaan dan pengalaman batin seseorang kepada kelompok masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Pada hakekatnya setiap manusia dianugrahi oleh Tuhan potensi dasar berkreasi seni. Tetapi tingkat kepekaan seseorang berbeda, tergantung pada berbagai faktor misalnya bakat dan latihan. Kreatifitas atau daya cipta seseorang dapat lahir melalui tantangan yang dihadapinya sehingga kreatifitas dapat berupa hasil karya yang mempunyai nilai lebih. Secara khusus kreatifitas dalam kesenian diartikan sebagai kemampuan menemukan, membuat, merancang ulang dan memadukan hal atau gagasan baru maupun gagasan lama menjadi suatu kombinasi baru.

---

<sup>221</sup> Koentjaraningrat, (1984), *Op.cit.*, hal. 34.

Kesenian tradisional Jawa masih berlaku di Desa Tugumulyo dan masih sering dipertunjukkan, berikut jenis kesenian tradisional Jawa yang ada di Desa Tugumulyo yang masih dipentaskan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 29**  
**Kesenian Tradisional Jawa<sup>222</sup>**

No.	Jenis Kesenian	f	Persentase
1.	Wayang Kulit	25	25 %
2.	Kuda lumping	55	55 %
3.	Ketoprak	15	15 %
4.	Tarian Jawa	5	5 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel di atas kesenian tradisional Jawa yang masih sering dipentaskan dari seratus responden (100 %) penduduk mengatakan kesenian wayang kulit yang masih dipentaskan sebanyak 25 responden (25 %), penduduk yang menyatakan bahwa kesenian kuda lumping yang masih dipentaskan sebanyak 55 responden (55 %), dan penduduk yang menyatakan bahwa kesenian tradisional yang berupa tari-tarian tradisional Jawa yang dipentaskan sebanyak 5 responden (5%).

Selain kesenian-kesenian tradisional di atas, jenis kesenian tradisional Jawa lainnya yang masih ada di Desa Tugumulyo antara lain jenis kesenian tayub. Hal ini membuktikan bahwa kesenian Jawa masih digemari oleh masyarakat Jawa maupun penduduk asli. Kesenian wayang kulit ada satu kelompok dan kesenian kuda lumping ada dua kelompok. Di samping itu jenis kesenian yang secara umum digemari oleh penduduk desa terutama oleh kawulomudonya adalah kesenian orkes Melayu, tetapi masih mengandung unsur kebudayaan Jawa. Jenis-jenis kesenian tersebut biasanya dipertunjukkan pada saat ada acara atau hajatan seperti peringatan tujuh belas Agustus atau sunatan dan pesta perkawinan. Jenis kesenian itu tidak hanya oleh orang Jawa saja, tetapi juga penduduk asli sering juga meminta mengisi acara pada hajatan atau pesta yang sedang dilakukan. Adapun tanggapan orang Jawa terhadap kesenian tradisional tersebut yang dijelaskan oleh bapak Sudirman (informan) sebagai berikut :

---

<sup>222</sup> Data Angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

*“Sinaoso kesenian punika ngangge basa Jawi engkang asli ngriki umumipun remen ningali ketoprak, wayang lan kuta kepang utowo kuda lumping. Amargi sabensaben pentaswonten dagelanipun, lan wonten adegan ingkang lucu, biasanipun plambake ugi ndherek memuceng”* Artinya dalam bahasa Indonesia : “Walaupun kesenian ini menggunakan bahasa Jawa, namun penduduk asli di sini senang melihat wayang maupun kuda lumping. Karena setiap pertunjukan ada lawakan dan apabila ada dagelan adegan lucu mereka juga ikut tertawa”.

Selanjutnya tabel di bawah ini merupakan tanggapan masyarakat Jawa di Tugumulyo tentang terpakai pakaian khas Jawa.

**Tabel 30**  
**Tanggapan Masyarakat Jawa**

No.	Tanggapan Masyarakat	f	Persentase
1.	Masih Terpakai	5	5 %
2.	Tidak Lagi Terpakai	75	75 %
3.	Kadang Terpakai	20	20 %
	Jumlah	100	100 %

Berdasarkan tabel 30, di atas dari 100 responden (100 %), tanggapan masyarakat Jawa tentang pakaian khas Jawa masih dipakai di Desa Tugumulyo mencapai 5 responden (5 %, tanggapan masyarakat tentang pakaian tradisional tidak lagi dipakai di Tugumulyo sebanyak 75 responden (75 %), dan tanggapan masyarakat tentang pakaian khas Jawa yang kadang dipakai di Tugumulyo sebanyak 20 responden (20 %).

Tata cara orang Jawa di Desa Tugumulyo disesuaikan dengan zaman atau mode pakaian sekarang, sehingga pakaian Jawa jarang ditemukan di Desa Tugumulyo. Masyarakat Jawa yang masih memakai pakaian Jawa hanya mencapai 5 responden (5 %). Berikut ini bentuk rumah tinggal penduduk di Desa Tugumulyo dapat dilihat pada tabel 31 di bawah ini.<sup>223</sup>

**Tabel 31**  
**Bentuk Rumah Tinggal Penduduk**

No.	Bentuk Rumah Tinggal	f	Persentase
1.	Rumah Batu	97	97 %
2.	Rumah Tapas Tanah	3	3 %
	Jumlah	100	100 %

<sup>223</sup> Data angket dari 100 orang responden yang diambil pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tugumulyo 1.

Berdasarkan tabel 31, di atas dari 100 responden (100 %) bentuk rumah tinggal penduduk Jawa di Tugumulyo yang mempunyai rumah batu sebanyak 97 responden (97 %), sedangkan rumah penduduk yang menggunakan rumah tapas tanah sebanyak 3 responden (3 %).

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Tugumulyo tidak ditemui lagi rumah panggung karena sebagian besar penduduk Jawa maupun penduduk asli adalah berbentuk rumah batu. Rumah panggung biasanya dimiliki oleh penduduk asli, tetapi di Desa Tugumulyo telah mencontoh bentuk rumah penduduk Jawa yang ada di sana.

### **c. Agama**

Agama yang dianut oleh penduduk yang ada di Desa Tugumulyo secara umum ada 4 (empat) macam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Hindu. Adapun jumlah penduduk yang menganut agama di Desa Tugumulyo secara rinci adalah sebagai berikut : Pemeluk agama Islam sebanyak 9.572 orang, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 107 orang, agama Katholik sebanyak 123 orang dan pemeluk agama Hindu sebanyak 169 orang.<sup>224</sup>

Dilihat dari pemeluk agama yang ada, maka sebagian besar agama yang dianut di Desa Tugumulyo adalah agama Islam. Sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Tugumulyo cukup banyak, karena setiap agama mempunyai tempat atau sarana peribadatan masing-masing. Jumlah mesjid yang ada di Tugumulyo ada 5 buah mesjid dan 16 mushola/surau. Jumlah gereja ada satu gereja Protestan dan pura sebanyak dua buah sebagai tempat peribadatan umat Hindu.<sup>225</sup>

### **d. Bahasa**

Bahasa dalam penelitian ini yaitu sebagai alat komunikasi/interaksi orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat, terutama komunikasi dengan orang Jawa maupun dengan penduduk asli dan orang dari suku Bali atau suku lainnya. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa.

Bahasa yang digunakan oleh penduduk Jawa dalam berkomunikasi dengan penduduk dari suku lainnya menggunakan bahasa campuran. Bahasa Jawa mendominasi di desa Tugumulyo, sehingga sebagian kecil dari penduduk suku lainnya seperti penduduk

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan H. Suparno di rumahnya di Desa Tugumulyo 1 pada tanggal 14 September 2011

<sup>225</sup> Wawancara dengan H. Suparno, *Ibid*.

asli dan orang dari suku Bali sudah dapat berbahasa Jawa walaupun sedikit.

Bahasa Jawa secara garis besar ada dua tingkatan, yaitu ngoko (bahasa Jawa kasar) dipakai untuk orang yang sudah dikenal akrab dan terhadap orang-orang yang lebih muda usianya serta lebih rendah derajatnya atau statusnya. Krama (bahasa Jawa halus) digunakan untuk berbicara orang yang belum dikenal akrab, tetapi sebaya dalam umur atau sederajat dan juga pada orang yang lebih tinggi umur dan status sosialnya. Contoh-contoh bahasa Jawa ngoko dan krama seperti tertera di bawah ini.

**Tabel 32**  
**Bahasa Jawa Ngoko, Krama dan Indonesia**<sup>226</sup>

Ngoko	Krama	Indonesia
Katon	Ketingal	Nampak
Siji	Setunggal	Satu
Loro	Kalih	Dua
Wedus	Mendo	Kambing
Kebo	Mahesa	Kerbau
Ula	Sardula	Ular
Manuk	Kukila	Burung
Endog	Tigan	Telur
Ora	Mboten	Tidak
Aku	Kula	Saya
Kowe	Penjenengan	Anda
Sanak	Sedherek	Saudara
Bojo	Semah	Istri
Gela	Kuciwa	Kecewa
Ngomong	Ngendika	Bicara
Meneng	Mendel	Diam
Gelem	Saget	Mau
Menehi	Peparing	Memberi
Duwit	Arta/yatra	Uang
Ragat	beya	Biaya
Durung	Dereng	Belum
Kuping	Talingan	Telinga
Ati	Manah	Hati
Uwis	Sampun	Sudah
Uwong	Tiyang	Orang
Lara	Gerah	Sakit
Rekasa	Rekaos	Sengsara
Mangan	Dahar	Makan
Tuku	Tumbas	Beli
Mripat	Paninggal	Mata
Lunga	Tindak	Pergi

<sup>226</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Desa Tugumulyo 1 pada tanggal 15 September 2011.

Bahasa Jawa halus/krama selalu disertai dengan intonasi dan gerak/ekspresi yang lembut. Dalam bahasa Jawa banyak sekali terdapat kosakata yang mengandung arti yang berbeda-beda, meskipun kata-katanya sama dan setiap kosakata jika diucapkan dengan intonasi yang berbeda, maka akan mempunyai arti/makna yang berbeda.

## **5. Dampak Keberadaan Desa Tugumulyo Terhadap Masyarakat Sekitar**

Keberadaan Desa Tugumulyo membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakatnya dan hal ini terlihat dalam taraf hidupnya yang lebih baik. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan program transmigrasi adalah sejauh mana program tersebut mendorong terjadinya transformasi sosial, ekonomi dan budaya antar masyarakat.<sup>227</sup>

Dampak sosial yang terjadi dengan adanya Desa Tugumulyo adalah masyarakat mengenal bagaimana cara berinteraksi, bersosialisasi dan bekerjasama. Di bidang sosial dampak yang nyata adalah cara mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dari suku lainnya, karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial. Dilihat dari hasil penelitian di lapangan proses interaksi yang terjadi antar penduduk di Tugumulyo adalah terjadinya suatu hubungan yang baik antara sesama orang Jawa maupun hubungan mereka dengan penduduk asli dan saling timbal balik.

Dampak lain dengan adanya Desa Tugumulyo, di bidang ekonomi adalah dalam sistem mata pencaharian. Pada dasarnya tujuan utama mereka bertransmigrasi ke Tugumulyo adalah faktor ekonomi yang sangat minim. Dengan dibukanya Tugumulyo sebagai daerah transmigrasi, maka memberikan suatu lapangan pekerjaan yang baru bagi transmigran asal Jawa dan penduduk asli. Desa Tugumulyo mempunyai potensi yang bagus dalam bidang pertanian dan perdagangan. Keadaan alam yang relatif subur membuat daerah ini cocok dijadikan lahan pertanian dengan sistem bertani menetap. Setiap penduduk memiliki lahan pertanian sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain mempunyai potensi yang baik di bidang pertanian, Tugumulyo juga berpotensi dalam bidang perdagangan.

Desa Tugumulyo ada sebuah pasar yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi penduduk setempat, karena pasar merupakan pusat bagi semua kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Tugumulyo. Pasar Tugumulyo secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan yang

---

<sup>227</sup> Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta : Gramedia, 1982), hal. 37.

baru bagi penduduk sebagai pedagang. Dampak yang nyata di bidang ekonomi dengan adanya Desa Tugumulyo adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi para transmigran dan penduduk sekitarnya.

Hasil di lapangan dampak yang ada dalam bidang budaya dengan adanya Desa Tugumulyo adalah terjadinya suatu akulturasi budaya. Chodidah menyatakan bahwa interaksi sosial yang positif dapat terjadi melalui suatu proses akulturasi. Melalui proses akulturasi ini akan tercipta suasana yang harmonis dan masing-masing pihak bersifat terbuka sehingga budayanya akan diperkaya oleh budaya etnik yang dianggap bermanfaat.<sup>228</sup>

Dalam sistem mata pencaharian antara dua jenis penduduk saling tukar pengetahuan mengenai sistem pertanian dan perdagangan serta kegiatan lainnya. Misalnya dalam membuat genteng dan batubata sebagai pekerjaan sampingan sambil menunggu hasil panen. Hal tersebut telah ditiru oleh penduduk asli yang menjadikan pekerjaan itu sebagai mata pencaharian yang baru bagi mereka. Dengan bertemunya budaya dari penduduk Jawa dan penduduk asli melalui dibukanya daerah transmigrasi di Tugumulyo menimbulkan akulturasi dalam beberapa bidang kehidupan seperti mata pencaharian, adat istiadat maupun sistem pemerintahan desa.<sup>229</sup>

Dalam berkomunikasi bahasa yang digunakan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Meskipun bahasa yang mereka kuasai hanya terbatas pada bahasa tertentu, tetapi hal ini merupakan salah satu dampak di bidang budaya. Budaya yang ada telah membaur dengan kebudayaan setempat dan tidak menghilangkan budaya aslinya. Hasil di lapangan bahwa budaya Jawa seperti wayang, ketoprak, kuda lumping dan budaya Jawa lainnya banyak digemari oleh penduduk asli dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian apa yang dicanangkan oleh pemerintah melalui dibukanya daerah transmigrasi adalah terjadinya transformasi sosial, ekonomi dan budaya, hal ini juga terjadi di Desa Tugumulyo.<sup>230</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Desa Tugumulyo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Desa ini

---

<sup>228</sup> Chodijah, B. Rahardjo, *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal 144.

<sup>229</sup> Wawancara dengan Gogok Sugito di Desa Tugumulyo 1 pada tanggal 15 September 2011.

<sup>230</sup> Alfian, *Op.cit.*, hal. 37.

dibuka pada tahun 1970 dengan membuka kawasan hutan yang berada pada wilayah Semendawai Suku III Betung, Kabupaten OKI. Para pembuka hutan tersebut terdiri dari para transmigran asal Jawa, Sunda, Bali dan penduduk asli yang merupakan para transmigran yang berada di daerah Kecamatan Belitang dan Kecamatan Buay Madang Ogan Komering Ulu (OKU).

Para pembuka hutan berhasil dan menjadikan daerah Tugumulyo sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Tugumulyo terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah yang berbentuk rawa-rawa. Transmigrasi yang ada di Tugumulyo termasuk dalam jenis transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu daerah tertentu dari satu daerah ke tempat lainnya. Motivasi utama para transmigran datang ke Tugumulyo karena faktor ekonomi. Perkembangan penduduk di Tugumulyo semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan jenis dan karakter mereka yang berbeda satu dengan lainnya. Transmigran yang paling dominan di Tugumulyo adalah transmigran asal Jawa.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan daerah ini cukup padat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 9.971 jiwa yang terdiri dari 4.051 jiwa laki-laki dan 5.920 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.285 KK. Kepadatan penduduk 80 orang per/km. Desa Tugumulyo mempunyai luas wilayah 12.500 hektar dan dikepalai oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh staf desa lainnya.

Masyarakat yang berada di Desa Tugumulyo berasal dari daerah yang berbeda. Mereka hidup bersama dan setiap orang akan memainkan peranannya sebagai anggota masyarakat yang saling membutuhkan. Di bidang sosial yaitu dalam pola interaksi antar masyarakat. Terjadi hubungan yang baik yang terwujud dalam suatu bentuk pola-pola tindakan yang bisa mewakili eksistensinya baik itu yang dilakukan oleh individu maupun dilakukan secara kelompok oleh masyarakat tertentu sebagai suatu sistem sosial.

Konflik yang terjadi antar penduduk dipengaruhi oleh faktor hutang, masalah tanah, kesalah pahaman, tetapi konflik tersebut hanya sebatas pertengkaran biasa dan dapat diatasi dengan jalan damai sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh kejadian itu. Sistem pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik dan yang menjabat sebagai aparat pemerintahan itu berasal dari daerah yang berbeda dan tidak didominasi oleh satu suku saja. Keadaan pendidikan dan kesehatan yang ada di Tugumulyo sudah cukup baik. Kerjasama yang ada di antara penduduk dalam bentuk gotong royong, siskamling dan musyawarah mufakat. Dalam kehidupan ekonomi, dilihat dari sistem mata pencaharian penduduk tidak banyak mengalami perubahan



dari daerah asalnya, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dan sistem di daerah asalnya. Jenis mata pencaharian utama penduduk di tugumulyo adalah sebagai petani dan pekerjaan sampingan sebagai pengrajin genteng dan batu bata, tetapi ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar.

Sarana yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Tugumulyo adalah pasar. Pasar Tugumulyo mempunyai peranan penting sebagai pusat perekonomian penduduk dan sebagai tempat bertemunya antar penduduk yang berbeda saling berinteraksi dan berhubungan. Kehidupan budaya masyarakat Jawa di Tugumulyo tidak jauh berbeda dengan budaya Jawa yang ada di Jawa, karena budaya Jawa yang ada di Tugumulyo masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang akrab. Jenis kesenian tradisional Jawa masih sering dipertunjukkan di Tugumulyo, seperti kesenian wayang kulit, kuda lumping, ketoprak, tayub dan sebagainya. Biasanya kesenian tersebut dipentaskan dalam acara pesta perkawinan, khitanan, peringatan hari kemerdekaan, maupun hari-hari besar lainnya.

Kesenian tradisional Jawa disambut baik oleh penduduk Jawa dan penduduk dari suku lainnya. Adat-istiadat yang mendominasi adalah adat Jawa, hal ini terlihat dari upacara adat perkawinan yang dipakai di Tugumulyo adalah adat Jawa, baik oleh orang Jawa maupun penduduk suku lainnya. Bahasa keseharian yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa. Jika berkomunikasi dengan penduduk asli menggunakan bahasa campuran Jawa Palembang. Agama yang dianut oleh penduduk ada 4 macam yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik dan agama Hindu, tetapi agama yang mendominasi adalah agama Islam. Secara tidak langsung terjadi akulturasi budaya di Desa Tugumulyo sehingga masing-masing pihak ada rasa terbuka dengan menyerap budaya etnik yang dianggap bermanfaat. Kehidupan masyarakat Jawa yang ada di Tugumulyo dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari hasil yang ada di lapangan.

Pembukaan daerah Tugumulyo sebagai daerah transmigrasi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat Jawa dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dalam bidang sosial dibuka desa Tugumulyo telah mempertemukan antar etnik yang berbeda yang saling berinteraksi, bekerjasama, dan membantu satu sama lain, walaupun mereka berasal dari suku dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi mereka bisa hidup rukun dan membaur dengan sesamanya. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial masyarakat di Tugumulyo sudah baik. Dampak yang ada dengan dibukanya Tugumulyo dalam kehidupan ekonomi adalah dalam jenis mata pencaharian penduduk setempat.

Desa Tugumulyo telah memberikan lapangan pekerjaan yang baru bagi para transmigran Jawa maupun penduduk sekitarnya. Tugumulyo mempunyai potensi dalam bidang pertanian dan perdagangan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi penduduk.

Dampak yang terjadi di bidang budaya adalah adanya akulturasi budaya dan tidak menghilangkan budaya aslinya. Contoh bahwa kesenian Jawa disambut baik oleh penduduk dari suku lainnya dan sebaliknya. Bahasa Jawa sudah menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi sehari-hari di Tugumulyo, walaupun bahasa yang mereka kuasai satu sama lainnya terbatas pada kata-kata tertentu saja, tetapi itu merupakan salah satu dampak di bidang budaya. Dengan demikian di desa Tugumulyo telah terjadi suatu transformasi sosial ekonomi dan budaya yang membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat di Tugumulyo.

## **2. Saran**

Transmigrasi sebagai pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih kosong penduduknya. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan dengan jelas daerah transmigrasi itu bisa memberikan kehidupan yang lebih banyak bagi para transmigran. Tugumulyo merupakan daerah transmigrasi yang dibuka oleh transmigran sendiri karena sebelumnya tidak memadai lagi sebagai tempat tinggal mereka dengan lahan yang semakin sempit. Dalam pembukaan daerah transmigran hendaknya pemerintah juga harus memberikan perhatian fasilitas, pelayanan dan pembinaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan.

Dalam hidup bermasyarakat masing-masing individu hendaknya saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ada rasa keterbukaan dan bekerja sama dalam arah yang positif untuk tujuan dan kepentingan bersama. Mereka harus menjaga hubungan sosial yang baik agar terciptanya suasana hidup yang rukun, harmonis dan aman. Para transmigran hendaknya tetap memperthankan kehidupan ekonomi yang sudah lebih baik dan seimbang serta harus menghindari agar tidak terjadi konflik antar etnik dalam hidup bermasyarakat baik sesama mereka maupun sesama suku lainnya.

Mengingat penelitian ini hanya membahas kehidupan sosial ekonomi dan budaya secara umum, kiranya penelitian ini dapat membuka jalan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada aspek-aspek lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, S. Imam, (ed.), *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Jakarta : Gramedia, 1982.
- Ali, Muhammad, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Bharata, 1980
- Anker Smith, F.R., *Refleksi Tentang Sejarah*, Jakarta : Gramedia, 1987.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- “Benturan Merapi, Ada Berapa Desa yang Hancur, Mereka Harus Ditransmigrasikan”, dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*, tanggal 8 November 2010.
- Bruce, J, Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka cipta, 1992.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, a.b. Mestika Zed dan Zulfami, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Chodijah, B, Rahardjo, *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, Jakarta : Rajawali, 1984.
- Frederick, William H. Dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1982.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1983.
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa (Terj. Hensri)*, Jakarta : Grafiti Press, 1985.
- Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, (Terj. Nograho Notosusanto), Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1975.
- Heren, H.J., *Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1979.
- Harjono, Joan, *Transmigrasi : Dari Kolonisasi Sampai Transmigrasi Swakarsa*, Jakarta : Gramedia, 1982.
- Ismah Afwan, Sri Sumami, Kustadi, *Kerja Sama Antar Departemen/Lembaga Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi*, Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
- Interaksi Antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta : Depdikbud, Dirjarahnitra, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989.
- Jungkas, K.H., *Transmigrasi dan Produksi Pertanian di Sumatera Selatan*, Jakarta : Gramedia, 1982.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Kantor Desa Tugumulyo, *Monografi Desa Tugumulyo, Kabupaten OKI*, 2010.
- Kantor Camat Lempuing, *Monografi Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI*, 2010.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia, 1983.
- Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Jembatan UGM, 1976.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- ....., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1980.
- ....., *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1984.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1987.
- ....., *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- ....., *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.
- Kustadi, *Masalah Pertanahan di Daerah Permukiman Transmigrasi*, Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
- Muhajir, Utomo, *90 Tahun Kolonisasi – 45 Tahun Transmigrasi*, Jakarta : Pustaka Swara, 1997.
- Munir, Rozi, “Transmigrasi, Apa dan Masalahnya” dalam Sri Edi (ed.), *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia, 1905-1985*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1985.
- Nasikun, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Pardoko, R.H., *Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi*, Bandung : Angkasa, 1987.
- Presiden Indonesia, *Pidato Pertanggung Jawaban Presiden Mandataris MPR RI pada tanggal 1 Maret 1983*, Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1983.
- Purwaningsih, Indriati Eko, *Masalah Produksi dan Pemasaran Hasil Komoditi Pertanian di Daerah Transmigrasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Raharjo, Chodidah B., *Benturan Sosial dan Budaya di Daerah Transmigrasi*, Jakarta : Rajawali, 1984.

- Rukmadi Warsito,dkk., *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Singarimbun, M. Dan Effendi, S., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soeleman, B., Taneka, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Djakarta : F.E. UI, 1964.
- Subangun, E., “Nilai Sosial Budaya yang Mendukung Program Kependudukan” dalam *Ilmu Kependudukan*, Jakarta : Erlangga, 1981.
- ....., “Menarik Bukan Mendorong” dalam *Ilmu Kependudukan*, Jakarta : Erlangga, 1981.
- Sujarwadi, “Transmigrasi Swakarsa, Transmigrasi Nelayan, Transmigrasi Perkebunan dan Transmigrasi Industri” dalam Rukmadi Warsito dkk., *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suharno, (et.al.), *Transmigrasi dan Latar Belakangnya*, Jakarta : Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, 1981.
- Suparlan, Parsudi, “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya” dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Jakarta : Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, September – Desember 2000.
- Warsito, Rukmini, dkk., *Transmigrasi : Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sumarto, Mursito Ndaru, “Prospek Transmigrasi Melancarkan Pembangunan Pedesaan”, *Analisa*, November No. 11 Tahun XI, 1982.
- Naim, Moechtar, “Segi Koordinasi Pelaksanaan Transmigrasi Kita” dalam *Kompas*, 14 Juni 1995.
- Zed, Mestika, “Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir”, dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM-Pustaka Pelajar, 2002.

### **BAB III**

## **DJOHAN HANAFIAH: Mencari Identitas Palembang<sup>1</sup>**

Rois Leonard Arios<sup>2</sup>

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Secara administratif Provinsi Sumatra Selatan terdiri dari 14 kabupaten dan kota. Namun secara budaya, wilayah kebudayaan satu suku bangsa tidak dapat dibatasi oleh batas administratif tersebut. Arus migrasi yang dilakukan oleh satu komunitas suku bangsa tertentu dari satu daerah ke daerah lainnya telah menyebabkan persebaran suku-suku bangsa di Provinsi Sumatra Selatan hampir merata. Namun penyebaran tersebut tidak serta merta meninggalkan daerah kebudayaan asli walaupun di daerah baru tersebut mereka telah menjadikan sebagai wilayah kebudayaannya.

Dalam satu wilayah administratif pemerintahan tidak hanya dihuni oleh satu suku bangsa sehingga dalam satu kabupaten atau kota tidak bisa diwakili oleh satu etnis. Namun untuk beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Limatang (Lintang Empat Lawang) dihuni oleh satu suku bangsa utama (asli). Sedangkan kabupaten lainnya terdiri dari dua atau lebih etnis utama seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kabupaten lainnya. Sedangkan Kota Palembang sendiri dihuni oleh orang Melayu Palembang sebagai suku bangsa utama dan berbagai etnis lainnya sebagai pendatang.

Keberagaman suku bangsa di Sumatra Selatan mengakibatkan pada setiap kabupaten/kota akan menghasilkan budayawan-budayawan yang melestarikan dan mengembangkan kebudayaan suku bangsanya di wilayah kebudayaannya. Sayangnya budayawan tersebut seringkali tidak terpublikasi baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar budayawan di daerah-daerah di Provinsi Sumatra Selatan berbuat demi kelangsungan dan pelestarian unsur-unsur kebudayaannya tanpa menyadari apakah hasil karyanya tersebut diapresiasi oleh pemerintah atau tidak. Hal inilah yang membedakannya dengan para seniman (dalam arti sempit) terutama

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan gagasan dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2009 - 2010.

<sup>2</sup> (Peneliti Madya pada BPSNT Padang)

seniman kontemporer yang lebih mementingkan pengakuan dari publik terhadap karya seninya.

Konsep budayawan sendiri masih perlu pemahaman yang jelas karena seringkali dianggap seorang budayawan harus menghasilkan sebuah karya seni seperti seni tari, lukis, atau seni patung. Demikian juga anggapan yang menyebut bahwa seorang pelukis atau penari adalah budayawan. Seorang budayawan belum tentu ahli tentang kebudayaan, tetapi ahli kebudayaan sudah pasti budayawan. Anggapan pelaku seni bukanlah budayawan akan menyingkirkan para budayawan baik sebagai pemikir yang tidak menghasilkan karya seni maupun pelaku seni. Padahal tidak sedikit sumbangan dari budayawan pemikir dan pelaku seni tersebut dalam kelangsungan dan kelestarian kebudayaan suatu suku bangsa. Budayawan dapat dikategorikan sebagai budayawan pemikir dan budayawan pelaku seni.

Cukup banyak seniman dari berbagai bidang seperti tari, lukis, dan sastra di Provinsi Sumatra Selatan khususnya di Kota Palembang. Namun di antara seniman-seniman tersebut, belum banyak yang diangkat kiprahnya sebagai budayawan. Seorang budayawan adalah orang yang memberi perhatian penuh dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kebudayaannya dalam upaya pelestarian budaya, penerapan nilai-nilai budaya, dan merevitalisasi unsur-unsur budaya agar tetap dapat bertahan pada perkembangan jaman.

Penulisan tentang tokoh-tokoh nasional baik dalam bentuk biografi lengkap maupun dalam bentuk ensiklopedia sudah cukup banyak dilakukan baik oleh pribadi, penulis, lembaga pemerintah, maupun oleh penulis amatir. Namun umumnya tokoh-tokoh yang diangkat adalah tokoh pejuang kemerdekaan atau yang berjasa dalam pembentukan Negara Republik Indonesia dalam perjuangan secara fisik atau untuk kepentingan tertentu dari orang atau kelompok tersebut.

Penulisan tokoh-tokoh budayawan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Penerbitan yang pernah ada masih terbatas pada bentuk ensiklopedia seperti yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam seri penerbitan tersebut, tokoh yang diangkat umumnya adalah pelaku seni seperti seni lukis, seni musik (musisi dan penyanyi), sastrawan, pematung, seni teater, dan seni tari.

Budayawan pemikir umumnya dan sebagian budayawan pelaku seni berbuat tanpa mengharapkan adanya *reward* namun lebih pada rasa tanggung jawabnya terhadap kelangsungan kebudayaannya. Di sisi lain budayawan umumnya berpikir dan berbuat secara sektoral yang terbatas

pada kebudayaannya sendiri sehingga tidak terpublikasikan baik di tingkat lokal provinsi maupun secara nasional. Padahal sumbangan pemikiran dan karyanya dalam pelestarian kebudayaan sangat besar.

## 2. Penulisan Biografi dan Kerangka Pemikiran

Penulisan biografi seorang tokoh akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan seperti politis, ekonomi, psikologis, dan faktor-faktor lainnya. Kata tokoh biasanya diberikan kepada seseorang yang dinilai positif oleh masyarakat. Pengertian tokoh sejarah adalah seseorang yang karena pemikirannya, sikap, dan perjuangannya mendapat perhatian masyarakat dan tempat dalam sejarah. Dalam mengkaji riwayat hidup seorang tokoh tidak terlepas dari situasi dan kondisi zamannya. Sedangkan pengertian tokoh nasional adalah seseorang yang sangat berjasa, baik dalam bidang politik, kenegaraan, sosial, ekonomi, kebudayaan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Sedangkan biografi dapat diartikan sebagai kisah seseorang atau dapat disebut sebagai kisah hidup seseorang yang benar-benar terjadi yang meliputi segenap ikhwal mengenai diri seseorang itu di dalam lingkungannya.<sup>3</sup>

Dalam penulisan biografi terdapat tiga bentuk yang dikaitkan juga dengan tujuan penulisan biografi tersebut. Ketiga bentuk tersebut adalah:<sup>4</sup>

1. biografi interpretatif, yaitu biografi yang selain memperhatikan keseimbangan dalam watak, tindakan, perbuatan, dan jamannya, juga menganalisa sumber-sumber sejarah;
2. biografi populer, biasanya ditulis dengan pertimbangan komersial agar lekas laku di pasaran. Biografi ini tidak selalu mementingkan kebenaran ilmiah. Berbagai gaya retorika dipergunakan untuk menjadikannya menarik;
3. biografi sumber, yaitu biografi pertama yang pernah ditulis mengenai seorang tokoh.

Beberapa penulisan tokoh tentang seorang pejuang, budayawan, atau pengusaha, dapat diklasifikasikan tiga aspek yang perlu dituliskan yaitu kisah hidup sang tokoh, misalnya tanggal lahir, pendidikan,

---

<sup>3</sup> Suwadji Syafii. 1984. "Menulis Biografi Tokoh", dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya Jilid III*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 71 – 73.

<sup>4</sup> RZ Leirissa. 1984. "Segi-Segi Praktis Penulisan Biografi Tokoh", dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya Jilid III*. Jakarta: Depdikbud. Hal. 97



pekerjaan, pemikiran (gagasan-gagasan dalam tulisan maupun lisan), dan hasil karya sang tokoh. Di samping itu kondisi sosial dan politik juga dapat mempengaruhi penulisan biografi seorang tokoh sehingga perlu analisa tentang kondisi sosial, politik (kebijakan pemerintah setempat), dan faktor-faktor psikologis penulis dengan sang tokoh.

Kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan pranata-pranata<sup>5</sup> yang ada disekitarnya seperti pranata keluarga, pendidikan, religi, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga dalam menganalisa biografi seseorang secara antropologis harus mempertimbangkan pranata-pranata tersebut.

Beberapa konsep yang menjadi acuan dalam proposal ini bermanfaat untuk membatasi berbagai pemahaman yang awam terjadi. Konsep budayawan sering menjadi polemik ketika dipertentangkan dengan konsep seniman. Dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri pengertian budayawan didefinisikan dengan sangat sederhana. Budayawan adalah orang yang ahli dalam seluk beluk kebudayaan.<sup>6</sup> Defenisi ini berarti bahwa setiap orang yang paham tentang kebudayaan suatu suku bangsa baik secara teoritis maupun praktis dapat dikatakan sebagai budayawan. Akan tetapi apakah seorang peneliti seperti Koentjaraningrat dapat dikatakan seorang budayawan? Budayawan adalah orang yang ahli dalam seluk beluk kebudayaan suku bangsa baik terlibat langsung dalam upaya pelestarian kebudayaan maupun tidak. Para ahli ilmu budaya, khususnya ahli Antropologi, seperti Koentjaraningrat dapat dikatakan sebagai budayawan karena ahli dalam kebudayaan. Setiap budayawan memiliki keahlian dalam suku bangsa tertentu atau sebagai pelaku budaya di dalam suku bangsa tertentu. Budayawan Palembang sudah pasti memiliki keahlian atau pelaku terhadap budaya Melayu Palembang, begitu juga halnya tentang budayawan Jawa adalah ahli tentang kebudayaan Jawa atau pelaku budaya Jawa. Pembatasan tersebut membuat seorang budayawan lebih bersifat lokal daripada skala nasional.

Konsep seniman juga sering dianggap sama dengan budayawan. Pemyataan ini memang benar, tetapi seniman lebih pada pemahaman yang lebih sempit karena seniman dapat dikatakan sebagai pengklasifikasian dari budayawan. Mengacu kepada konsep seni dan seniman, seni adalah kemampuan akal dalam menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Sedangkan seniman adalah orang yang memiliki jiwa

---

<sup>5</sup> Pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1986: 164)

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. Hal. 227.

dan bakat seni dan mampu menciptakan dan menggelarkan karya seni.<sup>7</sup> Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep biografi dan budayawan yang didalamnya nanti akan termasuk pengertian yang lebih luas.

### 3. Palembang Pada Masa Dahulu dan Masa Kini

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun, berdasarkan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682.<sup>8</sup> Salah satu sumber menyebutkan sebagai berikut.

“Palembang was built in the Çaka year of 604, 11 Çuklapakça or the 16th of June 628 A.D. by Dapunta Hyang. Situated on the banks of the Musi River, it became the center of the realm and played an important part in the international trade. Ming Shih records that Maharaja Palembang in the year 1375 sent a token of submission to the Emperor of China (Groenenveldt 1960). Nagarakertagama also mentions that Palembang was a kingdom under the sway of Majapahit (Pigeaud 1962). In the Babad Tanah Jawi and the Sejarah Melayu, two important historical texts, Palembang is repeatedly mentioned (Brown 1953).”<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi tersebut, menunjukkan bahwa Kota Palembang diyakini telah berumur lebih dari 1320 tahun berdasarkan tafsiran dan analisis Prasasti Kedudukan Bukit.<sup>10</sup>

Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya,

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal.

<sup>8</sup> <http://www.palembang.go.id/2007/?mod=7&id=7>. Tulisan-tulisan yang terbaru tentang Sriwijaya adalah makalah pada International Seminar on SRIWIJAYA CIVILIZATION : the awakening of a Maritime kingdom. Palembang, July 16-19 2008 antara lain oleh Abdullah Idi The Kingdom Of Sriwijaya And Social Integrated Value. E. Edwards McKimmon A Remarkable Ganesa from Palembang: some reconsiderations and their implications for further research. Malcolm Lee Bradford, Sriwijaya: Dominion of Trade and Buddhism, Pieter Ferdinandus, Palembang As The Capital Of Sriwijaya In The 7<sup>th</sup> Century, PROF. Dato' DR. Nik Hassan Shuhaimi Nik ABD. Rahman, Kataha During The Sriwijayan Era (7<sup>th</sup> To 11<sup>th</sup> CENTURIES AD) L.R. Retno Susanti, Ommission Utilization Kadatuan Sriwijaya As [The] Source Of History Study

<sup>9</sup> Yayasan Naskah Nusantara. “Report on the Compilation of a Catalogue of Manuscripts in Palembang”. [www.masyarakatpedulimusi.com](http://www.masyarakatpedulimusi.com)

<sup>10</sup> Djohan Hanafiah. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton: Kuto Gawang*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Hal. 2.

kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu *Pa* atau *Pe* sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan *lembang* atau *lembang* artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu).

Sedangkan menurut bahasa Melayu-Palembang, *lembang* atau *lembang* adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Djohan Hanafiah<sup>12</sup> Palembang berasal dari dua kosa kata yaitu *pa* dan *lembang*. *Pa* berarti suatu kata awal menunjukkan tempat. Sedangkan *lembang* berasal dari bahasa Melayu yang berarti tanah yang rendah, tanah yang tertekan, akar yang membengkak dan lunak karena lama terendam dalam air, menetes atau kumparan air. Dalam bahasa Melayu Palembang sendiri *lembang* berarti tanah yang berlekuk, tanah yang menjadi dalam karena dilalui air, tanah yang rendah, tidak tersusun rapi, berserak-serak. Jadi pengertian *Pa-lembang* adalah tempat yang berkumparan air atau tanah yang berair.

Setelah mengalami kejayaan pada abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan Semenanjung Malaysia. Sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya tersebut di sekitar Palembang menunjukkan bahwa di sekitar lokasi itu terdapat suatu kekuatan tersendiri yang dikenal sebagai kerajaan Palembang.

Menurut catatan Cina, raja Palembang yang bernama Ma-na-ha Pau-lin-pang mengirim dutanya menghadap kaisar Cina pada tahun 1374 dan 1375. Maharaja ini barangkali adalah raja Palembang terakhir, sebelum Palembang dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1377. Majapahit tidak dapat menempatkan adipati di Palembang, karena ditolak oleh orang-orang Cina yang telah menguasai Palembang. Mereka menyebut Palembang sebagai Ku-Kang dan mereka terdiri dari

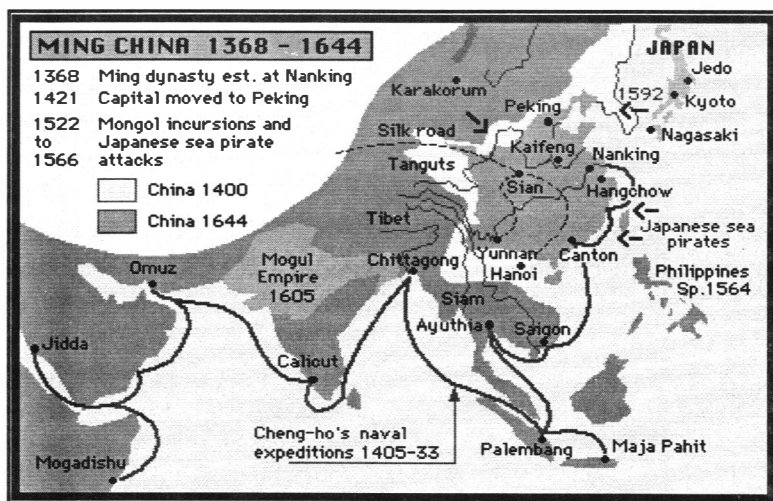
---

<sup>11</sup> <http://www.palembang.go.id/2007/?mod=7&id=7>

<sup>12</sup> Djohan Hanafiah. *Op.cit.* Hal. 1.

kelompok-kelompok cina yang terusir dari Cina Selatan, yaitu dari wilayah Nan-hai, Chang-chou dan Changuan-chou. Meskipun setiap kelompok ini mempunyai pemimpin sendiri, tetapi mereka sepakat menolak pimpinan dari majapahit dan mengangkat Liang Tau-ming sebagai pemimpin mereka. Pada masa ini Palembang dikenal sebagai wilayah yang menjadi sarang bajak laut dari orang-orang Cina tersebut. Tidak heran jika tokoh sejarah dan legendaris dari Cina, yaitu Laksamana Chen-ho terpaksa beberapa kali muncul di Palembang guna memberantas para bajak laut ini.

Pada tahun 1407 setelah kembali dari pelayarannya dari barat, Chen-ho sendiri telah menangkap tokoh bajak laut dari Palembang yaitu Chen Tsui-i. Chen-ho membawa bajak laut ini ke hadapan kaisar, kemudian dihukum pancung di tengah pasar ibukota. Namun beberapa toko bajak laut di lautan Cina seperti Chin Lien, pada tahun 1577 telah bersembunyi di Palembang dan kemudian menjadi pedagang yang disegani di Palembang. Chiang Lien sebagai pengawas perdagangan untuk Cina. sebetulnya kedudukan ini adalah suatu jabatan yang disahkan oleh kaisar dan mempunyai wewenang mengatur hukum, imbalan, penurunan ataupun kenaikan (promosi) bagi warga Cina di Palembang. Dapat dibayangkan bahwa kekuasaan orang-orang Cina di Palembang hampir 200 tahun lamanya.<sup>13</sup>



Peta Pelayaran Cheng Ho hingga ke Palembang<sup>14</sup>

<sup>13</sup> <http://www.palembang.go.id/2007/?mod=7&id=7>

<sup>14</sup> Daerah yang dilewati Pelayaran ke-1 1405-1407 Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumatra, Lambri, Ceylon, Kollam, Cochin, Calicut  
Pelayaran ke-2 1407-1408 Champa, Jawa, Siam, Sumatra, Lambri, Calicut, Cochin, Ceylon  
Pelayaran ke-3 1409-1411 Champa, Jawa, Malacca, Sumatra, Ceylon, Quilon,

Hilangnya pengaruh Majapahit dan Cina di Palembang adalah akibat kebangkitan Islam di wilayah Palembang sendiri. Situasi dan kondisi ini menempatkan Palembang menjadi wilayah perlindungan Kerajaan Islam Demak sekitar tahun 1546, yang melibatkan Aria Penangsang, Aria Jipang, dan Pangeran Hadiwijaya dari Pajang. Kematian Aria Penangsang membuat para pengikutnya melarikan diri ke Palembang. Para pengikut Aria Jipang ini membuat ketakutan baru dengan mendirikan Kerajaan Palembang. Tokoh pendiri Kerajaan Palembang adalah Ki Gede Ing Suro.<sup>15</sup> Keraton pertamanya dibangun di Kuto Gawang. Pada saat ini situsnya tepat berada di kompleks PT. Pusri. Makam Ki Gede Ing Suro berada di belakang Pusri. Bentuk keraton yang dibangun di Kuto Gawang di tepi sungai Musi sama seperti Kraton Jawa. Para penguasanya beradaptasi dengan lingkungan Melayu di sekitarnya.<sup>16</sup> Terjadilah suatu akulturasi dan asimilasi kebudayaan Jawa dan Melayu, yang dikenal sebagai kebudayaan Palembang. Ki Mas Hindi adalah tokoh kerajaan Palembang yang memperjelas jati diri Palembang, yang memutuskan hubungan ideologi dan kultural dengan pusat kerajaan di Jawa (Mataram). Dia menyatakan dirinya sebagai sultan, setara dengan Sultan Agung di Mataram. Ki Mas Hindi bergelar Sultan Abdurrahman, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Cinde Walang (1659-1706).

Ketika Belanda datang di Palembang, Keraton Kuto Gawang dibakar habis oleh VOC pada tahun 1659. Atas perlakuan pegawai VOC tersebut Kesultanan Palembang melakukan perlawanan di bawah Sultan Abdurrahman. Akhimya ia memindahkan keratonnya ke Beringin Janggut (sekarang sebagai pusat perdangangan). Sultan Mahmud Badaruddin I yang bergelar Jayo Wikramo (1741-1757) merupakan tokoh pembangunan Kesultanan Palembang. Ia melakukan pembangunan secara modern di Palembang.

---

Cochin, Calicut, Siam, Lambri, Kaya, Coimbatore, Puttanpur Pelayaran ke-4 1413-1415 Champa, Java, Palembang, Malacca, Sumatra, Ceylon, Cochin, Calicut, Kayal, Pahang, Kelantan, Aru, Lambri, Hormuz, Maladewa, Mogadishu, Brawa, Malindi, Aden, Muscat, Dhufar Pelayaran ke-5 1416-1419 Champa, Pahang, Java, Malacca, Sumatra, Lambri, Ceylon, Sharwayn, Cochin, Calicut, Hormuz, Maldives, Mogadishu, Brawa, Malindi, Aden Pelayaran ke-6 1421-1422 Hornuz, Afrika Timur, negara-negara di Jazirah Arab Pelayaran ke-7 1430-1433 Champa, Java, Palembang, Malacca, Sumatra, Ceylon, Calicut, Hormuz... (17 politics in total) ([http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng\\_Ho](http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng_Ho))

<sup>15</sup> Nama Ki Gede Ing Suro(a) merupakan gelar untuk orang gagah berani dari golongan masyarakat rendahan. Dalam bahasa Jawa Kuna, Sura berarti seorang gagah berani, bersifat kepahlawanan, laki-laki perkasa. Sedangkan gelar Ki berarti gelar yang dipakai oleh para senapati.

<sup>16</sup> Khusus tentang Keraton Kuto Gawang secara lengkap dapat di baca dalam Djohan Hanafiah. *Op.cit.* Hal. 8.

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam masuklah Belanda, ke Palembang. Sebagai Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam pada saat itu, Palembang dirombak secara total dari sisi penggolongan kotanya di bawah Kolonial Belanda. Pada awalnya wilayah pemukiman penduduk kota Palembang, lebih dari sekedar pemukiman yang terorganisir. Pemukiman pada waktu itu merupakan suatu lembaga persekutuan dimana *patronage* dan *paternalis* terbentuk akibat struktur masyarakat tradisional dan feodalistis. Keseluruhan sistem ini berada dalam satu lingkungan dan lokasi. Sistem ini dikenal dengan nama *gugu(k)*. Kosakata *gugu* berasal dari Jawa - Kawi yang berarti : diturut, diindahkan. Setiap *guguk* mempunyai sifat sektoral ataupun aspiratif. Wilayah kedemangan adalah wilayah dimana tokoh demang tinggal, ataupun kebumen yaitu tempat tempat dimana Mangkubumi menetap. Disamping itu ada wilayah-wilayah dimana kelompok etnis tertentu bermukim, seperti Kebanggan adalah pemukiman orang-orang dari Bangka, Kebalen adalah pemukiman orang-orang dari Bali.

Setelah Palembang berada dibawah administrasi kolonial Belanda, maka oleh *Regeering* Commisaris J.I Van Stevenhoven sistem perwilayahan *guguk* harus dipecah. Pemecahan ini bukan saja memecah kekuatan kesultanan, tetapi juga sekaligus memecah masyarakat yang tadinya tunduk kepada sistem monarki, menjadi tunduk pada administrasi kolonial. *Guguk* dijadikan beberapa kampung. Sebagai pengganti kepala *Guguk* diangkat Kepala Kampung. Kota Palembang dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Untuk mengepalai wilayah tersebut diangkat seorang Demang. Demang adalah *pamongraja* pribumi yang tunduk kepada *controleur*. Kota Palembang pada waktu itu terdiri dari 52 kampung, 36 kampung berada di seberang ilir dan 16 kampung di seberang ulu. Kampung-kampung ini diberi nomor yaitu dari nomor 1 sampai 36 untuk seberang ilir, sedangkan seberang ulu dari 1 sampai 16 ulu.

Pemberian nomor-nomor kampung ini penuh semangat pada awal pelaksanaannya, tetapi kemudian pembagian tidak berkembang malah menyusut. Pada tahun 1939 kampung tersebut menjadi 43 buah, dimana 29 kampung berada di seberang ilir dan 14 kampung berada di seberang ulu. Dapat diperkirakan bahwa pengurangan administratif kampung ini diperlukan bukannya untuk tujuan pengembangan wilayahnya, tetapi untuk mengetahui cacah jiwanya, yang berkaitan dengan penghitungan pajak secara perorangan. Beberapa kampung yang penduduknya kurang digabungkan, dan cukup dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Kepala Kampung hanya mengurus penduduk pribumi, maka untuk golongan orang Timur Asing, mereka mempunyai Kepala dan *wijk* tersendiri. Untuk golongan Cina, kepalanya diangkat dengan kedudukan

seperti kepangkatan militer, yaitu Letnan, Kapten dan Mayor. Demikian pula dengan golongan Arab dan Keling (India/Pakistan) dengan kepalanya seorang Kapten. Untuk kedudukan kepala Bangsa Timur Asing, biasanya dipilih berdasarkan atas pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan diserahkan bagi pemerintah disertai pula jaminan dana bagi kedudukannya.

Pemerintahan Kota Palembang pada 1 April 1906 menjadi satu *Stadgemeente*. Satu pemerintahan kota yang otonom, dimana dewan kota yang mengatur pemerintahan. Penduduk menyebut pemerintah kota ini adalah *Haminte*. Ketua Dewan Kota adalah *Burgemeester* (Walikota), yang dipilih oleh anggota Dewan Kota. Anggota Dewan Kota dipilih oleh penduduk kota. Sebenarnya pemerintah kota bukanlah dibentuk untuk tujuan utama memenuhi kepentingan pribumi, akan tetapi lebih kepada kepentingan para pengusaha Barat yang sedang menikmati liberalisasi. Dampak liberalisasi menjadikan kota sebagai pusat atau konsentrasi ekonomi, baik sebagai pelabuhan ekspor, industri, jasa-jasa perdagangan dan menjadi markas para pengusaha.

Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya di Pulau Sumatra. Sebagai kota besar, penduduk Kota Palembang berasal dari berbagai latar belakang etnis dengan etnis utama adalah suku bangsa Melayu Palembang. Etnis lainnya antara lain adalah etnis Jawa, Batak, Minangkabau, Ogan, Komering, Kayuagung, Tionghoa, Arab, dan Aceh. Dalam beberapa tulisan menyebutkan bahwa suku bangsa Melayu Palembang berasal dari hasil akulturasi beberapa suku bangsa yaitu Jawa, Melayu, dan Cina pada masa Kerajaan Sriwijaya. Khusus Orang Arab Palembang membentuk komunitas tersendiri yang menempati Kampung 9 – 10 Ulu dengan arsitektur rumah yang khas Arab.

Berdasarkan data tahun 1987, penduduk Kota Palembang yang berlatar belakang warga negara asing seperti Cina, India, Jepang, Arab, dan lainnya berjumlah 27.232 jiwa atau sekitar 3% dari jumlah penduduk Kota Palembang. Diantara mereka ini etnis Cina (Tiong Hoa) lebih banyak dan menempati hampir seluruh pelosok kecamatan di Kota Palembang. Suku bangsa Ogan, Komering, dan Kayuagung merupakan suku bangsa dari wilayah sekitar Kota Palembang. Sedangkan suku bangsa lainnya merupakan pendatang dari luar Provinsi Sumatra Selatan.

Latar belakang suku bangsa ini menjadi penting dalam berinteraksi di Kota Palembang disebabkan adanya perbedaan antara orang Palembang dan bukan orang Palembang. Kondisi ini lebih terlihat pada kawasan pemukiman di daerah Seberang Ulu I terutama masyarakat yang tinggal di rumah-rumah rakit dan rumah panggung.

Dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa daerah Seberang Ilir dan Seberang Ulu merupakan sebuah kawasan yang didiami oleh penduduk yang berbeda dari latar belakang suku bangsa. Kawasan Seberang Ilir merupakan pemukiman untuk masyarakat asli Palembang (orang Melayu Palembang) dan tempat berdirinya Kraton Kesultanan Palembang. Sedangkan kawasan Seberang Ulu merupakan daerah rawa-rawa sebagai tempat tinggal para pendatang yang bukan Palembang. Bahkan peraturan ini juga diterapkan pada pendatang Eropa, Cina, dan lainnya pada masa Kolonial Belanda. Demikian juga saat ini, secara psikologis kondisi ini masih tetap terpelihara sehingga para pendatang yang bekerja di sektor informal akan memilih tinggal di daerah Seberang Ulu. Kondisi ini juga menyebabkan ada dikotomi yang dirasakan secara psikologis masyarakat Palembang bahwa masyarakat di Seberang Ulu adalah masyarakat golongan bawah sedangkan masyarakat yang tinggal di Seberang Ilir adalah golongan menengah ke atas (elit).

## **B. KELUARGA BESAR R.M. AMIN**

### **1. Raden Mohamad Amin (Cek Hasan)**

Raden Mohamad Amin (alias Cek Hasan) berasal dari Kampung Kebon Duku 24 Ilir Palembang, yang kawin dengan Raden Ayu Zainah (alias Cek Ena) binti R.M. Rais dari Kampung Sungai Tawar 28 Ilir, pada tanggal 24 April 1907. Dalam tutur adat Palembang kedua orang ini disebut atau dipanggil ‘*yai*’ (kakek) dan ‘*nyai*’ (nenek) oleh cucunya. Sesuai dengan adat istiadat Palembang dalam sistem perkawinannya berdasarkan matrilineal, maka R.M. Amin pindah ke rumah isterinya yang bertempat tinggal di *rumah limas* kampung Sungai Tawar 28 Ilir yang terletak dipinggir Sungai Musi. Rumah peninggalan dari keluarga besar *nyai*, Demang Polisi Kota Palembang R.M. Ali Amin. Raden Mohamad Ali Amin lahir pada tanggal 20 Oktober 1915 di rumah Limas tersebut. Raden Mohamad Ali Amin kemudian populer dengan *Cek Ali*. Bapak atau ayah, dalam tutur adat Palembang dipanggil ‘*rama/romo*’. Romo dari Djohan Hanafiah adalah Cek Ali. Pada saat ini panggilan ‘*rama/romo*’, sering hanya disebut ‘*Ma/Mo*’ sudah jarang sekali dipakai. Apalagi pemakaian sebutan ini hanya dari kalangan keluarga tertentu.

Rumah Limas keluarga buyut Djohan Hanafiah merupakan salah satu dari rumah-rumah 3 serangkai pejabat tinggi Pemerintah Belanda dari golongan pribumi di Kota Palembang pada waktu itu, yaitu rumah Demang Polisi di Sungai Tawar 28 Ilir, rumah Pangeran Jaksa, R. Arpah Item di Kepandean 18 Ilir, dan rumah Pangeran Penghulu Kartamanggala Nataagama Mustofa di Kapuran, 19 Ilir. Sayangnya



bahwa rumah-rumah limas peninggalan sejarah tersebut tidak terpelihara dengan baik, sehingga mengalami kerusakan, malahan rumah limas buyut Djohan Hanafiah di Sungai Tawar 28 Ilir tersebut roboh pada tahun 1990 karena diterjang oleh arus Sungai Musi.

Sebagai Pegawai Pemerintah, *yai* Cek Hasan selalu berpindah-pindah tempat kedudukan jabatannya, dalam hal ini keluarganya termasuk juga Ali Amin ikut serta, yang membawa banyak suka dan dukanya. Ali Amin masih ingat sewaktu mengikuti ayahandanya bertugas sebagai Mantri Polisi di Bayung Lincir tempat yang terpencil antara Palembang dan Jambi. Tempat pemandiannya di sana adalah di sungai yang diberi pagar bambu untuk menjaga keselamatan terhadap serangan buaya. Kemudian ayahanda Ali Amin menjabat sebagai Asisten Demang di Bungamas, yang terletak antara Lahat dan Tebing Tinggi. Kemudian pindah ke Pagar Gunung di daerah Pasemah, yang hanya dapat dicapai dengan mobil sampai ke Terkul antara Lahat dan Pagar Alam, untuk seterusnya harus berjalan kaki atau naik gerobak. Jabatan sebagai petugas Pamong Praja waktu dahulu cukup berat yaitu sebagai Kepala *onderdistrik* yang membawahi beberapa *marga*, sekalian sebagai koordinator dan penanggung jawab dari berbagai dinas pemerintahan, seperti pajak, pekerjaan umum, khusus jalan dan jembatan, pertanian dan keamanan. Dalam menjalankan tugas ini, Cek Hasan terpaksa selalu meninggalkan keluarganya.

Keadaan Cek Hasan baru mengalami kehidupan yang tenang sejak ia pindah ke Palembang pada tahun 1927 untuk menjabat sebagai *Adjunct Hoofddjaksa* dan sekalian menempati rumah sendiri di Kampung Kebon Duku 24 Ilir. Namun ketika berhenti dari jabatan tersebut pada tahun 1934, karena penghematan, kembali dipekerjakan sebagai *Asisten Demang* di Tanjung Raja sampai tahun 1935 dan kembali ke Palembang sebagai pensiunan dari pegawai pemerintah.

Keluarga Cek Hasan sangat taat beragama. Ia lebih memilih bekerja dan atau bertempat tinggal di Palembang untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah. Dalam mematuhi syariat agama, khusus sembahyang Jum'at pernah Cek Hasan bentrok dengan atasannya, *Controleur* Kota Palembang Mussert, karena terlalu pagi meninggalkan kantor untuk sembahyang Jum'at. Akan tetapi Cek Hasan berpendirian bahwa sembahyang Jum'at adalah wajib, dan jika harus pilih antara sembahyang Jum'at dan melakukan tugas pekerjaan, lebih baik berhenti bekerja.

Pada hari-hari libur Cek Hasan mengikuti pengajian di rumah ulama Kyai Kms. H. Umar di 19 Ilir Palembang dan anaknya Ali Amin selalu diajak serta. Selain itu Cek Hasan juga mengadakan sendiri *cawisan* (majelis taklim) di rumahnya sekali seminggu dengan

mendatangkan ulama Kyai Kgs. H. Azahari dari kampung Soakbato 26 Ilir. Untuk ini Kyai tersebut dijemput oleh Ali Amin dengan perahu melalui Sungai Sekanak dan Sungai Kebon Duku (sekarang sungai terakhir ini sudah buntu). Kondisi demikian menjadi pengalaman tersendiri bagi R.M. Ali Amin. Sejak masih kecil sudah tertanam jiwa keagamaan dalam diri R.M. Ali Amin. Kemampuan Cek Hasan dalam berkarya sangat tinggi, tetapi terjadi penurunan pada R.M. Ali Amin. Sewaktu Cek Hasan *nderafdeeling* Ogan Ilir, tidak banyak lingkungan pergaulannya selain dari pada kelompok sesama pegawai-pegawai yang jumlahnya tidak begitu banyak. Cek Hasan tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut seperti olah raga tennis. Ali Amin pernah menanyakan hal tersebut kepada ayahnya, dan secara lugas Cek Hasan menjawab sambil mengajukan pertanyaan, apakah Ali Amin menganjurkan dia memungut bola tennis untuk tuan kontrolir pejabat Belanda tertinggi setempat. Jawaban itu menggambarkan sikap Cek Asan yang tidak suka mencari muka pada atasannya.

## 2. Raden Mohamad Ali Amin

Raden Mohamad Ali Amin (R.M. Ali Amin) lahir pada tanggal 20 Oktober 1915. Ia adalah ramanda<sup>17</sup> (orangtua) dari Djohan Ali Hanafiah. R.M. Ali Amin sudah masuk sekolah desa sejak umur 5 tahun di Bungamas. Menurut Ali Amin, mengingat masa kecilnya bahwa terdapat adat kebiasaan masyarakat Palembang membawa senjata tajam ke mana-mana, termasuk anak-anak sekolah. Pada waktu jam belajar senjata tersebut dikumpulkan oleh guru dan setelah jam pulang, senjata diberikan kembali kepada anak-anak.

Pada waktu Cek Asan pindah ke Pagargunung, Ali Amin telah berumur 6 tahun dan berpisah dengan keluarga, karena dia harus tetap bersekolah di Palembang. Temyata keinginannya untuk masuk sekolah Hollands Inlandsche School (HIS)<sup>18</sup> (sekolah dasar dengan bahasa

---

<sup>17</sup> Ramanda adalah panggilan akrab Djohan Hanafiah terhadap orang tuanya.

<sup>18</sup> Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada waktu Hindia Belanda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892. Pendidikan dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (Hollands Inlandsche School, HIS) baru dibentuk pada tahun 1908 di setiap Kabupaten di Jawa. Di setiap Kawedanaan ada Standard School yang lamanya 4 tahun dan disetiap Desa, sejak tahun 1907 (di bawah Gubernur Jenderal Van Heutz) ada Sekolah Desa (Volksschool) yang lamanya 3 tahun. Peraturan yang terakhir (1898) diterapkan pada tahun 1901 setelah adanya Politik Etis atau *Politik Balas Budi* dari Kerajaan Belanda, yang diucapkan pada pidato penobatan Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901, yang intinya ada 3 hal penting: irigrasi, transmigrasi [1], pendidikan. Pada zaman Hindia Belanda anak masuk HIS pada usia 6 th dan tidak ada Kelompok Bermain (Speel Groep) atau Taman Kanak-Kanak (Frobels), sehingga langsung masuk dan

pengantar bahasa Belanda) ditolak oleh pihak sekolah karena dianggap belum cukup umur. Pada tahun 1921, sewaktu berumur 6 tahun, Cek Hasan kembali mendaftarkan R.M. Ali Amin ke HIS, dan kembali ditolak dengan alasan sewaktu tangannya diukur, maksudnya tangan harus melingkari kepala dan menyentuh telinga, ternyata tangan R.M. Ali Amin tidak sampai menyentuh telinga. Sementara belum dapat diterima di HIS, Ali Amin belajar di sekolah Melayu 29 ilir. Pada tahun 1922 kembali Ali Amin mendaftar di HIS untuk yang ketiga kalinya, ternyata tetap ditolak dengan alasan yang sama. Akhirnya R.M. Ali Amin tetap belajar di sekolah Melayu 29 ilir, kemudian pindah ke sekolah Melayu di 24 ilir Kebon Duku. Kegigihan R.M. Ali Amin untuk memasuki HIS, akhirnya pada tahun 1923 sekali lagi mendaftarkan diri di HIS, dan kali ini tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia belajar baru pada umur 8 tahun. Ia diterima bersekolah di HIS di Kebon Duku pada pagi harinya, pada waktu sore dia belajar sekolah agama di Qur'aniah di 13 ilir.

Cukup lama R.M. Ali Amin harus berpisah dengan ayahnya Cek Asan. Baru pada tahun 1927, ayahnya kembali ke Palembang. Selama Ali Amin tinggal di Palembang dengan keluarga di 24 ilir, ternyata R.M. Ali Amin adalah anak yang cerdas, karena pada waktu berada di kelas 7 HIS, ia diusulkan untuk langsung masuk ke kelas 1 Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO),<sup>19</sup> setingkat SMP pada masa Hindia Belanda, jadi tidak perlu mengikuti *voorklass*. Demikian juga sekolah agamanya, karena cerdasnya dia diminta untuk melanjutkan sekolah agama Jamiatul Chair di Tanah Abang Jakarta. R.M. Ali Amin harus memilih, apakah dia harus meneruskan di MULO atau sekolah agama. Ayahnya

---

selama 7 tahun belajar. Setelah itu dapat melanjutkan ke MULO, AMS, atau Hogere Kweekschool. Jalur untuk anak Belanda adalah Europese Lagere School (ELS)- HBS III- HBS V atau ELS-Gymnasium/Lyceum. Jalur Sekolah bagi anak Belanda juga dapat dimasuki oleh anak Bumiputera dan Tionghoa yang terpilih. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa biasanya memilih jalur HCS (Hollands Chinesche School) karena selain bahasa pengantar Belanda, juga diberikan bahasa Tionghoa. Di luar jalur resmi Pemerintah Hindia Belanda, maka masih ada pihak swasta seperti Taman Siswa, Perguruan Rakyat, Kristen dan Katholik. Pada jalur pendidikan Islam ada pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhamadiyah, Pondok Pesantren, dan lain-lain. (sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

<sup>19</sup> MULO singkatan dari bahasa Belanda: *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* yaitu bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa sekarang ini, MULO setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Meer Uitgebreid Lager Onderwijs berarti "Pendidikan Dasar Lebih Luas". MULO menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 30-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap ibu kota kabupaten di Jawa. Hanya beberapa kabupaten di luar Jawa yang mempunyai MULO. (sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

sangat senang jika R.M. Ali Amin dapat menjadi seorang uztad, ternyata R.M. Ali Amin punya keinginan dan cita-cita menjadi seorang dokter. Untuk itulah setamat dari MULO di Palembang, R.M. Ali Amin meneruskan pendidikannya ke *Algeme(e)ne Middelbare School (AMS)*<sup>20</sup> B di Jakarta. Sebetulnya R.M. Ali Amin dapat juga meneruskan ke *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Bestuur Ambtenaren (MOSVIA)*,<sup>21</sup> Sekolah Menengah Pamongpraja Pribumi, yang tamatannya menjadi *ambtenaar* (pegawai pemerintah). Ali Amin harus hidup prihatin di Jakarta, karena biaya yang dikirim dari Palembang hanya pas-pasan saja. Untuk membiayai sekolah R.M. Ali Amin maka salah seorang adiknya harus berkorban untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Sebagai pemuda yang idealis, R.M. Ali Amin terlibat dengan gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia (pramuka). Ia juga menjadi anggota pergerakan pemuda untuk kemerdekaan, yaitu Indonesia Muda. Sebagai pemuda yang aktif dalam gerakan ini, sering R.M. Ali Amin harus berurusan dengan *Politiek Inlichtingn Dienst (PID)*, polisi rahasia Belanda.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> AMS adalah singkatan dari bahasa Belanda *Algeme(e)ne Middelbare School* yang merupakan bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. AMS setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) pada saat ini. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan pada tahun 1930-an, sekolah-sekolah AMS hanya ada di beberapa ibu kota provinsi Hindia Belanda yaitu Medan (Sumatera), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Indonesia Timur). Selain itu AMS ada di Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta), Surakarta (Kasunan Surakarta) dan beberapa kota Karesidenan seperti di Malang. Banyak orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS, dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke THS di Bandung (*Technische Hooge School* - didirikan tahun 1920 - sekarang - Institut Teknologi Bandung - ITB), RHS di Jakarta (*Rechts Hooge School* - didirikan tahun 1924 - sekarang Fakultas Hukum UI Jakarta), atau GHS di Jakarta (*Geneeskudige Hooge School* - didirikan tahun 1927 - sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta), ke Bogor di *Landbouw Hooge School* - didirikan tahun 1940 - sekarang Institut Pertanian Bogor - IPB. Melalui AMS berarti harus menyelesaikan MULO lebih dahulu yang tersebar di hampir semua provinsi yang hanya berjumlah delapan, sedangkan kalau melalui HBS hanya ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, atau Medan. Jalur *A afdeling* atau AMS A menekankan pada ilmu sastra dan budaya, tentu saja jalur ini hanya untuk meneruskan ke RHS saja. Jalur *B afdeling* atau AMS B menekankan pada ilmu alam dan ilmu pasti, jalur ini dapat ke semua jurusan RHS, THS, GHS, ataupun LHS. ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

<sup>21</sup> Mosvia: *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Bestuur Ambtenaren*, yaitu sekolah Pangrehpraja lengkap dengan asramanya.

<sup>22</sup> PID singkatan dari *Politiek Inlichtingn Dienst* (bahasa Belanda) yaitu polisi rahasia bentukan kolonial Belanda. PID bertugas mengamati semua orang yang dicurigai. Bahkan peristiwa pemberontakan tgl 12 Nopember 1926 di Banten dan kemudian bulan Januari 1927 di Sumatra Barat, secara militer pemberontakan itu

Setamat dari AMS, R.M. Ali Amin tidak dapat melanjutkan cita-citanya menjadi mahasiswa kedokteran, karena ayahnya Cek Asan sudah memasuki masa pensiun, sehingga tidak dapat lagi membiayainya untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 1936, dengan ijazah AMS R.M. Ali Amin kembali ke Palembang. Ia berbekal ijazah tersebut diterima di kantor Residen Palembang sebagai *klerk*.

Setelah merasa cukup kemampuan untuk berumah-tangga, maka R.M. Ali Amin menyatakan kepada ayahnya bahwa dia bermiat untuk kawin. Keluarganya mencarikan pasangannya dengan pertimbangan bibit, bebet, dan bobot untuk pasangan anaknya. Proses inilah yang disebut '*rasan tuo*', dalam adat perkawinan Palembang. Calon penganten pria tidak tahu dan tidak kenal dengan calon pengantin perempuan. Demikian juga halnya dengan proses dan prosesi adat, si calon pengantin hanya menerima apa adanya. Didalam perkawinan masa itu cinta datangnya belakangan, dan terbukti pula bahwa perkawinan masa lalu lebih langgeng dari masa sekarang. Perceraian masa lalu itu merupakan aib bagi keluarga.

Akad Nikah R.M. Ali Amin dilakukan di rumah keluarganya di 24 ilir. Dalam adat perkawinan Palembang akad nikah dilakukan di rumah pihak pria, tanpa menghadirkan calon pengantin wanita. Peristiwa itu berlangsung pada 3 Juli 1938. Bertindak sebagai wali nikah adalah Raden Ali Hasan, ayah dari Raden Ayu Ning Fatimah (cek Ning). Hasil perkawinan inilah Djohan Hanafiah lahir. Cek Ning dalam panggilan mesra anak-anaknya adalah *embuk* (ibu). Pelaksanaan perkawinan R.M. Ali Amin dan Cek Ning sepenuhnya dilakukan dalam adat perkawinan Palembang. Proses dan prosesinya memakan waktu satu minggu. Puncak acaranya adalah *munggah* yaitu mengarak pengantin pria menuju rumah pengantin perempuan. Pesta besar dilakukan di rumah pengantin perempuan di Kampung Duku 8 ilir, di rumah orangtua Cek Ning (R. Ali Hasan) Duku. Beberapa hari kemudian rentetan acara ini ditutup dengan '*mandi simburan*', yaitu selain kedua mempelai dimandikan, juga para besan dan tamu saling menyiram air, sehingga kadangkala mereka basah kuyup. Kemudian baru diadakan '*beratip*', memohon Allah Subhanawata'alah memberikan perlindungan, dan berkah bagi kedua mempelai.

---

dengan mudah ditumpas. Kemudian 13 ribu orang ditangkap dan 4500 yang dipenjarakan setelah diadili. Semua ini berkat jasa dari polisi rahasia tersebut. Baca Cindy Adams. 2007. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno;  
<http://forum.detik.com/showthread.php?t=38570&page=1711>; dan  
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/01/17/0027.html>.

## C. DJOHAN HANAFIAH

### 1. MASA KECIL

Setelah upacara perkawinan selesai, R.M. Ali Amin harus pindah ke rumah keluarga istrinya Cek Ning. R.M. Ali Amin harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan rumah tangga mertuanya di Duku. Sistem ini adalah bentuk matrilokal dalam adat perkawinan Palembang. R.M. Ali Amin pada waktu itu tentulah ikut membersihkan rumah dan pekarangan mertuanya.

Setelah hampir satu tahun perkawinan antara R.M. Ali Amin dan Cek Ning, lahirlah anak pertama Djohan Hanafiah pada tanggal 5 Juni 1939 dari kandungan seorang perempuan muda, waktu itu masih berumur 17 tahun. Putera pertamanya tersebut lahir dalam keadaan sehat. Tidak banyak diketahui tentang Djohan Hanafiah masa balita. Hanya Siti Rahmah, nenek Djohan Hanafiah dari pihak ibu, yang dipanggil sebagai *mak tuo*, sering mengatakan bahwa dialah lebih banyak mengasuh Djohan Hanafiah, karena ibunya masih terlalu muda pada waktu itu, tambahan pula hampir setiap tahun dia melahirkan. Walaupun tinggal di Duku, ayah dan ibunya sering juga berkunjung dan menginap di rumah kakek Cek Hasan Kebon Duku. Nenek yang di Kebon Duku, yaitu Cek Ena dipanggil oleh cucunya *embuk tuo*. Djohan Hanafiah sangat dimanjakan oleh *embuk tuo*, sebaliknya Cek Ena Kebon Duku sangat disiplin mengawasi cucu-cucunya, terutama masalah tugas-tugas agama, seperti mengaji dan sembahyang.

Semasa berumur masih balita, Djohan Hanafiah tumbuh dalam suasana peperangan Dunia antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada saat itu pasukan Jepang memporak porandakan kilang minyak Belanda dan Amerika di Sungai Gerong dan Plaju, melalui serbuan udara pada tanggal 14 Februari 1942. Djohan Hanafiah baru berumur 3 ½ tahun pada saat itu. Suatu pertumbuhan kebatinan yang kurang menguntungkan bagi Djohan Hanafiah yang masih kecil.

Masa pendudukan Jepang adalah masa yang paling menyedihkan bagi rakyat Indonesia. Selain kejiwaan yang terhinakan, juga yang paling parah adalah masalah makanan. Makanan rakyat yang berupa hasil perkebunan dan peternakan dijarah oleh pasukan Jepang. Untung saja pada masa itu keluarga Djohan Hanafiah dari pihak ibunya mempunyai lahan yang cukup untuk bercocok tanaman, seperti ubi, jagung dan sayur-sayuran. Disamping itu ada temak seperti ayam, bebek, kambing dan sapi. Lahan yang luasnya 2,5 ha, adalah hasil jerih payah R.M. Ali Hasan, kakek Djohan Hanafiah yang dikumpulkannya semasa dia menjabat sebagai *ambtenaar* masa kolonial Belanda. Dia telah menduduki jabatannya mulai dari juru tulis, klerk hingga Assisten

Demang yang ditempatkan hampir di semua pos di Keresidenan Palembang.

Hampir semua paman dan bibi Djohan Hanafiah dilahirkan di tempat-tempat kakeknya bertugas, biasanya di ibukota Marga. Ibunya juga lahir di Talang Betutu, sebuah marga yang kaya dengan penghasilannya. Wilayah Marga ini sekarang menjadi lahan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, yang dulunya dikenal sebagai Bandara Talang Betutu. Bahkan nenek Djohan adalah perempuan cantik, “kembang desa” dari Marga Semendo Darat, keluarga dari Pasirah (kepala daerah) di Marga Semendo Darat yang tinggal di Pulaupanggung.

Jepang masuk ke wilayah Indonesia untuk pertama kalinya mendarat di Tarakan Kalimantan Timur tanggal 11 Januari 1942 setelah melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan Belanda. Sumber-sumber minyak mulai dihancurkan sejak tanggal 10 Januari 1942 hingga besoknya pertahanan Belanda rontok.<sup>23</sup>

Jepang berhasil menduduki wilayah Palembang setelah sebanyak 700 pasukan payung Jepang bagian dari Divisi ke-38 pimpinan Letnan Jenderal Imamura diterjunkan di Kota Palembang pada tanggal 14 Februari 1942 melalui Bandara Talang Betutu. Pertempuran terjadi antara pasukan Belanda dengan pasukan Jepang selama dua hari hingga akhirnya Belanda kalah.<sup>24</sup>

Setelah Jepang menguasai wilayah Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua kawasan wilayah penguasaan. Jawa dan Sumatra berada dalam pengawasan *gunseibu* (angkatan darat), sedangkan selebihnya oleh *Minseibu* (angkatan laut). Sumatera sendiri berada di bawah pengawasan tentara ke-25 yang berpusat di Bukittinggi sejak tanggal 31 Mei 1943. Wilayah Jawa oleh tentara ke-15 dan Malaya di bawah tentara ke-29.<sup>25</sup>

Pada masa pendudukan Jepang tersebut, semua pegawai masa kolonial direkrut kembali oleh Jepang, bahkan kebanyakan dengan kedudukan yang sama atau dinaikkan pangkatnya. Jepang memerlukan mesin administrasi kolonial, karena mereka tidak membawa tenaga sipil untuk mengelola pemerintahan sipil. Memang pada awal pendudukan Jepang mereka bersikap baik, karena mereka memerlukan

---

<sup>23</sup> Onghokman. 1987. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia. Hal. 232

<sup>24</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi. 1998. *Brigadir Jenderal Kaharoeddin Datuk Rangkeyo Basa: Gubernur di Tengah Pergolakan*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal. 48. Baca juga Abdullah Siddik. 1999. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 129.

<sup>25</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi. 1998. *op.cit.* hal. 49

tenaga pribumi. Bahkan untuk menghadapi *chaos* dan terror pada masa peralihan ini Kolonel Matsuki merestui dr.A.K. Gani membentuk Penjaga Keamanan Oemoem (PKO).

Dr.A.K.Gani sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan memanfaatkan situasi ini untuk menghimpun kekuatan yang disamarkannya dalam bentuk Barisan Penjaga Keamanan. Organisasi ini didirikan untuk mengantisipasi *vacuumgezag* (kekosongan kekuasaan). Dengan larinya kepolisian kolonial Belanda, maka diperlukan rakyat untuk menjaga keamanan. Setelah pemerintahan pendudukan ini mantap, maka kepolisian dipegang langsung oleh Jepang.

Orang tua Djohan Hanafiah, Ali Amin, pada masa itu ditempatkan di Kantor Palembang *Shu* (Keresidenan) dengan seorang *Shu Chokan* (Residen) sebagai pemimpinnya. Kedudukan R.M. Ali Amin mendapatkan promosi sebagai *Fuku Gun-co*, pada masa kolonial setingkat dengan *Gediplomeerd Assisten Demang*. Selain promosi dia juga dimutasikan ke Lubuk Linggau. Kedudukan *Bunshuco* di kota ini dipimpin oleh seorang Jepang. Kedudukan Lubuklinggau juga dinaikan, yaitu pada masa kolonial Belanda kota ini bukan ibukota *afdeeling*, tetapi pada masa Jepang menjadi ibukota *afdeeling*. Jadi ada pemekaran wilayah *Afdeeling Palembangsche Bovenlanden* yang tadinya beribukota di Lahat menjadi 2 *Bunshu*, yaitu Lahat dan Lubuklinggau.

Djohan Hanafiah yang masih kecil dan 2 orang adiknya ikut dengan kedua orangtuanya ke Lubuk Linggau. Mereka tinggal di sana selama sekitar 3 tahun di *Bunshu* Lubuk Linggau. Kemudian ayahnya pindah lagi ke Muara Dua pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Wedana.

Djohan Hanafiah kecil lebih merasakan beratnya penderitaan akibat pendudukan Jepang di Lubuklinggau. Seorang adiknya yang lahir di Lubuklinggau meninggal dunia, karena diserang oleh malaria. Setiap hari Djohan Hanafiah menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di lapangan dan dimuka kantor pos tidak jauh dari tempat tinggalnya, yaitu Talang Bandung. Mayat-mayat itu adalah para BPP (*Barisan Pembantoe Pemerintah*), sebuah nama “terhormat” untuk pekerjaan yang tidak berperikemanusiaan. Istilah Jepang adalah *Romusha*, yaitu tenaga kerja untuk kepentingan mesin perang tentara Jepang, seperti membangun lapangan terbang, jalan, jembatan, dan juga pekerjaan yang bersifat insidentil lainnya. Tenaga kerja ini dikerahkan dari seluruh penjuru Keresidenan Palembang, dan dipekerjakan bahkan di luar Sumatera.

Djohan Hanafiah kecil sempat disekolahkan oleh orang tuanya ke sebuah sekolah dengan pendidikan gaya Jepang. Baris berbaris dan



*taisho* (senam) sangat ditekankan kepada anak-anak kecil yang kebanyakan menderita malnutrisi. Menyanyikan lagu-lagu Jepang dengan heroik, serta hormat kepada kaisar Jepang dengan menghadap matahari terbit sambil membungkukkan badan (*saikerik*), itulah yang dipelajari, tepatnya dicekoki kepada anak-anak ini. Anak-anak yang rata-rata berbadan kurus dengan kepala botak, hidungnya terus meleleh ingus atau matanya penuh dengan kotoran (tahi mata). Bau badannya tidak terhindarkan, karena baju kodok yang dipakainya jarang sekali dicuci dengan sabun. Kulit badan dihiasi dengan kurap dan kudis adalah gambaran biasa saja melekat ditubuh yang ceking tersebut. Pemandangan ini juga tergambar dengan masyarakat di Lubuklinggau waktu itu. Masih banyak orang yang berbaju kulit kayu, atau karung beras, tanpa alas kaki.

Anak-anak sekolah ini diajarkan juga untuk menanam pohon jarak. Tanaman untuk menghasilkan minyak kapal udara. Pekarangan rumah harus menanam jarak. Walaupun kondisi demikian, namun anak-anak pada waktu itu tetap riang seperti anak-anak normal lainnya. Bernyanyi lagu-lagu Jepang dan bermain-main adalah pekerjaan sehari-hari.

Tugas Raden Mohammad Ali Amin sebagai *fuku gun-co*, sangat berat di Lubuk Linggau, kadangkala dia harus berani menolak permintaan Jepang untuk merekrut sebanyak-banyaknya Romusha, atau dia harus tegas menolak permintaan Jepang tanpa kepentingan dinas Jepang, seperti permintaan untuk menyiapkan wanita penghibur. Ketegasannya pernah dikejar Jepang sampai ke rumah, dimana pada saat itu Jepang tidak menemuinya, hanya ada kakeknya Cek Asan yang sedang bersiap untuk shalat. Komandan Jepang tidak puas, maka ia menghajar Cek Hasan dengan popor senapan hingga pingsan.

## **2. Indonesia Merdeka**

Pendudukan Balatentara Dai Nippon berakhir. Kekalahan mereka pada Perang Pasifik oleh pasukan Sekutu, berdampak dengan penyerahan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang didudukinya termasuk di Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945 kepada Sekutu, rakyat Indonesia memproklamasikan Indonesia sebagai Negara yang merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berita tentang kemerdekaan baru sampai ke daerah-daerah di Indonesia beberapa hari kemudian. Dapat dimaklumi karena alat komunikasi pada waktu itu masih dikuasai oleh pihak Jepang. Di Lubuklinggau sendiri baru diterima antara tanggal 19 dan 20 Agustus. Rakyat menyambut berita dengan penuh semangat dan kegembiraan. Mereka mengibarkan bendera merah putih di rumah-rumah mereka.

Djohan Hanafiah kecil dan teman-temannya juga turut bersorak-sorak dan berlari-lari di kampung, dengan meneriakan merdeka. Meskipun pada waktu itu Djohan Hanafiah belum mengerti dan dapat menangkap sepenuhnya arti merdeka yang diteriakkannya.

Pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang tidaklah mudah, karena mereka masih memegang senjata lengkap. Kemudian mereka mendapat perintah untuk menyerahkan senjata ini kepada pihak pemenang Perang Pasifik, yaitu pasukan Sekutu. Disinilah letak konfliknya, Indonesia menganggap telah merdeka, dan berhak atas segala sesuatunya di bumi pertiwi. Sedangkan Jepang hanya tahu bahwa penguasa barunya adalah pemenang perang, yaitu Sekutu yang diwakili oleh tentara Inggris. Demikian pula Sekutu sebagai pemenang perang mereka menganggap *the winner's takes all*. Pihak pemuda Indonesia bersikap bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa tawar menawar, mereka merebut persenjataan Jepang. Konflik meningkat dengan bentrokan bersenjata. Catatan M. Ali Amin dalam biografinya mengenai suasana di Lubuklinggau masa itu menuliskan:

Ketegangan timbul waktu kedatangan rombongan tentara Sekutu, termasuk dari Belanda, yang tujuannya untuk mempersiapkan pelucutan senjata pasukan Jepang dan pembebasan tahanan Belanda di perkebunan Belalau. Dengan adanya orang-orang Belanda, yang sudah diketahui politik pemerintahannya, yaitu akan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, maka rombongan ini dengan mempergunakan kekuatan senjata Jepang melarang pengibaran bendera merah putih. Spontan timbul perlawanan dari rakyat yang hanya dapat diredakan sesudah ada musyawarah antara pihak Sekutu, Jepang dan pejabat-pejabat Indonesia dengan dibantu seorang pemimpin dari Jawa, sdr. Kiswoto. Akhimya hanyalah bendera merah-putih yang berkibar di Kantor Gunco saja yang diturunkan, sedangkan bendera-bendera di rumah-rumah tetap berkibar.<sup>26</sup>

Pada akhir bulan Oktober 1946, R.M. Ali Amin beserta keluarganya kembali ke Palembang melalui Lubuklinggau. Mereka menaiki kereta api<sup>27</sup>, membawa kesan dan kegembiraan tersendiri bagi anak seumur

---

<sup>26</sup> Djohan Hanafiah (ed). 1998. *Kesan-Kesan Dalam Kehidupan dan Dalam Berkarya dari H. M. Ali Amin, SH: Pengalaman Seorang Pegawai Tiga Zaman*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>27</sup> Ketika itu di Sumatera hanya ada 4 usaha kereta api yaitu Atjehtram (AT) atau Atjehstaatsstoomtram (ASS) untuk wilayah Aceh, Deli Spoorweg Maatschappij (DSM), untuk wilayah Sumatera Utara, Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust

Djohan Hanafiah pada waktu itu. Kereta api adalah suatu imajinasi dari bentuk petualangan. Kereta api dengan lokomotif tua dan gerbong yang mulai rongsok, maklum karena ini kereta yang ada sejak dibangun perkereta-apian di Keresidenan Palembang sejak masa kolonial (tahun 1920-an). Jaringan kereta api *Zuid Sumatra Spoorwegen* (ZSS), dirintis pihak swasta sejak tahun 1895, kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial, menjadi *Zuid Sumatra Staatsspoorwegen*. Jaringan tersebut direncanakan meliputi Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Kemudian direncanakan pula diteruskan ke Jambi dan Padang.

Ketika itu waktu tempuh Palembang – Lubuklinggau sekitar 6 jam, maka pada masa itu waktu tempuhnya hampir 18 jam. Hampir setiap jam kereta api harus berhenti untuk mengisi bahan bakar yang terdiri dari balok-balok kayu kering di sepanjang jalan. Tentu masalah kenikmatan naik kereta api waktu itu sangat susah didapat, karena jendela kereta api selalu tertutup, menghindari *lelatu* kayu kering yang beterbangan. Ditambah pula debu arang yang hitam itu masuk ke hidung dan mata penumpang. Dapat dipastikan bahwa setiap penumpang, mukanya akan dibedaki dengan warna asap dan debu hitam. Apalagi pakaian penumpang, keadaannya serupa perokok keretek, yaitu *lelatu* yang nempel di baju akan membuat lobang di baju mereka. Djohan Hanafiah kecil tidak banyak mengeluh dengan keadaan kereta api, karena lebih banyak tertidur di pangkuan pamannya.

Menjelang subuh kereta api memasuki stasiun Kertapati Palembang. Keluarga Djohan Hanafiah menuruni pelabuhan kecil di tepi Sungai Ogan, dengan membawa barang pindahan lumayan banyak. Mereka menaiki *tambangan* (perahu angkut). Tambangan tersebut melaju dari muara Sungai Ogan memasuki sungai Musi, menyeberang ke arah Tangga Buntung. Kemudian setelah menyusuri sungai Musi arah ke hilir, maka tambangan memasuki sungai Sekanak, melalui kolong jembatan Sekanak. Sungai Sekanak ditempuh sekitar 15 menit kemudian memasuki sungai Kebon Duku. Jarak muara sungai Kebon Duku tidak terlalu jauh dari tambangan dan telah sampai di tangga rumah kakek Djohan Hanafiah. Suatu perjalanan di tengah kota tanpa melintasi jalan darat.

Rumah kakek Djohan Hanafiah disebut *rumah darat*, artinya letaknya agak jauh ke daratan dari sungai Musi. Ada sebuah rumah lagi, yaitu *rumah limas* tua dari keluarga kakek, disebut *rumah laut*. Keluarga R.M. Ali Amin bertempat tinggal sementara di rumah tersebut. Ada sebuah sungai di belakang rumah itu, anak dari sungai Sekanak yang

---

(SSS) untuk wilayah Sumatera Barat, dan Staatsspoorwegen op Zuid-Sumatra (ZSS) untuk wilayah Sumatera Selatan.

mengalir ke sungai Tengkuruk ke Beringin Janggut. Sungai ini berada di kampung 18 ilir Kepandean. Di antara rumah darat dan rumah laut ada seruas *tembokan* (jalan yang dibuat *Gemeente* Palembang, dengan menembok atau menimbun tanah liat, sehingga jalan tidak terendam air). Nama kampung ini adalah 24 ilir Kebon Duku. Keberadaan rumah darat dan rumah laut berada di tepian sungai, maka Djohan Hanafiah menjadi perenang yang unggul, serta pandai mendayung perahu.

Pada masa remaja karakter Djohan Hanafiah terbentuk. Dia hidup dalam suasana revolusi Indonesia. Suasana dimana masalah nasionalisme, demokrasi, kelaparan, kemiskinan, antara patriot dan pengkhianat, antara pro NICA (*Nederlandsch Indië Civil Administratie*) dan Republik. Suasana kontradiksi yang sangat jelas. Motto para pejuang kemerdekaan pada waktu itu “Merdeka atau Mati”, dengan salam “Merdeka”, yang diteriakan diikuti kepalan tangan ke atas.

Romantisme perjuangan tidaklah seperti gambaran di dalam film-film, yaitu *the bad and the beautiful*, atau *black and white*. Ada ranah bukan antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Ada pejuang, ada kolaborator, ada mata-mata, ada musuh, ada bandit, ada apatis, dan sinis. Semuanya dilihat dan dirasakan oleh Djohan Hanafiah, tetapi sulit baginya untuk menterjemahkan dan mendalami bentuk-bentuk tersebut. Pikirannya belum sampai ke situ, terlalu polos baginya untuk mentafsirkan masa revolusi tersebut.

Pada saat pertempuran besar di Palembang, ‘Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang’, ‘*slag om Palembang*’, antara tentara Belanda dan para pejuang Republik Indonesia, yang terdiri dari lasykar pemuda dan Tentara Republik Indonesia (TRI), terjadi dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947.

Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang merupakan perang tiga matra yang pertama kali kita alami, begitu pula pihak Belanda. Perang tersebut terjadi melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara. Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari aspek politik, ekonomi dan militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai Palembang karena ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera. Ditinjau dari aspek ekonomi berarti jika Kota Palembang dikuasai sepenuhnya maka berarti juga dapat menguasai tempat penyulingan minyak di Plaju serta Sei Gerong. Selain itu, dapat pula memanfaatkan Palembang sebagai pusat perdagangan karet dan hasil bumi lainnya untuk tujuan ekspor. Sedangkan jika ditinjau dari segi militer, sebenarnya Pasukan TRI dan pejuang yang

dikonsentrasikan di Kota Palembang merupakan pasukan yang relatif mempunyai persenjataan yang terkuat, jika dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang berada di luar kota. Oleh karena itu, jika Belanda berhasil menguasai Kota Palembang secara total, maka akan mempermudah gerakan operasi militer mereka ke daerah-daerah pedalaman.<sup>28</sup>

Lokasi pertempuran secara umum terbagi tiga yaitu:<sup>29</sup>

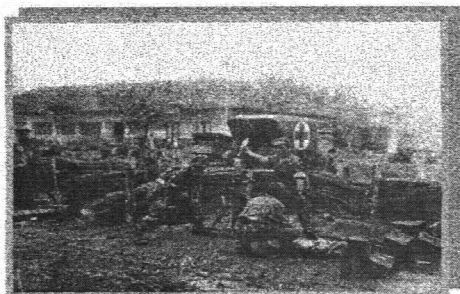
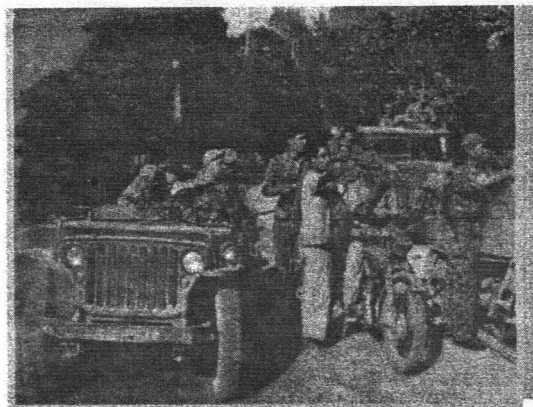
1. Front Seberang Ilir Timur, meliputi kawasan mulai dari Tengkuruk sampai RS. Charitas – Lorong Pagar Alam – Jalan Talang Betutu – 16 Ilir – Kepandean – Sungai Jeruju – Boom Baru – Kenten;
2. Front Seberang Ilir Barat meliputi kawasan mulai dari 36 Ilir yaitu meliputi Tangga Buntung – Talang – Bukit Besar – Talang Semut – Talang Kerangga – Emma Laan – Sungai Tawar – Sekanak – Benteng;
3. Front Seberang Ulu meliputi kawasan mulai dari 1 Ulu Kertapati sampai Bagus Kuning, selanjutnya meliputi kawasan Plaju – Simpang Kayu Agung – Sungai Gerong.

*Hot spot* pertempuran di sekitar Masjid Agung dan Kuto Besak sangat dekat dengan rumah tinggal keluarga Djohan Hanafiah, yaitu di laut Kebon Duku. Djohan Hanafiah menyaksikan dan bahkan ikut repot memberikan bantuan makanan nasi kepada para pejuang ini. Hal ini terjadi karena sewaktu pasukan mengundurkan diri dari *front* Masjid Agung dan Kuto Besak, mereka beristirahat di kolong rumah laut. Mereka berkumpul di sana karena paman Djohan Hanafiah Mamat (R.M. Arsyad) membawa mereka ke situ. Mang Mamat termasuk salah seorang TRI pada waktu itu. Djohan mengagumi senjata-senjata mereka. Ada senjata sederhana, seperti senapan kecepek, namun ada juga senjata modern hasil selundupan dari Singapura ditambah senjata bekas Jepang.

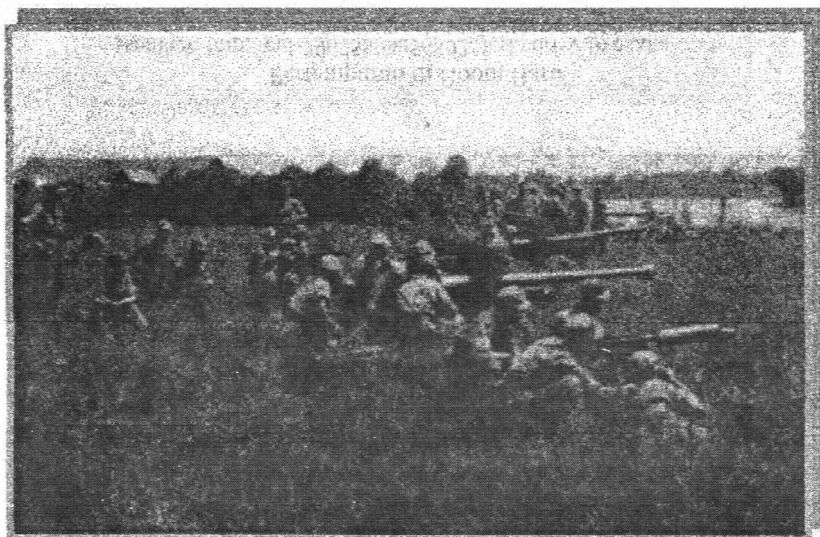
---

<sup>28</sup> Sri Purwati. “Upaya Menghadapi Serangan Belanda Pada Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang”. Diunduh tanggal 25 Desember 2009 dari: <http://dodinp.multiply.com/journal/item/177/>

<sup>29</sup> *ibid*



**Suasana Kota Palembang pada Masa slag om Palembang**  
 (sumber: <http://cid-7967580ba5680258.skydrive.live.com/.....>)



**Pertempuran di Boom Baru**  
 (sumber: <http://cid-7967580ba5680258.skydrive.live.com/.....>)

Setelah hari kelima pertempuran tersebut, diadakan *cease fire*, dimana pasukan Republik diharuskan menarik diri dari kota Palembang dengan radius 20 kilometer. Penarikan mundur ini memberikan kesempatan baru bagi pasukan Republik untuk konsolidasi di luar kota Palembang. Mundurnya pasukan ini tidak mengharuskan pemerintahan sipil untuk meninggalkan Palembang. Namun dengan sendirinya kekuatan sipil menjadi tidak berdaya, meskipun kepolisian dan Angkatan Laut RI masih tetap berada di Palembang.

Pelancaran Aksi Militer I pada 21 Juli 1947, oleh tentara Belanda, maka pemerintah sipil RI di Palembang tidak berfungsi lagi. Untuk itu pemerintahan sipil terpaksa hijrah ke daerah pedalaman, yaitu di Curup. Kedudukan pemerintahan RI di Curup ini diserbu Belanda dan berhasil diduduki pada 7 Januari 1949. Perjuangan dilanjutkan dengan bergeriliya.

Keberangkatan R.M. Ali Amin ke daerah pedalaman pada bulan November 1947, bersamaan dengan Gubernur Muda Mohamad Isa. Sejak saat itu Djohan Hanafiah bersama adik-adiknya dan ibunya ditinggalkan di Palembang. Keluarga ini dipecah dua, yaitu Djohan Hanafiah dengan 2 orang adik-adiknya tinggal di rumah kakek Kebon Duku, sedangkan ibunya dengan 3 orang adiknya tinggal di rumah kakek Duku.

Perjuangan bangsa Indonesia terus meningkat setelah Belanda melancarkan Aksi Militer ke II pada 19 Desember 1948. Pemerintah Sumatera Selatan menjadikan dirinya menjadi Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS)<sup>30</sup>, mengangkat dr. A. K. Gani sebagai Gubernur Militer. Sebagai Kepala Stafnya adalah Letkol dr. Ibnu Sutowo. Sedangkan R.M. Ali Amin sebagai Sekretaris Sipil DMISS dengan pangkat Patih.

Pada tanggal 30 Agustus 1948 telah terbentuk Negara Sumatera Selatan (NSS)<sup>31</sup> di Palembang, yaitu suatu bentuk Negara boneka buatan

---

<sup>30</sup> Pada tanggal 23 Desember 1948, Daerah Sumatera Selatan dijadikan satu Daerah Militer di bawah pimpinan A.K. Gani sebagai Gubernur Militer yang juga berkedudukan di Kota Curup. Akibat agresi Militer Belanda tersebut, Gubernur M. Isa, Gubernur Militer A.K. Gani dan Residen M. Hazairin menyingkir ke Kota Muara Aman dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dipindahkan ke Kota Muara Aman. Sumber Herawansyah, "Sejarah Propinsi Bengkulu dari Kemerdekaan Indonesia Hingga Terbentuk menjadi Propinsi Bengkulu" ([http://blog.uad.ac.id/anto\\_eko/2009/07/](http://blog.uad.ac.id/anto_eko/2009/07/)); baca juga Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, 1993. *Kenang-Kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu*. Palembang: Sriwijaya Media Utama.

<sup>31</sup> Negara Sumatera Selatan didirikan pada 30 agustus 1948. Wilayahnya meliputi Palembang dan sekitarnya yang dikepalai oleh Abdul Malik sebagai walinegara. Tujuan pembentukan negara boneka ini adalah untuk mengepung

Belanda. Belanda ingin terus memecah wilayah Republik dengan mendirikan NSS. Beberapa tokoh di Sumatera Selatan dapat dipengaruhi dan menjadi alat dalam NSS. Djohan Hanafiah menjadi bingung ketika kedua orang pamannya, yaitu para suami dari bibinya menjadi pegawai NSS. Kebingungan itu membuat Djohan Hanafiah menjadi marah, dan bertanya dalam hati mengapa mereka tidak menghormati ayahnya R.M. Ali Amin yang berjuang di pedalaman. Kemarahan ini menimbulkan pembangkangan Djohan Hanafiah. Kadangkala Djohan Hanafiah yang masih remaja berulah dengan membuat perkelahian antar sesama anak-anak di kampungnya. Bibi Bedah, adik ayahnya sering membela Djohan Hanafiah jika terjadi perkelahian. Pembelaan ini membuat Djohan Hanafiah tidak takut dengan anak-anak di kampung tersebut.

Djohan Hanafiah dan teman-temannya senang sekali bermain perang-perangan. Kolong rumah dijadikan mereka benteng pertahanan. Mereka saling menyerbu benteng-benteng tersebut. Senjata mereka buat dari bambu atau kayu, dibentuk seperti senapan atau meriam. Untuk penyerbuan mempergunakan *betetan* (katapel), dengan peluru tanah liat. Ada semacam *gentleman agreement* bahwa mereka tidak boleh mempergunakan batu sebagai peluru. Mereka selalu menganggap diri mereka adalah pejuang-pejuang Republik, sedangkan 'musuh' adalah fihak Belanda. Tokoh pejuang mereka sebut 'anak mudo' dan musuh mereka adalah 'bandit'. Adegan ini adalah merupakan tokoh-tokoh dalam film Hollywood, yaitu tokoh antagonis adalah bandit dan tokoh protagonis adalah anak muda. Ada tokoh ketika ketiga yang dikenal sebagai 'wak yeng', yaitu semacam joker atau penghibur, yang biasanya adalah teman dari anak muda.

Jika sudah bosan bermain perang-perangan maka mereka berenang di sungai, bermain perahu masuk ke dalam solok untuk berburu ikan atau burung. Kadangkala katapel dipergunakan untuk menembak mangga atau rambutan di kebun-kebun penduduk.

---

kedudukan pemerintahan Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Setiap negara bagian atau negara boneka yang diciptakan Belanda tersebut dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Belanda. Melalui negara-negara boneka yang dibentuknya, Belanda membentuk Pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Federal di Bandung pada tanggal 27 Mei 1948 lahir Badan Permusyawaratan Federal (BFO). Di dalam BFO terhimpun negara-negara boneka ciptaan Belanda. Disamping Negara Sumatera Selatan, negara boneka lainnya adalah Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan Negara Pasundan (<http://hadi-historyeducation.blogspot.com/2009/04/perjuangan-mewujudkan-kembali-negara.html>)



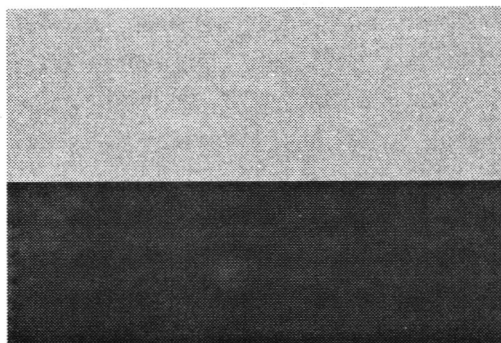
Djohan Hanafiah merasa bahwa hidupnya tergantung pada para pamannya, maka Djohan Hanafiah ingin menjadi penjual pempek atau es lilin di kampung. Akan tetapi niatnya ditolak oleh para bibi mereka, karena mereka merasa adalah kewajiban mereka untuk mengasuh keponakan mereka. Rasa jemu bermain-main di kampung Kebon Duku, membuat Djohan Hanafiah menemui adik-adik dan ibunya di kampung Duku. Meskipun jaraknya jauh, Djohan Hanafiah berjalan sendiri ke sana, kadangkala dia bermalam di situ. Ia di rumah kakek Duku ini berkumpul dengan paman dan bibinya serta anak-anak mereka. Salah seorang paman Djohan Hanafiah dari pihak ibu juga ikut bergeriliya. Djohan Hanafiah sangat senang di sana, apalagi pada musim buah. Rambutan dan mangga serta buah-buahan lain banyak sekali pohonnya. Akhirnya Djohan Hanafiah pindah ke rumah kakek Duku, karena dia harus bersekolah di Taman Siswa. Jarak tempuh dari rumah cukup jauh, namun dengan semangat Djohan Hanafiah berjalan kaki, menempuh jalan pintas antara kampung atau daerah semak belukar. Pada saat ini daerah semak belukar telah menjadi daerah perumahan dan pertokoan, yaitu daerah Lapangan Hatta dan Jalan Veteran.

Kadang-kadang Djohan Hanafiah ikut jemputan *wak Ma* (R.Oemar, kakak tertua ibunda Djohan Hanafiah), menaiki motor Harley Davidson. *Wak Ma* hampir setiap hari mengantar dan menjemput keponakannya yang lain, yaitu Asiah, sepupu Djohan Hanafiah. Asiah bersekolah di SD jalan Segaran. Umumnya satu tahun lebih tua dari Djohan. *Wak Ma* ini orangnya gagah, dengan cerutu besar dari tembakau Ranau yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Dia pernah menjadi menteri polisi.

Guru-guru di sekolah Taman Siswa adalah para pejuang dan nasionalis. Djohan Hanafiah banyak belajar di sini tentang filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara *Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Nasionalisme dan demokrasi dasarnya didapatkan Djohan Hanafiah dari lingkungan Taman Siswa. Ia juga sering mendengarkan pidato Bung Karno secara sembunyi-sembunyi. Djohan Hanafiah sangat mengagumi tokoh pemimpin bangsa ini.

Semangat kemerdekaan terus meningkat, rakyat Sumatera Selatan menuntut dibubarkannya Negara Sumatera Selatan. Dalam aksi tuntutan pembubaran NSS, Front Pemuda maju ke depan untuk menyampaikan resolusi pembubaran. Aksi ini didukung oleh seluruh rakyat Palembang, termasuk Djohan Hanafiah yang berada di depan bahkan berada di teras Istana Wali Negara (sekarang rumah dinas Walikota Palembang) Ketika demo pembubaran NSS. Djohan Hanafiah

merasakan pecahan kaca pintu istana, pada saat massa mendesak masuk ke Istana Wali Negara, namun tidak terjadi tindakan anarkhis.



Bendera Negara Sumatra Selatan

Tuntutan pembubaran ini berhasil, berupa pengabungan NSS ke dalam Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, dilakukan pada tanggal 18 Maret 1950. Besoknya tanggal 19 Maret peristiwa ini dirayakan dengan rapat umum di Lapangan Hatta. Rakyat dari seluruh pelosok Sumatera Selatan membanjiri Lapangan Hatta. dr. A.K. Gani sebagai mantan Gubernur DMISS memberikan pidato sambutan, dengan gayanya yang penuh semangat. Kemudian pidato Dr. M. Isa Gubernur Sumatera Selatan dan M. Uteh Riza Yahya sebagai Ketua Front Pemuda.

Kegembiraan Djohan Hanafiah dan keluarganya bukan saja karena NSS telah bubar, dan Republik Indonesia kembali ke Palembang, tetapi kegembiraan luar biasa karena ayahnya R.M. Ali Amin telah kembali ke tengah-tengah mereka. R.M. Ali Amin akhirnya mendapatkan rumah dinas di Jalan Raden Fatah no.1, dan memboyong keluarganya ke rumah tersebut. Dalam konsolidasi pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, R.M. Ali Amin diminta oleh Gubernur dr. M. Isa menjadi Residen Bangka dan Belitung. Akan tetapi kali ini R.M. Ali Amin meminta pertimbangan Gubernur, kiranya dapat diberikan kesempatan untuk tidak berpisah lagi dengan keluarga. R.M. Ali Amin meminta kesempatan untuk tugas belajar di Jakarta, guna meneruskan studinya yang terputus selama ini. Gubernur menyetujui permintaan R.M. Ali Amin.

082388208237

## D. R.M. ALI AMIN DAN STUDI

### **L. H**ijrah ke Jakarta.

Pertengahan tahun 1950, R.M. Ali Amin dan keluarganya telah berada di Jakarta, dan dia ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. R.M. Ali Amin telah terdaftar di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Ia dan keluarganya tinggal di Jalan Gunung Sahari no.86. Akan tetapi sebelumnya hampir satu tahun berada di Hotel de Leiyen jalan Sutomo. Djohan Hanafiah kembali melanjutkan sekolah di Taman Siswa jalan Garuda, suatu jarak yang tidak terlalu jauh dari hotel maupun dari rumah Gunung Sahari.

Djohan Hanafiah lebih berkembang lagi wawasannya di Jakarta. Kesempatannya untuk membaca terbuka lebar, karena Balai Pustaka berada di Jalan Wahidin tidak jauh di seberang rumahnya. Selain percetakan dan penerbitan, Balai Pustaka juga memiliki toko buku yang berada dalam satu komplek. Djohan Hanafiah jika tidak membeli buku, dia cuma numpang membaca. Selain itu juga Djohan Hanafiah adalah anggota perpustakaan USIS (United States Information Service), British Library atau menyewa buku di kios buku Bungur Besar. Bacaan yang menarik dibaca waktu itu adalah tulisan Aman 'Si Doel Anak Jakarta', Suman Hs, Cerita Petualangan dari Sasterawan Indonesia, dan juga buku terjemahan seperti tulisan Karl May. Begitu banyak buku tentang petualangan yang dibaca, sehingga Djohan Hanafiah menjadi terobsesi untuk berpetualang ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Wilayah Jakarta dengan daerah pinggirannya, Pasar Minggu, Tangerang bahkan kota Bogor dijalaninya dengan naik sepeda bersama teman sekampungnya.

Tamat SD di Taman Siswa Djohan Hanafiah melanjutkan ke SMP PAMI di Jalan Sutomo Jakarta. Djohan Hanafiah mempunyai teman, Syahril anak pemilik warung nasi Padang di Pasar Senen. Para seniman Senen selalu berkumpul dan berdiskusi di warung ini. Beberapa orang dikenali Djohan Hanafiah seperti Sukarno M. Noor, dan tokoh-tokoh seniman Indonesia lainnya. Djohan Hanafiah kelihatannya cukup akrab dengan Syahril. Mereka berdua naik kapal laut KPM ke Palembang. Pelayaran inilah petualangan pertama dengan kapal laut. Bukan main senang dan bangganya. Hampir setiap liburan Djohan Hanafiah naik kapal laut ke Palembang.

Selain senang membaca, juga Djohan Hanafiah senang menonton bioskop, terutama layar tancap yang berada di *Park* di dekat Stasiun Senen. Djohan Hanafiah menonton disini bisa menyelipap masuk sewaktu orang-orang berjubel masuk. Kalau tertangkap tangan oleh portir, tinggal bilang bahwa dia adalah anak buah Bang Pei. Portir

akan melepaskan Djohan Hanafiah dan kawan-kawan, karena Bang Pei adalah guru silat dan merangkap tukang pukul serta jagoan Kemayoran. Memang Djohan Hanafiah pernah ikut latihan silat, cuma tiga kali datang, sekedar latihan kembang silat.

Ada sebuah bioskop di ujung Jalan Gunung Sahari berbatas dengan Jalan Senen, namanya Rialto. Rialto adalah bioskop rakyat, maka jika nonton disini penonton sudah siap untuk digigit oleh kutu busuk sepanjang pertunjukan. Di samping bioskop ini ada gedung pertunjukan wayang orang. Akan tetapi Djohan Hanafiah kurang berminat menonton wayang orang. Ia lebih suka ke Gedung Kesenian dekat Kantor Pos. Djohan Hanafiah kagum melihat arsitek gedung kesenian, yang dulunya disebut *schouwburg*, apalagi interior dan panggunanya. Pada waktu perpisahan sekolah, diadakan pertunjukan kesenian di gedung tersebut. Bukan main bangganya Djohan Hanafiah sewaktu ditunjuk memegang peran yang tidak begitu penting dalam sandiwara sekolah tersebut.

## 2. Djohan Hanafiah Kembali ke Palembang

Pada akhir tahun 1954, ketika ayahnya R.M. Ali Amin akan mempersiapkan ujian sarjananya, telah datang utusan para Kepala Kampung dari Palembang. Mereka membawa resolusi untuk mengangkat *rama* menjadi Walikota Palembang. *Rama* pertama kali menolak permintaan ini, karena dia sedang persiapan ujian akhirnya. Penolakan ini membuat utusan lebih keras lagi permintaannya, bahwa mereka tidak akan pulang ke Palembang jika *rama* tidak kembali ke Palembang. Menghadapi polemik ini *rama* minta waktu untuk menemui para atasan dan guru-gurunya.

Guru besamya Prof. Mr. Soediman Kartohadiprojo, menolak permintaan *rama* untuk menunda ujian, jika dia menjadi Walikota. Jawaban ini dipadankan dengan jawaban guru besar lainnya, yaitu Prof. DR. Mr. Hazairin, malahan beliau memerintahkan untuk memenuhi keinginan orang banyak tersebut. *Rama* tentu berkonsultasi dengan Gubernur Dr. M. Isa yang menugaskannya untuk belajar tersebut. Ternyata pak gubernur tidak dapat menerima penundaan ujian karena alasan untuk menjadi Walikota, bahkan beliau meminta Menteri Dalam Negeri agar pengangkatan *rama* sebagai Walikota dibatalkan. Akan tetapi Menteri Dalam Negeri tidak dapat menerima permintaan gubernur tersebut, karena kedudukan Walikota ini lebih kepada kepentingan orang banyak. Akhimya *rama* dilantik menjadi Walikota Palembang awal tahun 1955. Ini berarti Djohan dan keluarga harus kembali ke Palembang.

R.M. Ali Am dilantik menjadi Walikota Palembang berdasarkan UU No. 22 tahun 1948, UU No. 1 tahun 1957, UU Darurat No. 5 tahun 1956, dan Penpres No. 6 tahun 1956. Dengan sekretaris daerah R. Nawawi. M. Ali Amin merupakan Walikota Palembang terpilih kedua untuk periode 1955 – 1957 dan periode 1959 – 1961.<sup>32</sup>

Dengan kembali ke Palembang, Djohan terpaksa mengulang kembali di kelas 3 SMPK. Bersama teman-teman baru Djohan mulai aktif membuat majalah sekolah dan latihan teater. Bahkan Djohan sempat menjadi sutradara.

Dalam satu pertunjukan untuk perpisahan sekolah Djohan bukan saja menjadi sutradara juga jadi pemain utamanya. Dalam adegan itu ada permainan catur antara Djohan dengan Subandi. Adegan mengharuskan Djohan membalikkan papan catur dan menempeleng Subandi. Latihan telah dilakukan dengan baik sebelumnya, akan tetapi pada saat malam pertunjukkan itu Djohan menjadi gugup, karena di barisan bangku depan ada sepasang bapak dan ibu, yang menurut Djohan Hanafiah memelototinya terus menerus. Suami isteri itu adalah orang tua dari gadis yang idam-idamkan Djohan Hanafiah. Celaknya orang tua gadis itu kurang menyukai Djohan Hanafiah, karena perbedaan agama dan etnis. Akibat gugup, maka Subandi jadi korban, karena dalam adegan penempelengan itu, Djohan Hanafiah memukulnya dengan kesal dan keras, sehingga keluar jeritan yang sesungguhnya akibat kesakitan. Sehabis pementasan Subandi masih menggosok pipinya yang merah dan sakit sambil menggerutu. Djohan Hanafiah minta maaf dan Subandi menerimanya.

Djohan Hanafiah kembali lagi ke Taman Siswa sewaktu dia lulus ujian SMP. Tingkatan SMA-nya disebut Taman Madya. Jurusan yang ditempuh adalah jurusan C, ilmu-ilmu sosial. Djohan Hanafiah kembali menerbitkan majalah sekolah yang dicetak dengan stencil di Taman Madya. Selama di SMA Djohan Hanafiah mulai berkenalan dengan politik. Teman dekatnya Zainal Abidin mengajak bersama kedalam Pemuda Demokrat, *onderbouw* dari Partai Nasional Indonesia. Partai terbesar waktu itu dengan ideologi sosio-nasionalisme. Djohan Hanafiah banyak membaca buku Sukarno, buku tentang sosialisme, komunisme, nasionalisme, Islam, revolusi, dan sejarah. Begitu asyik dan larutnya dengan bacaan itu, akibatnya Djohan Hanafiah banyak tertinggal pelajaran di sekolahnya. Djohan Hanafiah selalu mengajak teman-temannya untuk berdiskusi di sekolah, tapi tidak banyak lawan

---

<sup>32</sup> Djohan Hanafiah (ed). 1998. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Hal. 318.

bicara, sehingga ia dianggap sebagai pengganggu. H.M.Arub SH, mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, mantan Ketua DPRD dan Ketua Golkar Sumatera Selatan menulis dalam biografinya sebagai berikut: "...Sebaliknya dengan Djohan yang berasal dari Palembang. Dikenal sebagai anak kota. Di sekolah lebih banyak bermain-main ketimbang menekuni pelajaran. Suka mengganggu rekan-rekan yang lainnya yang serius belajar."

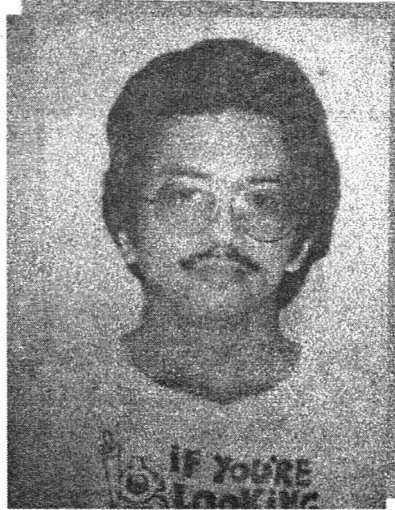
Namun meskipun tidak dekat dengan Djohan Hanafiah, Arub tetap menghormati sebagai kawan, terbukti sewaktu menjadi Bupati Bangka dan juga pada waktu menjabat Walikota Pangkalpinang, Arub menulis:

"Manakala Djohan yang sibuk mengurus KADIN berkunjung ke Bangka, maka Arub menyambutnya sebagai seorang teman. Teman yang sangat dihormati. Djohan disambut dengan gembira. Dilayani semua kebutuhannya. Arub berlaku sebagai tuan rumah yang paling baik."

Sebelum R.M. Ali Amin kembali ke Palembang, pada tahun 1952 pernah terjadi peristiwa yang tidak diketahui oleh sebagian orang Palembang ketika itu. Ketika itu terjadi ketegangan di kalangan militer di wilayah Tentara Teritorium (TT) II/Sriwijaya. Pada akhir oktober 1952 terjadi pengambil-alihan jabatan Panglima TT II/Sriwijaya oleh Letnan Kolonel Kretarto (komandan brigade X-TT II) dari Letnan Kolonel R.A. Kosasih. Peristiwa ini merupakan dampak dari konflik intern Angkatan Darat yang berpuncak pada demonstrasi besar-besaran para perwira militer di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952 dan pengambil-alihan jabatan-jabatan strategis di militer. Peristiwa di markas TT-II/Sriwijaya ini telah menimbulkan ketegangan di kalangan Angkatan Darat dan pemerintahan daerah Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa ketika itu sedang bertugas di Jakarta sehingga terjadi kekosongan kekuasaan sipil. Akhirnya untuk memperlancar pengoperan jabatan panglima termasuk mengambil alih RRI Palembang, Kretarto melakukan perundingan dengan pihak kepolisian. Pembantu Komisaris Besar Kaharoeddin sebagai wakil kepala Kepolisian Sumatra Selatan menjadi pucuk pimpinan menggantikan kepala kepolisian yang sedang cuti sakit. Kaharoeddin meminta agar RRI Palembang tidak diambilalih oleh angkatan darat dan menegaskan bahwa keamanan rakyat tetap berada dalam kendali kepolisian sehingga persoalan yang terjadi di angkatan darat tidak diketahui oleh rakyat yang bisa membuat keresahan. Persoalan ini

selesai setelah menteri pertahanan dan KSAD Kolonel Bambang Soegeng turun tangan menyelesaikannya.<sup>33</sup>



Djohan Hanafiah tahun 1960-an  
(sumber: koleksi Djohan Hanafiah)

### 3. Perjalanan Djohan Hanafiah Pertama ke Luar Negeri

R.M. Ali Amin pada tahun 1958 memperoleh undangan ke Amerika Serikat, dalam rangka pertemuan gerakan *Moral Rearmement* di Chicago. Pertemuan ini bersifat internasional karena dihadiri juga dari Jepang, Belanda, Australia dan lain-lain. Ia banyak bercerita tentang pertemuan ini, dan dia menganjurkan Djohan Hanafiah untuk melihat dan melakukan perjalanan serta belajar keluar negeri.

Pada tahun 1960, sebagai Walikota Palembang R.M. Ali Amin mendapat sponsor dari Pangdam IV/Sriwijaya, Kolonel Harun Sohar untuk berkunjung ke luar negeri, yakni Cina. Kunjungan khusus ini untuk meninjau cara menanggulangi kebersihan kota di Cina. Bagi R.M. Ali Amin kunjungan ini merupakan kesempatan ke dua tempat dimana yang satu adalah markas kapitalisme dan yang satu adalah gudang komunisme. Pada saat itu kedua kubu berhadapan keras dalam perang dingin. Djohan Hanafiah mempunyai kesempatan untuk meninjau luar negeri, setelahizinkan untuk mendampingi ayahnya R.M. Ali Amin.

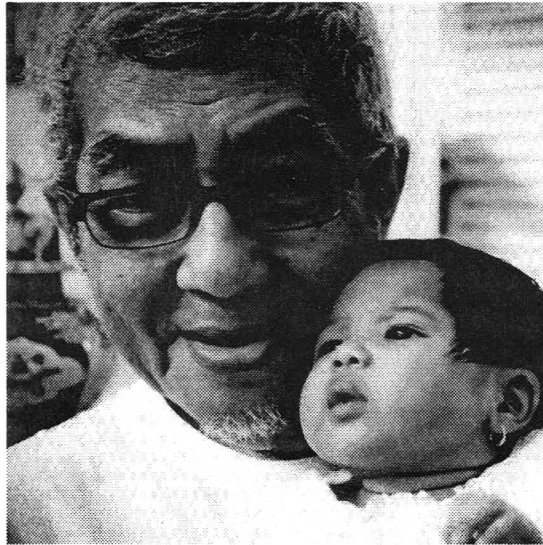
Cina pada waktu itu sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya dari negara-negara kapitalis, terutama Amerika dan Inggris. Mao Tze Dong membuat program yang fantastis dan ambisius

---

<sup>33</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi. 1998.*op.cit.* Hal. 205 – 205.

yaitu yang disebut “Lompatan Besar Kedepan”. Targetnya adalah bukan saja menyusul ketertinggalan tapi mengatasi Negara superpower dalam waktu 10 sampai 15 tahun atau lebih cepat lagi yaitu 5 tahun. Untuk ini terlalu banyak korban bagi rakyatnya. Jutaan rakyat mati karena diperlakukan dalam kerja paksa.

Selama kunjungan itu Djohan Hanafiah merasakan bagaimana beratnya kehidupan rakyat dengan disiplin komunis yang keras dan tegas. Semua rakyat berpakaian sama, yaitu katun berwarna biru dengan alas kaki dari kayu (terompah). Sehingga hiruk pikuk di kota pada waktu senja adalah bunyi terompah kayu dari para pejalan kaki. Kita tidak melihat mobil pribadi, kendaraan rakyat hanyalah sepeda. Berbeda sekali dengan Hongkong yang pada waktu itu masih dibawah Inggris ataupun juga Singapura. Perbandingannya seperti siang dan malam.



Djohan Hanafiah dan cucu Deandra Safina Parameswar  
(sumber: dokumen keluarga)

Pemandangan ini hilang sama sekali pada waktu kunjungan Djohan Hanafiah tahun 1999 ke Cina. Ia merasakan tidak berada di Cina, karena semuanya berubah total. Penduduk telah berpakaian necis dengan jas dan dasi dan bersepatu kulit. Taksi mewah berkeliaran, demikian juga hotel internasional gedungnya menjulang tinggi. Suasana sudah berada di alam Negara kapitalis. Meskipun masih menyebut dirinya komunis, tetapi wataknya ekonomi pasar. Menurut penulis Ted C.Fishman Cina adalah Negara *the world's most rapidly changing large economy*.



## E. Djohan Hanafiah dan Keluarga

### 1. Berumah Tangga

Masa remaja dengan kehidupan yang asyik dengan gerakan kemahasiswaan dan idealisme politik, membuat Djohan hidupnya tidak teratur. Kuliahnya mulai terbengkalai. Ayahnya telah berkali-kali memperingatkannya supaya menyelesaikan dulu kuliahnya barulah mau jadi politikus atau apa saja. Peringatan ini nampaknya kurang dihiraukan, bahkan Djohan Hanafiah jarang pulang ke rumah, karena aktivitasnya keluar kota.

Ayah dan ibunya akhirnya mengambil jalan untuk '*memunakkan*' (*tunak* = mantap, tekun), yaitu meminta anaknya Djohan Hanafiah supaya lebih cepat berumah tangga, sehingga punya tanggung jawab kepada diri dan keluarga. Atas anjuran ini Djohan Hanafiah tidak dapat menolak, karena menurut Djohan Hanafiah pertimbangan ini masuk akal juga. Apalagi Djohan Hanafiah sudah mempunyai gadis idaman, seorang gadis Palembang bernama Napisah, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrri.

Upacara perkawinan Djohan Hanafiah dilakukan dengan adat Palembang. Hanya berbeda dengan perkawinan ayah dan ibunya yaitu '*rasan tuo*', dimana semua diatur oleh kedua keluarga orang tua, karena mereka tidak kenal satu sama lain. Perkawinan Djohan Hanafiah adalah '*rasan mudo*', karena mereka sudah saling kenal, saling mencintai dan pilihan mereka sendiri. Akad nikah dilakukan di rumah pengantin pria, sedangkan *munggah* di rumah pengantin wanita. Djohan Hanafiah tidak masuk ke rumah isterinya, tapi kembali ke rumah bapaknya.

Hasil pernikahan tersebut telah lahir 3 orang putri dan satu putra yaitu Revi Vereyanthi, Resi Stantiawati, Reli Everyanti, dan Raden Mohamad Iksan. Hingga saat ini Djohan Hanafiah telah memiliki 4 cucu (*cucung* – bahasa Palembang) laki-laki yaitu Debby, Mimmy, Rozali, Isnaini dan seorang cucu perempuan Deandra Safina Parameswara. Djohan Hanafiah tidak terlalu mementingkan pemberian gelar bangsawan bagi anak-anaknya seperti penambahan raden. Hal ini merupakan hasil didikan orang tua Djohan Hanafiah (R.M. Ali Amin) yang tidak memberikan gelar raden kepada anak-anaknya seperti Djohan Hanafiah.

Bagi anak-anaknya, Djohan Hanafiah merupakan pahlawan. Perhatian yang begitu besar yang diberikan Djohan Hanafiah terhadap keluarga disamping kesibukan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan anak bungsu Djohan Hanafiah (Mohammad Iksan) pernah menganggap apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah pekerjaan sia-sia dan tidak menghasilkan uang, namun setelah dinasehati oleh Djohan Hanafiah

akhirnya Iksan bisa memahami dan bahkan bangga atas usaha keras yang dilakukan ayahnya dalam menggali sejarah dan budaya Palembang.

Bapak adalah sejatinya seorang ayah...Ayah yg selalu berusaha memberikan semua yang terbaik dan tiada henti melindungi keluarganya...Beliau bukan seorang pengusaha ataupun birokrat yang sukses di kariernya... melainkan seseorang yang hidup dan besar dari keberhasilannya dalam dunia organisasi...

Dari kegemarannya membaca buku dan terutama kecintaannya pada tanah kelahirannya...Bermodalkan biaya sendiri beliau terus menggali sejarah dan budaya sampai ke Belanda..Beberapa buku sejarah telah dihasilkan beliau untuk kepentingan daerah dan juga bangsa ini....Pengakuan tertinggi dari Negara ini pun diperolehnya dengan penghargaan sebagai seorang budayawan...

Seringkali kami menganggap apa yang dikerjakan beliau bukanlah sesuatu yang mendatangkan materi tetapi malah sebaliknya... Akan tetapi beliau selalu mengajarkan untuk hidup tanpa rasa pamrih... “apabila kamu membiarkan orang lain menilai dirimu dengan materi.. sama saja kamu sudah menjual martabat dan harga dirimu sendiri” Bagi kami bapak adalah seorang pahlawan dengan semua kelebihan maupun kekurangannya. Harta dan kekayaan bukanlah warisan yg akan beliau berikan kepada anak-anaknya... Namun hasil dari karyanya sebagai seorang sejarawan dan budayawan selama ini serta nama besar yang dimilikinya... Merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan kebanggaan yang sangat besar bagi kami semua...<sup>34</sup>

## **F. MENJADI AKTIVIS**

### **1. Mahasiswa Abadi**

Pada tahun 1959, Djohan berhasil lulus ujian akhir SMA dan dia ingin meneruskan kuliahnya di Jakarta. Dia diterima Perguruan Tinggi Publistik, namun dia pindah ke Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ekonomi di Jakarta. Ikut perpeloncoan Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA), yang pada saat itu terkenal ganas. Djohan Hanafiah hanya

---

<sup>34</sup> Muhammad Ikhsan pada jejaring sosial beliau di <http://www.facebook.com/idjohan> 7 januari 2010.

sempat kuliah disini kurang lebih 3 bulan, dan dia diminta orang tuanya kembali ke Palembang, karena kemampuan keluarga yang terbatas, sedangkan adik-adiknya juga memerlukan pendidikan.

Pada saat itu di Palembang baru mempunyai satu perguruan tinggi swasta, yaitu Syakiakirti, yang juga merupakan peleburan dari Akademi Ekonomi dan Hukum. Djohan Hanafiah kembali mendaftar di Fakultas Ekonomi juga Fakultas Hukum. Kuliahnya masih menumpang di mana-mana, termasuk di aula RSUP Palembang. Dosennya sebagian masih datang dari Jakarta. Kuliahnya diadakan sore sampai malam hari, dan yang kuliah kebanyakan pegawai-pegawai negeri.

Pada tahun 1960, berdiri perguruan tinggi negeri yang pertama kali di Palembang, yaitu Universitas Sriwijaya. Seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai Syakhiakirti melebur ke dalam Universitas Sriwijaya. Peresmian pendiriannya dilakukan oleh Presiden Sukarno. Djohan Hanafia ikut aktif dalam peresmian Universitas Sriwijaya tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ide untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan telah ada sejak awal tahun 1950-an, yang dicetuskan dalam suatu kesempatan resepsi perayaan hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1952. Diprakarsai oleh beberapa orang pemuka masyarakat, menjelma menjadi kesepakatan untuk membentuk "Panitia Fakultas Sumatera Selatan". Menjelang akhir Agustus 1952, dengan berbagai pertimbangan, ditetapkan bahwa yang pertama akan didirikan adalah fakultas ekonomi. Untuk itu dibentuklah "Panitia Fakultas Ekonomi Sumatera Selatan" yang dikelola oleh suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 1 April 1953 dengan nama "Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti". Pembukaan Fakultas Ekonomi secara resmi di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1953 dalam suatu acara yang dihadiri oleh Mr. Hadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Drg. M. Isa (Gubernur Sumatera Selatan), Bambang Utoyo (Panglima TT II Sriwijaya) dan Ali Gathmyr (Ketua DPRD Sumatera Selatan). Upaya melengkapi perguruan tinggi di Sumatera Selatan dilanjutkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti dengan membentuk Panitia Penyelenggaraan Fakultas Hukum. Pada tanggal 1 November 1957, bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV Fakultas Ekonomi, diresmikanlah fakultas tersebut dengan nama 'Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat'. Pengembangan kemudian dilanjutkan dengan bantuan Penguasa Militer Teritorial II Sriwijaya yang memberikan bantuan keuangan untuk mendirikan gedung permanen Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti di Bukit Besar (kini Kampus Unsri Bukit). Upacara peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1957. Upaya selanjutnya adalah penegerian perguruan tinggi yang sudah ada tersebut. Dengan perjuangan gigih tokoh masyarakat Sumatera Selatan ketika itu, antara lain Kolonel Harun Sohar (Panglima selaku Ketua Paperda TT II/ Sriwijaya) dan A. Bastari (Gubernur), hambatan yang masih ada untuk berdirinya universitas negeri di Palembang dapat diatasi. Delegasi yang dikirim ke Jakarta bulan Desember 1959 menemui Menteri PPK (Mr. Moh Yamin) berhasil memperoleh jaminan kesediaan pemerintah untuk mengambil alih perguruan tinggi Syakhyakirti menjadi suatu universitas negeri. Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lambaran Negara Tahun 1960 No. 135) akhirnya berdirilah

Sebagai perguruan tinggi negeri yang pertama masa itu di Palembang, biaya pendidikan masih cukup murah karena hanya sebatas membayar uang kuliah. Sebagai mahasiswa senior Djohan Hanafiah cepat memperoleh banyak teman dari mahasiswa baru. Apalagi pada tahun 1962, Djohan Hanafiah menjadi ketua perpeloncoan Universitas Sriwijaya, dengan mudah dia mendapatkan teman-teman, yang akhirnya menjadi anggota GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Djohan Hanafiah waktu itu adalah Ketua GMNI Palembang, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri dan juga pengurus Dewan Mahasiswa Unsri<sup>36</sup>. Kesempatan ini membuat karakter kepemimpinan Djohan cepat menonjol.



Perpeloncoan Mahasiswa Baru Unsri Tahun 1962  
(Taufiq Kiemas berkacamata)

(Sumber: Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008)

---

Universitas Sriwijaya yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 November 1960 dalam upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden Sukarno dengan disaksikan oleh Menteri PPK (Mr. Priyono) dan beberapa Duta Besar negara sahabat. Sebagai Presiden Universitas yang pertama diangkat Drg. M. Isa yang diangkat dengan Keputusan Presiden No. 696/M tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960. (sumber: <http://www.unsri.ac.id/?act=sejarah> \_ Universitas Sriwijaya - Indralaya, Sumatera Selatan.htm?act=sejarah&us=&x\_param=).

<sup>36</sup> Djohan Hanafiah menjadi wakil ketua senat Fakultas Ekonomi dan pengurus Dewan Mahasiswa Unsri. Himpunan Mahasiswa Islam merebut kepengurusan Dewan Mahasiswa pada tahun 1966 melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang mendeskriditkan GMNI dan dituduh macam-macam (wawancara dengan Djohan Hanafiah).

Pada masa ini organisasi mahasiswa yang sangat menonjol adalah GMNI. Organisasi mahasiswa ini menjadi pendukung utama PNI<sup>37</sup> (Partai Nasional Indonesia) yang pada tahun 1959 para tokoh dan alumni GMNI banyak mendapat jabatan dalam kepengurusan PNI Pusat. Dalam biografi Taufiq Kiemas<sup>38</sup> disebutkan: Gagasan-gagasan yang termaktub dalam pernyataan “beberapa tesis pedoman Garis perjuangan” yang dikeluarkan GMNI pada tahun 1959 sering menjadi tema pidato para pimpinan PNI.<sup>39</sup>

Ketika itu sentral pergerakan PNI adalah kebutuhan untuk kembali ke massa, menyatukan partai dan organisasi massa dalam Front Marhaenis yang kuat dan membangun PNI menjadi partai pelopor.



Taufiq Kiemas dan Para Senior GMNI

(Sumber: Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008)

Dalam biografi Taufiq Kiemas juga disebutkan bahwa pada awal tahun 1960-an, GMNI telah mendominasi dunia kemahasiswaan di kampus-kampus termasuk Universitas Sriwijaya. Taufiq Kiemas mengutip pernyataan Djohan Hanafiah<sup>40</sup> yang mengatakan bahwa

---

<sup>37</sup> PNI didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Baca Cindy Adams. 2007. *Op.cit.* Hal. 95

<sup>38</sup> Ketua MPR Republik Indonesia periode 2009 – 2014.

<sup>39</sup> Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *Jembatan Kebangsaan: Biografi Politik Taufiq Kiemas*. Jakarta: Rumah Kebangsaan dan Q Communication. Hal. 41

<sup>40</sup> Ketika itu Djohan Hanafiah adalah ketua GMNI Palembang periode 1960 – 1963. Selain Djohan Hanafiah, tokoh GMNI yang sangat menonjol ketika itu adalah Zainal Abidin.

hampir seluruh pimpinan dewan mahasiswa dan senat mahasiswa diduduki aktivis GMNI.

Organisasi GMNI ini pula yang mempertemukan Djohan Hanafiah dengan Taufiq Kiemas. Taufiq Kiemas menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 1962. Pertemanan antara Taufiq Kiemas dengan Djohan Hanafiah ditulis dalam biografi Taufiq Kiemas sebagai berikut.

Bagi setiap organisasi mahasiswa, masa-masa perploncon merupakan forum strategis untuk merekrut anggota baru. Ketika Taufiq masuk kuliah tahun 1962, kepanitiaan perploncon didominasi aktivis GMNI. Yang jadi ketua perploncon adalah Djohan Hanafiah. Sebelumnya, Djohan sudah mengenal Taufiq dan beberapa anggota geng Don Quixotte, melalui adiknya yang teman sepermainan Taufiq di SMA Negeri II Palembang. Nah, begitu tahu Taufiq ikut perploncon, Djohan dan para pengurus GMNI Palembang segera saja memutuskan merekrut Taufiq. Mereka tahu persis potensi yang dimiliki Taufiq akan bisa mendinamiskan GMNI Palembang.... Begitu masuk GMNI, Taufiq dan kawan-kawan langsung mendapat tugas penting: membantu pengumpulan dana untuk kebutuhan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang baru saja didirikan. Perintah itu langsung datang dari Rektor Universitas Sriwijaya, Mohammad Isa, yang juga merupakan salah seorang tokoh PNI. Taufiq pun langsung melakukan koordinasi dengan kawan-kawannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Tak lama kemudian, ia sudah mengumpulkan dana yang lumayan besar untuk ukuran saat itu serta kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Djohan Hanafiah. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan dana sebesar itu, Taufiq menjawab singkat, "Ah, Kak Djohan enggak perlu tahulah..."<sup>41</sup>

Taufiq Kiemas banyak belajar tentang politik dari buku-buku dan diskusi dengan para seniomya di GMNI terutama dengan Djohan Hanafiah dan Zainal Abidin.<sup>42</sup>

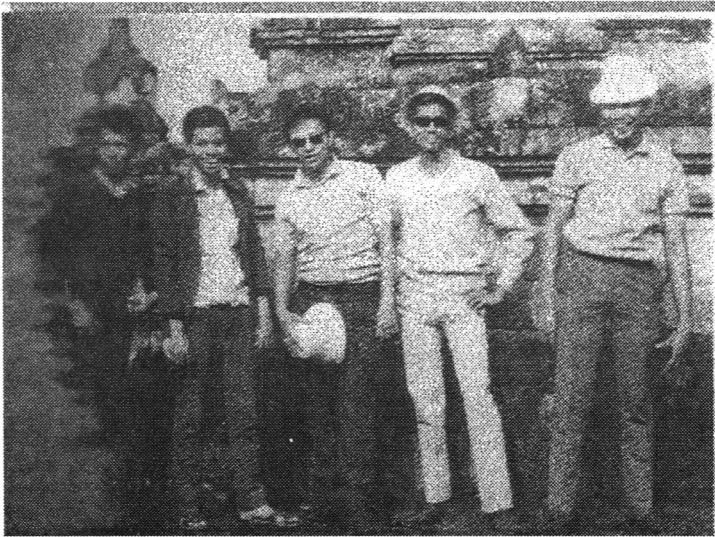
Bakat menulis Djohan Hanafiah dikembangkan dengan menerbitkan Koran bersama teman-teman dekatnya, Willem Panji Indra, Hazairin dan Yun Achmadi. Koran yang bersifat harian ini bernama Panji Revolusi. Djohan menjadi pimpinan redaksi, sekaligus merangkap wartawan, penjual, editor/korektor, dan pencari iklan. Satu kerja keras,

---

<sup>41</sup> Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *op.cit.* Hal. 42 – 45..

<sup>42</sup> *Ibid.*

karena mesin cetaknya adalah benar-benar *drukkerij* (dari kata *druken* = ditekan) dengan *Letter* dari timah panas.



Taufiq Kiemas dan Para Mahasiswa Senior  
Universitas Sriwijaya

(Sumber: Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008)

Berhubung karena ada aturan dari pusat, Koran harus ada induknya, maka Panji Revolusi berganti nama dengan Suluh Marhaen, yang berinduk ke Suluh Indonesia dari Jakarta. Perubahan ini tidak membawa perubahan apa-apa, karena dananya harus cari sendiri.

Kuliah Djohan Hanafiah menjadi ambaradul. Lebih banyak di luar kampus daripada di ruang kuliah. Akan tetapi hal ini memungkinkan karena sistem perkuliahan waktu itu disebut sebagai *vrij studie* (kuliah bebas). Kapan saja boleh kuliah dan kapan saja boleh ujian dan kapan saja boleh menyelesaikan kuliahnya. Metode ini adalah cara kuliah sistem liberal. Akibatnya banyak mahasiswa menyelesaikan studinya diatas 5 tahun. Kuliah 10 tahun bukan suatu luar biasa, bahkan ada yang bergelar MA (mahasiswa abadi). Temyata Djohan Hanafiah penganut *vrij studie*, kuliahnya tidak selesai-selesai. Presiden (Rektor) UNSRI, Dr. M. Isa, yang juga mantan Gubernur Sumatra Selatan, akhirnya mengancam dan membujuk Djohan Hanafiah, “kau selesaikan studi kau 2 tahun lagi, langsung kau dikirim ke Jerman.” Tanpa keyakinan yang pasti Djohan Hanafiah mengatakan “siap pak!”. Ternyata Djohan tidak menepati permintaan sang Presiden.

## 2. Pergolakan Politik – Pemberontakan PRRI (Operasi Sadar)

Bulan Februari 1958 adalah puncak perselisihan daerah dengan pemerintah pusat. Di daerah khususnya Sumatera dibentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang sebelumnya di Sulawesi telah terbentuk Permesta. Mereka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Menurut Ibnu Sutowo dalam biografinya.<sup>43</sup>

Pergolakan di daerah-daerah waktu itu sudah tidak dapat ditolerir lagi. Pusat mesti mengambil tindakan yang tegas. Kalau dibiarkan terus, perpecahan atas Negara bisa terjadi. Maka ditetapkan untuk dilaksanakan “Operasi RTP-01” untuk daerah Tapanuli, “Operasi 17 Agustus” untuk daerah Sumatera Tengah, “Operasi Merdeka” untuk Sulawesi, dan “Operasi Sadar” untuk Sumatera Selatan. Syamaun Gaharu, yang pernah bertugas di Sumatera Selatan dan dianggap loyal pada Pusat, diberi tanggung jawab menumpas pergolakan di Aceh. Di Sumatera Selatan berdiri “Dewan Garuda”. Secara resmi Panglima TT II tidak menyatakan berdiri dibelakang PRRI, seperti para pemimpin “Dewan Banteng” dan “Dewan Gajah”, tetapi Pusat meragukannya. Bahkan Kepala Stafnya Mayor Nawawi melarikan diri ke Prabumulih dengan anak buahnya sambil membawa senjata lengkap untuk menghadapi siapa saja. Peristiwa ini membuat situasi di TT II tidak menentu. Terutama ada kabar bahwa ia mungkin akan membumi hanguskan galangan minyak di Sungai Gerong.

Berkembangnya gerakan anti pemerintah pusat ini lebih disebabkan kecemburuan daerah-daerah terhadap pembangunan di Pulau Jawa. Kaharoeuddin dalam biografinya menceritakan penyebab dan dampak dari pendirian ketiga dewan ini.<sup>44</sup>

Menjelang penutup tahun 1956, krisis-krisis politik pemerintah pusat terus bergeser ke luar Jawa. Ketidakpuasan rakyat di Pulau Sumatra sekarang mendapat saluran lewat Dewan Banteng (Sumatera Tengah), Dewan Gajah (Sumatera bagian Utara), dan Dewan Garuda (Sumatera Bagian Selatan). Mereka sangat tidak puas dengan tindakan kabinet di bidang ekonomi dan mencemaskan kekuasaan Pusat yang semakin besar dan sikap Soekarno yang condong ke kiri. Di Sumatera wibawanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa, di samping kekhawatiran akan sepak terjang komunis (PKI) yang semakin

---

<sup>43</sup> Ramadhan KH. 2008. *Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita*. Depok: Komunitas Bambu

<sup>44</sup> Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi. 1998.*op.cit.* Hal. 229 – 230.



kuat. Perkembangan ini terjadi bersama-sama dengan semakin menurunnya pengaruh Masyumi dalam pemerintahan, meskipun merupakan salah satu partai terbesar pemenang pemilu 1955, menyebabkan pemimpin di luar Jawa sampai kepada kesimpulan bahwa sudah tiba saatnya untuk bangkit melawan pusat, yang mereka anggap hanya mengabdikan kepada kepentingan Pulau Jawa dan orang-orang Jawa.

Ketika ketiga dewan di Sumatera itu telah mengambil sikap yang jelas dengan “membangkang” terhadap pusat, Jakarta memberikan reaksi dan pendekatan yang berbeda. Untuk dewan Gajah, Jakarta bertindak cepat dan dramatis. Segera setelah memproklamasikan Dewan Gajah, Kolonel Mahudin Simbolon langsung dipecat dan digantikan oleh Djamin Ginting, tetapi jika dia tidak dapat melaksanakan pengambilalihan wewenang Panglima TT I/Bukit Barisan, maka Wahab Makmur akan menggantikannya. Hanya sikap Barlian<sup>45</sup> yang agak ambivalen. Seperti Ahmad Husein dan Simbolon, dia adalah putra daerah dan meskipun dia tidak mengambil alih kekuasaan secara terang-terangan, sikap anti-Jawa yang tumbuh akibat pemerintahan orang Jawa yang sangat sentralistik, tekanan terhadap Gubernur Sumatera Selatan Winaro yang orang Jawa, membuatnya minta dipindahkan dari daerah itu [Palembang – penulis].

Peristiwa ini secara lengkap ditulis dalam situs Kodam II/Sriwijaya sebagai berikut.<sup>46</sup>

Gerakan ini ternyata tercium oleh MBAD atas laporan dari Lettu Sainan Sagiman yang kelanjutannya adalah pada April 1957 Asisten I MBAD Letkol. Achmad Sukendro mengeluarkan perintah kepada Komandan Resimen V Mayor Djuhartono untuk menangkap perwira TT. II/SRIWIJAYA termasuk Panglimanya Letkol Burlan. Apa yang terjadi ternyata diluar kehendak MBAD, malahan Panglima TT. II/SRIWIJAYA memerintahkan menangkap Komandan Resimen V dengan menggerakkan pasukan dari KMKB. Hal ini mengakibatkan Mayor Djuhartono membawa pasukanya ke Talang Betutu dalam rangka

---

<sup>45</sup> Barlian lahir tanggal 23 Juli 1922 di Palembang, lulus SMA Belanda di Malang tahun 1941, kemudian mendapat latihan militer di zaman pendudukan Jepang. Selama revolusi berjuang di Sumatera Selatan dengan jabatan Panglima Devisi Sriwijaya. Setelah penyerahan kedaulatan ia ditempatkan MBAD Jakarta. Lalu masuk SSKAD di Bandung (1951-1952). Setelah pemilu 1955, diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Militer Sumatera Selatan.

<sup>46</sup> <http://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/>, diunduh tanggal 25 Desember 2009

mengamankan diri. KKMB (Gamisun) segera memerintahkan Lettu. Sainan Sagiman, dan dibantu oleh skuadron-skuadron panzer pimpinan Lettu. Faisol dan Satu Batalyon Penuh Infantri pimpinan Kapten. Abdulla yang bersama-sama untuk memimpin pasukan serta meminta penyerahan diri Mayor Djuhartono dan pasukan yang ternyata ditanggapi dingin oleh Mayor Djuhartono. Peristiwa semakin rumit dengan mendaratnya tiga fligh Dakota yang membawa Pasukan RPKAD di talang betutu. Mengingat kondisi yang rumit Mayor Nawawi segera diperintahkan untuk membawa pasukan dalam jumlah besar mengepung Talang Betutu. Untunglah sebelum front terbuka, Ketengan mulai mencair ketika jalur diplomasi dari TT. II/SRIWIJAYA yang dipimpin oleh Mayor Kastubi mencapai kesepakatan dengan dihadiri oleh Kolonel A.Yani dan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai utusan KSAD. Peristiwa ini sangat menggemparkan dan dikenal dengan peristiwa "Djuhartono". Setelah dimutasikannya Djuhartono dan disetujuinya tidak ada released ke media massa tentang peristiwa ini, tiba-tiba terdengar isu bahwa akan adanya serangan dari pusat terhadap daerah dan penangkapan tokoh-tokoh pergerakan daerah dari kalangan militer. Hal ini mengakibatkan ketersinggungan unsur TT. II/SRIWIJAYA dan menyiagakan seluruh kekuatan militer yang ada. Untunglah sebelum situasi bertambah panas Lettu Sainan Sagiman diperintahkan untuk mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan dengan Panglima Sumatera Tengah Letkol A. Husain, Panglima Sumatera Utara Letkol. Djamin Ginting serta Panglima Aceh Letkol Syamaun Gaharu agar memberikan dukungan kepada TT. II/SRIWIJAYA meyakinkan MBAD masalah Sumatera Selatan dibawa ketingkat pusat dan tidak perlu dengan pengerahan kekuatan militer. Usulan ini didukung secara penuh oleh ketiga panglima wilayah sumatera dengan tujuan mencegah pertempuran sesama kekuatan NKRI.

Untuk mencegah perluasan pengaruh gerakan dari Mayor Nawawi dkk dalam PRRI yang mengusung semangat ketidakpuasan atas timpangnya pembangunan antara Pusat - Daerah. KSAD memerintahkan dijalankannya Operasi Sadar dibawah pimpinan Kolonel Ibnu Sutowo dengan bantuan Kastaf TT II/SRIWIJAYA Letnal Kolonel Harun Sohar dan Komandan Resimen V. Letnan Kolonel Ryacudu. Langkah awal yang dilakukan adalah membekukan kekuasaan Panglima TT. II/SRIWIJAYA Letkol Barlian dan diganti dengan Letkol Harun Sohar dan kemudian dibentuk komando-komando operasi dengan

daerah Komando Resimen V sebagai ujung tombak dengan tiga sektor :

- Sektor I Berdiskolaksi di Sungai Penuh
- Sektor II Berdislokasi di Jambi
- Sektor III Berdislokasi di Curup

Dibantu oleh Resimen VI sebagai Cop-II untuk cadangan dan Komandan KMKB di Palembang sebagai Cop-III.



Panglima TT. II/SRIWIJAYA Letkol. Burlian Bertatap Muka dengan Masyarakat Musi Banyuasin

(Sumber: <http://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/>)

*Upaya untuk menyadarkan para pemberontak tersebut dilakukan dengan upaya pendekatan melalui tokoh masyarakat. Untuk tugas ini diminta bantuan ulama sepuh Sumatera Selatan Kyai. Haji Kiagus Rasyid Siddiq yang sangat dihormati kedua pimpinan utama PRRI ini dibantu oleh Kyai Haji Kiagus Muhammad Zen. Akhirnya Mayor Nawawi dan lain-lain perwira yang ikut andil dalam gerakan PRRI beserta pasukan takluk dibawah jahur diplomasi dan bersedia menandatangani kembali kepangkuan NKRI dengan dihadiri oleh KSAD. Jendral Abdul Haris Nasution, Panglima TT. II/SRIWIJAYA Kolonel Harun Sohar, Gubernur Achmad Bastari, Sainan Sagiman, Wahab Sarobu dan Ulama serta tokoh masyarakat Sumatera Bagian Selatan.*



### Satya Lencana Saptamarga

(sumber: Djohan Hanafiah)

Tugas untuk menyelesaikan masalah di Sumatera Selatan dipimpin oleh Kolonel Ibnu Sutowo Deputy II KSAD, karena dia adalah mantan Panglima TT II dan sangat dikenal di Sumatra Selatan. Ibnu Sutowo tidak membawa pasukan banyak, hanya beberapa orang RPKAD. Beliau mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh militer dan tokoh politik serta masyarakat, merekrut para pemuda yang dipercayai, terutama Pemuda Demokrat. Djohan yang juga kader Pemuda Demokrat direkrut tanpa dididik sebagai militer, akan tetapi diberi peralatan dan pakaian militer. *Move*-nya seolah ada pasukan yang sudah didrop di Palembang, dan RPKAD kemudian menduduki dan mengamankan Sungai Gerong dan Plaju. Sukses besar Operasi Sadar, berkat strategi Ibnu Sutowo yang tepat sasaran. KSAD Jendral A.H. Nasution sangat gembira atas keberhasilan penyelesaian di TT II, dan langsung membuat surat kepada Ibnu Sutowo. Atas keberhasilan pada Operasi Sadar tersebut diberikan penghargaan "Satya Lencana Saptamarga" kepada para yang berjasa seperti Ibnu Sutowo dan Djohan Hanafiah. Piagam ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Djuanda tanggal 5 oktober 1958.

### 3. Aktivis Politik

Berumah tangga ternyata tidak mengurangi aktivitas Djohan Hanafiah untuk terlibat dalam gerakan politik. Selain sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palembang, dia juga menjadi pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) Sumatera Selatan yang diketuai oleh Dr. A.K. Gani. Mau tidak mau Djohan Hanafiah telah menjadi politikus. Mengikuti gejolak PNI yang selalu konflik di dalam, sehingga mengalami kekalahannya dalam Pemilu 1957 sebagai partai besar setelah Masyumi. Kedudukan PNI diambil alih PKI. Djohan mengikuti setiap Kongres PNI yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dari sini pengalaman berwawasan nasionalnya bertambah.

### 4. Tahanan Politik

Peristiwa Nasional yang merupakan tragedi nasional pada tanggal 30 September 1965, menggerakkan para pemuda yang bernaung di bawah PNI waktu itu berkumpul di rumah Dr. A. K. Gani. Setelah menganalisa dan mendiskusikan peristiwa tersebut, perhitungan dan instink politik Dr. A.K. Gani mengatakan bahwa gerakan ini didalangi oleh PKI. Dr. A.K. Gani mengirim beberapa orang menghadap Panglima Kodam IV/Swj. Brigjen Makmun Murod, menyatakan sikap PNI mendukung pemerintah dan mengutuk Peristiwa 30 September/PKI.



Dr. A.K. Gani  
(sumber: dari berbagai sumber)

Pada saat kemelut itu Djohan sedang menghadapi ujian sarjana muda. Meskipun dengan angka yang pas-pasan Djohan dapat lulus pada ujiannya diawal tahun 1966. Sementara itu kemelut di tanah air semakin mencekam. Konflik politik sudah terbuka. Sukarno dihujat dan dituntut turun sebagai Presiden Republik Indonesia. Taufik Kiemas dalam biografinya<sup>47</sup> ‘menulis: “Anak-anak GMNI Palembang, meskipun tidak ikut dalam KAMI, juga melakukan gerakan ‘pembersihan’ tokoh-tokoh PKI di Sumatera Selatan. “Tugas kami terutama memberitahukan siapa saja aktivis PKI dan organisasi onderbouwnya kepada aparat keamanan”, kata Djohan.

Garis politik GMNI ketika itu adalah membela Presiden Soekarno dari berbagai kekuatan politik yang berusaha merongrong kekuasaannya. Tak perduli apakah itu dari kalangan komunis, tentara, atau kekuatan politik lain. ‘Pokoknya, siapa yang menyerang Bung Kamo waktu itu kami anggap musuh’ kata Djohan. Itulah sebabnya, ketika Koran Noesa Poetra – surat kabar lokal milik Partai Syarikat Islam Indonesia – edisi 9 Maret 1966 memberitakan Bung Karno terlibat Gestapu, emosi anak-anak GMNI meledak. Mereka tak bisa menerima tuduhan terhadap tokoh proklamator yang juga Presiden RI. Dalam pemberitaan Noesa Poetra itu disebutkan pula bahwa PNI-Ali-Surachman berafiliasi dengan PKI. Maka pagi-pagi sebelum Koran Noesa Poetra beredar ke masyarakat, seluruh edisi hari itu dirampas dari percetakan CV Rambang.”

Akibat perbuatan perampasan dan pembakaran koran tersebut, Taufik Kiemas selaku ketua GMNI Palembang pada waktu bersama 23 aktivis GMNI ditangkap dimasukkan dalam sel tahanan Markas CPM di Jalan Merdeka Palembang. Sedangkan Djohan Hanafiah pada waktu itu sedang mengikuti pelatihan pimpinan redaksi koran seluruh Indonesia di Jakarta. Pelatihan ini lebih merupakan indoktrinasi terhadap perubahan politik dan kekuasaan di Indonesia. Pelatihan di dilakukan dengan gaya militer, dengan mendapatkan pakaian militer dan tatatertib militer. Pelatihan ini memakan waktu 1 bulan.

---

<sup>47</sup> Taufik Kiemas. 2002. *Tanpa Rakyat Pemimpin Tak berarti Apa-apa*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal. 51-52. Informasi senada ditulis pada buku Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *Jembatan Kebangsaan: Biografi Politik Taufiq Kiemas*. Jakarta: Rumah Kebangsaan dan Q Communication.



Markas CPM Tempat Djohan Hanafiah dkk Dipenjara  
(Sumber: Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008)

Selesai latihan Djohan menemui Dr. A.K. Gani<sup>48</sup> di Jakarta, melaporkan bahwa tugasnya selesai dan ingin pulang. Dr. A. K. Gani melarang Djohan Hanafiah pulang ke Palembang, karena sudah ditunggu untuk ditangkap. Djohan Hanafiah tetap mendesak untuk pulang karena rasa tanggung jawab terhadap teman-teman yang telah ditahan dan juga isterinya telah melahirkan puterinya. “Baik”, kata Dr. A. K. Gani, “kau ke Lampung saja dulu, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.” Djohan Hanafiah ditempatkan oleh Dr. A. K. Gani di perkebunan karet NV Nakau, Lampung Utara milik Mukmin. Ternyata Nakau adalah perkebunan besar bekas *onderneming* milik Belanda. Bekerja sebagai manager perkebunan, Djohan Hanafiah

---

<sup>48</sup> A.K. Gani (Adenan Kapau Gani) merupakan Gubernur pertama (1945 – 1946) Sumatra Selatan. Lahir di Bukittinggi Sumatra Barat pada tahun 1905. Menamatkan pendidikan ELS di Bukittinggi tahun 1927 dan melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) di Batavia dan selesai tahun 1940. A.K. Gani merupakan pendiri dan ketua umum PNI Cabang Sumatra dan sempat menjadi residen Palembang. Pada masa perang kemerdekaan, Gani pernah menjabat menteri kemakmuran dalam kabinet Sjahrir III. Ketika menjabat menteri itulah Gani diberi gelar sebagai *the great smuggler of south east asia* karena keandalannya mengorganisasi penyeludupan barang-barang kebutuhan pokok menembus blockade pasukan Belanda (Baca: Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *Op.cit.* Hal. 49-50). Gani juga pernah menjabat sebagai wakil kementerian pertahanan di Sumatra yang berkedudukan di Palembang (Baca: Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I (1945)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hal. 112 dan 240). A.K. Gani meninggal pada desember 1968 di RS Charitas Palembang. Dalam biografi Taufiq Kiemas disebutkan, meninggalnya Gani disebabkan tekanan mental akibat kekangan politik yang dialami sejak diberhentikan dengan hormat sebagai anggota MPRS pada Juni 1966. Gani dianggap sebagai tokoh Soekaranois yang harus disingkirkan dan dilarang berpidato di depan umum.

mendatangkan istri dan anaknya ke Lampung Utara. Namun disini Djohan Hanafiah tidak begitu lama, karena jejaknya diketahui oleh lawan politiknya, sehingga dilaporkan dengan sangat luar biasa, yaitu mempersiapkan dan menggerakkan pasukan bersenjata. Padahal ketika itu R. M. Ali Amin (orang tua Djohan Hanafiah) adalah gubernur Sumatra Selatan periode tahun 1965 – 1968.<sup>49</sup>

Komandan Kodim Lampung Utara, sambil bergurau mengatakan alangkah hebatnya tuduhan tersebut. Dia hanya mengirim seorang petugasnya untuk mengantar Djohan Hanafiah ke Palembang dengan naik kereta api.

Djohan Hanafiah bersama anak dan isterinya berangkat dari Kotabumi, dan sesampai di Palembang Djohan Hanafiah langsung dimasukkan dalam sel tahanan CPM di Jalan Merdeka. Djohan Hanafiah tidak dicampur dengan teman-temannya yang telah masuk terdahulu, tetapi dalam sel para sarjana dan para pimpinan BUMN yang dituduh terlibat PKI.

Djohan Hanafiah tidak ingat berapa lama dia ditahan, karena dia memang tidak mau mengingatkan lagi peristiwa yang menyakitkan tersebut.<sup>50</sup> Djohan Hanafiah teringat sekali, sewaktu dia meminta surat pembebasan tahanan. Permintaan ini dijawab dengan sinis oleh petugas, "pembebasan tahanan? "Lah siapa yang menahan kamu, sudah, pulanglah ke rumah!" Hal ini terjadi menurut Djohan Hanafiah karena proses penahanannya juga tidak melalui proses hukum yang berlaku, tidak ada penyidikan, tidak ada persidangan, dan tidak ada surat penahanan. Walau sudah keluar penjara, namun Djohan masih dikenakan tahanan rumah yang berarti tidak bisa keluar rumah dan wajib lapor.

## **G. DJOHAN HANAFIAH MENJADI PENGUSAHA**

### **1. Luntang-Lantung, Cari *Lokak***

Akibat aktivitas mahasiswa GMNI yang terlibat politik dan mendukung Soekarno ditambah situasi politik pada tahun 1966 yang

---

<sup>49</sup> Berikut para gubernur di Provinsi Sumatera Selatan sejak pertama terbentuk tahun 1945. Tahun 1945 -1946 A.K. Gani; 1946 – 1952 Mohammad Isa; 1952 – 1957 Winarno Danuatmodjo; 1957 – 1958 M. Husin; 1958 – 1959 Mohtar Prabu Mangkunegara; 1959 – 1964 Achmad Bastari; 1964 – 1965 Abu Yasid Bustom; 1965 – 1968 M. Ali Amin; 1968 - 1978 Asnawi Mangkualam; 1978 - 1988 Sainan Sagiman; 1988 – 1998 Ramli Hasan Basri; 1998 – 7 November 2003 Rosihan Arsyad; 7 November 2003 – 11 Juli 2008 Syahrial Oesman; 11 Juli 2008 - 7 November 2008 Mahyuddin (penjabat); 7 Nov 2008 – 2013 Alex Noerdin.

<sup>50</sup> Djohan Hanafiah memperkirakan lama penahanannya sekitar 6 bulan.



tidak kondusif di Indonesia, para mahasiswa Unsri yang tergabung dalam GMNI dilarang kuliah, satu keputusan yang paling tidak bijaksana. Bahkan hasil ujian mereka dibatalkan. Beruntung bagi Djohan Hanafiah karena dia masih dapat meminta ijazah Sarjana Mudanya, ini berkat Dekan Fakultas Ekonomi waktu itu yang masih simpati kepada Djohan Hanafiah. Teman-temannya tidak berputus asa, karena ini merupakan konsekwensi dari satu perjuangan.

Kesempatan untuk meneruskan kuliah di Unsri sudah tertutup, maka sebagian anak-anak GMNI pindah ke pulau Jawa, terutama di Yogyakarta. Mereka melanjutkan kuliahnya setelah *discreening* bersih dari G 30 S/PKI. Dalam buku biografi Taufiq Kiemas disebutkan<sup>51</sup>

setelah situasi politik kembali tenang, satu per satu tokoh-tokoh pro-Soekarno dibebaskan dari penjara, termasuk para aktivis GMNI Palembang. Taufiq sendiri termasuk yang terakhir dari kelompok GMNI Palembang yang dibebaskan. Itupun dengan syarat tak boleh lagi tinggal di Palembang tapi harus pindah ke Jakarta.

Taufiq Kiemas mendapat jaminan kebebasan dari Jenderal A.H. Nasution dan Letjen Almsjah Ratu Perwiranegara yang merupakan teman baik orang tua Taufiq Kiemas.

Menurut pengakuan Djohan Hanafiah, dirinya mendapat perlakuan yang istimewa selama di penjara dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Statusnya yang sudah sarjana muda menjadi nilai lebih sehingga para petugas merasa segan kepada dia. Makanan yang lebih enak, tempat yang lebih baik menjadi keistimewaan yang diterima oleh Djohan Hanafiah. Kondisi ini sangat jauh dengan apa yang dialami oleh tahanan politik lainnya di sel yang berbeda. Taufiq Kiemas menuturkan dalam buku biografinya<sup>52</sup> bahwa sel tahanan mereka yang hanya berukuran 2,5 m x 2,5 m diisi sepuluh atau sebelas orang sehingga untuk berdiri saja sangat susah apalagi untuk tidur. Jatah makan mereka hanya 4 sendok nasi dengan sayur seadanya. Tempat mereka ditahan adalah markas CPM yang berada di Jl. Merdeka Palembang. Sel tahanan ini menjadi semacam tempat transit pagi para tahanan PKI dari Sumatra Selatan dan daerah sekitarnya seperti Bengkulu, Lampung, dan Sumatra Barat. Dari penjara tersebut, para tahanan PKI dibawa ke Pulau Kemaro (dibuku ditulis Pulau Kemarau) untuk dieksekusi.

Setelah keluar dari penjara, Djohan Hanafiah lebih memilih untuk mencari bisnis, karena dia telah mempunyai 2 orang anak. Ternyata tidak mudah untuk berbisnis dengan jiwa penuh semangat

---

<sup>51</sup> Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *Op.cit.* Hal. 67 – 68.

<sup>52</sup> Ibid. Hal. 64 – 67.

perjuangan. Djohan Hanafiah terpaksa berbisnis dan bekerja secara serabutan. Teman bisnis adalah Marwah M. Diah dan Rudy Anwar (almarhum). Djohan Hanafiah mengelola angkutan charter untuk ke luar kota, terutama ke Jambi. Sebagai sopirnya adalah Djohan sendiri. Biasanya penyewa kendaraan ini adalah orang-orang asing. Ada dua keuntungan yang didapat Djohan Hanafiah menggaet tamu-tamu asing ini, pertama tarifnya lebih mahal dan kedua Djohan Hanafiah dapat memperlancar bahasa Inggrisnya.

Kadangkala Djohan Hanafiah dan teman-temannya pergi ke Singapura, membeli mobil bekas dan dijual di Palembang. Djohan Hanafiah hanya membeli 1 mobil karena modalnya terbatas. Mobil ini dalam 1 bulan biasanya sudah terjual. Sambil menunggu pembeli, Djohan tetap melaksanakan kerja membawa tamu-tamu yang menyewa mobilnya.

Pada suatu waktu tamu Djohan seorang Belanda yang ingin menempatkan perwakilannya di Palembang, mencari seseorang yang memenuhi syarat perusahaannya. Kriteria yang dicari adalah yang memiliki *experience*, biasa bergaul, dan lancar berbahasa Inggris. Setelah mengadakan seleksi beberapa kali, akhirnya dia bertanya apakah Djohan Hanafiah mau bekerja dengan perusahaannya. Djohan Hanafiah kaget juga dengan pertanyaannya tersebut, kenapa dia memilih Djohan Hanafiah. Tentu ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya pada tahun 1967-1971, Djohan Hanafiah menjadi *Representative Area Sumatra for CIBA-GEIGY*<sup>53</sup> dan merubah penampilannya, dia harus memakai kemeja lengan panjang dengan dasi.

Selama bekerja di perusahaan tersebut, Djohan Hanafiah sering mengadakan perjalanan keliling Sumatra dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.<sup>54</sup> Ia sangat menikmati pekerjaannya ini karena keinginannya untuk keliling Indonesia jadi kesampaian walaupun baru sebatas Sumatera. Seringnya melakukan perjalanan ke daerah-daerah, Djohan Hanafiah berkesempatan untuk mengenali kebudayaan di Sumatera.

Ketika ayahnya (R.M. Ali Amin) menjadi Gubernur Bengkulu pada waktu itu (1970-1974). menawarkan sekali lagi pada Djohan

---

<sup>53</sup> Ciba-Geigy

<sup>54</sup> Ketika itu pesawat Garuda Indonesia melayani penerbangan setiap ibukota provinsi seperti Palembang – Jambi – Medan dan belum pesawat lainnya sebagai saingan. Sedangkan angkutan darat masih sangat terbatas dan jalan juga belum baik masih sebatas jalan tanah yang sudah dikeraskan dengan batu dan tak jarang mobil akan mogok atau terperosok. Dengan kondisi ini jarak Padang – Palembang bisa ditempuh sekitar 30 hari sehingga setiap penumpang harus menyiapkan bekal berupa beras, dan lauk pauk.

Hanafiah untuk menjadi pegawai negeri selagi ada kesempatan, karena ayahnya akan pensiun. Namun Djohan Hanafiah telah berketetapan bahwa dia tidak akan jadi pegawai negeri. “Saya tidak mau seperti ayah saya yang sibuk menjadi birokrat. Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang bangga dan ingin membesarkan kebudayaan bangsanya di dunia,” kata Djohan.<sup>55</sup>

Djohan Hanafiah selanjutnya pindah menjadi *Sales Manager for Southern Sumatra Grolier International* hingga tahun 1973. Kepindahan Djohan Hanafiah ke perusahaan ini karena ada semacam pembajakan. Ia dijanjikan untuk mendapatkan *income* lebih besar dari perusahaan sebelumnya. Kemudian Djohan Hanafiah berfikir kenapa tidak membuat perusahaan sendiri, karena dia telah mengetahui seluk beluk bisnis dan telah mempunyai jaringan bisnis. Lalu dia mendirikan CV. Mitra, *authorized dealer* VOLKSWAGEN di Palembang hingga tahun 1975. Persaingan yang kuat dari kendaraan Jepang, terutama Toyota, maka Djohan Hanafiah mengundurkan diri dari bisnis mobil.

## 2. Pengurus HIPMI

Djohan Hanafiah bersama Tibrani Basri melihat ada satu usaha baru, yaitu yang bersifat jasa, dimana praktek para dokter spesialis digabung menjadi satu, lengkap dengan apotik, laboratorium, rontgen dan peralatan dokter lainnya. Peluang ini dimanfaatkan dengan mendirikan sebuah perusahaan dengan memakai nama PT. Rosarum Cindo, dimana Djohan Hanafiah duduk sebagai direktornya dan Tibrani adalah komisaris. Suatu usaha yang baru pertama dibuka di Palembang sehingga berjalan dengan baik.

Meskipun usaha ini dikelola secara bisnis murni ternyata Djohan Hanafiah tidak dapat menolak keluarga atau teman-teman yang kesulitan dalam membayar jasa dokter atau menebus obat. Salah seorang tokoh Sumatera Selatan yang juga senasib dengan Djohan pada masa awal Orde Baru, DR. Mochtar Effendi, SE, dalam biografinya menceritakan pengalamannya:

“Aku berobat ke Dr. Alwi Shahab. Dengan bantuan saudara Djohan Hanafiah, seorang pemuda terpelajar kader Marhaenis yang konsisten, aku diperiksa di Rosarum Cindo. Juga tidak bayar, tetapi dibayar oleh saudara Djohan

---

<sup>55</sup> Pernyataan ini dikutip dari Florencia Marcelina Ramadhona. “Djohan Hanafiah: Bapak Penggali Sejarah dan Budaya Palembang”. <http://www.beritamusi.com/>. Demikian juga wawancara penulis dengan Djohan Hanafiah tanggal 14 November 2009 di rumah beliau Jl. Cek Bakar No. 7 Talang Semut Palembang.

Hanafiah. Aku dinyatakan oleh Dr. Alwi diserang penyakit encok, akibat tidur di semen di dalam penjara hampir tujuh tahun”<sup>56</sup>

Jiwa Djohan Hanafiah yang organisator, maka ia mulai terjun ke organisasi dunia usaha. Djohan Hanafiah terjun sebagai pengurus HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan KADIN (Kamar Dagang Indonesia). Untuk menjadi Pimpinan HIPMI di Palembang, pada th 1973 Aburizal Bakrie sendiri meminta Djohan Hanafiah sebagai Ketua. Jabatan ini akhirnya diembarnya sampai tahun 1980. Sewaktu Siswono Yudo Husodo menjadi Ketua Umum HIPMI, Djohan Hanafiah mendampinginya sebagai Wakil Ketua Sektor Perdagangan sedangkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Sektor Perdagangan. Dalam kancan HIPMI ini Djohan Hanafiah banyak belajar dan bergaul dengan tokoh-tokoh muda yang berwawasan luas dan inovatif. Tidak heran kalau HIPMI sebagai almamater tokoh pengusaha muda, yang lulus seleksi menjadi menteri di kabinet-kabinet pemerintah Republik Indonesia. Namun Djohan Hanafiah tidak memanfaatkan kedekatannya dengan tokoh-tokoh yang juga adalah teman dekatnya, seperti A. Latief, Agung Laksono, Fahmi Idris dan lainnya.

Djohan belajar demokrasi ala konglomerat muda di HIPMI. Pada tahun 1979 pada Munas HIPMI di Medan, Djohan Hanafiah adalah pendukung Surya Paloh bersaing dengan Ponco Sutowo untuk menjadi Ketua Umum HIPMI, akan tetapi jagoan Djohan Hanafiah ini gagal. Kemudian tahun 1983, ‘perseteruan’ dengan Ponco Sutowo berlanjut dalam Munas HIPMI seyogianya akan diadakan di Jakarta. Kembali harus menghadapi kubu Ponco, karena Djohan Hanafiah mendukung Bambang Permadi, putera Amir Mahmud (Menteri Dalam Negeri pada waktu itu) untuk menjadi Ketua Umum. Djohan Hanafiah ditunjuk sebagai ketua tim sukses, yang berhadapan dengan Fahmi Idris, Yapto, dan lainnya. Akhirnya kedua calon ini tidak muncul sebagai Ketua Umum HIPMI, muncul orang yang tidak diunggulkan yaitu Agung Laksono, yang kebetulan berada dalam tim Djohan Hanafiah. Tim Djohan terbagi dua, yaitu mewakili Indonesia Barat dipimpin sendiri oleh Djohan Hanafiah, sedangkan Indonesia Timur dipimpin oleh Aksa Mahmud. Meskipun dalam perjalanan HIPMI antara Djohan dan Ponco tidak begitu harmonis, tapi di luar itu hubungan pribadi cukup dekat. Ponco bahkan mengajak Djohan Hanafiah untuk bersama mengurus yayasan dibidang kebudayaan yang didirikannya tahun 2009, yaitu Yayasan Suluh Nusantara Bakti dengan visi “Mewujudkan masyarakat

---

<sup>56</sup> Mochtar Effendi. 2000. *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan: Catatan Tiga Zaman Dari Balik Terali Penjara Rezim Tirani Soeharto Sketsa Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatera Selatan*. Jakarta: Al-Mukhtar. Hal. 224

yang memahami dan menghargai nilai-nilai budaya untuk memperkokoh jati diri bangsa.”

Djohan Hanafiah juga adalah pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Menjadi Ketua KADIN Kota Palembang dan juga Ketua KADIN Provinsi Sumatra Selatan, bahkan juga masuk dalam pengurus KADIN Indonesia. Kesempatan untuk keluar negeri dilakukan pada masa kepengurusan KADIN, baik sebagai pimpinan delegasi maupun anggota delegasi. Sempat beberapa kali ke Eropa menjadi anggota delegasi yang didampingi oleh beberapa Menteri. Demikian juga ke negara-negara Asean, Cina, Australia, dan Jepang.

Bisnisnya terus berkembang hingga memimpin sejumlah perusahaan di Palembang. Terakhir sebagai Direktur Utama PT. Tejacatur Primaperkasa hingga 1993, sebelum akhirnya memutuskan terjun ke politik.

Sejak 1992-1997 Djohan Hanafiah menjadi anggota DPRD Sumatra Selatan dari fraksi Golkar dan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan pada masa Reformasi tahun 1999-2004. Sewaktu Arub SH menjadi ketua DPD Golkar Sumatera Selatan 1993-1998, Djohan menjadi Bendahara Golkar, karena kedudukan Djohan pada waktu itu adalah Ketua KADIN Sumatera Selatan (1993-1998). Djohan juga menjadi Wakil Ketua Golkar Sumatera Selatan tahun 1999-2004 dan terakhir sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Golkar Sumatera Selatan (2004-2009).

## **H. BAPAK SEJARAHWAN DAN BUDAYAWAN PALEMBANG**

### **1. Berawal dari Palembang-Buntung**

Awal ketertarikan Djohan Hanafiah terhadap sejarah dan kebudayaan Palembang bermula dari ejekan “Palembang buntung”. Ejekan ini sering disampaikan para pendatang, baik dari daerah pedalaman maupun dari Jawa, Minang, atau Melayu, terhadap *wong* Palembang. Dia ingin tahu, apa yang dimaksud dengan ejekan tersebut. Dia pun bertanya kepada banyak sesepuh yang tahu atau mengerti mengenai sejarah dan budaya Palembang. Akan tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Djohan Hanafiah pun membaca sejumlah catatan sejarah mengenai Palembang. Ia mengambil kesimpulan; maksud dari ejekan “Palembang buntung” itu adalah kebudayaan *wong* Palembang itu *semon* (semu), tidak jelas identitasnya, disebut wong Melayu bukan, disebut wong Jawa bukan. Sebab dalam kebudayaan Palembang merupakan akulturasi dan asimilasi budaya Jawa dan Melayu. “Setengah-setengah inilah yang disebut mereka buntung itu,” kata

Djohan. “Jadi, saya berkesimpulan budaya Palembang adalah akulturasi dan asimilasi budaya Melayu dan budaya Jawa,” kata Djohan Hanafiah.

Djohan Hanafiah mulai menulis artikel dan esay pendek untuk koran lokal. Akhirnya dia mendapatkan kolom tetap di Koran Sriwijaya Post yang menulis tentang sejarah dan kebudayaan Sumatera Selatan. Ia setelah banyak mengetahui tentang sejarah perlawanan di Sumatera Selatan dalam hal ini Kesultanan Palembang, menjadi meradang setelah melihat dalam buku babon sejarah Indonesia, yaitu *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) yang terdiri dari 6 jilid tidak memuat sama sekali tentang perlawanan Palembang terhadap kolonial.

Untuk membuktikan hebatnya perlawanan terhadap kolonial oleh rakyat Sumatera Selatan, Djohan Hanafiah menerbitkan sendiri sebuah buku yang dibiayainya sendiri, yang berjudul: “Perang Palembang 1819-1821, Perang Laut Terbesar di Nusantara” yang diterbitkan Pariwisata Jasa Utama tahun 1986.

Saya menulis buku ini, merupakan satu protes terhadap buku babon sejarah Indonesia, yaitu “Sejarah Nasional Indonesia” (SNI). Dalam buku yang terlalu Jawa sentris itu tidak menuliskan tentang kepahlawanan dan keperkasaan Palembang melawan Belanda pada abad ke 19. Saya membuktikan bahwa ternyata perang Palembang 1821 melawan Belanda merupakan perang armada laut terbesar di Nusantara. Hampir sama besar dengan peperangan armada Inggris melawan Belanda-Perancis sewaktu merebut pulau Jawa di tahun 1809. Anehnya peristiwa besar tidak ditulis dalam SNI tersebut”, kata Djohan Hanafiah.

Buku mengenai perlawanan Palembang tersebut dibuat kembali secara lebih padat dengan tambahan referensi dan penelitian baru dengan judul ‘*Kuto Besak, Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*’, diterbitkan oleh Masagung, Jakarta 1989. Buku ini menjadi telaah dan kritik oleh Prof. DR. Barbara Watson Andaya, guru besar sejarah dari University of Hawaii dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, March 01, 1994.<sup>57</sup> Menurut Barbara Watson, yang juga penulis dan peneliti sejarah dan kebudayaan Asia Tenggara tentang Djohan adalah:

“For several years Djohan Hanafiah has been an influential force behind local efforts to make Palembang’s history better known among Indonesians, and to this end

---

<sup>57</sup><http://www.encyclopedia.com/Journal+of+Southeast+Asian+Studies/publications.aspx?date=199403&pageNumber=1>

has published several books that deal with episodes, individual and places of historical importance.....”

Buku ini mendapat respon cukup bagus dari masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pekerja budaya di Palembang. Hal ini terbukti dari sejumlah diskusi mengenai buku tersebut.

Buku yang sangat memuaskan Djohan Hanafiah adalah tulisannya yang selama ini menjadi renungannya, tentang kebudayaan Palembang. Buku berjudul “*Melayu – Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*”, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995. Dalam buku Djohan memaparkan proses dari akulturasi dan asimilasi kebudayaan Melayu dan kebudayaan Jawa sebagai konsekwensi kontak perdagangan, politik, sosial, kebudayaan dan perebutan hegemoni kekuasaan. Menurut Djohan proses ini setidaknya berawal pada masa Sriwijaya dan puncaknya pada masa Kesultanan Palembang, karena elite Jawa dari Demak yang membangun keraton pertama di Kuto Gawang (Palembang Lama).<sup>58</sup> Hampir 1000 tahun proses ini berjalan. Namun dari sisi kebudayaan Jawa, yang ditulis dalam *Babad Tanah Jawa*, pendiri kerajaan Demak itu sendiri dilahirkan di Palembang.

Djohan Hanafiah mendapat pengakuan sebagai budayawan dari publik di Palembang, dan kemudian meluas secara nasional maupun internasional. Ia dinilai telah mampu merumuskan identitas wong atau masyarakat Palembang yang sebelumnya seakan tidak memiliki identitas atau “buntung”.

Sebelumnya pada tahun 1987, Djohan Hanafiah menulis buku mengenai sejarah pergolakan di Palembang Lamo atau di Kuto

---

<sup>58</sup> KERATON Kuta Gawang adalah sebuah keraton yang setidaknya telah berdiri selama 100 tahun, sebelum dibakar habis oleh VOC tahun 1659. Kuta Gawang berbentuk empat persegi, dikelilingi kayu besi dan unglan empat persegi dengan ketebalan 30 x 30 cm. Panjang dan lebar benteng ini berukuran 290 Rijnlandsche roede (1093 meter). Tinggi dinding temboknya adalah 24 kaki, atau kurang lebih 7,25 meter. Benteng ini menghadap Sungai Musi dengan pintu masuk melalui Sungai Rengas. Sedangkan bagian kanan dan kiri benteng dibatasi oleh Sungai Buah dan Sungai Taligawe. Benteng ini mempunyai tiga baluarti di mana baluarti tengah terbuat dari batu. Orang-orang asing bermukim di Seberang Ulu Sungai Musi. Mereka adalah orang-orang Portugis, Belanda, Cina, Melayu, Arab, Campa, dan lainnya. Benteng ini mempunyai pertahanan berlapis dengan kubu-kubu yang terletak di Pulau Kemaro, Plaju, Bagus Kuning, dan Plaju. Di samping itu terdapat cerucuk yang memagari Sungai Musi antara Pulau Kemaro dan Plaju. Kuta Gawang merupakan kota yang dilindungi oleh kuto (= pagar dinding tinggi), sebuah tipikal kota zaman madya (Djohan Hanafiah. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Hal. 11 – 12; lihat juga Djohan Hanafiah, “Keraton Kuto Gawang (2) dalam <http://www.beritamusi.com/kategori/budaya>).

Gawang.<sup>59</sup> Judul bukunya, "*Kuto Gawang: Pergolakan Politik dalam Kesultanan Palembang Darussalam*" yang juga diterbitkan Pariwisata Jasa Utama. "Dari buku ini saya ingin melacak dari awal soal Kesultanan Palembang Darussalam," kata Djohan.

## 2. Sejarahwan Otodidak

Minat Djohan Hanafiah untuk mempelajari sejarah dan budaya Palembang termasuk mengikuti perkembangannya sering terganggu oleh urusan bisnis selama menjadi pengusaha. Mengelola perusahaan sebagai direktur utama, cukup menyita waktu dan perhatian sehingga tidak ada waktu untuk menekuni minatnya terhadap sejarah dan budaya Palembang. Namun kesibukannya ini justru dimanfaatkan untuk mengumpulkan modal untuk kehidupan sehari-hari dan menekuni minatnya tersebut. Hal ini terlihat dengan keluarnya Djohan Hanafiah dari pekerjaannya sebagai pengusaha sukses dan fokus pada penggalian sejarah dan budaya khususnya Palembang.

Profesi seorang sejarahwan tidak harus memiliki gelar sarjana sejarah.<sup>60</sup> Disadari atau tidak, Djohan Hanafiah telah menjadi seorang ahli sejarah tanpa latar belakang pendidikan sarjana sejarah. Ilmu sejarah justru diperoleh dengan membaca buku-buku sejarah baik yang teoritis seperti metode sejarah dan buku ilmu-ilmu sejarah lainnya, seperti filsafat sejarah, sejarah masyarakat, sejarah ekonomi, sejarah perusahaan, sejarah intelektual, sejarah kebudayaan dan sejarah etnis. Djohan Hanafiah juga mempelajari buku-buku tentang peristiwa sejarah dan tokoh sejarah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Belanda.<sup>61</sup> Pemahaman Djohan Hanafiah mengenai Historiografi, ada semacam tradisi penulisan historiografi, yaitu 1) Historiografi Asia Selatan dan Asia Tenggara, 2) Historiografi Islam, 3) Historiografi Cina, 4) Historiografi Jepang, 5) Historiografi Afrika, dan 6) Historiografi Indonesia.

---

<sup>59</sup> Tentang Kuto Gawang, Djohan Hanafiah juga menulis 9 seri artikel dengan judul Keraton Kuto Gawang di <http://www.beritamusi.com/kategori/budaya>. Seri 1 – 3 ditulis pada tanggal 28 September 2009, seri 4 – 7 ditulis pada tanggal 29 September 2009, dan seri 8 dan 9 ditulis pada tanggal 30 September 2009. Sedangkan dalam bentuk buku yang dimiliki penulis adalah Djohan Hanafiah. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

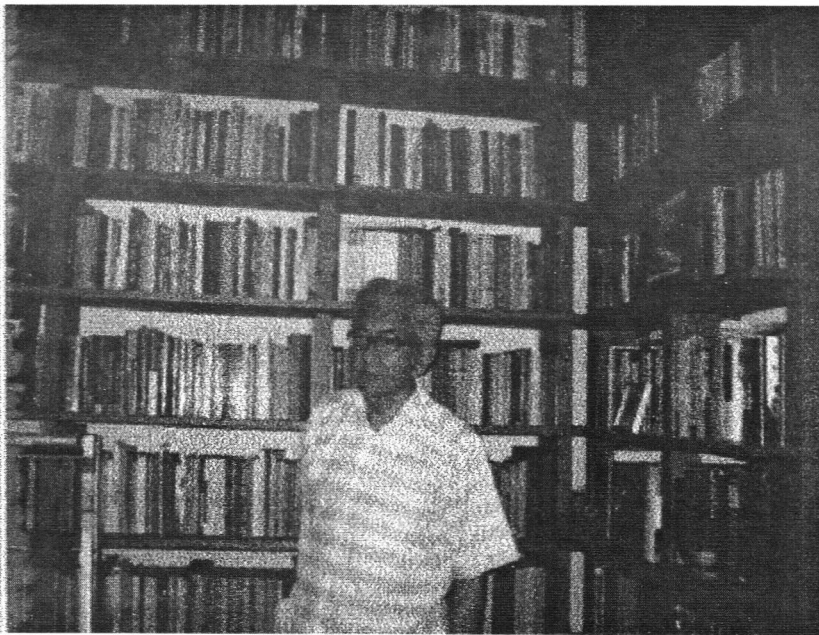
<sup>60</sup> Mengutip pernyataan Prof. Dr. Mestika Zed ketika diwawancarai 15 Desember 2009 di Padang.

<sup>61</sup> Untuk mendukung pemahamannya, Djohan Hanafiah juga mempelajari disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, arkeologi, dan geologi.

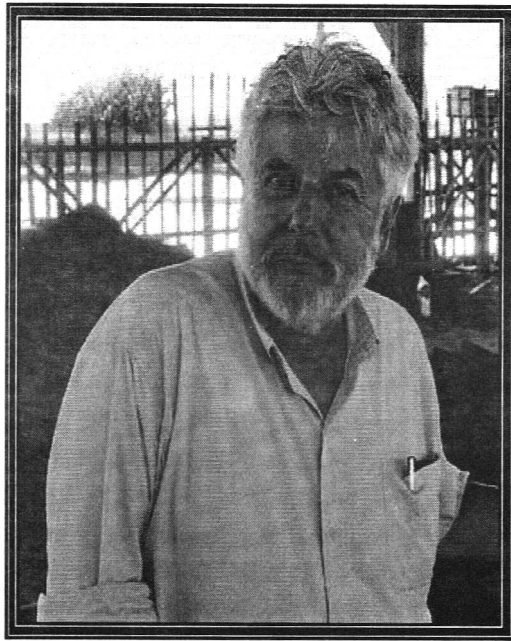


Kemampuan Djohan Hanafiah dalam berbahasa Inggris sangat mendukung sehingga tulisan-tulisan para peneliti dari luar negeri dengan cepat dipahami. Kemungkinan besar para mahasiswa sekarang ini sudah jarang yang memiliki kemampuan dan kemauan seperti ini.

Hampir semua buku tulisan Sartono Kartodidjo, Taufik Abdulah, Soedjatmoko, dan sejumlah sejarawan Indonesia, termasuk juga Louis Gottschalk, dan Bernard Lewis menjadi bahan studi dan koleksi Djohan. Di ruang perpustakaan Djohan pada saat ini tidak kurang 3.000 buku dari pelbagai topik dan disiplin ilmu. Termasuk buku antik yang telah berumur lebih 50 tahun bahkan 100 tahun seperti *A Study of History* 10 jilid tulisan Arnold Toynbee, cetakan tahun 1954, *Jan Pietersz Coen, Bescheiden omtrent zjn bedrijf in Indie*, cetakan tahun 1923, hanya terkoleksi 7 jilid. Ada beberapa buku tua yang diperoleh dari pasar buku loak di Rotterdam seperti *Cultureel Indie, Iste Jaargang*, tahun 1939. Buku ANJ Th Van Der Hoop, *Indonesische Siermotieven-Ragam ragam Perhisan Indonesia* th 1949, diperoleh di pasar loak Bandung. *Bloemlezing uit Maleische Geschriften*, jil 1 dan 2 terbitan Martinus Nijhoff 's Gravenhage, 1906.



Djohan Hanafiah dan perpustakaan pribadinya  
(Sumber: dokumentasi R.L. Arios)



Dr. Pierre-Yves Manguin  
(Sumber: <http://cetak.kompas.com/>)

Selain membaca buku, Djohan juga belajar dengan tokoh-tokoh sejarah nasional maupun internasional. Djohan Hanafiah berupaya membuat jaringan tersendiri dengan cara tersendiri. Pengalaman pertama menghadiri seminar dan lokakarya internasional adalah pada upaya menjadikan Melaka menjadi *historical city*, yang berlangsung di Melaka tahun 1986. Djohan Hanafiah direkomendasikan oleh Dr. Barbara Watson Andaya dan suaminya Dr. Leonard Andaya. Sebagai peserta Djohan harus membayar sendiri semua urusan transportasi dan akomodasi serta biaya seminar. Djohan banyak memperoleh teman para sejarawan dari Malaysia, Singapura, Belanda, Portugis, Amerika, Jepang, dan Cina.

Teman-teman yang paling banyak mendukung Djohan Hanafiah dalam penulisan sejarah ini dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.<sup>62</sup> Dr. Hasan Muarif Ambari<sup>63</sup> dan seluruh peneliti di Puslit Arkenas sangat bersimpati dengan Djohan. Hasan Muarif Ambari memberikan hampir seluruh penerbitan hasil penelitian baik berupa jurnal maupun laporan dari Puslit Arkenas sejak awal dari seluruh Indonesia.

---

<sup>62</sup> Sekarang bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

<sup>63</sup> Kepala Puslit Arkenas ketika itu

Demikian pula Dr. Pierre-Yves Manguin, arkeolog bawah laut dari Perancis, yang bergabung di EFEO<sup>64</sup> banyak memberikan Djohan Hanafiah bahan-bahan perpustakaan. Dia mengenali Djohan sebagai *a former member of the Provincial Parliament and a descendant of Sultan Badarudin I*.<sup>65</sup> Hubungan antara Djohan Hanafiah dengan Dr. Pierre-Yves Manguin terutama saat keterlibatan Djohan Hanafiah pada kegiatan ekskavasi situs Karang Anyar.

Djohan Hanafiah terlibat dalam ekskavasi yang dipimpin oleh Dr. Pierre-Yves Manguin dari EFEO bersama beberapa arkeolog Indonesia seperti Drs. Nurhadi Rangkuti, M.Si dari Puslit Arkeologi Nasional pada tahun 1985 hingga 1992 untuk pembuktian tentang lokasi Sriwijaya. Djohan Hanafiah dilibatkan karena menaruh perhatian yang sangat besar tentang sejarah Palembang disamping juga memiliki data tekstual dan data grafis (peta, foto dan sketsa) tentang Palembang.<sup>66</sup> Hasil ekskavasi tersebut menyimpulkan bahwa ibu kota Sriwijaya terletak di Palembang. Hasil ekskavasi di situs Karang Anyar, direkonstruksi menjadi satu taman lengkap dengan museum di dalamnya. Taman ini diberi nama Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) dan diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1994.<sup>67</sup> Untuk pertama kali pengelolaan TPKS ini dipercayakan kepada sebuah dewan pengelola yang diketuai oleh Djohan Hanafiah.

Buku hasil penelitian ilmiah tentang Palembang sebagai pusat Sriwijaya ditulis bersama oleh Djohan Hanafiah, Drs. Bambang Budi Utomo, dan DR. Hasan Muarif Ambari dengan judul *Perkembangan Kota Palembang Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tahun 2005. Mengenai Sriwijaya ada juga beberapa artikel yang ditulis Djohan Hanafiah sendiri atau bersama Bambang Budi Utomo.

---

<sup>64</sup> EFEO adalah singkatan dari *École française d'Extrême-Orient*, yaitu *an institution under the aegis of the French Ministry of Higher Education and Research whose scholarly mission is the study of the classical civilizations of Asia through the humanities and social sciences. The field of its research extends from India to China and Japan and includes all of Southeast Asia*. (sumber: <http://www.efeo.fr/en/presentation/vocation.shtml>, diunduh 30 Desember 2009)

<sup>65</sup> Pierre-Yves Manguin. "Welcome To Bumi Sriwijaya or the Building of a Provincial Identity in Contemporary Indonesia". ARI Working Paper No. 102 February 2008. Asia Research Institute Singapore. Diunduh dari <http://www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?pubid=823&type=2>.

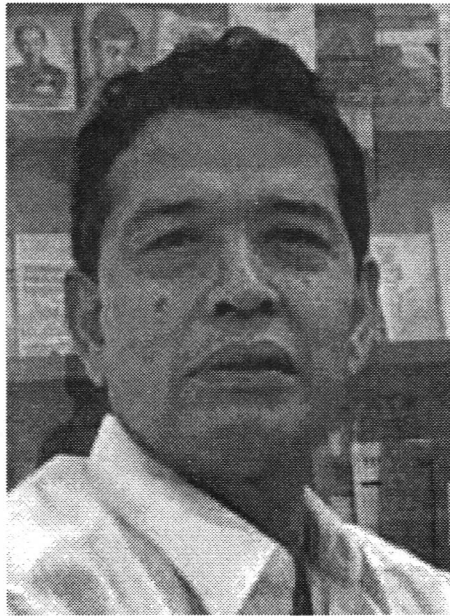
<sup>66</sup> Diskusi via facebook ([www.facebook.com/nurhadirangkuti](http://www.facebook.com/nurhadirangkuti)) dengan Drs. Nurhadi Rangkuti, M.Si. Kepala Balai Arkeologi Palembang.

<sup>67</sup> Tentang TPKS dapat dibaca Nurhadi Rangkuti, "Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Sebagai Pusat Informasi Sriwijaya". Dalam *RELIK NO. 06/SEPTEMBER 2008*. Baca juga Pierre-Yves Manguin. 2008.

Beberapa kali Djohan tampil di TVRI, TV2, TV3 Malaysia, Metro, RCTI, dan TVOne, memaparkan tentang Sriwijaya, bahkan pernah juga bersama dengan John N. Miksic<sup>68</sup>, guru besar Sejarah dari Amerika Serikat.

Berbasis ekonomi kantong sendiri yang mendukung Djohan untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah, baik berupa buku maupun dokumen lainnya. Djohanpun melakukan sejumlah perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia, maupun ke luar negeri seperti Belanda, Malaysia dan Singapura guna mendapatkan dokumen sejarah budaya Palembang.

Disamping itu bantuan dari pihak Pemerintah Kota Palembang dan Propinsi Sumatra Selatan turut memperlancar usaha-usaha Djohan mengadakan penelitian, baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Prof. Dr. Mestika Zed

Prof. Dr. Mestika Zed, Guru Besar Sejarah di Universitas Negeri Padang juga menceritakan pengalaman pertama sekali bertemu dengan Djohan Hanafiah. Pada tahun 1982, ketika itu Mestika Zed sedang kuliah mengambil gelar master dan doktor bidang sejarah<sup>6</sup> di *de*

---

<sup>68</sup> Salah satu tulisannya yang terkenal adalah *Historical Dictionary of Ancient Southeast Asia* terbit Februari 2007

<sup>69</sup> Atas rekomendasi Prof. Dr. Harsja W Bachtiar sebagai ketua *Stuurgroep* Komite Kerja sama Indonesia - Belanda, Mestika Zed dapat melanjutkan kuliah program *post-graduate* (MA) tahun 1981 - 1983 dan program Doktor pada tahun 1986 - 1991.

*inuiop[faculteit Social-culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam Belanda. Ketika asyik mencari-cari buku dan arsip di perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde (KITLV) Leiden Belanda, Mestika Zed melihat ada orang yang sepertinya orang Indonesia juga sedang mencari arsip. Setelah berkenalan dan berdiskusi akhirnya Mestika Zed mengetahui bahwa Djohan Hanafiah datang ke Belanda mencari arsip tentang Palembang dengan biaya sendiri. Hubungan mereka berlanjut ketika Mestika Zed melakukan penelitian di Palembang untuk penulisan disertasinya. Selama kurang lebih empat bulan tinggal di Palembang, Mestika Zed banyak mendapat informasi dari Djohan Hanafiah terutama dalam memahami visi lokal sejarah Palembang yang tidak ditemukan di buku-buku yang pernah dibaca Mestika Zed. Disamping itu Djohan Hanafiah juga mempertemukan Mestika Zed dengan beberapa narasumber yang ada di Palembang. Menurut Mestika Zed, Djohan Hanafiah merupakan sosok individu yang luar biasa. Latar belakang pendidikan, Djohan Hanafiah bukanlah sarjana sejarah tetapi seorang ekonom namun pengetahuan dan koleksi arsip dan buku-bukunya sangat luar biasa yang bahkan seorang doktor atau profesor sendiri belum tentu memiliki arsip-arsip seperti itu. Ditambah lagi semua itu diperoleh Djohan Hanafiah atas kemauan sendiri untuk belajar tentang sejarah dan budayanya. Tidak sedikit orang yang memiliki uang, namun yang memanfaatkan uang tersebut untuk membeli buku, arsip, dan berjalan-jalan mencari pengetahuan atas kemauan dan pendanaan sendiri sangat jarang ditemukan. Kekayaan arsip/dokumen dan pengetahuan bahasa asing yang baik menjadikan Djohan Hanafiah sebagai seorang sejarawan otodidak yang luar biasa.<sup>70</sup>*

Setelah mengundurkan diri sebagai pengusaha, Djohan mulai menerbitkan banyak buku, artikel, esai, mengenai sejarah dan budaya Palembang. Bersamaan dengan itu, pelacakan sejarah atau bukti-bukti baru mengenai sejarah Palembang dan Sumatra Selatan terus diburu. Buah dari totalitasnya ini Djohan Hanafiah mendapat penghargaan *Satya Lencana Kebudayaan* sebagai penulis dari Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 30 juli 2004.

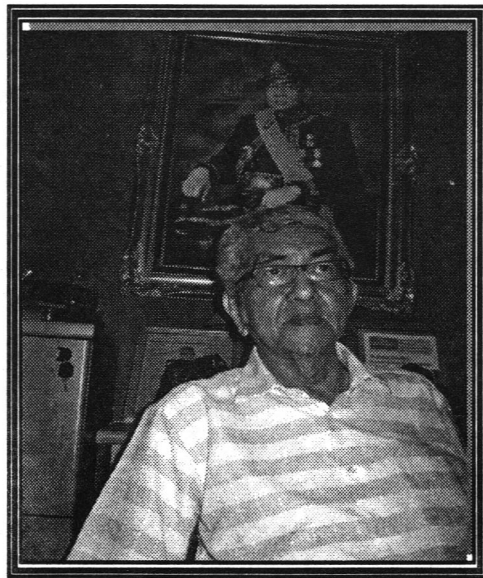
Penghargaan juga datang dari Malaysia. Penghargaan diberikan pada acara Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang ke-6 atau *6<sup>th</sup> Malay and Islamic World Convention*. Kegiatan ini di laksanakan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka (MITC) di Melaka tanggal 12 September 2005, yang diberikan oleh Datuk Seri Najib Tun

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Mestika Zed, 15 Desember 2009 di Padang. Beberapa informasi juga diperoleh dari buku beliau, Mestika Zed. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900 – 1950*. Jakarta: LP3ES.

Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, sebagai *Tokoh Pemimpin Adat Melayu Serumpun 2005*. Pada kesempatan itu diberikan juga penghargaan serupa kepada Prof. Datuk Dr. Abdul Latiff Abu Bakar serta Tengku Nasaruddin S. Effendy dari Malaysia, dan Tuanku Luckman Sinar dari Indonesia.<sup>71</sup>

Djohan Hanafiah menerima di tingkat lokal, penghargaan dari Walikota Palembang berupa *Ampera Emas* pada tahun 2007 yaitu penghargaan seni dan budaya. Juga memperoleh *Etnikom Award 2002*. Dari kota Prabumulih mendapatkan Penghargaan *Seni dan Pendidikan 2008*. Pelbagai macam penghargaan lainnya juga telah diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta.



Djohan Hanafiah dengan latar foto sebagai Ketua Dewan Pembina Adat  
(sumber: koleksi RL Arios)

Dapat dikatakan pelacakan kembali sejarah Palembang yang mulai marak tahun 1980-an akhir, semua bermula dari pembacaan atas buku atau artikel sejarah dan budaya yang ditulis Djohan Hanafiah.

Disamping mendapat piagam penghargaan sebagai budayawan, Djohan Hanafiah juga diakui sebagai seorang pejuang kemerdekaan dengan mendapatkan piagam penghargaan dan medali perjuangan angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Republik Indonesia yang diberikan pada 17 Agustus 2004.

---

<sup>71</sup> Dunia Melayu Perlu Elak Perpecahan, 12 September 2005. Situs Resmi Bahagian Pengurusan dan Analisis Maklumat, Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia. <http://bpam.kpk.gov.my/>

### 3. Pengakuan Sebagai Budayawan

Atas perjuangannya itu, meskipun tidak berlatar belakang pendidikan sejarah dan budaya, buat sebagian besar wong Palembang Djohan Hanafiah dianggap sebagai “penggali sejarah dan budaya Palembang”. Julukan ini menjadi populer dan sering dipakai pada beberapa tulisan seperti yang ditulis Florencia Marcelina Ramadhona “Djohan Hanafiah: Bapak Penggali Sejarah dan Budaya Palembang”.<sup>72</sup>

Berbagai seminar dan diskusi, baik lokal, nasional, maupun internasional dihadiri Djohan Hanafiah. Pemikiran atau informasi sejarah yang diungkapkannya membuat sejumlah intelektual, tokoh masyarakat, maupun pekerja seni di Palembang, terinspirasi menggali dan memperkenalkan kebudayaan Palembang. Terbatasnya sumber sejarah dan budaya di Palembang, baik berupa dokumen, arsip, naskah ataupun bibliografi lainnya, maka Djohan Hanafiah menjadi tempat sumber informasi yang selalu didatangi para mahasiswa dari pelbagai kota di Indonesia untuk membuat skripsi mengenai sejarah Palembang, termasuk lahirmya sejumlah kandidat doktor yang mengupas sejarah dan budaya Palembang. Sejumlah karya seni pun lahir, yang beranjak dari kebudayaan Palembang, baik sastra, teater, musik, maupun seni lainnya. Bahkan beberapa peneliti di BPSNT Padang telah menjadikan Djohan Hanafiah sebagai referensi tentang sejarah dan budaya di Sumatra Selatan dan menganggap bahwa sebuah penelitian di Palembang khususnya belum dianggap lengkap datanya bila belum bertemu dengan Djohan Hanafiah.

Pandangan Djohan Hanafiah mengenai sejarah cukup menarik. “Sejarah harus ditulis apa adanya, yaitu seperti yang terdapat dalam data-datanya. Akan tetapi orang kadangkala menuliskan sejarah bukan seperti adanya akan tetapi seperti apa yang dikehendaknya. Sejarah juga ada yang disebut sejarah masyarakat yang lebih bersifat kebudayaan, biasanya mengenai fakta sosial yang dipercayai sebagai kejadian masa lalu.

### 4. Karya Tulis

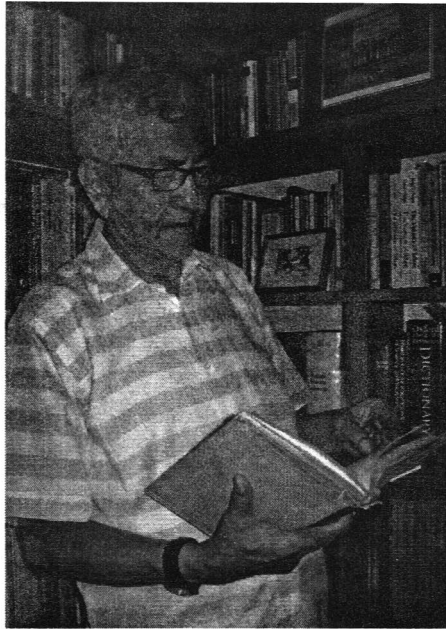
Masa produktif Djohan Hanafiah cukup tinggi. Pada tahun 1988 dia menulis “*Masjid Agung Palembang, Sejarah dan Masa Depan*nya” yang diterbitkan Masagung Jakarta. Kemudian pada tahun 1989 ada tiga buku Djohan Hanafiah yang diterbitkan, yakni “*82 Tahun Pemerintah Kota Palembang*” dan “*Palembang Zaman Bari, Citra Palembang*”

---

<sup>72</sup> Florencia Marcelina Ramadhona. “Djohan Hanafiah: Bapak Penggali Sejarah dan Budaya Palembang”. <http://www.beritamusi.com/>, 03.10.2009 16:05:51 WIB

*Tempo Doeloe*”, yang diterbitkan Humas Pemda Kotamadya Palembang. Lalu buku *“Kuto Besak, Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan”* yang diterbitkan Masagung – Jakarta.

Setelah itu Djohan Hanafiah melakukan pelacakan sejarah yang baru. Dia memburu sejumlah data, baik di Palembang, Belanda, maupun daerah lain di Nusantara. Dia pun melakukan sejumlah diskusi dengan arkeolog, penliti sejarah, dan para pekerja budaya lainnya.



Djohan Hanafiah dan koleksi buku-bukunya  
(sumber: koleksi RL Arios)

Pada tahun 1996, Pemda Sumatra Selatan menerbitkan buku Djohan Hanafiah mengenai *“Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sumatera Selatan”*. Selanjutnya *“Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tk II Palembang”* (Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Palembang – 1998.), *“Perang Palembang Melawan VOC”* (Millenium Publisher Jakarta(cet. Ke 2) – 2002.), *“Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kota Palembang”* (Pemda Kota Palembang – 2001.),

*“Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang Modern”* Karya bersama Bambang Budi Utomo & Prof.Dr.Hasan Muarif Ambari (Pemda Kota Palembang – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan – 2005.), *“Sejarah Keraton-keraton Palembang – Kuto Gawang”* (Pemerintah Kota Palembang – Dinas Pariwisata & Kebudayaan - 2005.), *“Dicari Walikota yang Memenuhi Syarat”* (Kerukunan Keluarga Palembang – 2005.),



Selain itu Djohan Hanafiah juga menjadi editor sejumlah buku, seperti *“Pasemah Sindang Merdika 1821-1866* (Pustaka Asri, Jakarta - 1999), *“Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad ke 19, Catatan Perang Pasemah 1866”* (Millenium Publisher, Jakara – 2000).

*Kesan-Kesan Dalam Kehidupan dan Berkarya H.M.ALI AMIN, Pengalaman Pegawai Tiga Zaman”* (Pemda Propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Pemda Kota Palembang 1999).

Djohan Hanafiah juga menjadi kontributor sejumlah buku, misalnya artikel berjudul *“Sriwijaya di antara Mitos, Legenda dan Sejarah”* yang dimuat dalam buku *“Sriwijaya dalam Perspektif Arkeologi dan Sejarah”* (Pemerintah Daerah Propinsi Tk.I Sumatera Selatan – 1993.), lalu artikel *“Palembang Masa Pasca Sriwijaya”* yang ditulis bersama Bambang Budi Utomo di dalam buku tersebut.

Artikel *“Palembang: Aspek Sejarah dan Budaya”* di dalam buku *“Musi Riverside Tourisme Development”* (Penerbit ITB – Bandung, 1999.). Artikel *“Pembangunan Sumbagsel: Pandangan Masa Depan dengan Refleksi Saat Ini dan Masa Lampau”* di dalam buku *“Untukmu Negeriku: Sumbagsel Membangun dan Pengabdian Kodam II/Sriwijaya”* (Penerbit Universitas Sriwijaya – Palembang 1998.). Artikel *“Pulau Berhala, Orang Kaya Hitam dan Si Gunjai: Suatu Mitos Ideologi dan Politik Jambi”* dalam buku *“Seminar Melayu Kuno Jambi, 7-8 Desember 1992”* (Penerbit Pemda Tk.I Propinsi Jambi – 1992.). Artikel *“Perjuangan, Penuhi dan Isilah”* dalam buku *“20 Tahun HIPMI”* (HIPMI Jakarta 1992.).

Selanjutnya artikel *“Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya”* dalam buku *“Kongres Kebudayaan 1991, Laporan Penyelenggaraan, Jakarta 29 Oktober – 3 November 1991”* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1992/1993.).

Artikel *“Kebangkitan Rumpun Melayu, Melalui Upaya Kerjaama Budaya dan Pariwisata”* pada buku *“Prosiding Lokakarya Dunia Melayu Dunia Islam, Kesatuan dan Perpaduan, Palembang 20-23 Mei 2001.”* (Penerbit Unsri Palembang.).

Artikel *“Potensi Budaya di Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”* di dalam buku *“Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan”* (Penerbit Universitas Sriwijaya 2001.). Kemudian artikel *“Chengho, Pelayarannya ke Nusantara”* (PITI dan Dewan Kesenian 2005), dan artikel *“Kesenian di Sumatera Selatan”* di dalam buku *“Direktori Kesenian Sumatera Selatan”* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop.Sumatera Selatan, 2006).

Sementara buku yang diterbitkan pihak luar atau asing, buku "*Guguk, Lembaga Sosial Ekonomi di Kota Palembang Abad 18 dan 19*" dalam "Jambatan", Tijdschrijft voor de Geschiedenis van Indonesie, jaargang 7, nummer 2. Amsterdam, 1989. "*Tari Zapin Nusantara: Sejarah Perkembangannya di Palembang*" dalam buku *Zapin Melayu di Nusantara* (ed.DR.Moh.Anis MD Nor)" (Penerbit Yayasan Warisan Johor, Johor Malaysia – 2000.). "*Adat Perkawinan Palembang*" dalam Buku "*Adat Melayu Serumpun, Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" (ed. Prof.Dr.Abdul latif Abubakar). (Penerbit Kerajaan Negeri Melaka, Perbadanan Muzium Melaka, 2001.). "*Kesultanan Palembang Darsussalam dalam buku Kesultanan Melayu Nusantara*" (Penerbit: Museum Negeri Pahang, Kuantan 2005). "*Kesultanan Melayu*" (ed. Rogayah A. Hamid & Mariyam Salim), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2006.

Sejak tahun 1988 hingga saat ini, sekitar 300 artikel sejarah dan budaya karya Djohan Hanafiah yang dipublikasikan di media massa dan jurnal.

## 5. Pemikiran dan Keterlibatan Aktivitas Ilmiah

Disamping menulis, Djohan Hanafiah juga memberikan berbagai pendapat sebagai sebuah pemikiran tentang kebudayaan dan sejarah Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Pemikiran ataupun pendapat tersebut dikutip oleh media massa tulis maupun elektronik yang merupakan hasil wawancara khusus maupun pernyataan dalam forum diskusi ilmiah.

Pada sebuah seminar tentang naskah kuno,<sup>73</sup> Djohan Hanafiah menggambarkan cerita-cerita yang ditemukan dalam penelitian Yayasan Naskah Nusantara bekerja sama dengan Tokyo University of Foreign Studies, Agustus lalu, itu menunjukkan keterkaitan Palembang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Sejarah Kesultanan Palembang bermula dari kemelut politik yang terjadi di Kesultanan Demak sesudah kematian Trenggana, Raja Demak setelah Raden Patah, serta pemindahan pusat kesultanan di Pajang oleh Prabu Adiwijaya. Budayawan Sumatera Selatan Djohan Hanafiah menegaskan, para bangsawan Jawa yang berkeraton di Palembang pada akhirnya beradaptasi dengan budaya Melayu yang sudah tumbuh di daerah ini. Palembang juga merupakan kawasan kosmopolitan, dengan percampuran budaya berbagai bangsa yang datang seiring arus perdagangan. Artinya, sejarah ibu kota Provinsi

---

<sup>73</sup> Sebagaimana yang ditulis pada <http://id.shvoong.com/social-sciences/1691449-melihat-palembang-dari-naskah-kuno/>

Sunatera Selatan ini lebih panjang dari perjalanan sejarah Kota Baghdad di Irak yang didirikan tahun 762, lebih tua dari Kyoto di Jepang yang didirikan tahun 794, apalagi dibandingkan dengan Jakarta yang berdiri tahun 1527.

Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang jauh lebih muda dari masa Sriwijaya, meninggalkan jejak tak terputus dengan keberadaan Palembang masa kini. Namun, apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya yang paling kasat mata dari masa kesultanan ini terkesan memprihatinkan.

Naskah yang berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam misalnya, antara lain ditemukan disimpan saja dalam rak di kamar mandi. Substansi yang dipaparkan menyuguhkan wacana yang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, penemuan naskah berperan penting dalam kegiatan apresiasi kebudayaan dan kesejarahan.

Djohan Hanafiah tidak saja berkutat dalam memberi pencerahan dibidang sejarah maupun budaya Palembang pada seminar-seminar lokal, nasional, maupun internasional, tetapi pada hal-hal yang kecil beliau juga sangat perhatian selagi itu masih menyangkut Palembang beliau semampu mungkin akan memberikan penjelasan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di Kota Palembang oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta beliau tetap diikutsertakan terutama untuk memberikan penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan, memberi informasi atau sebagai pemakalah, maupun sebagai juri. Djohan Hanafiah fasih memberikan penjelasan di bidang seni, seperti yang ditulisnya di Kompas dalam mengomentari omament seni ukir di Palembang.<sup>74</sup> Djohan berpendapat bahwa kekhasan seni ukir Palembang itu pada omamen-omamen kembangnya dan daun-daunannya. Sejak dulu sampai sekarang, ukiran dengan motif itu yang menjadi kekhasan seni ukir Palembang dibandingkan dengan seni ukir Jepara yang kebanyakan motifnya hewan-hewan, seperti burung. Sebelumnya perajin ukiran khas Palembang tidak terkonsentrasi pada satu lokasi. Mereka terpecah-pecah di sejumlah tempat dan baru tahun 1960 perajin ukiran yang sudah turun-temurun dari kakek-nenek hingga anak dan cucunya itu terkonsentrasi di satu tempat, di Kampung 19 Hilir atau sekitar kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Dalam catatan sejarah Kota Palembang, dahulu mereka tinggal di Kampung Sayangan, Kampung Kuningan, dan Kampung Plampitan yang menghasilkan produk-produk seni kerajinan. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi.

---

<sup>74</sup> Abdul Lathief. "Seni Ukir Bumi Sriwijaya Terus Bertahan" <http://cetak.kompas.com/>. Kamis, 17 Desember 2009 | 02:51 WIB

Djohan Hanafiah juga menjelaskan tentang sejarah pemukiman di atas Sungai Musi atau yang lebih dikenal dengan rumah rakit. Dalam sebuah wawancara dengan media massa nasional, Djohan Hanafiah mengomentari tentang kondisi rumah rakit di Sungai Musi saat ini. Pemukiman di atas air memang tidak sehat, tetapi harus diakui juga bahwa urusan memindahkan rumah rakit tidaklah mudah. Bangunan balok-balok kayu yang dijalin dengan bambu itu sudah merupakan bagian dari denyut nadi Kota Palembang. Bahkan sejarah rumah rakit mungkin sama tuanya dengan Kerajaan Sriwijaya, yaitu sejak abad ke-7. Menurut Djohan Hanafiah, rumah rakit itu tidak sekadar rumah tinggal, tapi juga mencerminkan struktur masyarakat feodal waktu itu. "Negeri ini penuh air, hanya pemimpin yang tinggal di bagian darat, sedangkan rakyat tinggal di atas air," kata Djohan, mengutip catatan sejarah Dinasti Ming Buku 324.<sup>75</sup>

## **I. AKHIR DARI PENCARIAN**

Berbagai aktivitas Djohan Hanafiah harus terhenti ketika penyakit menggerogoti tubuhnya. Berawal dari perawatan di RSMH Palembang hingga akhirnya harus menjalani operasi jantung di RSCM Jakarta. Pada tanggal 15 April 2010, akhirnya beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Palembang.

Koleksi Djohan Hanafiah berupa buku, dokumen penting, maupun arsip-arsip yang didapat dari berbagai daerah baik pemberian dari penulisnya, hadiah, ataupun yang dibeli menjadi satu kekayaan yang tidak ternilai harganya dalam dunia ilmu pengetahuan. Koleksi ini masih tersimpan dengan rapi di lemari buku rumahnya di Talang Semut. Sebagian ada yang tidak dipajang karena persoalan tempat yang tidak memadai hingga akhirnya harus disimpan.

Pertanyaan muncul, mau diapakan "harta karun" tersebut? Ketika masa hidupnya Djohan Hanafiah pernah menuturkannya bahwa bahwa ia masih mencari orang yang serius dan paham mengenai sejarah untuk mengelola koleksinya. Sampai saat terakhir belum menemukan pelanjut pemeliharaan koleksinya tersebut.

---

<sup>75</sup> "Kisah Rumah Rakit dari Sungai Musi",  
<http://majalah.tempointeraktif.com/>, 09/XXVIII 04 Mei 1999

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adams, Cindy. 2007. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno
- Chaniago, Hasril dan Khairul Jasmi. 1998. *Brigadir Jenderal Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa: Gubernur di Tengah Pergolakan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Effendi, Mochtar. 2000. *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan: Catatan Tiga Zaman Dari Balik Terali Penjara Rezim Tirani Soeharto Sketsa Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatera Selatan*. Jakarta: Al-Mukhtar
- Hanafiah, Djohan (ed). 1998. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
- Hanafiah, Djohan. 2005. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
- Hanafiah, Djohan (ed). 1998. *Kesan-Kesan Dalam Kehidupan dan Dalam Berkarya dari H. M. Ali Amin,SH: Pengalaman Seorang Pegawai Tiga Zaman*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Hasibuan, Imran dan Muhammad Yamin (ed). 2008. *Jembatan Kebangsaan: Biografi Politik Taufiq Kiemas*. Jakarta: Rumah Kebangsaan dan Q Communication
- Ibrahim, Muchtaruddin. 1999. *Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan IV*. Jakarta: Depdikbud
- KH, Ramadhan. 2008. *Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita*. Depok: Komunitas Bambu
- Kiemas, Taufiq. 2002. *Tanpa Rakyat Pemimpin Tak berarti Apa-apa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Leirissa, RZ. 1984. "Segi-Segi Praktis Penulisan Biografi Tokoh", dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya Jilid III*
- Leirissa, RZ. dkk. 1994. *Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan*. Jakarta: Depdikbud
- Onghokman. 1987. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia

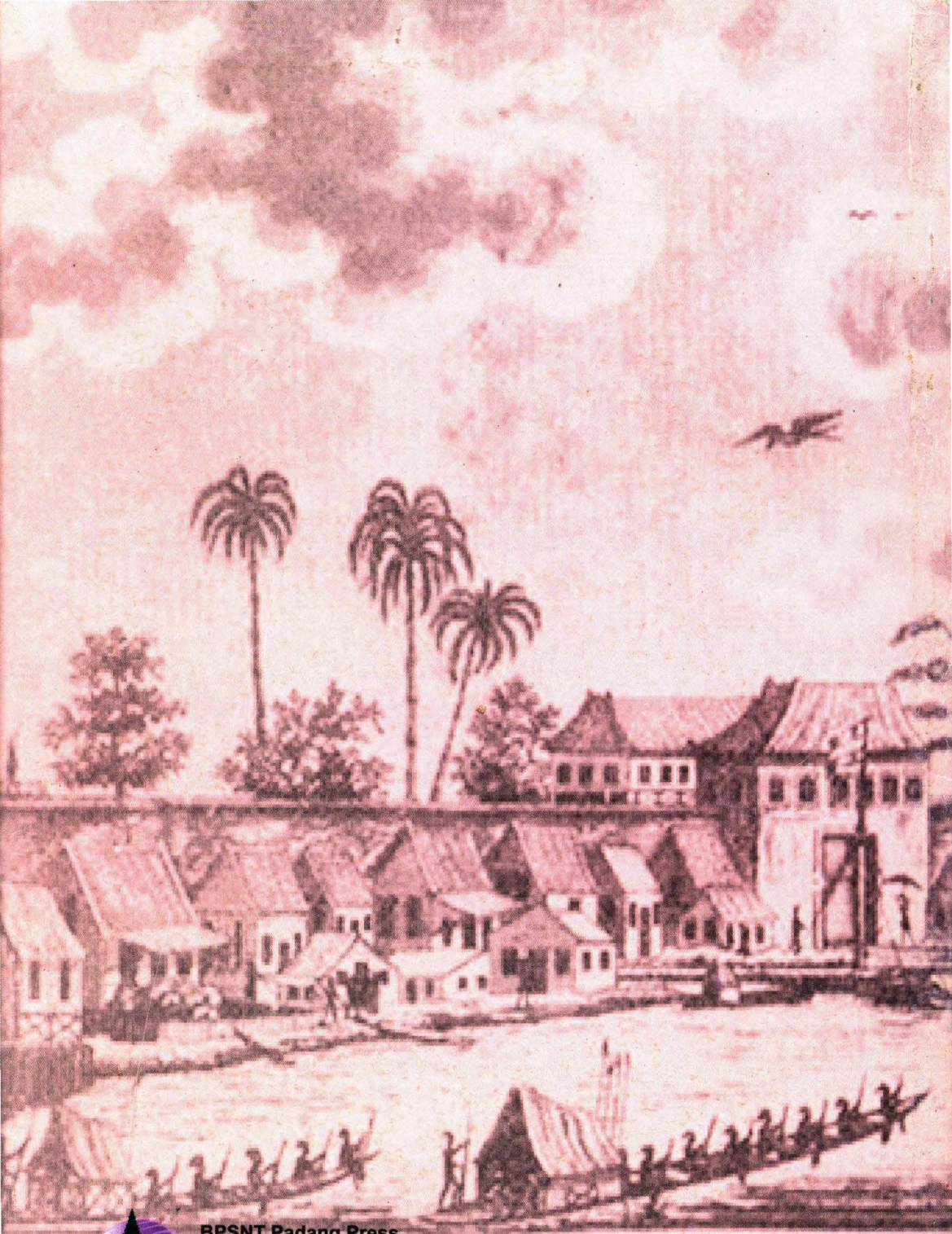
- Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, 1993. *Kenang-Kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu*. Palembang:Sriwijaya Media Utama
- Said, Julinar. dkk. 1998. *Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan III*. Jakarta: Depdikbud
- Siddik, Abdullah. 1999. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soetadji, Nanang S., dan Djohan Hanafiah. 2002. *Perang Palembang Melawan VOC*. Jakarta: Millennium Publisher
- Syafii, Suwadi 1984. “Menulis Biografi Tokoh”, dalam Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya Jilid III. Jakarta: Depdikbud
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediat Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I (1945)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediat Kamil. 2001. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid III (1947)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Utomo, Bambang Budi., Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambari. 2005. *Perkembangan Kota Palembang Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
- Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900 – 1950*. Jakarta: LP3ES

#### Artikel dan Situs Internet

- “Kisah Rumah Rakit dari Sungai Musi”,  
<http://majalah.tempointeraktif.com/>, 09/XXVIII 04 Mei 1999
- “Kota Mentok Didirikan Sultan Mahmud Badaruddin I”, Sriwijaya Post  
- Minggu, 27 September 2009 13:50 WIB  
<http://www.sripoku.com/lifestyle/rehat>
- Abdul Lathief. “Seni Ukir Bumi Sriwijaya Terus Bertahan”  
<http://cetak.kompas.com/>. Kamis, 17 Desember 2009
- Florenia Marcelina Ramadhona. “Djohan Hanafiah: Bapak Penggali Sejarah dan Budaya Palembang”. <http://www.beritamusi.com/>,  
03.10.2009 16:05:51 WIB

- Herawansyah, “Sejarah Propinsi Bengkulu dari Kemerdekaan Indonesia Hingga Terbentuk menjadi Propinsi Bengkulu”(http://blog.uad.ac.id/anto\_eko/2009/07/)
- http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/07/03195465/manguin.arkeolog.maritim.asia
- http://cid-7967580ba5680258.skydrive.live.com/self.aspx/.res/7967580BA5680258!202/7967580BA5680258!288#resId/7967580BA5680258!216, diunduh 25 Desember 2009
- http://forum.detik.com/showthread.php?t=38570&page=1711
- http://hadi-historyeducation.blogspot.com/2009/04/perjuangan-mewujudkan-kembali-negara.html
- http://id.shvoong.com/social-sciences/1691449-melihat-palembang-dari-naskah-kuno/
- http://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/, diunduh tanggal 25 Desember 2009
- http://kotapalembang.blogspot.com/2008/09/museum-pahlawan-nasional-dr-ak-gani.html
- http://www.efeo.fr/en/presentation/vocation.shtml, diunduh 30 Desember 2009)
- http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/01/17/0027.html
- http://www.unsri.ac.id/?act=sejarah \_ Universitas Sriwijaya - Indralaya, Sumatera Selatan.htm?act=sejarah&us= &x\_param=
- NasrulAzwar “Melihat Palembang dari Naskah Kuno” diunduh dari http://id.shvoong.com/social-sciences/1691449-melihat-palembang-dari-naskah-kuno/
- Nurhadi Rangkuti, “Tamat Purbakala Kerajaan Sriwijaya Sebagai Pusat Informasi Sriwijaya”. Dalam *RELIK NO. 06/SEPTEMBER 2008*
- Pierre-Yves Manguin. “Welcome To Bumi Sriwijaya or the Building of a Provincial Identity in Contemporary Indonesia”. ARI Working Paper No. 102 Asia Research Institute Singapore. Diunduh dari http://www.ari.nus.edu.sg/showfile.asp?pubid=823&type=2.
- Sri Purwati. “Upaya Menghadapi Serangan Belanda Pada Pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang“. Diunduh tanggal 25 Desember 2009 dari: http://dodinp.multiply.com/ journal/item/177/www.wikipedia.org
- Yayasan Naskah Nusantara. “Report on the Compilation of a Catalogue of Manuscripts in Palembang”. www.masyarakatpedulimusi.com
- http://id.wikipedia.org/wiki/Cheng\_Ho





**BPSNT Padang Press**  
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji  
Padang Sumatera Barat  
Telp./faks. 0751-496151  
[www.bpsnt.padang.info](http://www.bpsnt.padang.info)

**ISBN**  
**978-602-8742-55-9**